

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berbagai perubahan dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperbaiki sistem manajemen yang merupakan agenda penting reformasi pemerintahan. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam sistem manajemen tersebut adalah peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 yang merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan perwujudan akuntabilitas dari Pelaksanaan Rencana Strategis Daerah yang tercantum dalam Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan *good governance*, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam dokumen RPJMD 2011 – 2016. Dengan visi: **“Terwujudnya Lembata Yang Mandiri dan Produktif Berbasis Potensi Dalam Perspektif Tata Ruang”**, dan enam (6) misi yang diemban yaitu:

- 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;**
- 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;**
- 3. Recovery Ekonomi Wilayah;**
- 4. Peningkatan Pendapatan Daerah;**
- 5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dan**
- 6. Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan.**

Dalam konteks pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Lembata, telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun (2012 – 2016), yaitu

mendorong terwujudnya Lembata yang Mandiri dan Produktif Berbasis Potensi Dalam Perspektif Tata Ruang, dengan 18 tujuan dan 41 sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Misi Pertama : Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Tujuan Pertama : Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

- Sasaran :
- 1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.
 - 2. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.
 - 3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan Kedua : Meningkatkan Kepemimpinan Pejabat Karier yang berkualitas.

- Sasaran :
- Meningkatnya kompetensi PNS yang memenuhi standar minimal Diklat Jabatan Eselon IV, III, II dan kompetensi jabatan fungsional.

Tujuan Ketiga : Menata organisasi satuan kerja perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

- Sasaran :
- Tertatanya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan daerah.

Misi Kedua : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuan Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

Sasaran : 1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan berkualitas.

2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan desa dalam pendidikan.

Tujuan Kedua : Meningkatkan Kualitas Kesehatan.

Sasaran : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.

2. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan.

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan desa dalam bidang kesehatan.

Tujuan Ketiga : Menurunkan Angka Kemiskinan.

Sasaran : 1. Menurunnya jumlah rumah tangga miskin.

2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Tujuan Keempat : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja.

Sasaran : 1. Meningkatnya kesempatan kerja.

2. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pekerja.

- Tujuan Kelima : Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas iman umat beragama.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.
- Tujuan Keenam : Meningkatkan kualitas keolahragaan dan kebudayaan
- Sasaran : 1. Meningkatnya sarana, prasarana olah raga, seni dan budaya.
2. Meningkatnya kegiatan seni dan budaya.
3. Terpeliharanya benda/situs/kawasan cagar budaya.
- Tujuan Ketujuh : Meningkatkan sistem perlindungan sosial.
- Sasaran : 1. Meningkatnya pendidikan luar biasa.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perlindungan sosial.
3. Meningkatnya jaminan sosial.
- Misi Ketiga : Recovery Ekonomi Wilayah.**
- Tujuan Pertama : Menumbuhkembangkan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.
- Sasaran : 1. Peningkatan penelitian dan pengembangan komoditas unggulan daerah.
2. Optimalisasi komoditas unggulan daerah.

3. Terbangunnya sentra –
sentra ekonomi rakyat.

Tujuan Kedua : Meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi daerah yang kondusif.
Sasaran : 1. Meningkatnya kegiatan koperasi, UMKM berbasis desa.
2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif.
- Tujuan Ketiga : Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
Sasaran : 1. Optimalisasi pengelolaan obyek-obyek wisata.
2. Terpromosinya Obyek-obyek Wisata Unggulan.
3. Meningkatnya sektor pendukung pariwisata.
- Misi Keempat : Peningkatan Pendapatan Daerah.**

Tujuan Pertama : Mengembangkan sumber pendapatan daerah.
Sasaran : Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah.

Tujuan Kedua : Meningkatkan Investasi Daerah.
Sasaran : Meningkatnya investasi daerah.
- Misi Kelima : Percepatan Pembangunan Infrastruktur.**

Tujuan : Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah.
Sasaran : 1. Meningkatnya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara.
2. Meningkatnya Infrastruktur bidang

- ketenagalistrikan.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman dan rumah layak huni.
 4. Meningkatnya penyediaan air bersih.
 5. Meningkatnya fasilitas komunikasi dan informasi.

Misi Keenam : Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan

- Tujuan Pertama : Meningkatkan penataan wilayah berwawasan lingkungan.
Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
- Tujuan Kedua : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan
Sasaran : Terbentuknya kelompok peduli lingkungan.
- Tujuan Ketiga : Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang
Sasaran : Meningkatnya kualitas tata bangunan.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mendukung 38 (tiga puluh delapan) Sasaran Strategis dan 130 (seratus tiga puluh) Indikator Kinerja sebagaimana tersaji dalam Bab III Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya, Pemerintah Kabupaten Lembata telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, jujur dan bebas dari praktek KKN. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata disusun sebagai upaya untuk mewujudkan Area Perubahan Keenam Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2015-2019, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata, dimana pada area ini masih terdapat beberapa permasalahan, seperti efisiensi penggunaan anggaran untuk membiayai seluruh program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, belum adanya sistem pengukuran kinerja dan pemutakhiran data kinerja yang dapat diakses secara umum, belum adanya penerapan *e-audit* dalam penyelenggaraan keuangan yang profesional dan belum adanya penerapan wilayah bebas KKN pada setiap unit kerja SKPD.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diukur dari hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang termuat dalam dokumen RPJMD terkait.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata ini dapat menjadi salah satu faktor pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif,

efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Lembata sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata demi ***Terwujudnya Lembata yang Mandiri dan Produktif Berbasis Potensi dalam Perspektif Tata Ruang***. Semoga Tuhan dan *Lewot Tanah* Merestui.

Lewoleba, Maret 2018

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR, ST

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
Ikhtisar Eksklusif	i
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Hasil Review Inspektorat Kabupaten Lembata	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
1.4. Personil/Pegawai	8
1.5. Permasalahan Utama	13
1.6. Sistematika Penyusunan	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 16
2.1. Perencanaan Kinerja	16
2.1.1. Visi RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016	16
2.1.2. Misi RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016	16
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	16
2.1.4. Indikator Kinerja	21
2.1.5. Target Kinerja	33
2.2. Perjanjian Kinerja	41
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015	 43
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	43
3.2. Realisasi Anggaran	296
 BAB III PENUTUP	 297
4.1. Tinjauan Umum	297
4.2. Strategi	307

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran II : Realisasi Anggaran Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyusun laporan kinerja tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri. Kewajiban menyusun laporan kinerja tahunan ini, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dimaksud meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja merupakan salah satu bagian dari SAKIP yang memuat ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program selama satu tahun, yang menyajikan informasi tentang: Pencapaian Tujuan dan Sasaran sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Realisasi Pencapaian Target Kinerja, Penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja dan Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja dalam Dokumen RPJMD.

Melalui Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh gambaran keberhasilan dan kegagalan untuk kepentingan reviu dan evaluasi atas implementasi SAKIP guna menemukan strategi mengatasi permasalahan yang dihadapi, strategi percepatan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Untuk itu, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata, yang selanjutnya disingkat LAKIP Bupati Lembata Tahun 2017 merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahun berisi informasi mengenai rencana kinerja, Pelaksanaan dan capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Lembata. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata merupakan laporan pelaksanaan kinerja Tahun Terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011–2016. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Panduan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 – 2016; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata tahun 2016 Nomor 6).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam tahun 2017 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur Pemerintah Kabupaten Lembata atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan kinerjanya; dan
3. Sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lembata dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.3.1. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Sebagai salah satu kabupaten dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kedudukan Pemerintah Kabupaten Lembata

berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai daerah, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten Lembata.

1.3.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, terbentuklah 35 perangkat daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Lembata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 32 urusan pemerintahan, yang terdiri dari 24 urusan wajib (6 urusan wajib menyangkut pelayanan dasar dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan 8 urusan pilihan.

Pelaksanaan ke-32 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lembata dimaksud dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai berikut;

- 1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati.
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- 3) Inspektorat Kabupaten Lembata melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Dinas Daerah Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan urusan pemerinthan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 5) Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerinahan di bidang kesehatan;
- 6) Satuan Polis Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- 7) Dinas Sosial, Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- 9) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- 10) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan uruan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, urusan pemerintahan di bidang transmigrasi;
- 11) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebuayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan di bi-

dang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

- 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 15) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
- 16) Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sub urusan peternakan;
- 17) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 18) Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- 19) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan;
- 20) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian;
- 21) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- 22) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- 23) Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, aset dan pendapatan daerah.

Sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lembata dan yang tidak mengalami restruktursisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun tidak mengalami restrukturisasi, tetapi perangkat daerah ini melaksanakan urusan pemertintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketiga Prangkat Daerah itu antara lain:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 39 Tahun 2014, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, dan politik dalam negeri;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 95 Tahun 2013, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi sesuai dengan kebijakan daerah dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Nasional;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- 4) Kecamatan menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1.4. PERSONIL/PEGAWAI

Salah satu instrumen pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan moratorium Presiden Republik Indonesia membawa dampak pada ketiadaan perekrutan Salon Pegawai ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya tenaga ASN yang berfungsi sebagai instrumen pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Pemerintah Kabupaten Lembata hanya terbantu dengan penambahan personel/pegawai yang berasal dari Kategori Dua (K2). Sedangkan penerimaan Calon Pegawai ASN melalui jalur formasi dari Tahun 2011 hingga saat ini belum ada. Pemerintah Kabupaten Lembata tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, walaupun mengalami kekurangan pegawai. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lembata didukung oleh ASN sebanyak 3895 orang.

Untuk mengatasi kekurangan ASN maka Pemerintah Kabupaten Lembata memperpanjang kontrak dengan Tenaga Honor Daerah yang telah diangkat pada tahun 2005 dan tidak termasuk dalam tenaga honor K2 karena tidak memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 129 orang yang tersebar pada 35 SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lembata melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah telah membuat perjanjian kerja dengan tenaga sukarela setiap tahun anggaran untuk mengatasi kekurangan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun 2013-2014 sebanyak 1541 orang. Tenaga Sukarela dengan Perjanjian Kerja tersebut diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Propinsi Nusa Tenggara Timur.

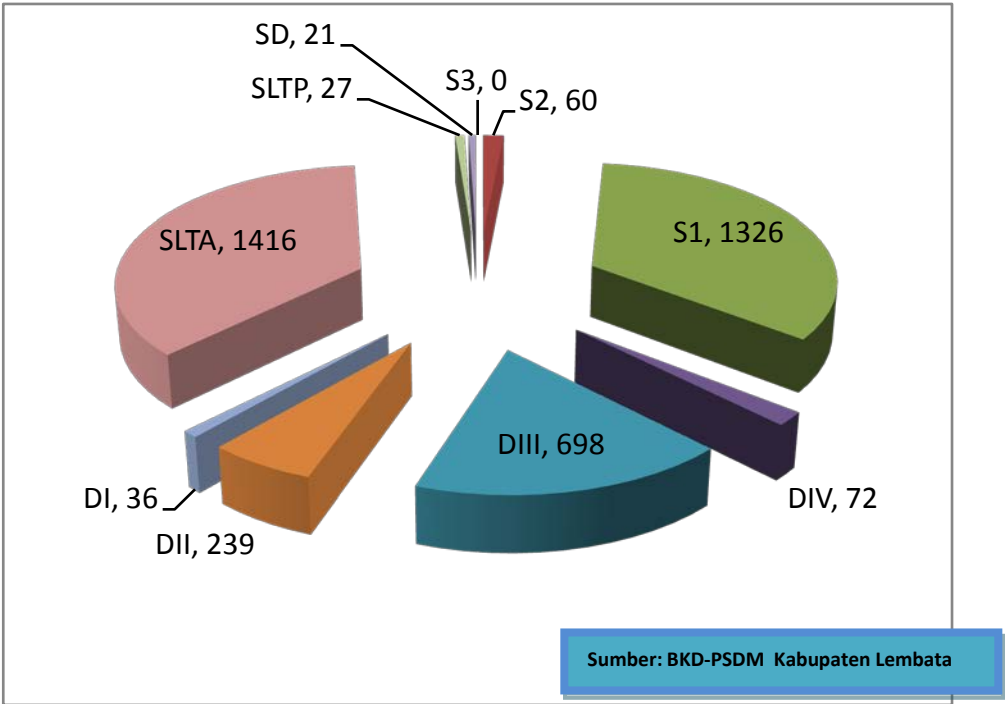
Adapun rincian mengenai keadaan ASN dan Tenaga Kontrak Daerah serta Tenaga Sukarela dengan Perjanjian Kerja (TSPK) adalah sebagai berikut:

1.4.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pada tahun 2017, jumlah ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata berjumlah 3895 orang. Rincian ASN berdasarkan Tingkatan Pendidikan, berdasarkan Golongan, berdasarkan Eselonering dan berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

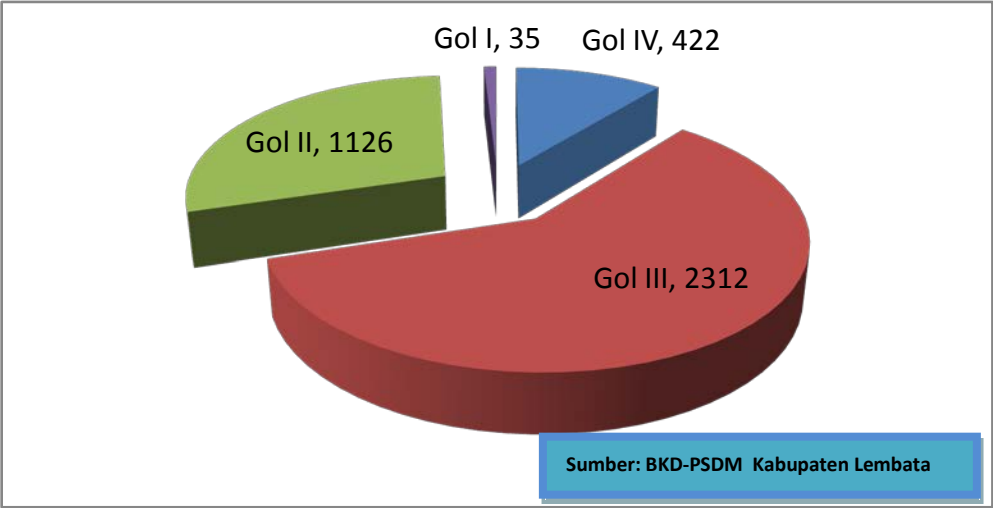
1. Jumlah ASN berdasarkan Tingkatan Pendidikan.

Grafik 1: Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan.



2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.

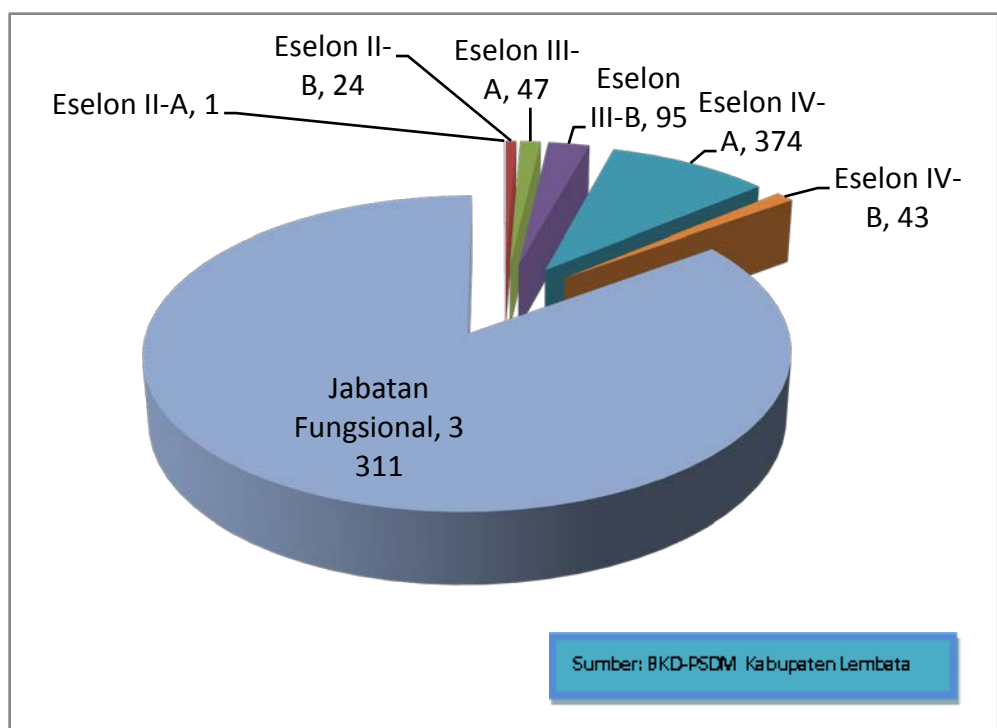
Grafik 2: Jumlah ASN berdasarkan Golongan



3. Jumlah ASN Berdasarkan Eselonering.

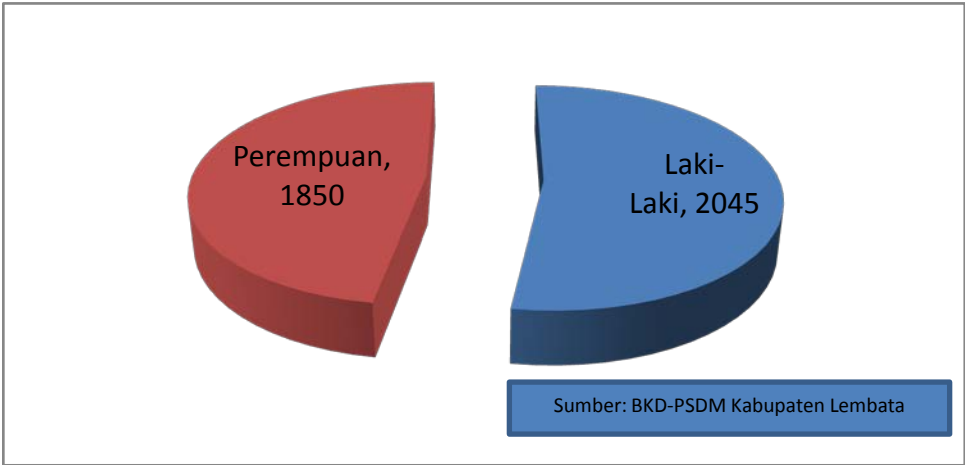
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah jabatan struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata berjumlah 605 jabatan, yang terdiri dari: Eselon IIa sebanyak 1 jabatan, Eselon IIb sebanyak 30 jabatan, Eselon IIIa sebanyak 51 jabatan, Eselon IIIb sebanyak 95 jabatan, Eselon IVa sebanyak 382 jabatan dan Eselon IVb sebanyak 46 jabatan serta jabatan fungsional (Umum dan Tertentu) sebanyak 3311 jabatan. Dari ke-605 jabatan struktural, 21 jabatan struktural yang lowong, sedangkan 584 jabatan struktural yang terisi. Ke-605 jabatan struktural yang terisi dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3: Jumlah Pejabat Struktural



Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin.

Grafik 4: Keadaan PNS/CPNS berdasarkan Jenis Kelamin

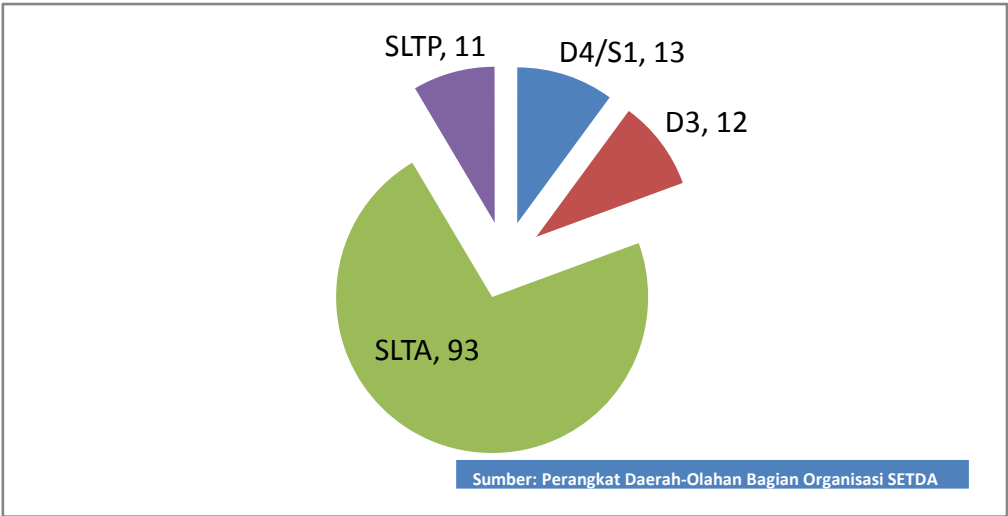


1.4.2. Tenaga Kontrak Daerah (TKD).

Pada tahun Anggaran 2017, jumlah TKD di wilayah Kabupaten Lembata terhitung 129 Orang. Jumlah ini hanya terhitung bagi TKD yang bekerja pada ke 45 Instansi yang ada di Wilayah Kabupaten Lembata, belum terhitung TKD yang bekerja sebagai Guru dan tenaga kesehatan. Jumlah TKD berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

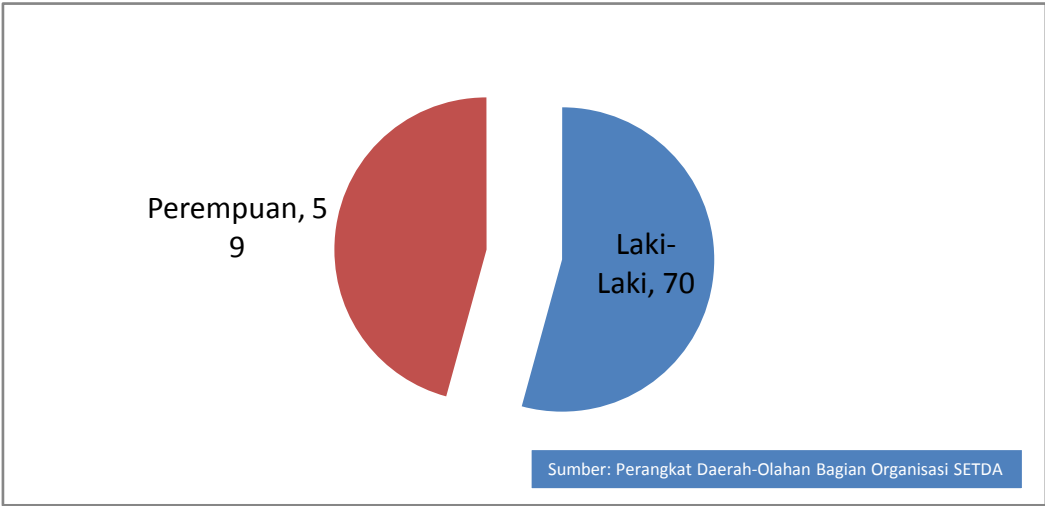
1. Jumlah TKD berdasarkan Tigkatan Pendidikan.

Grafik 5: Keadaan TKD berdasarkan Tingkat Pendidikan



2. Jumlah TKD berdasarkan Jenis Kelamin.

Grafik 6: Keadaan TKD berdasarkan Tingkat Pendidikan

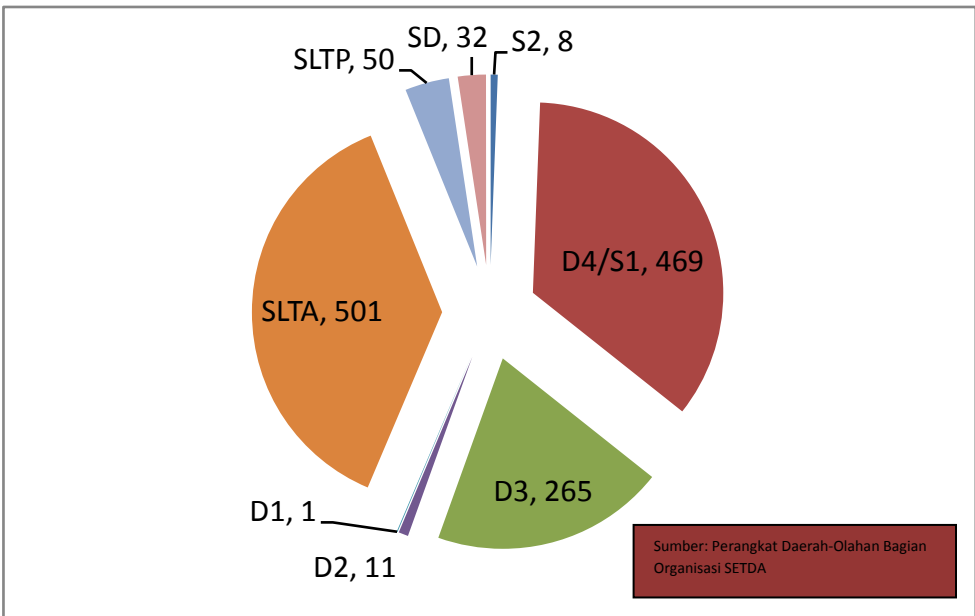


1.4.3. Tenaga Sukarela dengan Perjanjian Kerja (TSPK).

Pada tahun Anggaran 2017, jumlah TSPK di wilayah Kabupaten Lembata terhitung 1336 Orang. Jumlah TSPK berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

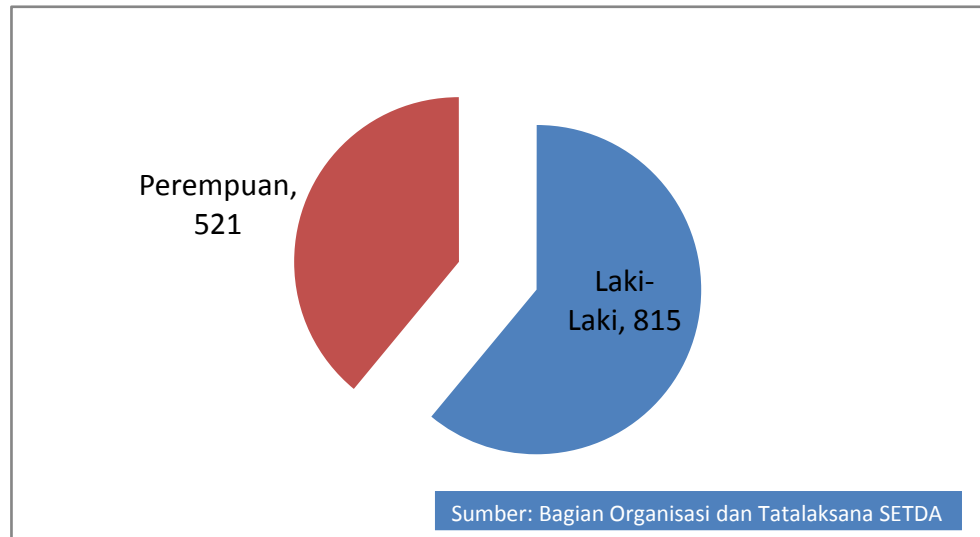
1. Jumlah TSPK berdasarkan Tigkatan Pendidikan.

Grafik 7: Keadaan TSPK berdasarkan Tingkat Pendidikan



2. Jumlah TSPK berdasarkan Jenis Kelamin.

Grafik 8: Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin



1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, masih terdapat kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016. Kendala itu antara lain:

- 1) Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum optimal seperti indikator capaian kurang jelas dan tidak terukur, data dasar dan asumsi yang kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam yang mengarah pada pencapaian suatu target. Selain itu *breakdown* RPJMD ke RKPD mengalami kesenjangan. Ada juga kecenderungan dokumen RPJMD/Renstra SKPD tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja sampai pada penyusunan RKA dan DPA, sehingga banyak program dan kegiatan yang terakomodir dalam RPJMD 2011–2016 tidak dilaksanakan, bahkan terdapat banyak program dan kegiatan yang tidak terakomodir dalam RPJMD 2011–2016.
- 2) Dari sisi Perencanaan Anggaran, ada kendala penitipan anggaran pada kegiatan tertentu pada tahap awal penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA). Pada saat penyusunan Dokumen Perencanaan perubahan Anggaran (DPPA), anggaran yang dititipkan pada kegiatan tertentu pada kegiatan yang sudah terealisasi 100% tanpa ada penambahan jumlah hasil kerja pada kegiatan yang ditambahkan jumlah anggarannya. Di samping itu, banyak program dan kegiatan mengalami penambahan pada perubahan anggaran, sedangkan output dan hasil kerja tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun.

- 3) Dari sisi Sumber Daya Manusia Aparatur, SDM aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata belum memadai. Dari 3895 ASN, masih terdapat 39% ASN yang berijazah SD,SLTP dan SLTA, prosentase tertinggi dari semua jenjang pendidikan yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata adalah ASN yang berijazah SLTA dengan 1416 ASN. Hal ini menghambat penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup.

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Lampiran II: Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lembata yang ditetapkan sebagai Visi Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 adalah “Terwujudnya Lembata yang Mandiri dan Produktif Berbasis Potensi dalam Perspektif Tata Ruang.”

2.1.2. Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2011–2016 diwujudkan dalam Misi Kepala Daerah Kabupaten Lembata 2011–2016 yang ditetapkan sebagai Misi Pemerintah Kabupaten Lembata yang diwujudkan dalam 6 (enam) agenda perjuangan sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Recovery Ekonomi Wilayah;
4. Peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dan
6. Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif, tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan tersebut harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Nasional dan Tujuan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, diuraikan sebagai berikut:

Misi Pertama : Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Tujuan Pertama : Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.

2. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan Kedua : Meningkatkan Kepemimpinan Pejabat Karier yang berkualitas.

Sasaran : Meningkatnya kompetensi PNS yang memenuhi standar minimal Diklat Jabatan Eselon IV, III, II dan kompetensi jabatan fungsional.

Tujuan Ketiga : Menata organisasi satuan kerja perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Sasaran : Tertatanya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan daerah.

Misi Kedua : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- Tujuan Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan.
- Sasaran :
1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan berkualitas.
 2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan desa dalam pendidikan.
- Tujuan Kedua : Meningkatkan Kualitas Kesehatan.
- Sasaran :
1. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.
 2. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan.
 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan desa dalam bidang kesehatan.
- Tujuan Ketiga : Menurunkan Angka Kemiskinan.
- Sasaran :
1. Menurunnya jumlah rumah tangga miskin.
 2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
- Tujuan Keempat : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja.
- Sasaran :
1. Meningkatnya kesempatan kerja.
 2. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pekerja.
- Tujuan Kelima : Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.
- Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas iman umat beragama.

2. Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.

Tujuan Keenam : Meningkatkan kualitas keolahragaan dan kebudayaan

- Sasaran :
1. Meningkatnya sarana, prasarana olah raga, seni dan budaya.
 2. Meningkatnya kegiatan seni dan budaya.
 3. Terpeliharanya benda/situs/kawasan cagar budaya.

Tujuan Ketujuh : Meningkatkan sistem perlindungan sosial.

- Sasaran :
1. Meningkatnya pendidikan luar biasa.
 2. Meningkatnya sarana dan prasarana perlindungan sosial.
 3. Meningkatnya jaminan sosial.

Misi Ketiga : Recovery Ekonomi Wilayah.

Tujuan Pertama : Menumbuhkembangkan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

- Sasaran :
1. Peningkatan penelitian dan pengembangan komoditas unggulan daerah.
 2. Optimalisasi komoditas unggulan daerah.
 3. Terbangunnya sentra – sentra ekonomi rakyat.

Tujuan Kedua : Meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi daerah yang kondusif.

Sasaran : 1. Meningkatnya kegiatan koperasi, UMKM berbasis desa.

2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif.

Tujuan Ketiga : Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

Sasaran : 1. Optimalisasi pengelolaan obyek-obyek wisata.

2. Terpromosinya Obyek-obyek Wisata Unggulan.

3. Meningkatnya sektor pendukung pariwisata.

Misi Keempat : Peningkatan Pendapatan Daerah.

Tujuan Pertama : Mengembangkan sumber pendapatan daerah.

Sasaran : Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah.

Tujuan Kedua : Meningkatkan Investasi Daerah.

Sasaran : Meningkatnya investasi daerah.

Misi Kelima : Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Tujuan : Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah.

Sasaran : 1. Meningkatnya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara.

2. Meningkatnya Infrastruktur bidang ketenagalistrikan.

3. Meningkatnya sarana dan

prasarana permukiman
dan rumah layak huni.

4. Meningkatnya penyediaan
air bersih.

5. Meningkatnya fasilitas
komunikasi dan informasi.

Misi Keenam : Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan

Tujuan Pertama : Meningkatkan penataan wilayah
berwawasan lingkungan.

Sasaran : Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup.

Tujuan Kedua : Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan berwawasan
lingkungan

Sasaran : Terbentuknya kelompok
peduli lingkungan.

Tujuan Ketiga : Meningkatkan kualitas pemanfaatan
ruang

Sasaran : Meningkatnya kualitas tata
bangunan.

2.1.4 Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Bupati
Lembata sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Sasaran Strategis
yang mencakup 130 (seratus tiga puluh) Indikator Kinerja.
Secara terperinci, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang
akan diwujudkan, sebagai berikut:

Misi I: Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Manusia Aparatur Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja : 1. Prosentase Aparatur yang Mengikuti

	Diklat PIM;
	2. Prosentase Aparatur yang Mengikuti Diklat Kompetensi; dan
	3. Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepega- waan.
Sasaran Strategis 2 :	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.
Indikator Kinerja	1. Prosentase Penurunan Temuan Administrasi dan Keuangan; 2. Prosentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat Profesional; 3. Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan; dan 4. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah.
Sasaran Strategis 3 :	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Indikator Kinerja :	1. Opini BPK; 2. Indeks Persepsi Korupsi; dan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat.
Sasaran Strategis 4 :	Meningkatnya Kompetensi PNS yang Menenuhi Standar Minimal Diklat jabatan Eselon IV, III, II.
Indikator Kinerja :	Prosentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidanganya.
Sasaran Strategis 5 :	Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
Indikator Kinerja :	1. Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup dan Surat Keputu-

- san);
2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Dipublikasi;
 3. Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda;
 4. Jumlah Kerja Sama Daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda dengan Pihak Ketiga);
 5. Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Jumlah Perda/Perbup/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Pemerintah Daerah;
 7. Jumlah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Pemerintah Daerah;
 8. Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
 9. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, (Anjab) dan ABK;
 10. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Organisasi dan Tatalaksana;
 11. Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan; dan
 12. Prosentase Anggota DPRD yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas anggota DPRD.

Misi II: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akses Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas.

Indikator Kinerja : 1. Prosentase Sekolah Menerapkan

	Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Baik;
	2. Prosentase Penduduk Usia Dini yang Mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini;
	3. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
	4. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Menengah;
	5. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan tahun Dalam Kondisi baik; dan
	6. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Dalam Kondisi baik.
Sasaran Strategis 2 :	Meningkatnya Kualitas pendidik dan Tanaga Kependidikan.
Indikator Kinerja :	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Syarat Kompetensi.
Sasaran Strategis 3 :	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Pendidikan.
Indikator Kinerja :	Jumlah Perpustakaan Desa.
Sasaran Strategis 4 :	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan.
Indikator Kinerja :	1. Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS/Puskesmas/Pustu/Puskesmas;
	2. Frekuensi Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar; dan
	3. Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.
Sasaran Strategis 5 :	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan.

Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SOP Pelayanan Kesehatan dan 2. Jumlah Lembaga Kemitraan.
Sasaran Strategis 6 :	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Bidang Kesehatan.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Penurunan Gizi Buruk; 2. Jumlah Kasus AKB dan AKI; 3. Prosentase Desa/Kelurahan STBM; dan 4. Prosentase RTM yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/ Rujukan.
Sasaran Strategis 7 :	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase PMKS; 2. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi; dan 3. Jumlah Kawasan Transmigrasi.
Sasaran Strategis 8 :	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentasei Akseptor KB; 2. Prosentase Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja; 3. Cakupan Peserta KB Aktif; 4. Frekuensi Penyuluhan; 5. Frekuensi Konseling KB; 6. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta; dan 7. Jumlah Sarana dan Prasarana KB.
Sasaran Strategis 9 :	Meningkatnya Kesempatan Kerja.
Indikator Kinerja :	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih.
Sasaran Strategis 10 :	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Pekerja.
Indikator Kinerja :	Jumlah PJTKI yang Terfasilitasi.

Sasaran Strategis 11 :	Meningkatnya Kualitas Iman Umat Beragama.
Indikator Kinerja :	1. Frekuensi Kegiatan Wawasan Kebangsaan; dan 2. Jumlah Fasilitas Kegiatan Keagamaan.
Sasaran Strategis 12 :	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah.
Indikator Kinerja :	Jumlah Sarana Rumah Ibadah Terdampingi.
Sasaran Strategis 13 :	Meningkatnya Sarana, Prasarana Olahraga, Seni dan Budaya.
Indikator Kinerja :	1. Jumlah Lapangan Olahraga; 2. Jumlah Budaya yang Dilestarikan; 3. Jumlah Sanggar Seni Budaya, Sekolah yang Aktif; dan 4. Jumlah Budaya, Situs dan Cagar Budaya yang Dilindungi.
Sasaran Strategis 14 :	Meningkatnya Pendidikan Luar Biasa.
Indikator Kinerja :	Jumlah dan Jenis Sekolah Luar Biasa.
Sasaran Strategis 15 :	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlindungan Sosial.
Indikator Kinerja :	Cakupan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
Sasaran Strategis 16 :	Meningkatnya Jaminan Sosial.
Indikator Kinerja :	Jumlah Database PMKS.

Misi III: Recovery Ekonomi Wilayah

Sasaran Strategis 1 :	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.
Indikator Kinerja :	1. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah; dan

	2. Jumlah Kerja Sama Pembangunan.
Sasaran Strategis 2 :	Optimalitas Komoditas Unggulan Daerah.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Kenaikan Produksi Pertanian dan Perkebunan; 2. Prosentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan; 3. Prosentase Kenaikan Hasil Hutan; 4. Prosentase Kenaikan Ketahanan Pangan; 5. Prosentase Kenaikan Kapasitas Penyuluh; 6. Jumlah Daerah Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; 7. Prosentase Kenaikan Produksi Ikan Tangkap (Ton); 8. Produksi Rumput Laut (Ton); dan 9. Jumlah Pelaku UMKM yang Terlatih.
Sasaran Strategis 3 :	Terbangunnya Sentra-Santra Ekonomi Rakyat.
Indikator Kinerja :	Jumlah Kelompok Binaan LKM.
Sasaran Strategis 4 :	Meningkatnya Kegiatan Koperasi, UMKM Berbasis Desa.
Indikator Kinerja :	Jumlah Koperasi Aktif.
Sasaran Strategis 5 :	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama proses perijinan (hari); 2. Jumlah SOP; 3. Tersedianya Dokumen Statistik Perijinan; 4. Jumlah SITU yang ditetapkan; 5. Jumlah Linmas; 6. Angka Kriminalitas; 7. Jumlah Unsur masyarakat dan pemangku kepentingan;

8. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
9. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
10. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat; dan
11. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Sasaran Strategis 6 : Optimalisasi Pengelolaan Obyek-Obyek Wisata.

Indikator Kinerja :
1. Jumlah Obyek Wisata; dan
2. Frekuensi Promosi.

Sasaran Strategis 7 : Terpromosinya Obyek-Obyek Wisata Unggulan.

Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Mitra.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Sektor Pendukung Pariwisata.

Indikator Kinerja : Jumlah Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Misi IV: Peningkatan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Indikator Kinerja :
1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah;
2. Jumlah Investor; dan
3. Nilai Kontribusi atas Investasi bagi Pemerintah Daerah.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Investasi Daerah.

Indikator Kinerja : Jumlah Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Publik.

Misi V: Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara.

- Indikator Kinerja :
1. Prosentase Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan Dalam Wilayah;
 2. Persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan;
 3. Prosentase Panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan;
 4. Prosentase peralatan kebinamargaan yang dapat berfungsi dengan baik;
 5. Persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural;
 6. Prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan dalam wilayah;
 7. Prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan dalam wilayah;
 8. Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi;

9. Prosentase dari pelayanan Sistem Drainase yang bersifat Struktural dan Non Struktural;
10. Prosentase jumlah angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota;
11. Prosentase jumlah halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
12. Prosentase Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran;
13. Prosentase Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota;
14. Prosentase Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten;
15. Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang menerapkan standar keselamatan;

	16. Prosentase Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, dan Guardrail, dan PJU) yang ada di Kabupaten; dan
	17. Prosentase Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang Wajib Uji.
Sasaran Strategis 2 :	Meningkatnya Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik; dan 2. Jumlah Lokasi Izin Usaha Pertambangan.
Sasaran Strategis 3 :	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman yang Layak Huni.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dari Pelayanan Sistem Drainase yang Bersifat Struktural dan Non Struktural; dan 2. Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Sasaran Strategis 5 :	Meningkatnya Fasilitas Komunikasi dan Informasi.
Indikator Kinerja :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat; 2. Prosentase kelompok yang dibentuk

oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah

3. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal;
4. Jumlah Siaran Radio Lokal Aktif;
5. Website Milik Pemda; dan
6. Jumlah Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan Jumlah Konferensi Pers.

Misi Keenam : Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

- Indikator Kinerja :
1. Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi;
 2. Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Dikonservasi (Ha);
 3. Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL;
 4. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air;
 5. Prosentase Penyebarluasan Informasi Bencana; dan
 6. Prosentase daerah rawan Bencana yang Dibangun.

Sasaran Strategis 2 : Terbentuknya Kelompok Peduli Lingkungan.

- Indikator Kinerja :
1. Pelayanan Informasi Status Lingkungan Hidup;
 2. Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan;
 3. Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan;
 4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah

	terhadap jumlah penduduk; dan
	5. Penegakkan Hukum Lingkungan.
Sasaran Strategis 3 :	Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan.
Indikator Kinerja :	1. Jumlah Regulasi tentang Rencana Tata Ruang.
	2. Jumlah Penyelesaian Izin Lokasi.
	3. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Pertanahan.

2.1.5. Target Kinerja

Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata di Tahun 2017 dipaparkan sebagai berikut:

1. Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti Diklat PIM dengan target capaian 100%;
2. Prosentase Aparatur yang Mengikuti Diklat Kompetensi dengan target capaian 100%;
3. Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian dengan target capaian 2 Dokumen;
4. Prosentase Penurunan Temuan Administrasi dan Keuangan dengan target capaian 50%;
5. Prosentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat Profesional dengan target capaian 100%;
6. Prosentase penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan dengan target capaian 100%;
7. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan target 16 kali;
8. Opini BPK Dengan Target WTP;
9. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target “B ” atau BAIK dengan nilai rata-rata 7,9 dan 1 Perbup IKM;
10. Prosentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dengan target capaian 100%;

11. Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup dan Surat Keputusan) dengan target capaian 270 Perda, Perbup dan Surat Keputusan;
12. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Dipublikasi dengan target capaian 10 Peraturan Perundang-Undangan;
13. Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda dengan target capaian 50 kegiatan.
14. Jumlah Kerjasama Daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda dengan Pihak Ketiga) dengan target capaian 5 kerjasama;
15. Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dengan target capaian 4 kali terhadap 2 Perusahaan Daerah;
16. Jumlah Perda/Perbup/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Pemerintah Daerah dengan target capaian 43 Perda/Perbup/Keputusan Bupati;
17. Jumlah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Pemerintah Daerah dengan target capaian 2 Perbup;
18. Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan target capaian 4 dokumen;
19. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan ABK: -
20. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Organisasi dan Tatalaksana dengan target capain 1 dokumen;
21. Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan dengan target capaian 24 Kali;
22. Prosentase Anggota DPRD yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas anggota DPRD dengan target capaian 100%;
23. Prosentase sekolah menerapkan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang baik dengan target capaian 100%;
24. Prosentase Penduduk Usia Dini yang Mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini dengan target capaian 100%;

25. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan target capaian 100%;
26. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Menengah dengan target capaian 100%;
27. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan tahun dalam Kondisi Baik dengan target capaian 50 Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
28. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik dengan target capaian 26 Sarana dan Prasara-na Pendidikan Menegah;
29. Jumlah Pendidik yang Memenuhi Syarat Kompetensi dengan target capaian 142 Guru;
30. Jumlah Perpustakaan Desa dengan target capaian 7 Perpustakaan Desa;
31. Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS/Puskesmas/Pustu/Puskesdes dengan target capaian 100%;
32. Frekuensi Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar dengan target capaian 12 kali;
33. Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan target capaian 12 kali;
34. Jumlah SOP Pelayanan Kesehatan dengan target capaian 8 SOP;
35. Jumlah Lembaga Kemitraan dengan target capaian 1 lembaga kemitraan;
36. Prosentase Gizi Buruk dengan target capaian 1%;
37. Jumlah Kasus AKB dan AKI dengan target capaian AKB: 14,67/1000 KH dan AKI: 128/100.0000 KH;
38. Prosentase Desa /Kelurahan STBM dengan target capana 100%;
39. Prosentase RTM yang Memperoleh JamKesmas /JamKesda /Jampersal /Rujukan dengan target capaian 100%;
40. Prosentase PMKS dengan target capaian 100%;

41. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dengan target capaian 100%;
42. Jumlah Kawasan Transmigrasi dengan target capaian 10 kawasan;
43. Prosentase Akseptor KB dengan target capaian 100%;
44. Prosentase Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja dengan target capaian 100% (250 remaja, 10 sekolah);
45. Cakupan Peserta KB Aktif dengan target capaian 3200 peserta;
46. Frekuensi Penyuluhan dengan target capaian 3 kali;
47. Frekuensi Konseling KB: -
48. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta: -
49. Jumlah Sarana dan Prasarana KB dengan target capaian 18 Jenis Sarana dan Prasarana;
50. Prosentase Tenaga Kerja Terlatih dengan target capaian 100%;
51. Jumlah PJTKI yang terfasilitasi dengan target capaian 3 PJTKI;
52. Frekwensi Kegiatan Wawasan Kebangsaan dengan target capaian 3 kali;
53. Jumlah Fasilitas Kegiatan Keagamaan dengan target capaian 6 kegiatan;
54. Jumlah Sarana Rumah Ibadah Terdampingi dengan target capaian 45 rumah ibadah;
55. Jumlah Lapangan olahraga: -
56. Jumlah budaya yang dilestarikan dengan target capaian 2 rumah adat;
57. Jumlah sanggar seni budaya, sekolah dan masyarakat yang aktif:-
58. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi ditargetkan tercapai 14 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya;
59. Jumlah dan jenis sekolah luar biasa dengan target capaian 1 sekolah luar biasa;
60. Cakupan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo: -

61. Data Base PMKS dengan target capaian 1 dokumen;
62. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah dengan target capaian 2 dokumen;
63. Jumlah Kerjasama Pembangunan dengan target capaian 4 jenis kerjasama;
64. Prosentase Kenaikan Produksi Pertanian dan Perkebunan dengan target capaian 100%;
65. Prosentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan dengan target capaian 100%;
66. Prosentase Kenaikan Hasil Hutan: -;
67. Prosentase Kenaikan Ketahanan Pangan dengan target capaian 100%;
68. Prosentase Kenaikan Kapasitas Penyuluh dengan target capaian 100%;
69. Jumlah sarana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan dengan target capaian 2 jenis;
70. Prosentase Kenaikan Produksi Ikan Tangkap (Ton) dengan target capaian 100%;
71. Produksi Rumput Laut (Ton) dengan target capaian 7850 Ton;
72. Jumlah Pelaku UMKM yang Terlatih dengan target capaian 320 orang;
73. Jumlah Kelompok Binaan LPM dengan target capaian 144 kelompok;
74. Jumlah Koperasi Aktif dengan target capaian 2 Koperasi;
75. Lama proses perijinan (hari) dengan target capaian 1 hari;
76. Jumlah SOP: -
77. Tersedianya Dokumen Statistik Perijinan dengan target capaian 1 dokumen statistik perijinan;
78. Jumlah SITU yang ditetapkan dengan target capaian 250 SITU;
79. Jumlah Linmas ditargetkan tercapai 1963 linmas;
80. Angka kriminalitas dengan target capaian 12;
81. Jumlah Unsur masyarakat dan pemangku kepentingan:-;

82. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan: -
83. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT): -
84. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat dengan target capaian 2 kali;
85. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ditargetkan tercapai 4 kali;
86. Jumlah Obyek Wisata dengan target capaian 2 obyek wisata;
87. Frekuensi Promosi dengan target capaian 3 kali pada 3 media cetak;
88. Jumlah Lembaga Mitra dengan target capaian 1 lembaga mitra;
89. Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan target capaian 8 kali koordinasi;
90. Jumlah pendapatan asli daerah dengan target capaian Rp. 31.730.890.356;
91. Jumlah Investor dengan target capaian 5 investor;
92. Nilai Kontribusi atas Investasi bagi Pendapatan Daerah dengan target capaian 40.343.935.361;
93. Jumlah Optimalisasi Pemanfaatan sarana/prasarana publik dengan target capaian 1 sarana dan prasarana publik;
94. Persentase panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan pada akhir tahun pencapaian SPM Terhadap Panjang jalan ruas-ruas jalan yang menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan dalam wilayah dengan target capaian 100%;
95. Prosentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan ditargetkan tercapai 100%;
96. Prosentase panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan dengan target capaian 100%;

97. Prosentase peralatan kebinamargaan yang dapat berfungsi dengan baik dengan target capaian 60%;
98. Persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural dengan target capaian 100%;
99. Rasio Ketersediaan jaringan Irigasi dengan target capaian 65%;
100. Prosentase jumlah angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota dengan target capaian 100%;
101. Prosentase jumlah halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dengan target capaian 100%;
102. Prosentase Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dengan target capaian 100%;
103. Prosentase Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota dengan target capaian 100%;
104. Prosentase Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten dengan target capaian 100%;
105. Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang menerapkan standar keselamatan dengan target capaian 100%;
106. Prosentase Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, dan Guardrail, dan PJU) yang ada di Kabupaten dengan target capaian 100%;
107. Prosentase Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang Wajib Uji dengan target capaian 100%;

108. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dengan target capaian 3223 rumah tangga;
109. Jumlah Lokasi Ijin Usaha Pertambangan: -
110. Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya: -
111. Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat dengan target capaian 100%;
112. Prosentase kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah ditargetkan tercapai 100%;
113. Jumlah surat kabar nasional / local dengan target capaian 8 surat kabar;
114. Jumlah siaran radio lokal aktif: -
115. Website milik Pemda dengan target capaian 1 website;
116. Jumlah Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan Jumlah konferensi pers dengan target capaian 350 kali;
117. Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha): -
118. Luas hutan dan lahan kritis yang dikonservasi (Ha) dengan target capaian 10 Ha;
119. Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL dengan target capaian 9 Wilayah Kecamatan, 50 lembaga usaha;
120. Cakupan Penghijauan Wilayah rawan Longsor dan Sumber Mata Air dengan target capaian 10 Ha;
121. Prosentase Penyebarluasan Informasi Bencana dengan target capaian 100%;
122. Prosentase daerah rawan bencana yang dibangun dengan target capaian 100%;
123. Pelayanan Informasi Status Lingkungan Hidup dengan target capaian 2 pelayanan informasi;

124. Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan ditargetkan tercapai 9 kelompok;
125. Kerusakan kawasan hutan dan lahan diturunkan seluas 20 Ha;
126. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap jumlah penduduk:-
127. Penegakan hukum lingkungan: -
128. Jumlah Regulasi tentang Rencana Tata Ruang dengan target capaian 1 Perda;
129. Jumlah Penyelesaian Ijin Lokasi: -; dan
130. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pertanahan: -.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lembata. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur lingkup Pemerintahan Kabupaten Lembata.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Untuk itu, penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bupati Lembata pada Tahun 2017 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sesuai Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Pemerintah Kabupaten Lembata telah melaksanakan 128 program yang didukung oleh yang tersebar pada 38 Sasaran Strategis dan 130 Indikator Kinerja.

Gambaran keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja tercantum pada Lampiran I.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	Nilai 75 < 100%	Baik
3.	Nilai 55 < 74%	Cukup
4.	Nilai < 55 %	Kurang

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata diukur dalam 6 (enam) Misi Pemerintah Kabupaten Lembata tahun 2011–2016 yang dijabarkan dalam 38 (tiga puluh delapan) Sasaran Strategis dan 130 (seratus tiga puluh) Indikator Kinerja. Dari ke130 Indikator Kinerja, 27 Indikator Kinerja tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2017 karena *pertama*: ketiadaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud; *kedua*: pengalihan urusan yang sebelumnya menjadi ke-

wenangan Pemerintah Kabupaten Lembata dialihkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara timur. Secara terperinci, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata dapat dipaparkan sebagai berikut:

Misi Pertama: Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Reformasi birokrasi diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan bermartabat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang baik, bersih, efisien, efektif dan partisipatif (reformasi kepemimpinan dan reformasi birokrasi/organisasi). Pelaksanaan pemerintahan akan berjalan optimal apabila ditopang oleh aparatur yang profesional dengan struktur pemerintahan yang solid dan kuat. Reformasi birokrasi dimaksudkan menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional, memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi sehingga menghasilkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Adapun Target dan Capaian Kinerja Misi Pertama: Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lembata dijabarkan sebagai berikut:

- I. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah.

Ukuran Keberhasilan misi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lembata, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh Badan Kepegawaian Daerah dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lembata bersama Perangkat Daerah tertentu yang mengalokasikan anggaran Diklat Kepemimpinan bagi para pejabat struktural. Adapun Pengukuran capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama, digambarkan pada Tabel 3.1 berikut ini:

3.1. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Pertama

N O	INDIKATOR KINERJA	KON- DISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAPA IAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Aparatur yang Mengikuti	20%	39 Org	22 Org	56%	3%	5%	-	3%	6%	4%	42%	75%

Diklat PIM													
2.	Prosentase Aparatur yang Mengikuti Diklat Kompetensi	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	85%
3.	Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian	0	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia (2 dokumen)	Tersedia (2 Dokumen)

Dari tabel 3.1 dapat diketahui bahwa:

1. Prosentase Aparatur yang Mengikuti Diklat PIM.

Pada tahun 2017, Prosentase aparatur dalam jabatan struktural yang mengikuti Diklat PIM tercapai 56% atau 22 aparatur yang mengikuti diklat PIM (PIM II, PIM III dan PIM IV) dari target 39 aparatur.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase aparatur dalam jabatan struktural yang mengikuti Diklat PIM tercapai 87% atau 39 aparatur yang mengikuti diklat PIM (PIM II, PIM III dan PIM IV) dari target 45 aparatur.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 terdapat penurunan prosentase aparatur yang mengikuti Diklat PIM mengalami penurunan dari 39 aparatur ke atau 22 aparatur.

Penurunan ini disebabkan karena minimnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai aparatur yang mengikuti Diklat PIM.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka prosentase aparatur yang mengikuti Diklat PIM tercapai 42% atau 252 aparatur, yang terdiri dari 20% atau 123 aparatur mengikuti diklat PIM pada awal RPJMD, 3% atau 18 aparatur mengikuti Diklat PIM pada tahun 2012, 5% atau 31 aparatur mengikuti Diklat PIM pada tahun 2013, 3% atau 21 aparatur mengikuti Diklat PIM pada tahun 2015, 6% atau 39 aparatur mengikuti Diklat PIM pada tahun 2016 dan 4% atau 22 aparatur yang mengikuti Diklat PIM pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase aparatur yang mengikuti Diklat PIM ditargetkan tercapai 75% atau 456

aparatur dari total 608 atau 100% aparatur yang menduduki jabatan struktural (*Catatan: total jabatan struktural pada Tahun 2017 mengalami perubahan dari 616 jabatan ke 608 jabatan karena adanya Penataan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*).

Pelaksanaan Diklat PIM bertujuan untuk pengembangan kompetensi serta peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN dan juga sebagai salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan struktural lingkup Pemerinah Kabupaten Lembata agar dapat bekerja secara professional, dan bebas dari praktek KKN.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan ini adalah kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendorong Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini, sehingga Pemerinah Kabupaten Lembata sulit mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 - 2016. Selain itu, anggaran untuk pelaksanaan Diklat PIM masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Lembata sulit mengukur dan mengejar target yang telah ditetapkan.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah kabupaten Lembata berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini dengan memaksimalkan rencana pelaksanaan Diklat PIM terpusat pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lembata disertai dengan alokasi anggaran yang memadai guna mengoptimalkan pengukuran target yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Satu tidak dapat diukur karena alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

ini tersebar pada 35 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

2. Prosentase Aparatur yang Mengikuti Diklat Kompetensi.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Pertama dan Indikator Kinerja Dua.

Sedangkan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak ada pencapaian terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini masih menyebar pada Perangkat Daerah. Sementara Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selau perangkat daerah pelaksana indikator kinerja ini tidak memiliki data base aparatur yang mengikuti diklat profesi.

Apabila hasil kinerja dari kondisi awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2011–2016, maka prosentase Aparatur yang Mengikuti Diklat Kompetensi tercapai 20%, (capaian pada awal RPJMD). Sementara dari tahun Pertama RPJMD hingga tahun 2017 indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Aparatur Sipil Negara tentang tugas dan fungsi yang dimbannya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan ini adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini masih tersebar pada masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten sehingga mempersulit Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Aparatur sebagai instansi pelaksana tugas dan fungsi pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini dengan memaksimalkan rencana pelaksanaan Bimtek atau Diklat Kompetensi terpusat pada BKD-PSDM disertai dengan alokasi anggaran yang memadai guna mengoptimalkan pengukuran target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Dua tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

3. Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian.

Pada tahun 2017, tersusunnya sistem administrasi kearsipan dan dokumen kepegawaian sebanyak 2 dokumen, yaitu Dokumen Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lembata.

Sedangkan pada tahun 2016, juga tersusunnya sistem administrasi kearsipan dan dokumen kepegawaian sebanyak 2 dokumen, yaitu Dokumen Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lembata.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 terdapat tidak terjadi penambahan maupun pengurangan sistem administrasi kearsipan dan dokumen kepegawaian.

Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran setiap tahun dalam melaksanakan program dan kegiatan ini hanya untuk menghasilkan dua dokumen sistem administrasi kearsipan dan dokumen kepegawaian.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian tersedia dalam dua jenis dokumen, yaitu dokumen Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan

Daftar Nominatif Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lembata, mencapai target akhir RPJMD dengan target tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian.

Penyediaan Sistem administrasi kearsipan dan dokumen administrasi kepegawaian (DUK dan Nominatif Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lembata) sebagai data pendukung bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta sebagai dasar pembinaan dan pengembangan pola karier PNS.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan ini terjadi karena usulan kenaikan pangkat periode oktober terlambat disampaikan ke Bidang Informasi dan Data Kepegawaian menyebabkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM terlambat dalam menyediakan sistem administrasi kearsipan dan dokumen kepegawaian.

Terhadap kendala ini, Pemerintah kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan percepatan usulan kenaikan pangkat periode oktober sehingga pada akhir tahun Daftar Urutan Kependidikan (DUK) dan Daftar Nominatif Kepegawaian lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata disediakan tepat waktu.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 12.393.750 atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 12.393.750 (*Pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 46% atau Rp. 10.683.750 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 23.077.500*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian dengan

kegiatan Penyusunan DUK dan Nominatif PNSD/CPNSD lingkup Pemkab Lembata.

II. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Efektifitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah Daerah.

Ukuran Keberhasilan misi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lembata, dengan sasaran Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah terlaksana melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH), Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah. Ketiga Program ini bertujuan untuk menata dan membina semangat dan mental aparatur negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan secara terpadu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Inspektorat Kabupaten Lembata dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Adapun Pengukuran capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua, tersaji pada Tabel 3.2 berikut ini:

3.2. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kedua

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Penurunan Temuan Administrasi dan Keuangan	60%	61 Temuan	62 Temuan	96,72 %	268%	155%	177%	118%	232%	59,63 %	59,63%	30%
2.	Prosentasi Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat profesi	40%	6	16	267%	19%	19%	19%	37%	19%	22%	174,62%	70%
3.	Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	15%	52.838	50.098	95%	*	8%	12%	13%	13%	36%	96%	80%
4.	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	36 Kali	16	19	119%	4	4	4	6	7	19	80 kali	36 Kali

*) Tidak ada data

Dari tabel 3.2 diketahui bahwa:

1. Prosentase Penurunan Temuan Administrasi dan Keuangan.

Pada tahun 2017, prosentase penurunan temuan administrasi dan keuangan tercapai 96,72% atau 62 temuan (40 temuan administrasi, 22 temuan keuangan) dari target 50% atau 61 temuan (40 temuan administrasi, 21 temuan keuangan).

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase penurunan temuan administrasi keuangan tercapai 232% atau 221 temuan (157 temuan administrasi, 64 temuan keuangan) dari target 95 temuan (61 temuan administrasi dan 34 temuan keuangan).

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka prosentase temuan administrasi keuangan mengalami penurunan dari 232% atau 221 temuan ke 59,63% atau 62 temuan.

Keberhasilan dalam upaya menurunkan temuan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata dalam upaya pembendahan dalam rangka mengejar Opini BPK dengan predikat WTP pada tahun 2019.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka Prosentase Penurunan Temuan Administrasi dan Keuangan tercapai 59,63% atau sebanyak 62 temuan, belum mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase penurunan temuan administrasi dan keuangan ditargetkan tercapai 30% atau 25 temuan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena; *pertama*: masih rendahnya tingkat pengetahuan Aparatur Sipil Negara tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan temuan yang sama dapat berulang pada tahun-tahun berikutnya; *kedua*: masih kurangnya kepedulian obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan; *ketiga*: masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan yang lebih komprehensif antar lembaga pengawas; dan *keempat*:

belum maksimalnya evaluasi berkala terhadap temuan hasil pengawasan.

Terhadap kendala ini, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lembata adalah:

- 1) Penambahan Personil aparat fungsional auditor dan pengawas urusan pemerintahan daerah dengan maksud untuk mempermudah proses pemeriksaan dan proses tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan;
- 2) Pemberian Sanksi kepada obyek pemeriksaan yang tidak atau lambat menyampaikan tindak lanjut hasil temuan baik temuan administratif maupun material; dan
- 3) Pemberian pembinaan pengawasan pada awal tahun anggaran kepada obyek pemeriksaan terkait pemahaman Undang-Undang Pelaksanaan Anggaran untuk mengurangi kealahan dalam penggunaannya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 834.784.107 atau 99,89% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 835.720.100 (*Pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 20% atau Rp. 136.440.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 699.279.600*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait ditekan hingga 59,63%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 99,89%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

- 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 3) Penanganan kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya;
 - 4) Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan;
 - 5) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif; dan
 - 6) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
2. Indikator Kinerja Prosentase Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat Profesi.

Pada tahun 2017, prosentase tenaga pemeriksa aparatur pengawasan yang mengikuti diklat profesi tercapai 267% atau 16 aparatur (diklat pengembangan aparatur pengawasan untuk 11 orang aparatur dan diklat teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja untuk 5 orang aparatur) dari target 100% atau 6 aparatur.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase tenaga pemeriksa aparatur pengawasan yang mengikuti diklat profesi tercapai 116% atau 14 aparatur dari target 100% atau 12 aparatur.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 prosentase tenaga pemeriksa aparatur pengawasan yang mengikuti diklat profesi mengalami peningkatan dari 116% atau 14 aparatur ke 267% atau 16 aparatur.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya upaya Pemerintah Kabupaten Lembata untuk melakukan pembenahan terhadap hasil temuan pengawasan, sehingga peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat profesi penting untuk menekan temuan hasil pemeriksaan. Selain itu, peningkatan kompetensi aparat pengawasan penting bagi pejabat fungsional selain sebagai syarat untuk menduduki jabatan fungsional dimaksud, dan untuk menambah kapasitas dan kemampuan pemahaman akan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka prosentase tenaga pemeriksa aparatur pengawasan yang mengikuti diklat profesi

tercapai 174,62% atau 129 aparatur, yang terdiri dari 40% atau 30 aparatur yang mengikuti diklat profesi pada awal RPJMD, 19% atau 14 aparatur yang mengikuti Diklat Profesi pada tahun 2012, 19% atau 14 aparatur yang mengikuti Diklat Profesi pada tahun 2013, 19% atau 14 aparatur yang mengikuti Diklat Profesi pada tahun 2014, 37% atau 27 aparatur yang mengikuti Diklat Profesi pada tahun 2015, 19% atau 14 aparatur yang mengikuti Diklat Profesi pada tahun 2016 dan 22% atau 16 aparatur yang mengikuti Diklat Profesi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan prosentase tenaga pemeriksa aparatur pengawasan yang mengikuti diklat profesi ditargetkan tercapai 70% atau 52 aparatur dari total keseluruhan 100% atau 74 aparatur pengawasan.

Manfaat dilaksanakan diklat profesi bagi tenaga pemeriksa aparatur pengawasan adalah untuk menambah pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, agar dalam melaksanakan tugas, tenaga pemeriksa aparatur pengawasan dapat bekerja sesuai dengan tuntutan aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, diklat profesi yang diikuti oleh tenaga pemeriksa aparatur pengawasan merupakan salah satu tuntutan atau syarat untuk menduduki jabatan fungsional.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah jumlah aparatur pengawas belum seimbang dengan volume dan beban kerja di bidang pengawasan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga pengawas, baik melalui diklat profesi maupun penambahan jabatan fungsional di bidang pengawasan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 178.788.780 atau 94,91% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 188.370.000 (*Pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 26% atau Rp. 39.084.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 149.286.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan

seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 267%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 94,91%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan:

- 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan; dan
 - 2) Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
3. Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan.

Pada tahun 2017, Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan tercapai 95% atau 50.098 penduduk dari target 52.838 penduduk.

Sedangkan pada tahun 2016, Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan tercapai 98% atau 18.207 penduduk dari target 18.500 penduduk.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan mengalami peningkatan dari 13% atau 18.207 penduduk pada tahun 2016 ke 36% atau 50.098 penduduk pada tahun 2017.

Peningkatan ini disebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan melakukan pelayanan langsung kepada Masyarakat dengan upaya Jemput Bola (JEBOL).

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka Prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan tercapai 96% atau

134.736 penduduk telah memiliki dokumen kependudukan, yang terdiri dari 15% atau 20.650 penduduk telah memiliki dokumen kependudukan pada awal RPJMD, 8% atau 11.273 Penduduk telah memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2013, 12% atau 16.205 Penduduk telah memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2014, 13% atau 18.303 penduduk telah memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2015, 13% atau 18.207 penduduk telah memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2016 dan 36% atau 50.098 Penduduk telah memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan prosentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan ditargetkan tercapai 80% atau 112.280 penduduk dari 140.350 Penduduk kabupaten Lembata.

Manfaat di lakukan pendekatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang tengah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lembata adalah dokumen kependudukan yang merupakan identitas diri dan sebagai jaminan kepastian hukum hak sipilnya.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan penganggaran, koordinasi lintas sektor belum memadai, penerapan regulasi terkait penataan administrasi kependudukan belum optimal serta rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Terhadap Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk menambah alokasi anggaran untuk membiayai program kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana prasarana pendukung dan sosialisasi penerapan regulasi peraturan yang lebih optimal serta pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan upaya Jemput Bola (JEBOL).

Penggunaan sumber daya keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.549.179.850,- atau 98,30% dari

total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.575.927.250. (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 5% atau Rp. 91.567.150 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 1.667.494.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 95%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 98,30%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Tiga didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan:

- 1) Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
 - 2) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
 - 3) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Kependudukan;
 - 4) Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 5) Dukungan Teknis Lainnya Yang Berkualitas; dan
 - 6) Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
4. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2017, jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan sebanyak 19 kali dari target 16 kali rapat koordinasi. Rapat-rapat koordinasi itu antara lain:

1. Rapat Koordinasi dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD yang Dibiayai Dana Dekonsentrasi dan Dana DAK sebanyak 4 kali;
2. Rapat Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan APBD sebanyak 14 kali; dan
3. Rapat Pelaksanaan Percepatan Realisasi APBD Melalui Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep) sebanyak 1 kali.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

dilaksanakan sebanyak 7 kali dari target 6 kali rapat koordinasi. Rapat-rapat koordinasi itu antara lain:

- 1) Koordinasi dan Pelaporan Progam/Kegiatan SKPD yang Dibiayai dari Dana Dekonsentrasi dan DAK dilakukan sebanyak 4 kali;
- 2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD dilakukan sebanyak 2 kali; dan
- 3) Pelaksanaan Percepatan Realisasi APBD melalui Sistem Monitoring TEPA (Sismontep) dilakukan sebanyak 1 kali.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 terjadi penambahan jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dari 7 rapat koordinasi ke 19 rapat koordinasi.

Penambahan jumlah rapat koordinasi ini disebabkan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengendalikan dan memacu percepatan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lembata.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tercapai 80 kali, yang terdiri dari 36 kali rapat koordinasi terjadi pada awal RPJMD, 4 kali rapat koordinasi terjadi pada tahun 2012, 4 kali rapat koordinasi terjadi pada tahun 2013, 4 kali rapat koordinasi terjadi pada tahun 2014, 6 kali rapat koordinasi terjadi pada tahun 2015 dan 7 kali rapat koordinasi terjadi pada tahun 2016, dan 19 kali rapat koordinasi terjadi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah ditargetkan tercapai 36 kali.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah bertujuan untuk memacu percepatan penyerapan anggaran, baik dari dana DAK, Dekonsentrasi, maupun APBD. Hal ini terbukti dengan tingginya

penyerapan anggaran Tahun 2017 lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Empat sebesar Rp. 193.131.915 atau 96,98% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 199.149.000. (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 6% atau Rp. 12.008.600 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 211.157.600*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 119%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 96,98%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Empat didukung oleh pelaksanaan Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain:

1. Koordinasi dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD yang Dibiayai dari Dana Dekonsentrasi dan DAK;
2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD; dan
3. Pelaksanaan Percepatan Realisasi APBD melalui Sistem Monitoring TEPA (Sismontep).

III. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Ukuran Keberhasilan misi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lembata, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik terlaksana melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang ditopang melalui kegiatan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan, Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dan

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib pelaksanaan administrasi pemerintahan dan tertib pengelolaan keuangan daerah dengan hasil: berkurangnya temuan administratif dan material dari Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Program ini dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lembata dan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Adapun pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik tersaji pada Tabel 3.3 berikut ini:

3.3 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Opini BPK	Disclaimer	WTP	dalam Proses Penilaian BPK	-	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	dalam Proses Penilaian BPK	WDP	WTP
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	-	-	0%	-	7,0	7,5	-	7,6	-	7,6	7,9

Dari tabel di atas diketahui:

1. Indikator Kinerja Opini BPK.

Pada tahun 2017, belum ada Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata karena masih menunggu evaluasi temuan hasil pengawasan oleh BPK RI.

Sedangkan pada tahun 2016 Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata dinyatakan WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Dengan demikian, Opini BPK tahun 2017 belum dapat dibandingkan tahun 2016 dengan Opini BPK WDP. Diharapkan pada tahun 2017, Opini BPK Mengalami peningkatan dari WDP ke WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka Opini BPK tercapai WDP, belum mencapai target akhir RPJMD dengan opini BPK ditargetkan tercapai WTP.

Peningkatan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata dengan status WDP disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan pembenahan, terutama dalam penatausahaan aset dan keuangan daerah. Perkembangan hingga tahun 2014, penatausahaan keuangan telah sesuai dengan tuntutan regulasi, sementara pengelolaan aset daerah masih menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk berbenah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Strategis Ketiga Indikator Kinerja Satu sebesar Rp. 230.209.007 atau 99,60% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 231.145.000. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja Satu belum dapat disimpulkan karena output dan hasil kerja dari program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini masih dalam proses evaluasi oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Sedangkan pada tahun 2016, dilaksanakan dilaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang dengan pencapaian indeks kepuasan “B” dengan nilai rata-rata 7,6 dari target nilai rata-rata 8,0. Unsur-unsur yang disurvei meliputi 9 aspek dari 14 aspek menurut Keputusan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2013 antara lain: Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Pengaduan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi sampel Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 SKPD dengan item Survey sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut ini:

NO	NAMA SKPD	JENIS PELAYANAN	NILAI IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas PPO	Pengadaan Barang dan Jasa	6,8	B
2.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	TDP, TDG, TDI, Izin Reklame dan Apotik	6,7	B
3.	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kab. Lembata	Izin Gangguan/SITU	6,7	B
4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Izin Operasional Kendaraan Umum	6,9	B
5.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	SIUP	7,0	B
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum	IMB, IPL	8,7	A
7.	Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba	Rawat Inap, Poliklinik, KIA	7,4	B
8.	Puskesmas	Non Rawat, Poliklinik, KIA, Gizi	7,3	B
9.	PDAM Lewoleba	Layanan Air Bersih	7,3	B
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran	7,4	B
11	Sekretariat Daerah	Administrasi Umum	7,4	B
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Layanan Pendidikan	7,3	B
13	Kantor Camat	Administrasi Umum	7,5	B
14	Kantor Desa	Administrasi Umum	7,4	B
NILAI RATA-RATA			7,6	BAIK

Sumber: Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Lembata

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, pada tahun 2017 pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat diukur ka-

rena tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat tercapai 7,6, belum mencapai target RPJMD dengan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat ditargetkan tercapai 7,9.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di kabupaten embata dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Sampai dengan survey terhadap indeks kepuasan masyarakat tahun 2016, kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lembata dengan hasil cukup baik.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah:

1. Masih terdapat aparatur Pemerintah Kabupaten Lembata yang belum memahami dan menghayati semangat pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Fasilitas dan tenaga pelayanan publik, seperti bidan, perawat, dokter, belum menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.
3. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan publik.

Adapun solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lembata adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara agar berkompeten dan disiplin dalam melaksanakan pelayanan publik, seperti peningkatan kompetensi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah dan pengangkatan tenaga kesehatan yang masih berstatus pegawai honor menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai ASN. Demikian pula fasilitas dan tenaga pelayanan publik juga sedang ditingkatkan agar pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lembata benar-benar menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Strategis Ketiga Indikator Kinerja Dua tidak dapat diukur karena pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

IV. Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Kompetensi PNS yang Memenuhi Standar Minimal Diklat Jabatan Eselon IV, III, II dan Kompetensi Jabatan Fungsional.

Ukuran Keberhasilan misi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan sasaran Meningkatnya kompetensi PNS yang memenuhi standar minimal Diklat Jabatan Eselon IV, III, II dan kompetensi jabatan fungsional terlaksana melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang ditopang melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Diklat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur melalui diklat teknis dan fungsional. Program ini diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dalam jabatannya sesuai bidang penugasan yang diberikan. Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lembata. Adapun Pengukuran capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi PNS yang memenuhi standar minimal Diklat Jabatan Eselon IV, III, II dan kompetensi jabatan fungsional, dipaparkan dalam Tabel 3.4 berikut ini:

3.4 Tabel Pengukuran Capaian Kinerja sasaran Strategis Keempat

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2017			Realisasi terhadap RPJMD						Capaian Hingga Tahun 2017	Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	34,67%	50 Aparatur	50 Aparatur	100%	2%	3%	*	3%	12%	1,28 %	55,95%	87,9%

*) Tidak ada data

Dari tabel 3.4 diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya sebanyak 50 aparatur atau 100% dari target 50 aparatur.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya sebanyak 72 aparatur atau 144% dari target 50 aparatur.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya mengalami penurunan dari 144% atau 72 aparatur ke 100% atau 50 aparatur.

Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya mencapai 55,95% atau 327 aparatur, yang terdiri dari 34,67% atau 214 aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya pada awal RPJMD, 2% atau 12 aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya pada tahun 2012, 3% atau 18 aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya pada tahun 2013, 3% atau 18 aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya pada tahun 2013, 12% atau 72 aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya pada tahun 2016 dan 1,28% atau 7 aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya ditargetkan mencapai 87,9%.

Pelaksanaan bimtek/diklat kompetensi bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi pejabat struktural dalam menduduki jabatan. Kompetensi ASN yang ada selama ini dijadikan Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai dasar dalam penempatan jabatan dalam mutasi dan pelatihan pejabat struktural.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah minimnya anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek kompetensi, sehingga Pemerinah Kabupaten Lembata sulit mengejar target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011 - 2016. Selain itu, anggaran untuk pelaksanaan bimtek atau diklat kompetensi masih tersebar pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga Badan Kepegaaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Lembata sulit mengukur dan mengejar target yang telah ditetapkan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk merencanakan pelaksanaan PIM dengan terpusat pada Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur disertai dengan alokasi anggaran yang memadai guna mengoptimalkan pengukuran target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Keempat Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 230.624.028 atau 65,98% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 349.557.200. *(pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 1% atau Rp. 3.487.800 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 353.045.000)*. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 65,98%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil Daerah.

V. Sasaran Strategis Kelima : Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran sesuai dengan Kebutuhan Daerah.

Ukuran Keberhasilan Misi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan sasaran tertatanya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan daerah terlaksana melalui Program Penataan Organisasi Pemerintah Daerah, Program Penataan Tatalaksana Pemerintah Daerah, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kualitas Proses Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana, dan Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah. Program-program di atas bertujuan untuk menata organisasi satuan kerja perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk selanjutnya dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lembata. Program ini dilaksanakan secara terpadu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata dan Kecamatan. Adapun pengukuran capaian kinerja tertatanya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan daerah, tersaji pada Tabel 3.5 berikut ini:

3.5. Pengukuran Capaian Kinerja sasaran Strategis Kelima

N O	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda, Perbub dan Surat Keputusan Bupati) yang dihasilkan	560	270	589	218%	-	-	723	548	678	589	2538	2500
2.	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Di-publikasi	50	10	4	40%	6	6	6	5	6	4	83	250
3.	Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda,	40	50 Kegiatan	46 Kegiatan	92%	*	*	14	15	50	46	165	200

N O	INDIKATO R KINERJA	CA- PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REAL ISASI	% CAPA IAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
	Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda												
4.	Jumlah Kerjasama Daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda dengan Pihak Ketiga)	2	5 Ker- jasa- sa- ma	-	0%	*	1	1	-	-	-	4	3
5.	Jumlah Koordinasi dan Pengawasan badan Usaha Milik Daerah	2	4	4	100%	4	4	4	4	4	4	4	3
6.	Jumlah Perda/Perbub/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Perangkat Daerah	15	43	3	6,98%	2	11	12	-	24	3	67	15
7.	Jumlah Peraturan Bupati tentang Tataaksana	1	2	1	50%	2	2	2	2	-	1	10	5
8.	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3	4	3	75%	4	4	4	4	3	4	3	3
9.	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) & ABK	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
10.	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tataaksana	0	-	-	0%	-	-	2	1	-	-	3	2
11.	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawah	25	24	22	91,67 %	10	11	10	12	24	22	114	200
12.	Prosentase Anggota DPR yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.	50%	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*) Tidak ada data

Berdasarkan Tabel di atas diketahui:

1. Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda, Perbub dan Surat Keputusan Bupati) yang dihasilkan.
- Pada tahun 2017, jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan sebanyak 589 produk hukum daerah yang terdiri dari 10 Perda, 65 Perbub dan 515 Keputusan Bupati) atau 218% dari target 270 produk hukum daerah (10 Perda, 10 Perbub dan 250 Keputusan Bupati).

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan sebanyak 678 produk hukum daerah yang terdiri dari 9 Perda, 101 Perbup dan 568 Keputusan Bupati) atau 121% dari target 560 produk hukum daerah (10 Perda, 50 Perbup dan 500 Keputusan Bupati).

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017, jumlah produk hukum daerah mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya tuntutan kebutuhan daerah akan produk hukum untuk memayungi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 maka Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup dan Surat Keputusan Bupati) yang dihasilkan tercapai 3098 produk hukum daerah, yang terdiri dari 560 produk hukum daerah yang ditetapkan pada awal RPJMD, 723 produk hukum daerah yang ditetapkan pada 2014, 548 produk hukum daerah yang ditetapkan pada tahun 2015, 678 produk hukum daerah yang ditetapkan pada tahun 2016 dan 589 produk hukum daerah yang ditetapkan pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan ditargetkan tercapai 2500 produk hukum daerah.

Produk hukum daerah yang dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas formulasi Kebijakan Pemerintah Daerah (KPD) yang terkodefikasi secara legal dan formal. Produk Hukum Daerah Kabupaten Lembata yang telah ditetapkan membantu Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja Pertama adalah rendahnya inisiatif dari Perangkat Daerah dalam menjabarkan regulasi yang lebih tinggi yang berkaitan dengan bidangnya, sehingga banyak regulasi yang lebih tinggi belum dijabarkan sepenuhnya dalam regulasi-regulasi turunannya.

Strategi yang dibangun untuk mengatasi kendala di atas adalah dengan mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat menjabarkan regulasi yang lebih tinggi ke dalam regulasi

turunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja Satu sebesar Rp. 981.008.104 atau 95,27% dari total pagu sebesar Rp. 1.029.760.700. (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 20% atau Rp. 170.830.570 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 858.930.130*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 218%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 95,27%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Satu didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.

2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Dipublikasikan.

Pada tahun 2017, Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dipublikasi sebanyak 4 Peraturan Perundang-Undangan dari target 10 peraturan perundang-undangan. Keempat Peraturan Perundang-Undangan itu antara lain:

- 1) Peraturan Bupati Lembata Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman, Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan

- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Sedangkan pada tahun 2016, Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dipublikasi sebanyak 6 Peraturan Perundang-Undangan. Keenam Peraturan Perundang-Undangan itu antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengasan Batas Desa; dan
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dipublikasikan mengalami penurunan dari 6 Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2016 ke 4 Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2017. Jumlah peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat yang dijabarkan ke daerah Kabupaten Lembata hanya 4 regulasi tersebut di atas.

Jika realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dipublikasi sebanyak 83 peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 50 Peraturan Perundang-

Undangan yang dipublikasikan pada awal RPJMD, 6 Peraturan Perundang-Undangan dipublikasikan pada tahun 2012, 6 Peraturan Perundang-Undangan dipublikasikan pada tahun 2013, 6 Peraturan Perundang-Undangan dipublikasikan pada tahun 2014, 5 Peraturan Perundang-Undangan dipublikasikan pada tahun 2015, 6 Peraturan Perundang-Undangan dipublikasikan pada tahun 2016 dan 4 Peraturan Perundang-Undangan dipublikasikan pada tahun 2017, belum mencapai targeet Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi, sebanyak 29 Peraturan Perundang-Undangan, belum mencapai target akhir RPJMD dengan target capaian jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan sebanyak 250 Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Lembata dipublikasikan melalui media Warta Peraturan Perundang-Undangan dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Lembata, yang dipublikasikan setiap tahun. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Lembata tentang Regulasi atau produk hukum, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dipublikasikan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memperjuangkan kepentingannya.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah baik pihak Aparatur Sipil Negara maupun pihak masyarakat belum sepenuhnya dijadikan sebagai regulasi atau aturan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga masih banyak tugas dan kewajiban baik Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat berjalan di luar regulasi dan peratran yang berlaku.

Terhadap kendala ini, Pemerinah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan, agar diketahui dan dipahami oleh Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Tiga Indikator Kedua adalah sebesar Rp

109.461.500 atau 90,77% dari total pagu sebesar Rp. 120.590.000 (*Pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 7% atau Rp. 9.760.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 130.350.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 40%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 90,77%.

Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja Kedua didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum dengan kegiatan antara lain:

- 1) Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu; dan
- 2) Pembentukan Desa Sadar Hukum.
3. Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda.

Pada tahun 2017, jumlah koordinasi dan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda tercapai 46 kegiatan/paket/dokumen/bulan atau 92% dari target 50 kegiatan/paket/dokumen/bulan. Ke-46 kegiatan itu antara lain:

1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri tercapai 8 kali dari target 8 kali;
2. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya tercapai 22 kali dari target 22 kali;
3. Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 12 Bulan dari target 12 bulan;
4. Pengadaan fasilitas Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 3 paket dari target 4 paket;

5. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat tidak tercapai dari target 1 kali kegiatan;
6. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Pelayanan Umum tidak tercapai dari target 1 kali kegiatan;
7. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Daya Saing Daerah tidak tercapai dari target 1 kali kegiatan; dan
8. Penataan Taman Rumah Jabatan sebanyak 1 paket pekerjaan dari target 1 paket pekerjaan.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah koordinasi dan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda tercapai 50 kegiatan/paket/dokumen/bulan atau 100% dari target 50 kegiatan/paket/dokumen/bulan. Ke-50 kegiatan itu antara lain:

1. Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri tercapai 28 kali;
2. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya tercapai 1 tahun;
3. Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercapai 1 paket pekerjaan;
4. Pengadaan fasilitas Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 6 paket pekerjaan;
5. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat tercapai 1 kali untuk 3 bidang;
6. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Pelayanan Umum tercapai dari target 1 kali untuk 3 bidang;
7. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Daya Saing Daerah tercapai 1 kali untuk 2 bidang; dan
8. Pembangunan Pagar dan Pos jaga Rumah jabatan tercapai 1 paket pekerjaan;
9. Penataan Taman Rumah Jabatan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah tercapai 1 paket pekerjaan;

10. Pengingan Air, Listrik, Telepon Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tercapai 2 paket pekerjaan;
11. Pembangunan Rumah Genset Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tercapai 1 unit rumah genset; dan
12. Pengadan Genset Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tercapai 1 unit rumah genset.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemerintah Daerah mengalami penurunan dari 50 kegiatan/paket/dokumen/bulan pada tahun 2016 ke 46 kegiatan/paket/dokumen/bulan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah atau volume beberapa kegiatan dari tahun sebelumnya. Misalnya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri pada tahun 2017 sebanyak 28 kali, pada tahun 2017 kegiatan ini hanya terlaksana sebanyak 8 kali.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, maka jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda tercapai 165 kegiatan/paket/dokumen/bulan, belum mencapai target akhir RPJMD dengan Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda ditargetkan tercapai 300 kegiatan/paket/dokumen/bulan.

Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda dilaksanakan dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati di daerah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja ini adalah pelaksanaan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati belum optimal karena belum adanya konsistensi antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak ada ralisasi kinerja walaupun anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini terealisasi.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen untuk menjaga konsistensi antara perencanaan kinerja dan pelaksanaan kinerja sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kinerja.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Empat sebesar Rp 4.279.347.936 atau 92,00% dari total pagu sebesar Rp. 4.759.770.800 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 63% atau Rp. 1.844.075.450 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.915.695.350*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 92% dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 92,00%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Tiga didukung oleh pelaksanaan Program Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda, dengan kegiatan antara lain:

1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;

3. Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 4. Pengadaan Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 5. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 6. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Pelayanan Umum;
 7. Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Daya Saing Daerah; dan
 8. Penataan Taman Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
4. Jumlah Kerjasama Daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda dengan Pihak Ketiga).

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Sedangkan pada tahun 2016, juga tidak terdapat pelaksanaan kerja sama antara pemda dengan pemda dan pemda dengan pihak ketiga. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini masih dalam taraf penandatanganan MoU peningkatan ekonomi khusus untuk ketiga kabupaten ini (Alor, Lembata dan Flores Timur-KEK-ALTAKE).

Capaian kinerja tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 karena selama 2 tahun berturut-turut tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Jika realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka Jumlah Kerja Sama Daerah (antar pemda dan pemda dan antar pemda dengan pihak ketiga) tercapai 4 (empat) kerja sama, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah kerja sama daerah (antar Pemda dan antar Pemda dengan Pihak Ketiga) ditargetkan tercapai 3 kerja sama.

Manfaat yang terasa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja Ketiga adalah meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat lintas daerah.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah:

- Belum adanya sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan, baik secara intern maupun ekstern guna mendukung kerja sama antar daerah;
- Belum terbentuknya tim kerja sama antar daerah (TKKAD); dan
- Belum dilakukannya inventarisasi maupun kajian yang mendalam terkait obyek kerja sama sebagai dasar pertimbangan atau rekomendasi kelayakan pelaksanaan kerja sama.

Terhadap kendala ini, maka solusi yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Lembata adalah dengan cara menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah bahwa prosedur pelaksanaan kerjasama melalui 7 tahapan, yakni tahap persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian dan tahap pelaksanaan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp 1.553.600 atau 2,09% dari total pagu sebesar Rp. 74.391.600 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 100% atau Rp. 74.391.600 dari pada perubahan anggaran Tahun 2017*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 0% atau tidak tercapai, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 2,09%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Kerja Sama Daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda Dengan Pihak Ketiga) dengan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Dengan Pihak Ketiga.

5. Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

Pada tahun 2017, terlaksananya 4 kali koordinasi dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Koordinasi dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam pada dua perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan UD Purin Lewo.

Sedangkan pada tahun 2016, terlaksananya 4 kali koordinasi dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Koordinasi dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam pada dua perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan UD Purin Lewo.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka jumlah koordinasi dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan.

Tidak ada penambahan jumlah koordinasi dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah disebabkan karena anggaran yang dialokasikan hanya untuk pelaksanaan koordinasi terhadap dua perusahaan daerah sebanyak 4 kali dalam satu tahun anggaran. Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah maka Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah sebanyak 4 kali (Empat kali setiap tahun dari tahun pertama RPJMD sampai Tahun 2017), melampaui target akhir

RPJMD dengan Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah sebanyak 3 kali koordinasi dan pengawasan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah bermanfaat untuk penyampaian informasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PD Purin Lewo secara efisien dan transparan, serta adanya informasi kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah terkait.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketiga Indikator Empat adalah rekomendasi hasil koordinasi dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah tidak ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah terkesan tidak mengalami perkembangan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah adalah dengan melakukan pembenahan, baik dari sisi manajerial, maupun dari sisi finansial, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Tiga sebesar Rp 27.036.400 atau 86,88% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 31.118.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 19% atau Rp. 7.217.800 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 38.335.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 86,88%.

Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja Keempat didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah/BUMD.

6. Indikator Kinerja Jumlah Perda/Perbub/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2017 tersusunnya 3 Peraturan Bupati Lembata tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi dalam Uraian Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata. Ke-3 Keputusan Bupati itu antara lain:

1. Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi dalam Uraian Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata;
2. Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi dalam Uraian Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata; dan
3. Peraturan Bupati Lembata Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi dalam Uraian Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lembata;

Sedangkan pada tahun 2016 tersusunnya 24 buah Perda/Perbub (1 Perda, 23 Perbub) tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah Perda/Perbub/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Perangkat Daerah, dari 24 Perda/Perbub/Keputusan Bupati pada tahun 2016 menjadi 3 Perda/Perbub/Keputusan Bupati pada tahun 2017.

Penurunan jumlah Perda/Perbub/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan ini disebabkan karena minimnya SDM aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja hingga tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan tahun 2017 maka Jumlah Perda/Perbup/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Perangkat Daerah telah mencapai 67 Perda/Perbup/Keputusan Bupati yang terdiri dari 15 Perda/Perbup/Keputusan Bupati Mengenai Organisasi Perangkat Daerah tersusun pada awal RPJMD, 2 Perda/Perbup/Keputusan Bupati Mengenai Organisasi Perangkat Daerah tersusun pada tahun 2012, 11 Perda/Perbup/Keputusan Bupati Mengenai Organisasi Perangkat Daerah tersusun pada tahun 2013, 12 Perda/Perbup/Keputusan Bupati Mengenai Organisasi Perangkat Daerah tersusun pada tahun 2014, 24 Perda/Perbup/Keputusan Bupati Mengenai Organisasi Perangkat Daerah tersusun pada tahun 2016 dan 3 Perda/Perbup/Keputusan Bupati Mengenai Organisasi Perangkat Daerah tersusun pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan Jumlah Perda/Perbup/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 15 Perda/Perbup/SK Bupati mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan perangkat daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan aspek demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan masing-masing daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kabupaten Lembata, penataan perangkat daerah berdasarkan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, bertujuan untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah dibentuk belum sepenuhnya bekerja optimal karena masih dalam proses pembenahan, karena faktor penggabungan dan

penghilangan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, Pemerintah kabupaten Lembata terus berupaya untuk melakukan pembenahan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja Enam sebesar Rp. 126.631.720 atau 79,30% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 170.030.350. *(pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 9% atau Rp. 16.682.600 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 186.712.950)*. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 86,88%.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Kelima dan Indikator Kinerja Satu adalah Program Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dengan kegiatan:

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda tentang OPD; dan
 2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perbup tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Jabatan.
7. Jumlah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana.

Pada tahun 2017, tersusunnya 1 Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Pemerintah daerah dari target 2 Peraturan Bupati. Peraturan Bupati yang tersusun adalah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Singkatan Nama Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah kabupaten Lembata.

Sedangkan pada tahun 2016 tidak dilaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, maka Jumlah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Pemerintah Daerah melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana tercapai 9 Peraturan Bupati, yang terdiri dari 1 Peraturan Bupati tentang Tatalaksana yang tersusun pada awal RPJMD, 2 Peraturan Bupati tentang Tatalaksana yang tersusun pada tahun 2012, 2 Peraturan Bupati tentang Tatalaksana yang tersusun pada tahun 2013, 2 Peraturan Bupati tentang Tatalaksana yang tersusun pada tahun 2014 dan 2 Peraturan Bupati tentang Tatalaksana yang tersusun pada tahun 2015 dan 1 Peraturan Bupati tentang Tatalaksana yang tersusun pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Pemerintah Daerah ditargetkan tercapai 5 dokumen.

Peraturan Bupati tentang Tatalaksana ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin, baik disiplin waktu, maupun disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (SN) lingkup pemerinah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja ini adalah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana yang telah ditetapkan, kurang disosialisasikan kepada Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, sehingga banyak Aparatur Sipil Negara kurang mengerti dan memahami tentang Peraturan Bupati tentang Tatalaksana.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan sosialisasi regulasi terkait kepada Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Tujuh sebesar Rp 37.027.300 atau 93,43% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 39.629.600 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 5% atau Rp. 1.965.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 41.594.600*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 50%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 93,43%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Tiga didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana Pemerintah Daerah dengan kegiatan Penyusunan Perbup tentang Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

8. Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2017, tersusunnya 3 dokumen akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Dokumen Lakip Bupati Lembata Tahun 2017;
2. Dokumen Lakip Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata tahun 2017;
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017; dan

Sedangkan pada tahun 2016, tersusunnya 3 dokumen akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Lakip Bupati Lembata Tahun 2015;
2. LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata tahun 2015; dan
3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, tidak terjadi penambahan jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan jumlah dokumen akuntabilitas kinerja sebanyak 3 dokumen.

Hasil penilaian terhadap dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, terutama Dokumen LAKIP Bupati Lembata mengalami peningkatan Nilai setiap tahun. Walaupun masih berpredikat penilaian “C”, namun nilai yang diperoleh untuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata mengalami peningkatan nilai. Dari kelima komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja) penilaian yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengalami peningkatan sebagai berikut: tahun 2012, Predikat penilaian “C” dengan nilai hasil evaluasi 31,91, tahun 2013 predikat penilaian “C” dengan nilai hasil evaluasi 37,99, tahun 2014 predikat penilaian “C” dengan nilai hasil evaluasi 45,47 Dan tahun 2015 predikat penilaian “C” dengan nilai hasil evaluasi 45,61. Sedangkan Tahun 2016 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata masih dalam proses penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Diharapkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2016 mengalami peningkatan.

Jika realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 maka Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata berjumlah 3 dokumen atau 100%, mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata ditargetkan tercapai 3 dokumen.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh

penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini terletak pada lini perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya mengdopsi dokumen perencanaan jangka menengah daerah, sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata sulit diukur dan dievaluasi karena banyak program dan kegiatan yang direncanakan di luar program dan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan menengah daerah Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan pembenahan pada lini perencanaan program, dimana dokumen RPJMD Kabupaten Lembata dijadikan sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan kinerja.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Tiga sebesar Rp 95.088.559 atau 90,62% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 104.929.700. *(pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 20% atau Rp. 25.637.200 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 130.566.900)*. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 75%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 90,62%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Delapan didukung oleh pelaksanaan Program Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
- 2) Pendampingan LAKIP SKPD; dan
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

9. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja “Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).”

Sedangkan pada tahun 2016, juga tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja “Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).”

Selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja hanya disusun pada tahun 2014 untuk mengejar kuota formasi penerimaan CPNS. Sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja Pemerintah Kabupaten Lembata tidak disusun karena Pemerintah Kabupaten Lembata masih berkonsentrasi pada penataan perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Demi efektifitas dan efisiensi anggaran dan waktu, pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini untuk sementara ditunda pelaksanaannya hingga menunggu penataan perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Jika realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka jumlah dokumen Anjab dan ABK tercapai 1 dokumen dan belum mencapai target akhir RPJMD yaitu 3 dokumen.

10. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana.

Pada tahun 2017 tidak dilaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana.

Sedangkan pada tahun 2016 juga tidak dilaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana.

Capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2016 tidak dapat dibandingkan karena pada tahun 2016 – 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Jika realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana tercapai 3 dokumen (capaian tahun 2015), yang terdiri dari 2 dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana tersusun pada tahun 2014 dan 1 dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana tersusun pada tahun 2015, melampaui target akhir RPJMD dengan Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana ditargetkan tercapai 2 dokumen.

Adapun kegagalan yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena kekurangan SDM aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lembata adalah dengan menambah SDM aparatur, sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan tidak dapat diukur karena pada perubahan anggaran tahun 2017, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Lima dialihkan ke pelaksanaan program dan kegiatan lain. Walaupun demikian, dari sisi konsistensi dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017: pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak efisien karena pengalokasian anggaran untuk membiayai program dan kegiatan

ini tidak diikuti dengan perencanaan yang tepat dan terukur, sehingga alokasi anggaran murni sebesar Rp. 51.643.200 tidak dapat digunakan dan dialihkan ke pelaksanaan program dan kegiatan lain.

11. Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan.

Pada tahun 2017, Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan dilaksanakan sebanyak 27 kegiatan atau 100% dari target 24 kegiatan. Ke-27 kegiatan itu adalah:

1. LKPJ Kepala Desa pada 144 desa;
2. Pelantikan Penjabat Kepala Desa pada 51 Desa;
3. Pelantikan BPD Definitif/ PAW pada 56 Desa;
4. Pendampingan APBDES dan Perubahan pada 144 Desa;
5. Fasilitasi Pelaksanaan Program Anggur Merah pada 52 Desa;
6. Pembentukan BUMDES pada 38 Desa;
7. Pelaksanaan Lomba Desa pada 118 Desa;
8. Pelaksanaan Musrenbangdes pada 144 Desa;
9. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada 9 Kecamatan;
10. Penyusunan dan Pelaksanaan Perdes tentang Penertiban ternak pada 37 Desa;
11. Pelatihan Linmas unruk 39 Desa;
12. Koordinasin Keamanan hari raya nasional dan daerah pada 144 Desa;
13. Pencanaan Desa sebagai Kampung KB tingkat Kabupaten Lembata pada 1 Desa;
14. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa pada 17 Desa;
15. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada 32 Desa;
16. Pelatihan Paskibra pada 9 Kecamatan;
17. Pelaksanaan Pekan Olahraga Rakyat Lembata dan HUT RI sebanyak 9 Kecamatan;
18. Pelaksanaan HUT Otonomi Daerah/Gala Desa pada 9 Kecamatan;
19. Pelaksanaan Lomba Makanan Lokal pada 22 Desa;

20. Pembentukan FKUB tingkat Kecamatan pada 1 Desa;
21. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa pada 15 Desa;
dan
22. Rapat Koordinasi Tingkat Desa sebanyak 7 kali.

Sedangkan pada tahun 2016, Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan kegiatan. Jenis pembinaan pemerintahan wilayah bawahan dimasuk adalah:

23. LKPJ Kepala Desa pada 144 desa;
24. Pelantikan Penjabat Kepala Desa pada 14 Desa;
25. Pelantikan BPD PAW pada 20 Desa;
26. Pendampingan APBDes dan Perubahan pada 144 Desa;
27. Fasilitasi pelaksanaan Program Anggur Merah pada 34 Desa;
28. Pembentukan BUMDES pada 9 Desa;
29. Pelaksanaan Lomba Desa pada 144 Desa;
30. Pelaksanaan Musrenbangdes pada 144 Desa;
31. Pelaksanaan Musrenbangkec pada 9 Kecamatan;
32. Penetapan Peraturan Desa tentang Penertiban Ternak
sebanyak 13 Desa;
33. Pelatihan Linmas pada 144 Desa;
34. Keamanan Hari Raya Nasional dan Daerah pada 144 desa;
35. Pencanangan Desa sebagai Kampung KB tingkat Kabupaten
Lembata kampung KB pada 1 desa;
36. Sosialisasi Kamtibmas di Wilayah Kecamatan pada 144 desa;
37. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa sebanyak 32 kali;
38. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada 43 desa;
39. Pelatihan Paskibra pada 9 Kecamatan;
40. Pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Rakyat Lembata (Poral)
dan HUT RI pada 9 Kecamatan;
41. Lomba Makanan Lokal pada 22 Desa;
42. Perayaan Hari Bahari Nusantara Tingkat Nasional di Lembata
sebanyak 1 kegiatan;
43. Bimtek dan Diklat Kompetensi Aparatur pada 15 Aparatur
Desa;

44. Monitoring Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional pada 1 Desa;
45. Monitoring pelaksanaan Program Pamsimas pada 1 Desa; dan
46. Pembentukan FKUB tingkat Kecamatan pada 1 Desa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan mengalami penurunan dari 24 kegiatan pada tahun 2016 ke 22 kegiatan pada tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD 2011–2016 maka Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan terlaksana sebanyak 114 kegiatan, yang terdiri dari 25 kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan yang dilaksanakan pada awal RPJMD, 10 kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan yang dilaksanakan pada tahun 2012, 11 kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan yang dilaksanakan pada tahun 2013, 10 kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan yang dilaksanakan pada tahun 2014, 12 kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan yang dilaksanakan pada tahun 2015, 24 kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan 22 kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan dilaksanakan pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD, dengan jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan ditargetkan tercapai 200 Kegiatan.

Dampak yang dirasakan dengan adanya kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan pada Daerah Kabupaten Lembata adalah: kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa meningkat, tertatanya administrasi pemerintahan desa, serta meningkatnya pendapatan ekonomi produktif masyarakat desa.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah keterbatasan sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan menyebabkan banyak kegiatan pemberdayaan, penataan administrasi dan kecamatan dilaksanakan tidak optimal.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur kecamatan dan desa dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan optimal.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 11.414.393.419 atau 90% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp 12.682.230.152 (*pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran murni sebesar 12.682.230.152*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 91,67%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 90%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Enam didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Bawah dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah Bawahan.

12. Prosentase Anggota DPRD yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.

Pada tahun 2017, Prosentase Anggota DPRD yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD tercapai 100% atau terlaksananya diklat peningkatan kapasitas pada 25 anggota DPRD dari target 25 anggota DPRD.

Sedangkan pada tahun 2016, Prosentase Anggota DPRD yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD tercapai 100% atau terlaksananya diklat peningkatan kapasitas pada 25 anggota DPRD dari target 25 anggota DPRD.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase anggota DPRD yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD tidak mengalami penambahan. Hal ini disebabkan karena jumlah anggota DPRD yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD sebanyak 25 anggota DPRD pada tiap-tiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karna adanya pengalokasian anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD 2011–2016 maka Prosentase Anggota DPRD yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD tercapai 100% atau 25 Anggota DPRD dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun 2017, mencapai target akhir RPJMD, dengan Prosentase Anggota DPR yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD ditargetkan tercapai 100%.

Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Lembata dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Dengan adanya diklat peningkatan kapasitas, Anggota DPRD Kabupaten Lembata dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik, seperti tugas dan peran legislasi, tugas dan peran anggaran.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 2.400.865.144 atau 76,54% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp 3.136.900.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 15% atau Rp. 545.900.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 3.682.800.000*). Dari pagu dan realisasi

keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 76,54%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja Dua Belas didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Misi Kedua: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kualitas sumber daya manusia ditentukan dengan kualitas jasmaniah dan rohaniah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan menciptakan manusia Lembata yang berpendidikan, sehat, terpenuhi hak-hak dasarnya secara jasmaniah maupun rohaniah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Lembata Baru yang mandiri dan produktif, perlu dilakukan secara terus menerus. Peran pemerintah dalam kualitas sumber daya manusia tahun 2011–2016 adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kehidupan sosial budaya, pemuda dan olahraga serta penataan dan penegakkan hukum melalui akselerasi peningkatan mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, penguatan kearifan lokal, produktifitas sumber pendapatan dan harmonisasi sosial dan kerangka NKRI. Capaian Kinerja dalam rangka mewujudkan Misi Kedua: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Berkualitas.

Sasaran Strategis Pertama dalam mewujudkan Misi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 adalah Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Bentuk Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas tertuang dalam Indikator Kinerja yang termuat dalam Tabel 3.6 berikut ini.

3.6. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Misi Kedua Sasaran Strategis Pertama

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDI-SI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARG ET	REALI SASI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Sekolah Menerapkan Manajemen Pendidikan yang Baik	40%	446	446	100 %	*	*	95%	70%	86%	100%	100%	70%
2.	Prosentase Penduduk Usia Dini yang Mengenyam pendidikan Anak Usia Dini	30%	4716	4126	87,4 1%	*	*	50%	49%	77,5 3%	87,41 %	87,48%	50%
3.	Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	50%	37.071	27.045	73%	50%	55%	60%	65%	63%	73%	73%	70%
4.	Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Menengah	40%	8587	5002	58,2 5%	35%	40%	45%	53%	50%	-	50%	60%
5.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dalam Kondisi baik	82	50	50	100 %	12	42	14	12	15	50	227	97
6.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Dalam Kondisi baik	26	26	8	30,7 6%	2	1	2	2	9	8	50	85

*) Tidak ada data

Dari Tabel di atas diketahui:

1. Prosentase Sekolah Menerapkan Manajemen Pendidikan yang Baik.

Pada tahun 2017, prosentase sekolah menerapkan manajemen pendidikan yang baik tercapai 100% atau 446 sekolah dari target 446 sekolah.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase sekolah menerapkan manajemen pendidikan yang baik tercapai 86% atau 385 sekolah dari target 446 sekolah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase sekolah menerapkan manajemen pendidikan yang baik mengalami peningkatan dari 86% atau 385 sekolah ke 100% atau 446 sekolah.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya upaya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk manajemen pendidikan. Selain itu, partisipasi para *stakeholder*, seperti LSM dalam memperjuangkan manajemen pendidikan yang baik dengan jalan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Sekolah, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Evaluasi Diri Sekolah (EDS), Penyelenggaraan Gong Belajar dan Rapat Kerja Perencanaan Pendidikan Lintas Sektoral.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka prosentase sekolah yang telah menerapkan manajemen pendidikan yang baik tercapai 100% atau 446 sekolah, melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Lembata dengan target capaian 70% atau 312 sekolah yang menerapkan manajemen pendidikan yang baik dari total keseluruhan 100% atau 446 sekolah di wilayah Kabupaten Lembata.

Manfaat penerapan manajemen pendidikan yang baik agar terciptanya standar pelayanan pendidikan, pada meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Lembata. Hal ini Nampak dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung penerapan

manajemen pendidikan yang baik, seperti penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, supervisi akademik dan managerial pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kurangnya intensitas bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan manajemen pendidikan serta minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan manajemen pendidikan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melaksanakan program manajemen pelayanan pendidikan dengan tujuan pada meningkatkan penerapan manajemen pendidikan.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Satu sebesar Rp. 458.693.552 atau 95,39% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 480.876.800 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 4% atau Rp. 16.933.800 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 463.943.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 95,39%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;
- 2) Operasional UPTD PPO; dan
- 3) Supervisi Akademi dan Managerial pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan.

2. Prosentase Penduduk Usia Dini yang Mengenyam pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun 2017, prosentase penduduk usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini tercapai 87,48% atau 4126 anak usia dini dari target 4716 anak usia dini.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase penduduk usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini tercapai 77,53% atau 3582 anak usia dini dari target 4620 anak usia dini.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase penduduk usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan dari 77,53% atau 3582 penduduk usia dini ke 87,41% atau 4126 penduduk usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, termasuk anak usia dini.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, prosentase penduduk usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini tercapai 87,48% atau 4126 anak usia dini, melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Lembata dengan prosentase penduduk usia dini yang mengenyam pendidikan anak usia dini ditargetkan tercapai 50% atau 2358 penduduk usia dini dari total keseluruhan 100% atau 4716 penduduk usia dini.

Manfaat dari Pendidikan Anak Usia Dini agar anak-anak bisa dibimbing pada mengenal ilmu pengetahuan dengan metode pendidikan anak usia dini dengan tujuan untuk mempersiapkan diri ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

Adapun Kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah bahwa masyarakat belum sungguh merasakan akan pentingnya pendidikan usia dini bagi anak, sehingga masih ada penduduk usia dini yang tidak mengenyam pendidikan anak usia dini.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada meningkatkan angka partisipasi penduduk usia dini dalam mengenyam pendidikan anak usia dini pada memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini agar semua anak usia dini berhak memperoleh pendidikan yang layak.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Dua sebesar Rp. 263.393.800 atau 96,20% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 273.786.700 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 54% atau Rp. 315.225.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 589.012.200*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 87,41%, realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 96,20%.

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Dua didukung oleh pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan:

- 1) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD; dan
 - 4) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tingkat kabupaten.
3. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pada tahun 2017, prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun tercapai 73% atau 27.045 orang dari terget 100% atau 37.071 penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun tercapai 63% atau 23.382 orang dari target 100% atau 37.071 penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mengalami peningkatan dari 63% menjadi 73%.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, termasuk anak usia pendidikan dasar sembilan tahun.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tercapai 73% atau 27.045 penduduk usia sekolah yang mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Lembata, dengan prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun tercapai 70% atau 25.949 penduduk usia sekolah yang mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lembata sebagai bekal pada melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah; *pertama*: Masih berkembangnya cara pandang bahwa penghidupan yang layak tidak semestinya diperoleh dari jalur pendidikan; *kedua*: Kurangnya kepedulian orang terhadap anak pada mengenyam pendidikan dasar Sembilan tahun dan *ketiga*: Jarak jangkauan antara sekolah dan pemukiman yang begitu jauh.

Solusi yang tengah diambil adalah peningkatan kerja sama antara orang tua siswa dan guru pada pro aktif dalam menekan

angka putus sekolah, khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun dengan meningkatkan partisipasi anak dalam mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Tiga sebesar Rp. 696.151.124 atau 98,17% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 709.120.325. (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 14% atau Rp. 28.732.775 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 680.387.550*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait baru tercapai 73%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 98,17%.

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Tiga didukung oleh pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar;
 - 2) Penyediaan Biaya Operasional DAK Bidang Pendidikan;
 - 3) Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional;
 - 4) Seleksi Olympiade MIPA SD/MI;
 - 5) Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - 6) Pendampingan Try Out Mata Pelajaran.
4. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Menengah.

Pada tahun 2017 prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan menengah tidak tercapai karena urusan pendidikan, khususnya pendidikan menengah telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan pada tahun 2016 prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan menengah tercapai 50% atau

4307 orang dari target 100% atau 8587 penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan menengah.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, prosentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan menengah tercapai 50% (capaian tahun 2016), belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Lembata dengan Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Menengah ditargetkan tercapai 60%.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Empat tidak dapat diukur karena tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

5. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dalam Kondisi Baik.

Pada tahun 2017, jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik tercapai 50 sarana dan prasarana atau 100% dari target 50 Sarana dan sarana pendidikan dasar sembilan tahun.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik tercapai 15 sarana dan prasarana atau 73,50% dari target 20 sarana dan sarana pendidikan dasar sembilan tahun.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017, jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 15 sarana dan prasarana pendidikan menjadi 50 sarana dan prasarana pendidikan.

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan ini disebabkan karena adanya bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat ke Daerah Ka-

bupaten Lembata. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerinah Pusat dan Pemerinah Kabupaten Lembata berkomitmen pada meningkatkan mutu pendidikan di daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik tercapai 227 sarana dan prasarana, yang terdiri dari 82 sarana dan prasarana pendidikan dasar Sembilan tahun dalam kondisi baik pada awal RPJMD, 12 sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik pada tahun 2012, 42 sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik pada tahun 2013, 14 sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik pada tahun 2014, 12 sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik pada tahun 2015, 15 sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik pada tahun 2016 dan 50 sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD, dengan jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun dalam kondisi baik ditargetkan tercapai 97 sarana dan prasarana pendidikan.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan pendidikan. Di wilayah Kabupaten Lembata, kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi anak didik, pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan dasar Sembilan tahun semakin meningkat karena bertambahnya jumlah peserta didik, sementara anggaran yang dialokasikan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum mencu-

kupi tuntutan kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang layak.

Dengan adanya kendala ini, solusi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lembata adalah melakukan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar yang sudah tidak layak digunakan, walaupun belum semua sarana dan prasarana pendidikan dasar Sembilan tahun belum seluruhnya direhabilitasi.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.340.344.450 atau 98,78% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.356.901.879 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 38% atau Rp. 820.400.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.177.301.879*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 58,25%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 98,78%.

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Lima didukung oleh pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pembangunan Ruang Kelas;
 - 2) Pembangunan Perpustakaan sekolah;
 - 3) Pengadaan Meubelur sekolah;
 - 4) Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Asrama Siswa; dan
 - 5) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang kelas.
6. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Dalam Kondisi Baik.

Pada tahun 2017, jumlah sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik tercapai 8 sarana dan prasarana atau 30,76% dari target 26 sarana dan prasarana.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik tercapai 9 sarana dan prasarana atau 34,61% dari target 26 sarana dan prasarana.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017, jumlah sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 9 sarana dan prasarana menjadi 8 sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik.

Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RJDM sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, jumlah sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik tercapai 50 sarana dan prasarana, belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Lembata, yaitu sarana dan prasarana prasarana pendidikan menengah.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pendidikan menengah merupakan salah satu faktor penting dalam memajukan pendidikan. Di wilayah Kabupaten Lembata, kondisi sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi anak didik, pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan menengah semakin meningkat karena bertambahnya jumlah peserta didik, sementara anggaran yang dialokasikan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum mencukupi tuntutan kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang layak.

Dengan adanya kendala ini, solusi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lembata adalah melakukan rehabilitasi

terhadap sarana dan prasarana pendidikan menengah yang sudah tidak layak digunakan, walaupun belum semua sarana dan prasarana pendidikan dasar belum seluruhnya direhabilitasi.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Enam sebesar Rp. 1.340.344.450 atau 98,78% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.356.901.879 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 38% atau Rp. 820.400.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.177.301.879*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 30,76%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 98,78%.

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Asrama Siswa;
- 2) Pembangunan Ruangan Kelas;
- 3) Pembangunan Laboratorium Sekolah;
- 4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
- 5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa;
- 6) Pengadaan Meubeler Sekolah; dan
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

II. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sasaran Strategis Kedua dalam mewujudkan Misi Kedua adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011–2016 Pemerintah Kabupaten Lembata adalah Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pencapaian Sasaran Strategis ini

didukung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Bentuk peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan tertuang dalam Indikator Kinerja yang termuat dalam Tabel 3.7 berikut ini.

3.7. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDI- SI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Syarat Kompetensi	25	142	50	35,2 1%	*	*	543	630	1192	50	2440	859 (51,2%)

*) Tidak ada data

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, jumlah pendidik yang memenuhi standar kompetensi 50 pendidik atau 35,21% dari target 142 pendidik.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah pendidik yang memenuhi standar kompetensi tercapai 1192 pendidik.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka jumlah pendidik yang memenuhi syarat kompetensi pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 1192 pendidik ke 50 pendidik.

Penurunan jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi disebabkan karena sistem pemberkasan banyak guru tidak memenuhi syarat, Penilaian pada standar Uji Kompetensi Guru (UKG) tidak memenuhi standar, akibat jarak tempuh guru pada daerah-daerah terpencil membuat banyak mengalami keterlambatan.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah pendidik yang memenuhi syarat kompetensi tercapai 2440 pendidik, yang terdiri dari 25 pendidik yang memenuhi syarat kompetensi pada awal RPJMD, 534 pendidik yang memenuhi syarat kompetensi pada tahun 2014, 630 pendidik yang memenuhi syarat kompetensi pada tahun 2015, 1192 pendidik yang memenuhi syarat kompetensi pada tahun 2016 dan 50 pendidik yang memenuhi syarat kompetensi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah pendidik yang memenuhi syarat kompetensi ditargetkan tercapai 859 pendidik.

Adapun manfaat dari Pendidikan Berbasis Kompetensi bagi Guru adalah pada meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, serta meningkatkan kemampuan khusus atau spesifikasi guru di dibidang pendidikan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja ini adalah bahwa banyak guru belum memiliki standar kompetensi.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan intensitas kegiatan pelatihan dan bimtek atau diklat bagi guru untuk meningkatkan kompetensi guru.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 6.250.847.477,- atau 99,67% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 6.271.590.150. *(pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 12% atau Rp. 842.739.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 7.144.329.150)*. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya tercapai 35,12%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 99,67%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;
- 2) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik;
- 5) Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- 6) Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN; dan
- 7) Penetapan Angka Kredit Guru.

III. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Pendidikan.

Sasaran Strategis Ketiga yaitu “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Pendidikan” diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Jumlah Perpustakaan Desa. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Secara terperinci, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini termuat dalam Tabel 3.8 berikut ini.

3.8. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGE T AWAL	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Perpustakaa n Desa	2 Perpust akaan	7	46	657%	4	8	6	15	33	46	112 Perpustak aan	15 Perpusta kaan

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, Jumlah Perpustakaan Desa tercapai 46 Perpustakaan Desa dari target 7 Perpustakaan Desa yang akan dibangun. Ke-46 Perpustakaan itu antara lain:

KECAMATAN	NAMA PERPUSTAKAAN DESA	KECAMATAN	NAMA PERPUSTAKAAN DESA
Nubatukan	1. Baolangu		32. Baobalag
	2. Bour		33. Idalolong
	3. Udak Melomata		34. Riabao
Ile Ape	4. Tagawiti	Wulandoni	35. Alap Atadei
	5. Tanjung Batu		36. Pantai Harapan
	6. Muruona		37. Lelata
	7. Palilolon		37. Wulandoni
	8. Riangbao		39. Posiwatu
	9. Todanara		40. Tapobali
Ile Ape Timur	10. Waimatan	Omesuri	41. Aramengi
	11. Lamagute		42. Mahal
Lebatukan	12. Hadakewa		43. Wailolong
	13. Lewoeleng		44. Hoelea II
Atadei	14. Lerahinga		45. Meluwiting
	15. Lusilame		46. Mahal I
	16. Tubukrajan		
	17. Nubaatalojo		

Buyasuri	18.	Tubung walang
	19.	Panama
	20.	Loyobohor
	21.	Leuburi
	22.	Rumang
	23.	Atuwalupang
	24.	Buriwutun
	25.	Bean
	26.	Bedihading II
	27.	Bareng
	28.	Kaohua
Nagawutung	29.	Lusi Duawutung
	30.	Duawutung
	31.	Penikeneq
	32.	Baobalag



“Aktivitas masyarakat Desa di Perpustakaan TAAN TOI
KODA (Desa Kolontobo-Kec. Ile Ape)”

Sumber: Dinas Kearsipandan Perpustakaan Kabupaten Lembata

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah perpustakaan desa tercapai 33 Perpustakaan dari target 13 perpustakaan desa yang dikembangkan. Ke-33 Perpustakaan itu antara lain: Perpustakaan Desa Paubokol, Perpustakaan Desa Waijarang, Perpustakaan Desa Pada, Perpustakaan Desa Belobatang, Perpustakaan Desa Seranggoran, Perpustakaan Desa Waienga, Perpustakaan Desa Baopana, Perpustakaan Desa Beutaran, Perpustakaan Desa Kolipadan, Perpustakaan Desa Dulitukan, Perpustakaan Desa Petuntawa, Perpustakaan Desa Kolontobo, Perpustakaan Desa Laranwutun, Taman Bacaan Papyrus, Desa Kolontobo, Perpustakaan Desa Lamawolo, Perpustakaan Desa Lamaau, Perpustakaan Desa Normal, Perpustakaan Desa Roma, Perpustakaan Desa Lebewala, Perpustakaan Desa Mampir, Perpustakaan Desa Panama, Perpustakaan Desa Umaleu, Perpustakaan Desa Benihading, Perpustakaan Desa Atulaleng, Perpustakaan Desa Ile Kimok, Perpustakaan Desa Atawolo, Perpustakaan Desa Babukerong, Perpustakaan Desa Ileboli, Perpustakaan Desa Liwulagang, Perpustakaan Desa Lamalera A, Perpustakaan Desa Lamalera B, Perpustakaan Desa Atakera dan Perpustakaan Desa Belobao.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka jumlah perpustakaan desa pada tahun 2017 mengalami penambahan dari 33 perpustakaan ke perpustakaan 46 perpustakaan desa.

Keberhasilan ini disebabkan karena adanya komitmen bersama antara Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lembata untuk menjadikan Kabupaten Lembata sebagai “Kabupaten Literasi” sehingga hampir sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Lembata memiliki Perpustakaan Desa, walaupun masih dalam kondisi yang sederhana.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah perpustakaan desa telah mencapai 122 perpustakaan, yang terdiri dari 2 perpustakaan desa yang dibangun para awal RPJMD, 4 perpustakaan desa yang dibangun pada tahun 2012, 8 perpustakaan desa yang dibangun pada tahun 2013, 6 perpustakaan desa yang dibangun pada tahun 2014, 15 perpustakaan desa yang dibangun pada tahun 2015, 33 perpustakaan desa yang dibangun pada tahun 2016 dan 46 perpustakaan desa yang dibangun pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Lembata, dengan jumlah perpustakaan desa ditargetkan tercapai 15 Perpustakaan.

Manfaat yang sudah dirasakan masyarakat desa Kabupaten Lembata dengan adanya Perpustakaan Desa adalah pada meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama pengetahuan tentang cara bercocok tanam, cara beternak dan cara bertani.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah sarana gedung serta sarana dan prasarana perpustakaan desa masih sangat memprihatinkan serta minimnya pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan desa.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun mendatang mengalokasikan anggaran pada pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan desa dan mengikutsertakan masyarakat desa dalam bimtek atau pelatihan pengelolaan perpustakaan desa.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 109.990.300 atau 58,03% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 189.529.740 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 71%*

atau Rp. 463.017.360 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 652.547.100). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 657%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 58,03%.

Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan Kegiatan antara lain:

- 1. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan masyarakat;
- 2. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah; dan
- 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

IV. Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Sasaran Strategis Keempat yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan. Secara terperinci, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini termuat dalam Tabel 3.9 berikut ini.

3.9. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keempat

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2016			Realisasi						Capaian Hingga Tahun 2017	Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS/Puskes	80%	20.000 Pcs	18.750 Pcs	93,75 %	35%	40%	70%	67%	90%	93,75 %	93,75%	90%

mas/Pustu/Puskesmas													
2. Frekuensi Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar	4 Kali	12	12	100%	12	12	12	12	12	12	12	12 Kali	12 Kali
3. Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	6 Kali	12	11	92%	12	12	12	11	11	11	11	11 Kali	12 Kali
4. Jumlah Kasus AKB/AKI	160 Kasus	36	32	89%	26	20	38	41	36	32	32	kasus	128 Kasus

Dari Tabel di atas diketahui:

1. Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu/Puskesmas.

Pada tahun 2017, prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu/Puskesmas tercapai 93,75% atau 18.750 Pcs dari target 100% atau 20.000 Pcs.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu/Puskesmas tercapai 90% atau 18.000 Pcs dari target 100% atau 20.000 Pcs.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya upaya Pemerintah Kabupaten Lembata dalam memajukan kualitas pelayanan kesehatan di Daerah Kabupaten Lembata.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu/Puskesmas pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 690% menjadi 93,75%.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu/Puskesmas tercapai 93%, melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Lembata dengan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu/Puskesmas ditargetkan tercapai 90%.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena persediaan obat dan perbekalan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lembata, sehingga masih ada pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit lain.

Terhadap kendala ini, Pemerinah Kabupaten Lembata telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan obat dan perbekalan kesehatan untuk menekan masalah pasien dirujuk ke Rumah Sakit lain karena alasan keterbatasan obat dan perbekalan kesehatan di daerah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 2.001.390.391 atau 90,09% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.221.446.808 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 2% atau Rp. 50.599.492 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.272.046.300*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 93,75%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 90,09%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - 2) Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
2. Frekuensi Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar.

Pada tahun 2017, frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar dilakukan sebanyak 12 kali atau setiap bulan dalam

setahun dari target 12 kali. Bentuk pengawasan obat dan makanan yang beredar berupa inspeksi dan monitoring terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Kabupaten Lembata.

Sedangkan pada tahun 2016, frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar dilakukan sebanyak 12 kali atau setiap bulan dalam setahun.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka pada tahun 2017 frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar tidak mengalami perubahan, karena kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011– 2016, maka frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar sudah mencapai target akhir RPJMD, yaitu 12 kali dan target akhir RPJMD dengan frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar tercapai 12 kali dari target 12 kali pengawasan peredaran obat dan makanan.

Manfaat dari pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat dan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi (kadaluarsa). Pengawasan terhadap obat dan makanan ini efektif karena tidak ada kasus tentang keracunan obat dan makanan kadaluarsa di Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum adanya tindakan atau sanksi yang tegas kepada para pengusaha obat dan makanan sehingga masih terdapat obat golongan tertentu yang sebenarnya tidak beredar bebas tetapi beredar luas di kalangan masyarakat, atau masih ada makanan kadaluarsa yang beredar di kalangan masyarakat.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk menyita obat dan makanan yang tidak layak beredar, serta mencabut ijin usaha bagi pengusaha obat dan ma-

nan apabila terbukti mengedarkan obat dan makanan yang tidak layak beredar.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 72.234.500 atau 58,99% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 122.460.500 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 18% atau Rp. 26.936.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 149.397.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 59%.

Pencapaian Sasaran Strategis Keempat Indikator Kinerja Dua didukung oleh pelaksanaan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Makanan di Bidang Obat dan Makanan; dan
 - 2) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
3. Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

Pada tahun 2017 frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar dilakukan sebanyak 11 kali dari target 12 kali kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Sedangkan pada tahun 2016 frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar dilakukan sebanyak 11 kali dari target 12 kali.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka pada tahun 2017 frekuensi pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dilaksanakan sebanyak 11 kali.

Frekuensi pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan tidak mencapai target pada tahun 2016 dan tahun 2017 disebabkan karena terjadi penurunan anggaran pada perubahan angga-

ran tahun 2017 yang menyebabkan frekuensi pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dilaksanakan 11 kali, tidak sesuai target 12 kali setahun.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu 11 kali, sementara target akhir RPJMD, frekuensi pengawasan obat dan makanan yang beredar ditargetkan terlaksana 12 kali.

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dilaksanakan dengan tujuan pada mengendalikan keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga, sehingga makanan hasil produksi rumah tangga layak beredar dan layak dikonsumsi masyarakat di wilayah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah sarana dan prasarana pengujian kadar kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga belum memadai.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya pada mengadakan sarana dan prasarana pengujian kadar kesehatan makanan yang lebih memadai sehingga pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan betul-betul efektif dan efisien.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 35.545.000 atau 89,23% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 39.834.000. *(pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 5% atau Rp. 2.253.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 42.087.000)*. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 92%, dan realisasi keuangan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 89,23%.

Pencapaian Sasaran Strategis Keempat Indikator Kinerja Dua didukung oleh pelaksanaan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil Produksi Rumah Tangga.

4. Jumlah Kasus Angka Kematian Bayi (AKB) /Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada tahun 2017, angka kematian bayi/kasus angka kematian ibu sebanyak 32 kasus, yang terdiri dari 3 kasus kematian ibu dari 2146 kelahiran hidup atau 139,79/100.000 KH dan 29 kasus kematian bayi dari 2146 kelahiran hidup atau 13,51/1000 KH.

Sedangkan pada tahun 2016, angka kematian bayi/kasus angka kematian ibu sebanyak 36 kasus, yang terdiri dari 4 kasus kematian ibu dan 32 kasus kematian bayi dari target 36 kasus AKI/AKB.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka pada tahun 2017 jumlah kasus AKB/AKI mengalami menurun dari 36 kasus pada tahun 2016 ke 32 kasus pada tahun 2017.

Penurunan kasus angka kematian bayi dan angka kematian ibu di wilayah Kabupaten Lembata disebabkan karena adanya upaya pemerintah Kabupaten Lembata untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah kasus AKB/AKI mencapai 32 kasus, melampaui target akhir RPJMD, dengan jumlah kasus AKB dan AKI ditargetkan tercapai 128 kasus.

Penurunan kasus kematian bayi dan kasus kematian ibu merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menangani kasus kematian bayi dan kasus kematian ibu. Komitmen ini nampak dalam upaya Pemerintah Kabupaten Lembata da-

lam program tugas belajar bagi tenaga bidan, baik pada puskesmas maupun rumah sakit, pelaksanaan MoU dengan Universitas Udayana adalah pada mendapatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini tenaga dokter untuk peningkatan mutu pelayanan RSUD Lewoleba, penambahan sarana dan prasarana persalinan pada rumah sakit dan puskesmas serta mewajibkan semua ibu hamil pada melahirkan pada fasilitas kesehatan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih banyak ibu hamil yang belum melahirkan pada fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena letak geografis dan jarak jangkauan dari rumah ke fasilitas kesehatan sulit dijangkau sehingga banyak ibu hamil memilih bersalin di rumah daripada harus melahirkan pada fasilitas kesehatan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sehingga bekerja secara profesional dan bekerja sampai ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, penambahan sarana dan fasilitas kesehatan di desa menyebabkan AKB dan AKI menurun drastis. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, AKB dan AKI dapat ditekan hingga nol kasus.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.017.933.700 atau 39,26% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.592.662.600. *(pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 4% atau Rp. 109.001.100 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.701.663.700)*. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 89%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 39,26%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dengan Keluarga Kurang Mampu;
- 2) Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu; dan
- 3) Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu.

V. Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan.

Sasaran Strategis Kelima yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 adalah Meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Berikut, pengukuran kinerja Sasaran Strategis Kelima dipaparkan dalam Tabel 3.10 berikut ini.

1.10. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kelima

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			REALISASI TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah SOP Pelayanan Kesehatan	0	8	8	100%	2	2	-	1	1	8	14	8
2.	Jumlah Lembaga Kemitraan	2	1	2	200%	1	-	-	-	-	2	3	2

Dari Tabel di atas diketahui:

- 1. Jumlah SOP Pelayanan Kesehatan.

Pada tahun 2017, disusunnya 8 SOP Pelayanan Kesehatan atau 100% dari target 8 SOP. Ke-8 SOP itu antara lain:

NO	NAMA - NAMA SOP/SPO
1	ASESMEN INFORMASI PASIEN RAWAT JALAN
2	ASESMEN RAWAT JALAN
3	ASESMEN RAWAT INAP
4	ASESMEN AWAL MEDIS IGD
5	ASESMEN PASIEN PRA OPERASI
6	KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN ASESMEN PASIEN

7	ASESMEN PRA BEDAH
8	ASESMEN GIZI PASIEN

Sedangkan pada tahun 2016, disusunnya 1 SOP Pelayanan Kesehatan. SOP Pelayanan Kesehatan itu adalah SOP Pengelolaan Obat-Obat Lasa.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah SOP pelayanan kesehatan mengalami penambahan dari 1 SOP KE 8 SOP. Penambahan jumlah SOP pelayanan kesehatan ini disebabkan karena pada tahun 2017, Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pembenahan pada segi fisik dan administrasi, dalam rangka mengejar akreditasi rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka Jumlah SOP Pelayanan Kesehatan tercapai 14 SOP Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari 2 SOP Pelayanan Kesehatan tersusun pada tahun 2012, 2 SOP Pelayanan Kesehatan tersusun pada tahun 2013, 1 SOP Pelayanan Kesehatan tersusun pada tahun 2015, 1 SOP Pelayanan Kesehatan tersusun pada tahun 2016 dan 8 SOP Pelayanan Kesehatan tersusun pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD, dengan jumlah SOP pelayan kesehatan ditargetkan tercapai 8 SOP.

SOP Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba disusun sebagai standar bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya survey indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan umum Pemerinah Kabupaten Lembata pada tahun 2016, dimana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba memperoleh nilia indeks kepuasan 7,4 dengan kategori mutu pelayanan “Baik.”

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum adanya evaluasi secara berkala SOP Pelayanan Keseha lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun-tahun mendatang akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap SOP Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp 3.087.100,- atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 3.087.100 (*pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 3.087.100*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dengan Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

2. Jumlah Lembaga Kemitraan.

Pada tahun 2017, dilaksanakan 2 jenis kerjasama dengan lembaga kemitraan, yaitu kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan kerjasama dengan Universitas Udayana dalam hal pengiriman dokter residen pada peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Sedangkan pada tahun 2016, tidak ada lembaga kemitraan yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam bidang kesehatan.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena tidak ada lembaga kemitraan yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam bidang kesehatan.

Terjadinya penambahan jumlah lembaga mitra pada bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam bidang kese-

hatan disebabkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lembata.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah lembaga kemitraan tercapai 3 lembaga mitra, yaitu AIPMNH yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, BPJS Kesehatan dan Universitas Udayana, melampaui target akhir RPJMD, dengan jumlah lembaga mitra ditargetkan tercapai 2 lembaga.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan lembaga mitra dalam bidang pelayanan kesehatan bertujuan pada meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Wujud konkrit dari kerjasama kemitraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lembata nampak dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan dengan program tugas belajar yang didanai oleh AIPMNH, peningkatan tenaga dokter residen pada meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Lewoleba serta peningkatan jaminan kesehatan masyarakat melalui program BPJS.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kerja sama kemitraan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, seperti masih kurangnya tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter untuk menangani masalah kesehatan di Kabupaten Lembata serta kualitas tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat masih memprihatinkan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata dan pihak lembaga mitra terus melakukan pembenahan dengan cara penambahan tenaga dokter serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan (bidan dan perawat) melalui program tugas belajar dan ijin belajar.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp

5.540.032.664 atau 91,27% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 6.069.984.640 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 7% atau Rp. 439.310.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 6.509.294.640*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 200%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 91,27%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulan masalah kesehatan.

VI. Sasaran Strategis Keenam : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan.

Sasaran Strategis Keenam yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Capaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan. Berikut pengukuran kinerja sasaran Strategis Keenam yang dipaparkan dalam Tabel 3.11 berikut ini.

1.11. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keenam

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Gizi Buruk	1,83%	1,0%	1,50 %	71,6 6%	*	*	1,14%	1,28%	0,37 %	1,50 %	1,50%	0,86%
2.	Jumlah Kasus AKB/AKI	160 Kasus	32	36	111 %	26	20	38	41	36	32	32	128 Kasus
3.	Prosentase Desa/Kelurahan STBM	31%	151 desa /Kel	17 desa /kel	11%	3,97%	4,63 %	4,63%	5,29%	19%	11%	80%	100%
4.	Prosentase RTM yang memperoleh Jamkesmas/ Jamkesda/J	38%	650 RTM	625R TM	96,1 5%	6%/	9%	7%	6%	10%	11%	86%	52%

ampersal/R
ujukan

*) Tidak ada data

Dari Tabel di atas diketahui:

1. Prosentase Penurunan Gizi Buruk.

Pada tahun 2017, prosentase penurunan kasus gizi buruk tercapai 1,5% atau 126 balita gizi buruk dari target 1% atau 82 balita gizi buruk dari total keseluruhan 8156 balita.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase penurunan gizi buruk tercapai 0,37% atau 42 kasus gizi buruk dari total keseluruhan 11.099 balita.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka prosentase gizi buruk pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 0,37% atau 42 balita gizi buruk pada tahun 2016 menjadi 1,5% atau 126 balita gizi buruk pada tahun 2017.

Peningkatan prosentase gizi buruk di Kabupaten Lembata disebabkan karena kurangnya pendampingan terhadap ibu dan keluarga dengan kasus-kasus kelainan gizi, serta rendahnya informasi tentang jenis makanan bergizi dan cara pengelolaannya sehingga menyebabkan rendahnya minat konsumsi pada balita.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase gizi buruk belum mencapai target akhir RPJMD, dengan prosentase penurunan gizi buruk 1,5% atau 126 balita gizi buruk dari 8156 balita di Kabupaten Lembata pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJM, dengan prosentase penurunan gizi buruk ditargetkan tercapai 0,86%.

Adapun manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kesehatan (*Human Development Indeks*) di Kabupaten Lembata dan pertumbuhan balita optimal karena tidak mudah terkena penyakit.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kurangnya pemberian makanan tambahan pada

balita kurang gizi dan ibu hamil. Selain itu, asupan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan balita juga tidak mengandung energi protein (KEP) dan energi kronis (KEK).

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada memberikan makanan tambahan pada balita kurang gizi dan ibu hamil. Selain itu, asupan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan balita mengandung energi protein (KEP) dan energi kronis (KEK) melalui kegiatan Pemberian Tambahan Makanan yang terselenggarakan pada tiap-tiap posyandu di wilayah Kabupaten Lembata. Diharapkan, dengan adanya metode ini, prosentase gizi buruk di Kabupaten Lembata ditekan hingga 0%.

Penggunaan sumber daya keuangan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 728.874.200 atau 73,01% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 998.365.400 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 14% atau Rp. 121.858.400 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 876.507.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 71,66%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 73,01%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi;
- 2) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin; dan
- 3) Pemberdayaan Masyarakat pada Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.

2. Jumlah Kasus Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu.

Pada tahun 2017, angka kematian bayi/kasus angka kematian ibu sebanyak 32 kasus, yang terdiri dari 4 kasus kematian ibu dari 2146 kelahiran hidup atau 139,79/100.000 KH dan 29 kasus kematian bayi dari 2146 kelahiran hidup atau 13,51/1000 KH.

Sedangkan pada tahun 2016, angka kematian bayi/kasus angka kematian ibu sebanyak 36 kasus, yang terdiri dari 4 kasus kematian ibu dan 32 kasus kematian bayi dari target 36 kasus AKI/AKB.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah kasus AKB/AKI mengalami menurun dari 36 pada tahun 2016 ke kasus ke 32 kasus pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah kasus AKB/AKI telah diturunkan hingga 32 kasus, melampaui target akhir RPJMD, dengan jumlah kasus AKB dan AKI ditargetkan tercapai 128 kasus.

Penurunan kasus kematian bayi dan kasus kematian ibu merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menangani kasus kematian bayi dan kasus kematian ibu. Komitmen ini nampak dalam upaya Pemerintah kabupaten Lembata dalam program tugas belajar bagi tenaga bidan, baik pada puskesmas maupun rumah sakit, pelaksanaan MoU dengan Universitas Udayana adalah pada mendapatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini tenaga dokter pada peningkatan mutu pelayanan RSUD Lewoleba, penambahan sarana dan prasarana persalinan pada rumah sakit dan puskesmas serta mewajibkan semua ibu hamil pada melahirkan pada fasilitas kesehatan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih banyak ibu hamil yang belum melahirkan

pada fasilitasi kesehatan. Hal ini disebabkan karena letak geografis dan jarak jangkauan dari rumah ke fasilitas kesehatan sulit dijangkau sehingga banyak ibu hamil memilih bersalin di rumah daripada harus melahirkan pada fasilitas kesehatan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk menambah jumlah dan kualitas tenaga kesehatan sehingga bekerja secara profesional dan bekerja sampai ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, penambahan sarana dan fasilitas kesehatan di desa menyebabkan AKB dan AKI menurun drastis. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, AKB dan AKI dapat ditekan hingga nol kasus.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.017.933.700 atau 39,26% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.592.662.600 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 4% atau Rp. 109.001.100 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.701.663.700*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 111%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 39,26%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dengan Keluarga Kurang Mampu;
- 2) Perawatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu; dan
- 3) Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu.

3. Prosentase Desa/Kelurahan STBM.

Pada tahun 2017, presentase desa/kelurahan STBM tercapai 11% atau 17 desa/kelurahan dari target 100% atau 151 Desa/Kelurahan STBM.

Sedangkan pada tahun 2016, presentase desa/kelurahan STBM sebesar 19% atau 29 desa/kelurahan dari target 100% atau 151 Desa/Kelurahan STBM.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 prosentase desa/kelurahan STBM mengalami penurunan dari 19% atau 29 desa/kelurahan ke 11% atau 17 desa/kelurahan.

Penurunan ini disebabkan karena minimnya anggaran pada melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase desa/kelurahan STBM mencapai 80% atau 121 Desa/Kelurahan STBM, yang terdiri dari 31% atau 47 desa/kelurahan STBM pada target awal RPJMD, 3,97 atau 6 desa/kelurahan STMBM pada tahun 2012, 4,63% atau 7 desa/kelurahan STBM pada tahun 2013, 4,63% atau 7 desa/kelurahan STBM pada tahun 2014, 5,29% atau 7 desa/kelurahan STBM pada tahun 2015, 19% atau 29 desa/kelurahan STBM pada tahun 2016 dan 11% atau 19 desa/kelurahan STBM pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase desa/kelurahan STBM ditargetkan tercapai 100% atau 151 Desa/Kelurahan.

Manfaat dari program kegiatan ini adalah dapat meminimalisir penyakit-penyakit berbasis lingkungan yang berpotensi menyebabkan wabah karena berasal dari lingkungan yang tidak sehat. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lembata membawa dampak terhadap kesehatan lingkungan, baik di daerah kota maupun pedesaan, sehingga Kabupaten Lembata terhindar dari wabah penyakit yang disebabkan karena faktor

lingkungan yang tidak sehat, seperti diare, demam berdarah, dis-entri dan penyakit menular lainnya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah minimnya sosialisasi tentang STBM kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut yang mengakibatkan masyarakat tidak memahami tentang pentingnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bagi kehidupannya.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada melakukan sosialisasi atau pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya sanitasi total berbasis masyarakat bagi kehidupan masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 420.652.200 atau 67,36% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 624.507.900 (*pagu anggaran ini tidak mengalami penurunan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 624.507.900*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 11%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 67,36%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - 2) Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat; dan
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan UKS.
4. Prosentase Rumah Tangga Miskin yang Memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan.

Pada tahun 2017, prosentase Rumah Tangga Miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan tercapai 96,15% atau 625 rumah tangga miskin dari target 650 rumah tangga miskin.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase Rumah Tangga Miskin yang memperoleh Jamkesmas/ Jamkesda/ Jampersal/ Rujukan tercapai 60,60% atau 568 rumah tangga miskin dari target 600 rumah tangga miskin.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017 prosentase rumah tangga miskin yang memperoleh jamkesmas/jamkesda/jampersal/rujukan mengalami peningkatan dari 568 rumah tangga miskin ke 625 rumah tangga miskin. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Lembata akan pentingnya jaminan keehatan bagi keluarga miskin.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase rumah tangga miskin yang memperoleh jamkesmas/jamkesda/jampersal/rujukan tercapai 86% atau 4943 rumah tangga miskin, yang terdiri dari 38% atau 2159 rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan pada awal RPJMD, 6% atau 341 rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan pada tahun 2012, 9% atau 511 rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan pada tahun 2013, 7% atau 398 rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan pada tahun 2014, 6% atau 341 rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan pada tahun 2015, 10% atau 568 rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan pada tahun 2016 dan 11% atau 625 rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal/Rujukan pada tahun 2017,

melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Lembata dengan rumah tangga miskin yang memperoleh Jamkesmas/ Jamkesda/ Jampersal/ Rujukan ditargetkan tercapai 52% atau 2955 rumah tangga miskin dari total 5682 rumah tangga miskin di Kabupaten Lembata.

Program Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi secara gotong royong atau peserta yang tidak mampu dapat ditolong oleh peserta yang mampu atau terjadi subsidi silang.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti program Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal karena besarnya iuran yang dibebankan per jiwa sesuai kategori membebaskan masyarakat untuk mengangsur iuran Jamkesmas/Jamkesda/Jampersal setiap bulannya.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan sosialisasi agar masyarakat paham untuk bergabung menjadi peserta BPJS.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 22.369.052.705 atau 86,56% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 25.841.588.685. (*pagu anggaran ini sudah mengalami peningkatan 7% atau Rp. 1.765.969.035 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 24.075.619.650*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 96,15%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 86,56%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya; dan
- 2) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

VII. Sasaran Strategis Ketujuh : Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin.

Sasaran Strategis Ketujuh yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin. Capaian terhadap Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata. Berikut, pengukuran kinerja Sasaran Strategis Ketujuh dapat dilihat dalam Tabel 3.12 berikut ini.

1.10. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh

N O	INDIKATO R KINERJA	KONDI- SI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase PMKS	26,73%	50 org	93 Org	186 %	9,91	0,91%	0,91 %	2,33%	0,92 %	1,70 %	9,63%	13,75%
2.	Prosentase Lembaga Kemasya- katan yang Terfasilitasi	60%	-	-	-	22%	22%	24%	6%	6%	-	140%	100%
3.	Jumlah Kawasan Transmigra- si	6	-	-	0%	3	-	-	-	-	-	9	10

Dari Tabel di atas diketahui:

- 1. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Pada tahun 2017, prosentase PMKS yang terfasilitasi tercapai 186% atau 93 PMKS dari target 50 PMKS.
Sedangkan pada tahun 2016, prosentase PMKS yang terfasilitasi tercapai 100% atau 50 PMKS dari target 50 PMKS.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016, prosentase PMKS yang terfasilitasi pada tahun 2017 mengalami penambahan, dengan

prosentase PMKS tercapai 100% atau 50 PMKS menjadi 186% atau 93 PMKS.

Prosentase PMKS mengalami penambahan karena adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Lembata untuk terus menekan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase PMKS yang terfasilitasi tercapai 9,63%, yang terdiri dari penurunan prosentase PKMS yang terjadi pada awal RPJMD sebesar 26,73%, penurunan prosentase PKMS yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,91%, penurunan prosentase PKMS yang terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,91%, penurunan prosentase PKMS yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,91%, penurunan prosentase PKMS yang terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,33%, penurunan prosentase PKMS yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 1,70% dan penurunan prosentase PKMS yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,92%, melampaui target akhir RPJMD dengan prosentase penurunan PMKS ditargetkan tercapai 14,06% atau 767 PMKS dari total keseluruhan 5453 PMKS yang berada di wilayah Kabupaten Lembata.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) di Kabupaten Lembata merupakan sekelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus, baik dari sisi mental, sosial dan ekonomi. Sehubungan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk terus menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bentuk upaya penekanan ini melalui pemberdayaan kelompok ini, baik dari sisi mental, seperti bimbingan spiritual dan konseling, dari sisi sosial, seperti meningkatkan kepercayaan diri para PMKS agar tidak minder dalam pergaulan kemasyarakatan serta dari sisi ekonomi seperti bantuan finansial pada kemandirian kelompok ini.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

(eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) kurang maksimal karena belum ada pendataan yang menyeluruh pada mengetahui jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada selalu mengupdatekan data base PMKS setiap tahun (walaupun belum maksimal) agar penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lembata dapat terdata dan diberi pendampingan secara teratur.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp 15.646.300 atau 74,37% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 203.833.900. *(pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 203.833.900)*. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 186%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 74,37.

Pencapaian Sasaran Strategis Ketujuh Indikator Kinerja Satu didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi tercapai 100% atau 9 kelompok lembaga kemasyarakatan dari target 9 kelompok lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksudkan adalah Kelompok Karang Taruna. Bentuk fasilitasi berupa

pemberdayaan dan pembekalan materi dan keterampilan berusaha.

Pencapaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase kelompok lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi tercapai 140%, yang terdiri dari 60% atau 91 kelompok lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi pada awal RPJMD, 22% atau 33 kelompok lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi pada tahun 2012, 22% atau 33 kelompok lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi pada tahun 2013, 24% atau 36 kelompok lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi pada tahun 2014, 6% atau 9 kelompok lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi pada tahun 2015 dan 6% atau 9 kelompok lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi pada tahun 2016, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi ditargetkan tercapai 100% atau 151 kelompok lembaga kemasyarakatan yang ada pada 151 Desa dan Kelurahan.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Ketujuh Indikator Kinerja Dua tidak dapat diukur karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

3. Jumlah Kawasan Transmigrasi.

Pada tahun 2017 tidak ada penambahan jumlah kawasan transmigrasi. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketujuh Indikator Kinerja Tiga pada tahun ini terfokus pada persediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi pada kawasan transmigrasi yang sudah ada dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah transmigrasi berupa pendidikan dan pelatihan bagi warga

transmigrasi lokal sebanyak 30 kepala keluarga dari target 30 kepala keluarga pada kawasan transmigrasi lokal.

Sedangkan pada tahun 2016 juga tidak ada penambahan jumlah kawasan transmigrasi. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketujuh Indikator Kinerja Tiga pada tahun ini terfokus pada pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah transmigrasi berupa pendidikan dan pelatihan bagi warga transmigrasi lokal sebanyak 70 kepala keluarga dari target 70 kepala keluarga pada kawasan transmigrasi lokal.

Untuk itu, indikator kinerja ini pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 tidak dapat diukur.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah kawasan transmigrasi yang ada di wilayah Kabupaten Lembata masih tercapai 9 kawasan, yang terdiri dari 6 kawasan transmigrasi yang dibuka pada awal RPJMD dan 3 kawasan transmigrasi yang dibuka pada tahun 2012, belum mencapai target RPJMD dengan jumlah kawasan transmigrasi ditargetkan tercapai 10 kawasan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketujuh Indikator Kinerja Tiga disebabkan karena jumlah kawasan transmigrasi lokal di wilayah Kabupaten Lembata tidak bertambah karena rasio kepadatan penduduk pada wilayah Kabupaten Lembata belum memenuhi kriteria dibentuknya kawasan transmigrasi lokal baru, sehingga indikator kinerja ini belum urgen dilaksanakan pada mencapai 10 kawasan transmigrasi. Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan upaya yang mendukung Indikator Kinerja ini dengan memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi yang telah ada dengan pemberian bekal usaha pada memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang tersedia di kawasan transmigrasi pada meningkatkan taraf hidupnya.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 95.044.360

atau 91,93% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 99.613.200 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 16% atau Rp. 18.273.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 117.886.200*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 0%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 91,93%. Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Kegiatan Pengelolaan, Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Program Transmigrasi Lokal dengan kegiatan pelatihan transmigrasi lokal dan Program Transmigrasi Lokal dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Warga Transmigrasi Lokal.

VIII. Sasaran Strategis Kedelapan : Meningkatnya Kesejahteraan.

Sasaran Strategis Kedelapan yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah meningkatnya kesejahteraan. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan dijabarkan dalam Tabel 3.13 berikut ini.

1.11. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Akseptor KB	59,89	2030	2667	131,38%	15,10 %	14,67 %	11,9 8%	9,98%	11,0 9%	11,18 %	134%	74,52
2.	Prosentase Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja	59,89	250	240	96,0 0%	11,42 %	12,56 %	11,9 9%	14,27 %	17,1 2%	13,70 %	141%	87,32
3.	Cakupan Peserta KB Aktif	6963	3200	9660	301,88%	10.216	10.863	8140	8951	9195	9660	9660	36000
4.	Frekuensi Penyuluhan	4	3	3	100 %	5	4	6	5	4	3	3	12
5.	Frekuensi	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12

	Konseling KB												
6.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	95,22%	-	-	-	*	0,76	0,78	1,08%	1%	-	98,84%	0,40/40%
7.	Jumlah Sarana dan Prasarana KB	3	18 Jenis	18 Jenis	100 %	2	2	2	-	-	-	9	9

**Tidak ada data*

Dari tabel di atas, dapat diketahui:

1. Prosentase Akseptor KB.

Pada tahun 2017, prosentase akseptor KB tercapai 131,38% atau 2667 akseptor KB dari target 2030 aseptor KB
Sedangkan pada tahun 2016, prosentase akseptor KB tercapai 90% atau 2250 akseptor KB dari target 2500 akseptor KB.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentae akseptor KB mengalami peningkatan dari 2250 akseptor KB ke 2667 akseptor KB.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang mengikuti program Keluarga Berencana.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase akseptor KB tercapai 134%, yang terdiri dari 59,89% atau 12.146 akseptor KB pada awal RPJMD, 15,10% atau 3062 akseptor KB pada tahun 2012, 14,67% atau 2975 akseptor KB pada tahun 2013, 11,98% atau 2492 akseptor KB pada tahun 2014, 9,98% atau 2024 aseptor KB pada tahun 2015, 11,09% atau 2250 akseptor KB pada tahun 2016 dan 11,18% atau 2267 akseptor KB pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD, dengan prosentase akseptor KB ditargetkan tercapai 74,52% atau 15.112 akseptor KB.

Penjaringan akseptor KB baru dilakukan agar Pasangan Usia Subur (PUS) bisa mengatur jarak kelahiran serta mambatasi jumlah anak untuk membangun keluarga yang berkualitas dan mandiri.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Ki-

nerja ini adalah masih banyak pasangan usia subur yang belum menyadari akan pentingnya program KB dalam keluarga.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan penyuluhan dan konseling kepada pasangan usia subur tentang pentingnya program KB dalam keluarga.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 271.840.616 atau 85,22% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 318.980.800 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 29% atau Rp. 129.279.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 448.259.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 131,38% dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 85,22%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Keluarga Berencana dengan Kegiatan antara lain:

- 1) Pelayanan KIE;
 - 2) Revitalisasi Kelompok UPPKS;
 - 3) Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Klinik;
 - 4) Update data dan Pendataan Keluarga; dan
 - 5) Sosialisasi Peran Pria dalam Program KB.
2. Prosentase Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pada tahun 2017, prosentase advokasi kesehatan reproduksi remaja tercapai 96% atau 240 remaja dari target 250 remaja.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase advokasi kesehatan reproduksi remaja tercapai 100% atau 300 remaja dari target 300 remaja.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase advokasi kesehatan reproduksi remaja mengalami penurunan dari 300 remaja ke 240 remaja.

Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan target kinerja yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase advokasi kesehatan reproduksi remaja tercapai 141%, yang terdiri dari 59,89% atau 1049 remaja yang mendapatkan advokasi kesehatan reproduksi pada awal RPJMD, 11,42% atau 200 remaja yang mendapatkan advokasi kesehatan reproduksi pada tahun 2012, 12,56% atau 220 remaja yang mendapatkan advokasi kesehatan reproduksi pada tahun 2013, 11,99% atau 210 remaja yang mendapatkan advokasi kesehatan reproduksi pada tahun 2014, 14,27% atau 250 remaja yang mendapatkan advokasi kesehatan reproduksi pada tahun 2015, 17,12% atau 300 remaja yang mendapatkan advokasi kesehatan reproduksi pada tahun 2016 dan 13,70% atau 240 remaja yang mendapatkan advokasi kesehatan reproduksi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD, dengan prosentase advokasi kesehatan reproduksi remaja ditargetkan tercapai 87,32% atau 1530 remaja.

Advokasi kesehatan reproduksi Remaja di Wilayah Kabupaten Lembata bertujuan untuk memberikan pendampingan atau konseling bagi generasi muda, baik pada anak muda usia sekolah dan di luar sekolah dalam rangka menyiapkan masa depan generasi muda yang lebih baik. Dengan adanya bimbingan dan konseling, generasi muda dapat menjaga dan menghindari seks bebas sebelum menikah dengan risiko dan dampaknya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah minimnya anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan ini, sehingga masih banyak remaja yang belum ter-

sentuh dengan kegiatan pendampingan dan konseling terkait kesehatan reproduksi remaja.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini walaupun dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 63.476.400 atau 99,54% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 63.771.600 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 2% atau Rp. 1.403.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 65.174.600*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 96% dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 99,54%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

3. Cakupan Peserta KB Aktif.

Pada tahun 2017, cakupan peserta KB aktif tercapai 9660 peserta KB atau 301,68% dari target 3200 peserta KB aktif.

Sedangkan pada tahun 2016, cakupan peserta KB aktif tercapai 9195 peserta KB aktif.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, cakupan peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 9195 peserta ke 9660 peserta.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka cakupan peserta KB aktif tercapai 9660 peserta (capaian tahun 2017), belum mencapai target akhir RPJMD, dengan cakupan peserta KB aktif ditargetkan tercapai 36.000 peserta.

Penjaringan masyarakat untuk mengikuti program KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju keluarga bahagia dan sejahtera.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih banyak pasangan usia subur yang belum menyadari akan pentingnya program KB dalam keluarga.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan penyuluhan dan konseling kepada pasangan usia subur tentang pentingnya program KB dalam keluarga.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 50.580.099 atau 98,87% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 51.156.900 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 21% atau Rp. 13.570.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 64.726.900*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 301,88% dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 98,87%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan Kontrasepsi dengan Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.

4. Frekuensi Penyuluhan.

Pada tahun 2017, frekuensi penyuluhan terlaksana 3 kali dalam setahun atau 100% dari target 3 kali dalam setahun.

Sedangkan pada tahun 2016, frekuensi penyuluhan terlaksana 4 kali dalam setahun atau 100% dari target 4 kali dalam setahun.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, frekuensi penyuluhan mengalami penurunan dari 4 pada tahun 2016 ke kali ke 3 kali pada tahun 2017.

Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan target kinerja yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka frekuensi penyuluhan terlaksana sebanyak 3 kali (capaian tahun 2017) belum mencapai target akhir RPJMD, dengan frekuensi penyuluhan ditargetkan tercapai 4 kali.

Penyuluhan keluarga berencana bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran para masyarakat tentang mafaat program keluarga berencana bagi kehidupan keluarganya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah minimnya anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan ini, sehingga frekuensi penyuluhan belum terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini walaupun dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 38.489.400 atau 99,05% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 38.611.400 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 10% atau Rp. 4.245.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 42.856.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah

digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100% dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 99,05%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Kegiatan Fasilitasi forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah.

5. Frekuensi Konseling KB.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka Frekuensi konseling KB masih menggunakan kondisi awal RPJMD, yaitu 4 kali, belum mencapai target akhir RPJMD dengan Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ditargetkan tercapai 12 kali.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen agar pada tahun-tahun mendatang dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud pada Tahun Anggaran 2017, maka alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur.

6. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Sedangkan pada tahun 2016, partisipasi perempuan di lembaga swasta tercapai 95% atau 475 perempuan dari target 500 perempuan.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka partisipasi perempuan di lembaga swasta tercapai 98,84% (Capaian tahun 2016), yang terdiri dari 95,22% atau 48.317 perempuan yang berpartisipasi di lembaga swasta pada awal RPJMD, 076% atau 386 perempuan yang berpartisipasi di lembaga swasta pada tahun 2013, 078% atau 396 perempuan yang berpartisipasi di lembaga swasta pada tahun 2014, 1,08% atau 548 perempuan yang berpartisipasi di lembaga swasta pada tahun 2015 dan 0,94% atau 475 perempuan yang berpartisipasi di lembaga swasta pada tahun 2016, melampaui target RPJMD, dengan partisipasi perempuan di lembaga swasta ditargetkan tercapai 40% atau 20.296 kaum perempuan dari total 50.742 pekerja perempuan.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian Sasaran Strategis Kedelapan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena pada tahun ini tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

7. Jumlah Sarana dan Prasarana KB.

Pada tahun 2017, tidak ada penambahan jumlah sarana dan prasarana KB (Balai Penyuluhan KB). Walaupun tidak ada penambahan sarana dan prasarana KB berupa kantor UPT Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi anggaran dalam melak-

sanakan program dan kegiatan ini tetap dialokasikan dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana penunjang sarana dan prasarana kantor UPT Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 18 jenis sarana dan prasarana (13 BOKB dan 5 jenis belanja modal) dari target 18 jenis sarana dan prasarana (13 BOKB dan 5 jenis belanja modal).

Sedangkan pada tahun 2016, juga tidak ada penambahan jumlah Sarana dan prasarana KB (Balai Penyuluhan KB). Alokasi anggaran juga hanya untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.

Capaian kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak dapat diukur karena pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada penambahan jumlah sarana dan prasarana KB (Kantor UPT Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Jika realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka Jumlah Sarana dan Prasarana KB tercapai 9 sarana dan prasarana KB (Kantor UPT Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada pada 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Lembata), yang terdiri dari 3 sarana dan prasarana KB dibangun pada awal RPJMD, 2 sarana dan prasarana KB dibangun pada tahun 2012, 2 sarana dan prasarana KB dibangun pada tahun 2013 dan 2 sarana dan prasarana KB dibangun pada 2014, mencapai target RPJMD dengan jumlah sarana dan prasarana KB ditargetkan tercapai 9 sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana KB yang dibangun dan diadakan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan program Keluarga Berencana kepada masyarakat Kabupaten Lembata menuju keluarga mandiri dan sejahtera.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah SDM penyuluh KB masih sangat minim, baik

dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga sarana dan prasarana KB belum dapat difungsikan untuk melayani masyarakat yang tersentuh program KB.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk meningkatkan SDM penyuluh KB, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas agar dapat menggunakan sarana dan prasarana KB untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar 1.785.320.836 atau 98,50% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.812.450.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 1% atau Rp. 10.500.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 1.822.950.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 98,50%. Walaupun realisasi kinerja terbilang efisien, namun pelaksanaan program dan kegiatan ini tidak sesuai dengan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan daerah dan turunannya. Terhadap capaian Indikator Kinerja ini harus dipertimbangkan karena Pemerintah Kabupaten Lembata berada dalam masa transisi untuk masuk dalam Tahun Pertama RPJMD Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2018 – 2022.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Penyuluhan KB dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Penyuluh KB.

IX. Sasaran Strategis Kesembilan : Meningkatnya Kesempatan Kerja.

Sasaran Strategis Kesembilan yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah Meningkatnya Kesempatan Kerja. Capaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lembata. Berikut, pengukuran kinerja Sasaran Strategis Kesembilan dipaparkan dalam Tabel 3.14 berikut ini.

1.12. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Kesembilan

N O	INDIKATOR KINERJA	CA- PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2016			CAPAIAN						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGE T AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Tenaga Kerja yang Terlatih	0,4%	12 TK	8 TK	67%	0,060 %	0,06 0%	0,07%	0,064 %	1,06 %	0,16%	1,21%	0,6%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, prosentase tenaga kerja terlatih tercapai 67% atau pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan untuk 8 tenaga kerja dari target 12 tenaga kerja.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase tenaga kerja yang terlatih tercapai 100% atau 53 tenaga kerja dari target 53 tenaga kerja.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017, Jumlah Tenaga Kerja yang Terlatih mengalami penurunan dari 53 tenaga kerja pada tahun 2016 ke 8 tenaga kerja pada tahun 2017.

Penurunan ini disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Stratgeis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka prosentase tenaga kerja terlatih tercapai 1,21%, yang terdiri dari 0,4% atau 20 tenaga kerja terlatih pada awal RPJMD, 0,06% atau 3 tenaga kerja terlatih pada tahun 2012, 0,06% atau 3 tenaga kerja terlatih pada tahun 2013, 0,07% atau 4 tenaga kerja terlatih pada tahun 2014, 0,06% atau 3 tenaga kerja terlatih pada tahun 2015, 1,06% atau 3 tenaga kerja terlatih pada tahun 2016

dan 0,16% atau 100 tenaga kerja terlatih pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD, dengan prosentase tenaga kerja yang terlatih ditargetkan tercapai 0,6% dari 4984 tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

Pelatihan keterampilan tenaga kerja seperti: Pertukangan, Menjahit, *House Keeping* (Loundry) bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi tenaga kerja, sehingga mampu memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk membuka lapangan kerja baru. Dengan demikian, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih banyak tenaga kerja yang setelah mendapatkan pelatihan keterampilan, tidak mengembangkan keterampilan yang diperoleh. Selain itu, alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini masih sangat minim.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan bagi tenaga kerja yang tidak mengembangkan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan keterampilan, serta penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini walaupun dengan minimnya kemampuan keuangan daerah yang ada.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar 89.285.198 atau 98,76% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 90.406.698 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 12% atau Rp. 21.733.502 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 112.140.200*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai

66,67%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 98,76%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.

X. Sasaran Strategis Kesepuluh : Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Pekerja.

Sasaran Strategis Kesepuluh yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Pekerja. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan. Berikut, pengukuran kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh dipaparkan dalam Tabel 3.15 berikut ini.

1.13. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2016			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah PJTKI yang terfasilitasi	0	3	-	0%	2	2	2	3	-	-	9	3

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, tidak ada penambahan jumlah PJTKI. Walaupun tidak ada penambahan, tetapi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan ini tetap dialokasikan dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengembangan PJTKI serta fasilitasi terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja ketiga PJTKI ini agar berjalan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sedangkan pada tahun 2016, juga tidak ada penambahan jumlah PJTKI. Alokasi anggaran untuk fasilitasi terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kerja ketiga PJTKI ini agar berjalan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Capaian kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak dapat diukur karena pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada penambahan jumlah PJTKI.

Jika realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka Jumlah PJTKI yang terfasilitasi sebanyak 9 PJTKI, yaitu: PT Citra Bina Tenaga Mandiri, PT Intan Ayu Lestari, PT Tisnama Argayana, PT Sukses Mandiri Utama, PT Anugerah Usaha Jaya, PT Lentera Bunga Bangsa Sejati, PT Madrel Mitra Global, PT Mitra Sinergi Sukses dan PT Qafco (*capaian tahun 2015*), melampaui target RPJMD, dengan jumlah PJTKI ditargetkan tercaai 3 PJTKI.

Keberadaan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Kabupaten Lembata bertujuan untuk merekrut tenaga kerja Indonesia asal kabupaten Lembata untuk bekerja di luar negeri secara legal dan formal. Dengan adanya PJTKI, para tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri dengan mengantongi passport dan visa. Selama ini, tidak ada masalah kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lembata karena para tenaga kerja Indonesia mengantongi surat ijin resmi seperti pasport dan visa.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih ada segelintir masyarakat Kabupaten Lembata yang bekerja di luar negeri dengan tidak mengantongi surat ijin resmi.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang ketenagakerjaan.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Kesepuluh Indikator Kinerja ini sebesar 54.120.019 atau 97,12% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 55.726.300 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 21% atau Rp. 14.447.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 70.173.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 0%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 97,12%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Hubungan Industrial.

XI. Sasaran Strategis Kesebelas : Meningkatnya Kualitas Iman Umat Beragama.

Sasaran Strategis Kesebelas yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 adalah Meningkatnya Kualitas Iman Umat Beragama. Capaian Sasaran Startegis ini didukung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Berikut pengukuran kinerja Sasaran Strategis Kesebelas dipaparkan dalam Tabel 3.16 berikut ini.

1.14. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDI- SI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Frekuensi Kegiatan Wawasan Kebangsaan	6	3	3	100%	3	3	3	3	3	3	24	12
2	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	4	6	6	100%	4	4	4	4	4	6	30	20

Dari Tabel di atas diketahui:

1. Frekuensi Kegiatan Wawasan Kebangsaan.

Pada tahun 2017, frekuensi kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan sebanyak 3 kali atau 100% dari target dari target 3 kali kegiatan wawasan kebangsaan. Ketiga kegiatan itu adalah: Fasilitasi HUT RI, Kegiatan Fasilitasi HUT Otonomi Daerah dan Kegiatan Fasilitasi HUT Kenegaraan lainnya.

Sedangkan pada tahun 2016, frekuensi kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan jenis kegiatan sama dengan tahun 2017.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini pada tahun 2017 disebabkan karena adanya alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017, frekuensi kegiatan wawasan kebangsaan tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Hal ini disebabkan karena program kegiatan ini merupakan program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2011–2016 maka Frekuensi Kegiatan Wawasan Kebangsaan dilakukan sebanyak 24 kali, yang terdiri dari 6 kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada awal RPJMD, 3 kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada tahun 2012, 3 kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada tahun 2013, 3 kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada tahun 2014, 3 kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada tahun 2015, 3 kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada tahun 2016 dan 3 kegiatan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan Frekuensi Kegiatan Wawasan Kebangsaan ditargetkan sebanyak 15 kali.

Kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten Lembata bertujuan pada meningkatkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan daerah bagi masyarakat Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini nampak dalam partisipasi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyongsong HUT RI, HUT Otonomi Daerah dan HUT kenegaraan lainnya, seperti mengikuti upacara

bendera masih sangat rendah. Dengan adanya kendala ini, solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata yang tidak berpartisipasi dalam upacara bendera menyongsong HUT RI, HUT Otonomi Daerah dan HUT kenegaraan lainnya berupa teguran tertulis atau teguran ringan serta pemotongan tambahan penghasilan bagi ASN yang tidak mengikuti kegiatan dimaksud.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 139.925.900 atau 92,53% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 151.217.550 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 3% atau Rp. 4.964.800 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 156.182.350*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 92,53%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kesebelas Indikator Kinerja Satu didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Lainnya dengan kegiatan Fasilitasi HUT RI, HUT OTDA dan HUT Kenegaraan Lainnya.

2. Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.

Pada tahun 2017, jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tercapai sebanyak 6 kali terhadap 4 kelompok keagamaan, yaitu Kelompok Agama Katolik, Kelompok Agama Islam, Kelompok Agama Kristen Protestan dan Kelompok Agama Hindu dari target 6 kegiatan fasilitasi keagamaan. Keenam kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan itu antara lain:

1. Kegiatan Fasilitasi Dialog Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di dilaksanakan sebanyak 2 kali;
2. Fasilitasi Kegiatan FKUB Kabupaten Lembata sebanyak 1 kali;
3. Fasilitasi Manasiq Haji pada 16 orang haji;

4. Fasilitasi Pembinaan Kelompok Kategorial pada 3 kelompok kategorial;
5. Doa dan Hiburan Menyongsong Tahun Baru sebanyak 1 Kegiatan; dan
6. Fasilitasi Buka Puasa Bersama sebanyak 1 kali.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tercapai sebanyak 4 kali terhadap 4 kelompok keagamaan, yaitu Kelompok Agama Katolik, Kelompok Agama Islam, Kelompok Agama Kristen Protestan dan Kelompok Agama Hindu dari target 3 kegiatan fasilitasi keagamaan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan mengalami peningkatan dari 4 kegiatan pada tahun 2016 ke 6 kegiatan pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah dan frekuensi kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2011–2016, maka Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan melampaui target RPJMD dengan jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan dilaksanakan sebanyak 30 kali, yang terdiri dari 4 kali fasilitasi kegiatan keagamaan terjadi pada awal RPJMD, 4 kali fasilitasi kegiatan keagamaan terjadi pada tahun 2012, 4 kali fasilitasi kegiatan keagamaan terjadi pada tahun 2013, 4 kali fasilitasi kegiatan keagamaan terjadi pada tahun 2014, 4 kali fasilitasi kegiatan keagamaan terjadi pada tahun 2015 dan 4 kali fasilitasi kegiatan keagamaan terjadi pada tahun 2016, dan 6 kali fasilitasi kegiatan keagamaan terjadi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan ditargetkan tercapai 20 kali.

Dengan adanya fasilitasi kegiatan keagamaan seperti yang telah digambarkan di atas menyebabkan terjadinya peningkatan kualitas kerukunan hidup antar umat beragama serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di daerah Kabupaten Lembata. Bukti nyata dari fasilitasi kegiatan keagamaan adalah semakin

tingginya semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama, sehingga isu SARA tidak pernah terjadi di wilayah Kabupaten Lembata.

Minimnya anggaran yang dialokasikan pada program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini menyebabkan fasilitasi kegiatan keagamaan tidak dilaksanakan secara maksimal.

Dengan adanya kendala tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Sekretariat Daerah menawarkan solusi berupa penambahan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 536.677.300 atau 85,44% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 628.131.600 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 5% atau Rp. 33.936.600 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 662.068.200*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 85,44%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama, dengan kegiatan:

- 1) Fasilitasi Dialog Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama;
- 2) Fasilitasi Lembaga FKUB Kabupaten Lembata;
- 3) Fasilitasi Manasiq Haji;
- 4) Fasilitasi Pembinaan Rohani Kelompok Kategorial;
- 5) Doa dan Hiburan Menyongsong Tahun Baru; dan
- 6) Fasilitasi Buka Puasa Bersama.

XII. Sasaran Strategis Keduabelas : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah.

Sasaran Strategis Keduabelas yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Berikut pengukuran kinerja Sasaran Strategis Keduabelas dapat tersaji dalam Tabel 3.17 berikut ini.

1.15. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keduabelas

N O	INDIKATOR KINERJA	CA- PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Sarana Rumah Ibadah Terdampingi	40	45	45	100%	63	61	41	27	45	45	367	75

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, jumlah sarana rumah ibadah yang terdampingi sebanyak 45 rumah ibadah dari target 45 rumah ibadah.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah sarana rumah ibadah yang terdampingi sebanyak 45 rumah ibadah dari target 45 rumah ibadah. Bentuk pendampingan yang diberikan terhadap rumah-rumah ibadah tersebut berupa uang tunai yang akan digunakan dalam pembangunan sarana rumah ibadah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah sarana rumah ibadah yang terdampingi tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan anggaran dalam melaksanakan progdam dan kegiatan yang mendukung Sasaran Stretegis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari target awal PJMD sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka jumlah sarana rumah ibadah yang terdampingi melampaui target RPJMD dengan jumlah sarana rumah ibadah terdampingi tercapai 367 rumah ibadah, yang terdiri dari 40 sarana rumah ibadah yang didampingi pada awal

RPJMD, 63 sarana rumah ibadah yang didampingi pada tahun 2012, 61 sarana rumah ibadah yang didampingi pada tahun 2013, 41 sarana rumah ibadah yang didampingi pada tahun 2014, 27 sarana rumah ibadah yang didampingi pada tahun 2015, 45 sarana rumah ibadah yang didampingi pada tahun 2016, dan 45 sarana rumah ibadah yang didampingi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah sarana rumah ibadah yang terdampingi ditargetkan tercapai 75 rumah ibadah.

Bantuan terhadap sarana rumah ibadah di wilayah Kabupaten Lembata dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Lembata dalam hal peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya bantuan sarana rumah ibadah, umat beriman merasa aman dan nyaman beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 475.499.400 atau 97,94% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 485.524.400 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 5% atau Rp. 21.133.600 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 464.390.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 97,94%.

Pencapaian Sasaran Strategis Keduabelas Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama dengan kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Ibadah.

XIII. Sasaran Strategis Ketigabelas : Meningkatnya Sarana, Prasarana Olahraga, Seni dan Budaya.

Sasaran Strategis Ketigabelas yang mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 adalah Meningkatnya Sarana, Prasarana Olahraga, Seni dan Budaya. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut pengukuran kinerja Sasaran Strategis Ketigabelas tersaji pada Tabel 3.18 berikut ini.

1.16. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ketigabelas

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah Lapangan Olahraga	12	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	12	25
2.	Jumlah Budaya yang dilestarikan	3	2	2	100%	-	1	-	2	6	2	14	6
3.	Jumlah Sanggar Seni Budaya Sekolah dan Masyarakat yang Aktif	48	-	-	-	14	16	12	12	12	-	114	98
4.	Jumlah Budaya, Situs dan cagar Budaya yang Dilindungi	18	14	14	100%	5	5	3	14	6	14	65	18

Dari Tabel di atas diketahui bahwa:

1. Jumlah Lapangan Olahraga.

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak ada pencapaian terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini. Hal yang menjadi kendala utama adalah persoalan pembebasan lahan pada pembangunan lapangan olahraga sehingga anggaran yang dialokasikan pada melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja terkait tidak dialokasikan.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD dibandingkan dengan target RPJMD maka jumlah lapangan olahraga masih sesuai dengan target awal RPJMD, yaitu 12

lapangan olahraga, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah lapangan olahraga ditargetkan tercapai 25 lapangan olahraga.

2. Jumlah Budaya yang Dilestarikan.

Pada tahun 2017, jumlah budaya yang dilestarikan tercapai 2 budaya atau 100% dari target 8 budaya yang dilestarikan. Kedua budaya itu adalah:

- 1) Upacara Adat Desa Lamanuna; dan
- 2) Komunitas Kampung Nelayan Lamalera.

Pelestarian budaya dilakukan melalui distribusi air minum pada pelaksanaan upacara adat, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kekayaan budaya pada 9 wilayah kecamatan di Kabupaten Lembata, pengalokasian anggaran dalam hal pelestarian budaya, pemberian dukungan finansial terhadap perawatan dan pemeliharaan budaya oleh masyarakat pemilik kekayaan budaya terkait.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah budaya yang dilestarikan tercapai 6 budaya atau 88% dari target 8 budaya yang dilestarikan. Ketujuh budaya itu adalah:

- 1) Ritus Adat Makan Kacang di Kampung Lama Napaulun;
- 2) Ritus Adat Makan Kacang di Kampung Lama Lewohala;
- 3) Ritus Adat Makan Kacang di Kampung Lama Lamariang;
- 4) Ritus Adat Makan Kacang di Kampung Lama Lamawolo;
- 5) Ritus Adat Makan jagung Muda di Atawolo; dan
- 6) Ritus Adat Ahar di Watuwawer.



Sumber: Disbudpar Kab. Lembata

**Ritus Adat Ahar di Desa Watuwawer-
Kecamatan Atadei-Kabupaten Lembata**

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah budaya yang dilestarikan mengalami penurunan dari 6 budaya menjadi 2 budaya. Penurunan jumlah budaya yang dilestarikan disebabkan karena minimnya anggaran dalam men-

dukung pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal PJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka jumlah budaya yang dilestarikan melampaui target RPJMD dengan jumlah budaya yang dilestarikan tercapai 14 budaya, yang terdiri dari 3 budaya yang dilestarikan pada awal RPJMD, 1 budaya yang dilestarikan pada tahun 2013, 2 budaya yang dilestarikan pada tahun 2015, 6 budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 dan 2 budaya yang dilestarikan pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah budaya yang dilestarikan ditargetkan tercapai 6 budaya.

Adapun manfaat dari pelestarian budaya di Kabupaten Lembata adalah pada memelihara dan melestarikan budaya warisan leluhur dan nenek moyang yang telah diwariskan secara turun temurun. Selain itu, bidang pariwisata sebagai leading sektor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 juga mengembangkan pariwisata budaya dengan tujuan pada mengekspose ke dunia luar bahwa Kabupaten Lembata juga kaya akan budaya warisan nenek moyang yang harus dilestarikan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud adalah minimnya anggaran pada mempublikasikan atau mengekspose kekayaan budaya di wilayah Kabupaten Lembata sehingga Kabupaten Lembata dengan kekayaan budayanya tekesan masih terisolir.

Terhadap kendala ini, Pemerinah Kabupaten Lembata telah berupaya secara optimal dalam mempublikasikan kekayaan budaya melalui promosi budaya pada Media Surat Kabar Pesona Lembata dan Pembuatan film Dokumenter tentang Kekayaan Budaya Kabupaten Lembata, seperti film dokumenter kampung nelayan Lamalera yang telah selesai dalam proses pembuatan film dokumenternya.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Keduabelas Indikator Kinerja Dua sebesar Rp. 1.269.300 atau 4,17% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 30.439.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 12% atau 4.000.300 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 34.439.300*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 4,17%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya.

3. Jumlah Sanggar Seni Budaya Sekolah dan Masyarakat yang Aktif.

Pada tahun 2017 tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini. Hal ini disebabkan karena tidak ada alokasi

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah sanggar seni budaya sekolah dan sanggar seni masyarakat yang dibina berjumlah 12 Sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat. Keduabelas Sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat itu adalah:

- 1) Sanggar Seni Budaya Sekolah SMA Negeri I Nubatukan;
- 2) Sanggar Seni Budaya Sekolah SMA Negeri II Nubatukan;
- 3) Sanggar Seni Budaya Sekolah SMK Negeri Ile Lewotolok;
- 4) Sanggar Seni Budaya Sekolah SMA PGRI Lewoleba;
- 5) Sanggar Seni Budaya Masyarakat Etnis Manggarai;
- 6) Sanggar Seni Budaya Masyarakat Etnis Ngada;
- 7) Sanggar Seni Budaya Masyarakat Etnis Ende;
- 8) Sanggar Seni Budaya Masyarakat Etnis Sikka;
- 9) Sanggar Seni Budaya Masyarakat Etnis Timor;

- 10) Sanggar Seni Budaya Masyarakat Etnis Sumba;
- 11) Sanggar Seni Budaya Masyarakat Etnis Binongko; dan
- 12) Paguyuban Etnis Binongko.

Keduabelas sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat ini dibina dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hari Bahari Nusantara Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Lewoleba, Kabupaten Lembata tanggal 13 Desember 2016.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal PJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka jumlah sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif tercapai 144 sanggar (capaian kinerja tahun 2016), yang terdiri dari 48 sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif pada awal RPJMD, 14 sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif pada tahun 2012, 16 sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif pada tahun 2013, 12 sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif pada tahun 2014, 12 sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif pada tahun 2015 dan 1 sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif pada tahun 2016, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah sanggar seni budaya sekolah dan masyarakat yang aktif ditargetkan tercapai 98 budaya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

4. Jumlah Budaya, Situs dan Cagar Budaya yang dilindungi.

Pada tahun 2017, jumlah budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi tercapai 14 budaya, situs dan cagar budaya atau 100% dari target 14 situs dan cagar budaya (*alokasi anggaran pada melaksanakan program dan kegiatan ini baru terjadi pada Perubahan*

Anggaran Tahun 2017). Keempatbelas Situs budaya dan cagar budaya yang dilindungi itu antara lain:

1. Situs/Cagar Budaya Oit Nale-Mingar;
2. Situs/Cagar Budaya Leva Nuang- Desa Lamalera A dan Desa lamalera B;
3. Situ/Cagar Budaya Reka Wata- Desa Lamawolo;
4. Situs/Cagar Budaya Bata Witi-Desa lamawolo;
5. Situs/Cagar Budaya Rewa Ika – Desa Dikesare;
6. Situs/Cagar Budaya Tenun Ikat Ile Ape;
7. Situs/Cagar Budaya Tenun Ikat Atadei;
8. Situs/Cagar Budaya Tenun Ikat Lamalera;
9. Musik Tradisional Tatong di Wilayah Kedang;
10. Ahar-Watuwawer;
11. Kebekal-Watuwawer;
12. Ploe Kwar-Watuwawer;
13. Kaweru – Atawolo; dan
14. Utan Wuun Lolon- Ile Ape.



Situasi Penangkapan Ikan secara Tradisional di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kab. Lembata.

(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lembata)

Sedangkan Pada tahun 2016, jumlah budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi tercapai 6 budaya, situs dan cagar budaya atau 75% dari target 8 situs dan cagar budaya. Ketiga belas budaya, situs budaya dan cagar budaya yang dilindungi itu antara lain:

- 1) Rumah Adat Suku Nuban di Desa Lusilame;
- 2) Situs Waibelen di Desa Jontona;
- 3) Situs Kampung Lama Lelawerang di Desa Baopana;
- 4) Situs Kampung Lama Kolibuto di Desa Merdeka;
- 5) Situs Kampung Lama Lelalein di Desa Lerahinga; dan
- 6) Kampun Lama Lamatuka di Desa Lamatuka.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi mengalami peningkatan dari 6 budaya, situs budaya dan cagar budaya pada tahun 2016 ke 14 budaya, situs budaya dan cagar budaya pada tahun 2017.

Peningkatan Jumlah Budaya, Situs dan cagar Budaya yang Dilindungi ini disebabkan karena adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Lembata dalam upaya menggali, memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya warisan nenek moyang.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2011–2016, maka jumlah budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi tercapai 65 budaya, situs dan cagar budaya, yang terdiri dari 18 budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi pada awal RPJMD, 5 budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi pada tahun 2012, 5 budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi pada tahun 2013, 3 budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi pada tahun 2014, 16 budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi pada tahun 2015, 6 budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi pada tahun 2016 dan 14 budaya, situs dan cagar budaya yang dilindungi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah budaya, situs dan cagar budaya ditargetkan tercapai 18 budaya, situs dan cagar budaya.

Budaya, situs budaya dan cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Lembata bertujuan pada melindungi dan mengkonservasi budaya, benda budaya situs dan cagar budaya hasil peninggalan nenek moyang agar masyarakat Kabupaten Lembata dapat mengenal sejarah dan asal-usulnya. Selain itu, manfaat dari perlindungan dan pelestarian budaya, situs dan cagar budaya adalah pada medatangkan kontribusi pendapatan daerah sebagai dampak dari kunjungan wisatawan terhadap budaya, situs dan cagar budaya terkait. Bentuk perlindungan dan konservasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lembata berupa pemugaran dan pemeliharaan budaya, situs dan cagar budaya yang telah dilindungi.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketigabelas Indikator Kinerja Empat adalah masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang nilai budaya, situs dan cagar budaya yang dimiliki, yang membawa dampak pada rendahnya

partisipasi masyarakat dalam upaya membantu Pemerintah Kabupaten Lembata dalam upaya melestarikan budaya, situs dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya pada melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya budaya, situs dan cagar budaya warisan nenek moyang bagi kehidupan masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 96.418.900 atau 99,99% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 96.428.400 (*pagu anggaran ini tidak mengalami penurunan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 96.428.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 99,99%.

Pencapaian Sasaran Strategis Ketigabelas Indikator Kinerja Empat didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

XIV. Sasaran Strategis Keempatbelas : Meningkatnya Pendidikan Luar Biasa.

Sasaran Strategis Keempatbelas ini merupakan salah satu upaya pada mencapai Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga. Berikut, pengukuran kinerja sasaran Strategis Keempatbelas tersaji pada Tabel 3.19 berikut ini.

1.17. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keempatbelas

N O	INDIKATOR KINERJA	CA- PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah dan Jenis Sekolah Luar Biasa	1	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	1	1

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Sedangkan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak ada pencapaian terhadap Sasaran Strategis Ketigabelas Indikator Kinerja ini. Walaupun tidak terjadi penambahan jumlah dan jenis sekolah luar biasa, Pemerintah Kabupaten Lembata tetap mengalokasikan anggaran tiap-tiap tahun, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 pada meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah luar biasa dimaksud dengan mengalokasikan anggaran pada Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendidik serta Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Apabila hasil kinerja dari capaian awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2011–2016, maka jumlah dan jenis sekolah luar biasa tercapai 1 sekolah, mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah dan jenis sekolah luar biasa ditargetkan tercapai 1 sekolah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Keempatbelas Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggran pada melaksanakan program dan kegiatan yng mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

XV. Sasaran Strategis Kelimabelas : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perlindungan Sosial.

Sasaran Strategis Kelimabelas ini merupakan salah satu upaya pada mencapai Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Berikut, pengukuran kinerja Sasaran Strategis Kelimabelas tersaji pada Tabel 3. 20 berikut ini:

1.18. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kelimabelas

N O	INDIKATOR KINERJA	CA- PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2016			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGE T	REALISA SI	% CAPAIA N	201 2	201 3	201 4	201 5	201 6	201 7		
1.	Cakupan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak ada pencapaian terhadap Sasaran Strategis Kelimabelas Indikator Kinerja ini. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Lembata tidak memiliki Panti Asuhan dan Panti Jompo. Target 4 Panti Asuhan/Panti Jompo pada awal RJMD merupakan panti jompo milik yayasan swasta. Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lembata berkaitan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya sebatas pada pemberian bantuan sosial terhadap Panti Asuhan/panti Jompo.

Apabila hasil kinerja dari target awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2011–2016, maka cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo tercapai 4 panti asuhan/panti jompo (capaian pada awal RPJMD), belum mencapai target akhir RPJMD dengan cakupan panti asuhan/panti jompo ditargetkan tercapai 6 panti asuhan/panti jompo.

XVI. Sasaran Strategis Keenambelas : Meningkatnya Jaminan Sosial.

Sasaran Strategis Keenambelas ini merupakan salah satu upaya pada mencapai Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011–2016 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Berikut, pengukuran kinerja Sasaran Strategis Keenambelas tersaji dalam Tabel 3.21 berikut ini.

1.19. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Keenambelas

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDI-SI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARG ET	REA LIS ASI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah Database PMKS	1	-	-	0%	1	1	1	1	-	-	-	1

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017 tidak dilaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Pada tahun 2016 juga tidak dilaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Hal ini disebabkan karena tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 karena selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011– 2016, maka jumlah database PMKS tidak ada, belum mencapai target akhir RPJMD dengan Jumlah Database PMKS ditargetkan tercapai 1 dokumen.

Data base PMKS yang selama ini disusun sebagai pedoman untuk menekan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupa-

ten Lembata. Dengan adanya data base PMKS, angka penyandang masalah kesejahteraan sosial ditekan karena Pemerintah Kabupaten Lembata selalu memberikan motivasi dan pemberdayaan sehingga mendapatkan penghidupan yang layak.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena tidak ada alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud. Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun mendatang harus mengalokasikan anggaran pada melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Penggunaan sumber daya keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Keenambelas Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Misi Ketiga: Recovery Ekonomi Wilayah

Recovery pembangunan ekonomi wilayah dilakukan berbasis potensi sumber daya ekonomi sektoral dengan mengembangkan investasi produksi bagi pengolahan sumber kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan serta investasi pariwisata. Pengembangan sektor-sektor tersebut ditekankan pada pengembangan komoditas unggulan daerah, pada mewujudkan *branding* daerah. Pembangunan sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan sehingga pengelolaan sektor kelautan, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta sektor ekonomi lainnya, pada dapat menopang pengembangan pariwisata di Kabupaten Lembata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksudkan pada menciptakan manusia Lembata yang berpendidikan, sehat, terpenuhi hak-hak dasarnya secara jasmaniah maupun rohaniyah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Lembata Baru yang mandiri dan produktif, perlu dilakukan secara terus menerus. Peran pemerintah dalam kualitas sumber daya

manusia tahun 2011–2016 adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kehidupan sosial budaya, pemuda dan olahraga serta penataan dan penegakkan hukum melalui akselerasi peningkatan mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, penguatan kearifan lokal, produktifitas sumber pendapatan dan harmonisasi sosial dan kerangka NKRI. Capaian Kinerja dalam rangka mewujudkan Misi Ketiga: *Recovery* Ekonomi Wilayah dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.

Sasaran Strategis Pertama pada misi ketiga *Recovery* Ekonomi Wilayah adalah Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah dengan tujuan pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam bidang ekonomi. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama tersaji pada Tabel 3.22 berikut ini:

1.20. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Pertama

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJM	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGE T AKHIR RPJMD
			TARG ET	REA LISA SI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah	0	2	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	Jumlah Kerja Sama Pembangunan	2	4	4	100 %	2	2	2	2	3	4	4	3

Berdasarkan tabel di atas diketahui:

1. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah.

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak ada pencapaian terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini dalam mendukung Misi Kedua yaitu *Recovery* Ekonomi. Hal ini disebabkan karena lemahnya koordinasi antara instansi koordinastor dan instansi teknis dalam melaksanakan program dan

kegiatan ini, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat digunakan dan dikembalikan ke kas daerah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan tidak dapat diukur karena pada perubahan anggaran tahun 2017, anggaran yang dialokasikan pada membiayai program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini dialihkan ke pelaksanaan program dan kegiatan lain. Walaupun demikian, Dari sisi konsistensi dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017: pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait belum efisiensi karena pengalokasian anggaran pada membiayai program dan kegiatan ini tidak diikuti dengan perencanaan yang tepat dan terukur, sehingga alokasi anggaran murni sebesar Rp. 254.537.400 tidak dapat digunakan dan dialihkan ke pelaksanaan program dan kegiatan lain.

2. Jumlah Kerjasama Pembangunan.

Pada tahun 2017, terdapat 4 kerja sama pembangunan, yaitu kerja sama dengan Dunia Usaha/Lembaga.

Sedangkan pada tahun 2016, terdapat 3 kerja sama pembangunan

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 terdapat penambahan kerja sama pembangunan dari 3 kerja sama pembangunan pada tahun 2016 ke 4 kerja sama pembangunan pada tahun 2017.

Adapun keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena adanya minat NGO dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam membangun Lembata dari berbagai bidang.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka jumlah kerja sama pembangunan tercapai 4 kerja sama pembangunan, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah kerja sama pembangunan ditargetkan tercapai 3 kerja sama.

Kerja sama pembangunan yang dilaksanakan antara pihak pemerintah Kabupaten Lembata dengan Dunia Usaha/NGO bertujuan untuk memajukan pembangunan di wilayah Kabupaten Lembata. Misalnya Kerja sama dengan PLAN Internasional yang bergerak di bidang pendidikan ramah anak dan AIPMNH di bidang kesehatan, khususnya di bidang kesehatan ibu, bayi dan balita.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan dunia usaha/NGO sehingga perencanaan pembangunan masih terkesan tumpang tindih.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berkoordinasi dengan dunia usaha/NGO dalam rangka sinkronisasi program rencana pembangunan sehingga terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan di kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Dua sebesar Rp 93.915.099 atau 99,56% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 94.334.800. Pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 15% atau Rp. 16.755.200 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 11.090.000. Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Ketigabelas Indikator Kinerja Dua *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 99,65%.

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Dua didukung oleh pelaksanaan Program Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga.

II. Sasaran Strategis Kedua : Optimalitas Komoditas Unggulan Daerah.

Sasaran Strategis Kedua misi *Recovery* Ekonomi Wilayah adalah Optimalitas Komoditas Unggulan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam bidang ekonomi. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua sebagaimana tersaji pada Tabel 3.23 Berikut ini:

1.21. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kedua

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase kenaikan Produksi Pertanian dan Perkebunan	5%	15.000 Ton	15.000 Ton	100 %	*	*	12%	76%	6,2%	15%	15%	15%
2.	Prosentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan	4,6%	917,2 Ton	846,1 Ton	92,25%	*	*	4%	1%	6,25%	7,27%	7,27%	6,21%
3.	Prosentase Kenaikan Ketahanan Pangan	10%	100 %	25%	25%	4%	3%	4%	5%	25%	25%	25%	25%
4.	Prosentase Kenaikan Kapasitas Penyuluh	40%	83 Penyuluh	83 Penyuluh	100 %	*	*	100%	100% ¹	100 %	100% ¹	100%	60%
5.	Jumlah Sarana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1	2 Jenis	1 Jenis	50%	-	-	-	-	-	1	2	2
6.	Jumlah kenaikan Produksi Ikan tangkap (Ton)	4732	6800	7137	105 %	1568	2202	3458	5800	6000	7137	7137 (Ton)	8709 (Ton)
7.	Produksi Rumput Laut (Ton)	4500	7850	2854	36%	*	*	255	7375	7500	2854	2854 (Ton)	8500 (Ton)
8.	Jumlah Pelaku UMKM yang terlatih	200	320	200	63%	*	175	175	420	320	200	1490	350

*) Tidak ada data

Berdasarkan Tabel di atas diketahui:

1. Prosentase Kenaikan Produksi Pertanian dan Perkebunan.

Pada tahun 2017, prosentase kenaikan produksi pertanian dan perkebunan tercapai 100% atau kenaikan produksi pertanian dan perkebunan tercapai 15.000 Ton dari target 15.000 Ton.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase kenaikan produksi pertanian dan perkebunan tercapai 123,14% atau 6.157 Ton dari target 5% atau 5000 Ton.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka prosentase kenaikan produksi pertanian dan perkebunan mengalami peningkatan dari 6.157 Ton ke 15.000 Ton. Peningkatan ini disebabkan karena curah hujan yang bagus dan keadaan iklim yang cukup baik sehingga produksi pertanian dan perkebunan mengalami peningkatan.



**Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Masyarakat
Kabupaten lembata tahun 2017**
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Lembata)

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD, maka prosentase kenaikan produksi pertanian dan perkebunan mencapai 15% atau 15.000 Ton hasil pertanian dan perkebunan (capaian tahun 2017), mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase kenaikan hasil pertanian dan perkebunan ditargetkan tercapai 15% atau 15.000 Ton.

Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan bertujuan pada menambah stok pangan pada pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Kabupaten Lembata.

Apun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah pola bercocok tanam petani belum mengikuti yang mengikuti pola bercocok tanam tradisional, seperti menggunakan ladang berpindah-pindah, bahkan menggunakan pestisida kegiatan bercocok tanam.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada memberdayakan masyarakat petani dengan memberikan penyuluhan tentang teknik bercocok tanam yang baik, yang berorientasi pada agrobisnis melalui para penyuluh perta-

nian ke desa-desa, serta sosialisasi tentang bahaya penggunaan pestisida dalam bercocok tanam.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 284.070.555 atau 97,54% dari total pagu dana setelah perubahan anggaran sebesar 291.232.100,00 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 41% atau Rp. 204.248.100 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 495.480.200*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 97,54%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Satu didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan dengan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian/Perkebunan.

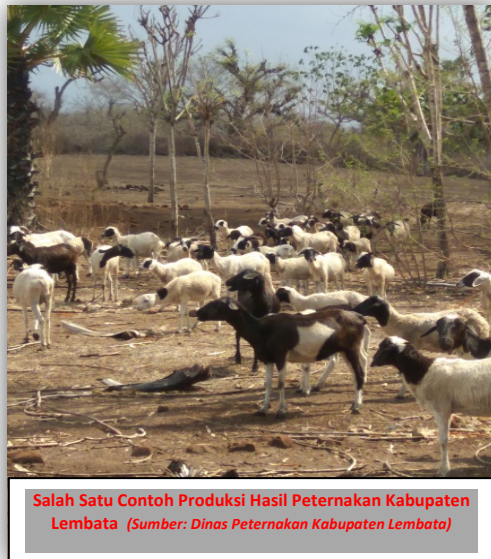
2. Prosentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan.

Pada tahun 2017, Prosentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan tercapai 92,25% atau kenaikan produksi hasil peternakan tercapai 846,1 Ton dari target 917,2 Ton.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase kenaikan produksi hasil peternakan tercapai 84,98% atau kenaikan produksi hasil peternakan tercapai 447 Ton dari target 526 Ton.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2016 prosentase kenaikan produksi peternakan mengalami peningkatan dari 84,98% pada tahun 2016 ke 92,25% pada tahun 2017.

Adapun keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena meningkatnya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan daging.



Salah Satu Contoh Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Lembata (Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lembata)

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka prosentase kenaikan produksi peternakan tercapai 7,27%, melampaui target akhir RPJMD dengan target prosentase kenaikan produksi hasil peternakan sebesar 6,21 %.

Produksi hasil peternakan bagi Kabupaten Lembata bermanfaat untuk mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan adanya produksi hasil peternakan, masyarakat Kabupaten Lembata dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum adanya daerah tujuan pemasaran hasil peternakan, sehingga masyarakat Kabupaten Lembata mengalami kesulitan dalam memasarkan produksi hasil peternakan.

Terhadap kendala ini, Pemertintah kabupaten Lembata terus berupaya untuk mencari daerah tujuan pemasaran hasil produksi peternakan agar produksi hasil peternakan masyarakat dapat dipasarkan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.460.159.950 atau 99,52% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.467.238.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 10% atau Rp. 166.706.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 1.633.944.500*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 92,55%, dan

realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 99,52%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Dua didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pembibitan dan Perawatan Ternak;
 - 2) Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat;
 - 3) Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak;
 - 4) Pengembangan Agribisnis Peternakan;
 - 5) Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Tani Peternakan;
 - 6) Pengembangan Pengolahan Hasil Ternak; dan
 - 7) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Peternakan.
3. Prosentase Kenaikan Ketahanan Pangan.

Pada tahun 2017, prosentase kenaikan ketahanan pangan tercapai 25% dari target 100%.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase kenaikan ketahanan pangan tercapai 5% dari target 25%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2016 prosentase kenaikan ketahanan pangan tidak mengalami peningkatan.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka prosentase kenaikan ketahanan pangan tercapai 25%, mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase kenaikan ketahanan pangan ditargetkan tercapai 25%.

Pangan merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia. Usaha peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah rawan pangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan agar masyarakat tidak mengalami masalah rawan pangan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kondisi iklim dan curah hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen, yang membawa dampak pada masalah rawan pangan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk membudidayakan tanaman pangan yang tumbuh dan berkembang pada daerah dengan iklim dan curah hujan yang tidak menentu seperti di wilayah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.114.413.650 atau 98,78% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.128.180.450 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 11% atau Rp. 133.889.700 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 1.262.070.150*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 25%, tetapi realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud sudah tercapai 98,78%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penanganan Daerah Rawan Pangan;
- 2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
- 3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
- 4) Pengembangan Kelembagaan KTNA Tingkat Kabupaten;
- 5) Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Agribisnis;
- 6) Pendampingan Program Pengembangan Agribisnis Perdesaan (PUAP);

4. Prosentase Kenaikan Kapasitas Penyuluh.

Pada tahun 2017, prosentase kenaikan kapasitas penyuluh tercapai 100% atau peningkatan kapasitas penyuluh sebanyak 83 penyuluh dari target 83 penyuluh.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase kenaikan kapasitas penyuluh tercapai 100% atau peningkatan kapasitas penyuluh sebanyak 105 penyuluh dari target 105 penyuluh.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 prosentase kenaikan kapasitas penyuluh mengalami penurunan dari 105 penyuluh ke 83 penyuluh. Hal ini disebabkan karena semua penyuluh mengikuti diklat/bimtek peningkatan kapasitas penyuluh setiap tahun, dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka prosentase kenaikan kapasitas penyuluh telah mencapai 100% atau 83 penyuluh, melampaui target akhir RPJMD dengan prosentase kenaikan kapasitas penyuluh ditargetkan tercapai 60% atau 50 penyuluh.

Peningkatan kapasitas penyuluh bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan penyuluh agar mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan bekal pengetahuan yang dimilikinya dan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah sarana dan prasarana pendukung penyuluhan belum memadai sehingga para penyuluh mengalami kesulitan dalam memberikan penyuluhan serta membagi pengetahuan yang dimilikinya dalam pekerjaan praktis di lapangan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan agar para penyuluh dapat melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp.

381.118.950 atau 99,54% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 382.890.450,00 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 13% atau Rp. 57.859.250 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 440.749.700*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 99,54%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyuluh dengan kegiatan Penyusunan Program dan Programa Penyuluh.

5. Jumlah Sarana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pada tahun 2017, jumlah sarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan tercapai 1 sarana pemasaran atau 50% dari target 2 sarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. Sarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan itu adalah pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan yang berdampak pada permintaan permintaan pasar, baik dalam wilayah Kabupaten Lembata, maupun di luar wilayah Kabupaten Lembata.

Sedangkan pada tahun 2016, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka jumlah sarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan mencapai 2 sarana, mencapai target akhir

RPJMD dengan jumlah sarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan ditargetkan tercapai 2 jenis.

Manfaat dari sarana pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan adalah untuk mempromosikan potensi daerah Kabupaten Lembata dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah, kurangnya SDM aparatur pelaksana pekerja lapangan sehingga pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan tidak berjalan maksimal.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan upaya penambahan SDM aparatur pelaksana pekerja lapangan, baik dari lingkungan Aparatur Sipil Negara, maupun dari kalangan luar Aparatur Sipil Negara agar pemasaran hasil pertanian dan perkebunan tidak berjalan maksimal.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 469.411.100 atau 92,88% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar 499.110.100 (*pagu anggaran ini sudah mengalami peningkatan 1% atau Rp. 499.110.100 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 495.480.200*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 50%, sedangkan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 92,88%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan dengan kegiatan:

- 1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah; dan

2) Pengembangan Pembenihan dan Pembibitan Pertanian/Perkebunan.

6. Prosentase Kenaikan Produksi Ikan Tangkap.

Pada tahun 2017, kenaikan produksi ikan tangkap tercapai 7137 Ton atau 105% dari target 6800 Ton.

Sedangkan pada tahun 2016, kenaikan produksi ikan tangkap mencapai 92,30% atau 6000 Ton dari target 6.500 Ton produksi ikan tangkap.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah kenaikan produksi ikan tangkap mengalami peningkatan dari 6.500 Ton ke 6800 Ton.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah nelayan dan jumlah armada nelayan. Selain itu, kenaikan ini disebabkan pula karena cara penangkapan ikan tidak lagi menggunakan cara tradisonal tetapi telah menggunakan cara yang semakin modern.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka jumlah kenaikan produski ikan tangkap pada tahun 2017 telah mencapai 7137 Ton, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah kenaikan produksi ikan tangkap ditargetkan mencapai 8709 Ton.

Manfaat dari kenaikan produksi ikan tangkap yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lembata adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya pendapatan asli daerah. Hal ini terbukti dengan hadirnya PT Emas Ikan Samudra Indonesia (EISINDO) di Kabupaten Lembata yang menjadi pemasok tepung ikan ke luar daerah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih rendahnya SDM masyarakat, terutama masyarakat nelayan akan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga program pemerintah di bidang perikanan yang bertujuan pada meningkatkan taraf hidup masyarakat belum berjalan efektif. Banyak bantuan sarana dan fasilitas yang

mendukung peningkatan produksi perikanan diterlantarkan, bahkan dibiarkan mubazir.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan SDM aparatur dengan sosialisasi dan penyuluhan di bidang perikanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lembata terus meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan fasilitas perikanan yang telah didistribusikan ke masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.554.222.014 atau 96,97% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.603.904.832 (*pagu anggaran ini sudah mengalami peningkatan 12% atau Rp. 212.258.418 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 1.816.163.250*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 105%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 96,97%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan:

- 3) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan; dan
- 4) Pendampingan DAK Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

7. Produksi Rumput Laut (Ton).

Pada tahun 2017, produksi rumput laut tercapai 2854 Ton atau 36% dari target 7850 Ton.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah produksi rumput laut mencapai 7.500 Ton atau 100% dari target 7.500 ton produksi rumput laut.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah kenaikan produksi rumput laut mengalami penurunan drastis dari 7500 Ton ke 2854 Ton.

Penurunan produksi rumput laut disebabkan karena serangan hama rumput laut yang berkepanjangan, sehingga aktivitas budidaya rumput laut terhenti.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka produksi rumput laut mengalami penurunan capaian dari 7500 Ton ke 2854 Ton, belum mencapai target akhir RPJMD dengan produksi rumput laut ditargetkan tercapai 8500 Ton.

Manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah meningkatkan pendapatan petani rumput laut.

Namun usaha rumput laut hingga saat ini belum membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Lembata karena adanya kendala hama atau penyakit yang menyebabkan banyak aktivitas budidaya rumput laut dihentikan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata tengah berupaya pada memberantas hama rumput laut dengan memberikan bimtek dan pelatihan tentang budidaya rumput laut serta cara memberantas hama rumput laut, sehingga masyarakat terus meningkatkan aktivitas dalam membudidayakan rumput laut.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Lima sebesar Rp. 426.970.849 atau 96,58% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 442.094.300 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 6% atau Rp. 29.012.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 471.106.300*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 36%, tetapi realisasi

keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 96,58%.

Pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Lima didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan Pendampingan DAK Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

8. Jumlah Pelaku UMKM yang Terlatih.

Pada tahun 2017, jumlah pelaku UMKM yang terlatih sebanyak 200 pelaku UMKM atau 63% dari target 320 Pelaku UMKM.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah pelaku UMKM yang terlatih sebanyak 320 orang atau 91% dari target 350 orang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM yang terlatih mengalami penurunan dari 320 pelaku UMKM pada tahun 2016 ke 200 Pelaku UMKM pada tahun 2017.

Penurunan jumlah pelaku UMKM yang terlatih disebabkan karena alokasi anggaran pada melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini mengalami penurunan.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka jumlah Pelaku UMKM yang terlatih mencapai 1490 orang, yang terdiri dari 200 pelaku UMKM yang terlatih pada awal RPJMD, 175 pelaku UMKM yang terlatih pada tahun 2013, 175 pelaku UMKM yang terlatih pada tahun 2014, 420 pelaku UMKM yang terlatih pada tahun 2015, 320 pelaku UMKM yang terlatih pada tahun 2016 dan 200 pelaku UMKM yang terlatih pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan target jumlah pelaku UMKM yang terlatih ditargetkan tercapai 350 orang.

Manfaat pelatihan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan pada meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di bidang usaha mikro, kecil dan menengah agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah ini dengan program “Halo Lembata” dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan bantuan sarana dan fasilitas usaha mikro, kecil dan menengah kepada masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah minat dan usaha masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah masih berjalan timpang. Hal ini terbukti dengan adanya bantuan sarana dan fasilitas usaha mikro, kecil dan menengah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan disalahgunakan pada kepentingan lain.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kendala ini, serta menarik kembali sarana dan fasilitas usaha mikro, kecil dan menengah dari masyarakat yang menyalahgunakan sarana dan fasilitas yang telah dihibahkan kepada masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp 157.550.600 atau 99,39% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 158.516.000 (*Pagu anggaran ini sudah mengalami peningkatan 72% atau Rp. 27.788.300 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 38.595.200*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 63%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 99,39%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

III. Sasaran Strategis Ketiga : Terbangunnya Sentra-Sentra Ekonomi Rakyat.

Dalam mewujudkan *Recovery* Ekonomi, Sasaran Strategis Ketiga yang ingin dicapai Pemerintah Kabuapten Lembata adalah Terbangunnya Sentra-Sentra Ekonomi Rakyat dengan tujuan pada meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga sebagaimana tersaji pada Tabel 3.24 Berikut ini:

3.24. Tabel Pengukuran Sasaran Strategis Ketiga

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGE T AWAL	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARG ET	REA LISA SI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	144	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	144	173

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa:

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja ini. Capaian terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini bisa terlaksana jika ada pemekaran desa baru. Ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Ketiga Indikator Kinerja ini disebabkan karena adanya moratorium Menteri Dalam Negeri Nomor 140/418/10/BPMPD/2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan yang menegaskan bahwa dalam rangka penataan desa dan kelurahan maka seluruh daerah harus mempedomani ketentuan yang berlaku tentang pemekaran desa secara saksama dan atau melakukan penudaan sementara (*moratorium*) terhadap pemekaran desa dan kelurahan di wilayah masing-masing sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka jumlah kelompok binaan LPM masih menggunakan

capaian awal RPJMD, yaitu 144 kelompok, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah kelompok binaan LPM ditargetkan tercapai 173 kelompok.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata tetap menyiapkan alokasi anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini dalam rangka antisipasi terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai moratorium dimaksud.

Karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud pada Tahun Anggaran 2017, maka alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud sebesar Rp. 1.450.000.000 tidak dapat direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang moratorium tentang pemekaran desa dan kelurahan dicabut sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini dapat dilaksanakan.

IV. Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Kegiatan Koperasi, UMKM Berbasis Desa.

Dalam mewujudkan *Recovery* Ekonomi, Sasaran Strategis Keempat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam bidang ekonomi. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat tersaji pada Tabel 3.25 berikut ini:

3.25. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Keempat

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Jumlah Koperasi Aktif	42	2	2	100 %	3	3	3	2	2	2	57	144

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, jumlah koperasi aktif tercapai 2 koperasi atau 100% dari target 2 koperasi, yaitu Koperasi Ataili di Desa Ataili, Kecamatan Wulandoni dan Koperasi Mupulsanik di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah koperasi aktif tercapai 2 koperasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah koperasi aktif tidak mengalami penambahan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya pada pencapaian target kinerja 2 koperasi aktif.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka jumlah koperasi aktif telah mencapai 57 Koperasi, yang terdiri dari 42 koperasi aktif pada awal RPJMD, 3 koperasi aktif pada tahun 2012, 3 koperasi aktif pada tahun 2013, 3 koperasi aktif pada tahun 2014, 2 koperasi aktif pada tahun 2015, 2 koperasi aktif pada tahun 2016 dan 2 koperasi aktif pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah koperasi aktif ditargetkan tercapai 114 koperasi.

Manfaat Koperasi adalah mensejahterakan anggota. Peran koperasi ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Lembata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berdampak pada peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Lembata. Konkritnya, masyarakat kabupaten Lembata dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi berkat adanya upaya menyimpan dan meminjam di Koperasi.

Adapun kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah minimnya keahlian (*skill*) pengelola koperasi, sehingga sistem pengelolaan koperasi belum sesuai dengan harapan anggotanya.

Terhadap kendala tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan upaya peningkatan kapasitas dan keahlian

han pengurus koperasi dengan kegiatan bimtek/pelatihan di bidang perkoperasian.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar 157.550.600 atau 99,39% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 158.516.000 (*pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 158.516.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 99,39%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan, Pengembangan Perkoperasian; dan
- 2) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

V. Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif.

Dalam mewujudkan *Recovery* Ekonomi, Sasaran Strategis Kelima yang diusung Pemerintah Kabupaten Lembata adalah Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif. Sasaran Strategis Kelima ini bertujuan pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam bidang ekonomi. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan bangsa dan Politik. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima tersaji pada Tabel 3.26 berikut ini:

3.26. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kelima

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDI- SI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017 1 Hari	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REA LISA SI	% CAP AIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Lamanya Proses Perijinan	5	1 Hari	1 Hari	100 %	5	4	3	2	1	1	1 Hari	1 Hari
2.	Jumlah SOP	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 SOP
3.	Tesedianya Dokumen Statistik Perijinan	0	1	1	100 %	1	1	1	1	1	1	1	1 Doku- men
4.	Jumlah SITU yang Ditetapkan	50	250	249	99,6 0%	*	*	135	209	232	249	875	250
5.	Jumlah Linmas	1938	1963	1946	99,1 3%	*	*	*	*	*	1946	1946	2325
6.	Angka Kri- minalitas	203	12	12	100 %	25	22	20	17	15	12	12	154
7.	Jumlah Unsur Masyarakat Pemangku Kepentingan	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
8.	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembang- an Wawasan Kebangsaan	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
9.	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberanta- san penyakit Mayarakat (PEKAT)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10.	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Ma- syarakat	24	2	2	100 %	2	2	2	2	2	2	2	36
11.	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggu- langan Korban Bencana Alam	6	4 Kali	1 Kali	25%	1	1	1	1	1	1	1	12

*) Tidak ada data

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa:

1. Lamanya Proses Perijinan.

Pada tahun 2017, lamanya prises perijinan tercapai 1 hari dari target 1 hari.

Sedangkan pada tahun 2016 lamanya proses perijinan terca-
pain 1 hari dari target 1 hari.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka pada tahun
2017 lamana proses perijinan tercapai 1 hari.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai
dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka la-
manyanya proses perijinan tercapai 1 hari, mencapai target RPJMD
dengan lamanya proses perijinan ditargetkan 1 hari.

Percepatan proses perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk masyarakat yang membutuhkan dokumen perijinan bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit, tingkat kepuasan masyarakat meningkat dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lembata semakin optimal.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah dukungan data dalam proses pengurusan dokumen perijinan dari masyarakat yang mengurus perijinan tidak lengkap sehingga menyebabkan Pemerintah kabupaten Lembata mengalami kesulitan dalam menerbitkan perijinan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat perijinan dan lamanya proses perijinan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan proses perijinan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 152.118.199 atau 99,65% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 152.921.199 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 2% atau Rp. 2.604.799 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 150.316.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 99,65%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan Perijinan Terpadu dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. Jumlah SOP.

Indikator Jumlah SOP tidak dapat diukur karena pada tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

3. Tersedianya Dokumen Statistik Perijinan.

Pada tahun 2017, tersusunnya 1 dokumen statistik perijinan ddari target 1 dokumen statistik perijinan. Dokumen Statistik Perijinan itu adalah Data Base Perijinan.

Sedangkan pada tahun 2016, tersusunnya 1 dokumen statistik perijinan ddari target 1 dokumen statistik perijinan. Dokumen Statistik Perijinan itu adalah Data Base Perijinan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah dokumen statistik perijinan tercapai 1 dokumen perijinan.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka jumlah dokumen statistik perijinan tercapai 1 dokumen, mencapai target RPJMD dengan jumlah dokumen statistik perijinan ditargetkan ditargetkan tercapai 1 dokuen.

Dokumen statistik perijinan disusun sebagai dasarn atau acuan dalam pelaksanaan urusan perijinan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah dukungan data dalam proses pengurusan dokumen prijinan adari masyarakat yang mengurus perijinan tidak lengkap sehingga menyebabkan Pemerintah kabupaten Lembata mengalami kesulitan dalam menerbitkan perijinan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat-syarat perijinan dan lamanya proses perijinan untuk membantu masyarakat dalam pengurusan proses perijinan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 26.173.400 atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran

sebesar Rp. 26.173.400 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 100% atau Rp. 26.173.400 pada Perubahan Anggaran tahun 2017*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan Perijinan Terpadu dengan kegiatan Pembuatan dan Pengembangan data Base perijinan.

4. Jumlah SITU yang Ditetapkan.

Pada tahun 2017, jumlah SITU yang ditetapkan tercapai 249 SITU atau 99,60% dari target 250 SITU.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah SITU yang ditetapkan tercapai 232 SITU.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah SITU yang ditetapkan mengalami peningkatan dari 232 SITU ke 249 SITU.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target RPJMD maka jumlah SITU yang ditetapkan tercapai 875 SITU, yang terdiri dari 50 SITU yang diterbitkan pada awal RPJMD, 135 SITU yang ditetapkan pada tahun 2014, 209 SITU yang ditetapkan pada tahun 2015, 232 SITU yang ditetapkan pada tahun 2016 dan 249 SITU yang ditetapkan pada tahun 2017, melampaui target RPJMD dengan jumlah Penerbitan SITU yang ditetapkan ditargetkan tercapai 250 SITU.

Penetapan atau penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada masyarakat Kabupaten Lembata yang memiliki usaha bertujuan untuk melegalkan dan melindungi usaha masyarakat. Se-

lain itu, Penerbitan SITU bertujuan untuk peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih banyak masyarakat Kabupaten Lembata yang belum sadar akan manfaat SITU sebagai dokumen legal dalam pelaksanaan usaha, sehingga kepemilikan SITU belum dilihat sebagai hal yang urgen dalam melaksanakan usahanya.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya SITU dalam melaksanakan usaha masyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 152.118.199 atau 99,65% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 152.921.199 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 2% atau Rp. 2.604.799 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 150.316.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 99,65%.

Pencapaian Sasaran Strategis Keempat Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan Perijinan Terpadu dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

5. Jumlah Linmas.

Pada tahun 2017, jumlah Linmas tercapai 1946 linmas atau 99,13% dari target 1963 Linmas.

Sedangkan pada tahun 2016, tidak ada data tentang jumlah Linmas di kabupaten Lembata.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2016 tidak ada data tentang jumlah Linmas di kabupaten Lembata.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka jumlah Linmas tercapai 1946 Linmas, belum mencaai target akhir RPJMD dengan jumlah Linmas ditargetkan tercapai 2325 Linmas.

Keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (linmas) yang tersebar di desa-desa dan kota di wilayah kabupaten Lembata bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik di desa maupun kota. Dengan adanya anggota Linmas, keamanan dan ketertiban di wilayah desa dan kota terminimalisir dan aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di desa maupun di kota dapat diatasi.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) anggota Linmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga banyak anggota linmas yang belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas anggota Linmas dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dalam rangka pendidikan dan pelatihan Linmas agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Kelima Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 26.591.400 atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 26.591.400 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 9% atau Rp. 2.500.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 29.091.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program

dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 99,13%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan, antara lain:

- 1) Pelatihan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; dan
- 2) Bina Potensi masyarakat.

6. Angka Kriminalitas.

Pada tahun 2017, angka kriminalitas tercapai 12 kasus dari target 12 kasus.

Sedangkan pada tahun 2016, angka kriminalitas tercapai 15 kasus.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, angka kriminalitas mengalami penurunan dari 15 kasus pada tahun 2016 ke 12 kasus pada tahun 2017.

Penurunan ini disebabkan karena masyarakat semakin mengerti dan memahami pentingnya kantrantibmas sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka angka kriminalitas tercapai 12 kasus, melampaui target RPJMD dengan angka kriminalitas ditargetkan tercapai 154 kasus.

Penekanan angka kriminalitas bertujuan pada meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lembata. Hal ini terbukti dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata dalam memerangi tindakan-tindakan kriminal, seperti perjudian, premanisme, pemerkosaan, eksploitasi anak dibawah umur, prostitusi dan perselingkuhan. Bukti nyata dari komitmen ini adalah adanya penurunan angka kriminal setiap tahun.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih segelintir masyarakat yang belum dapat

menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, seperti: perjudian, premanisme, pemerkosaan, eksploitasi anak dibawah umur, prostitusi dan perselingkuhan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada menekan angka kriminalitas dalam kerjasama dengan aparat keamanan dalam wadah KOMINDA, serta kerja sama unsur muspida dalam merespon tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Lembata. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat kepada berbagai lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 60.406.300 atau 40,47% dari total pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 149.262.700 (*Pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 32% atau Rp. 69.199.100 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 218.461.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 40,47%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan:

- 1) Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dan Pengamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
 - 2) Fasilitasi Penanganan Konflik di Wilayah; dan
 - 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Jumlah Unsur Masyarakat Pemangku Kepentingan.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka jumlah unsur masyarakat pemangku kepentingan masih menggunakan capaian awal RPJMD, yaitu 15 unsur masyarakat, mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah unsur masyarakat pemangku kepentingan ditargetkan tercapai 15 unsur masyarakat.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen agar pada tahun-tahun mendatang dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud pada Tahun Anggaran 2017, maka alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tidak dapat diukur.

8. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan masih menggunakan capaian awal RPJMD, yaitu 6 kali, mencapai target akhir RPJMD dengan Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ditargetkan tercapai 6 kali.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen agar pada tahun-tahun mendatang dapat mengalo-

kasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud pada Tahun Anggaran 2017, maka realisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur.

9. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (PEKAT) masih menggunakan capaian awal RPJMD, yaitu 1 kali, belum mencapai target akhir RPJMD dengan Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (PEKAT) ditargetkan tercapai 2 kali.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen agar pada tahun-tahun mendatang dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud pada Tahun Anggaran 2017, maka alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur.

10. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat.

Pada tahun 2017, frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat tercapai 2 kali dalam setahun dari target 2 kali pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat. Bentuk pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat berupa sosialisasi

sasi dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dan kegiatan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di masyarakat.

Sedangkan pada tahun 2016, frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat tercapai 2 kali dalam setahun dari target 2 kali pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat. Bentuk pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat dan kegiatan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya pada 2 kali pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat setiap tahun, dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat tercapai 2 kali dalam setahun, belum mencapai target RPJMD dengan frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat ditargetkan tercapai 36 kali dalam setahun.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat bertujuan pada mendidik masyarakat agar bebas berpolitik, termasuk politik praktis yang sehat. Di kabupaten Lembata, pendidikan politik yang diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dalam perhelatan politik, seperti pilgub, pilkada dan pemilihan legislatif, tidak ada perpecahan yang membawa dampak terhadap isu suku, agama dan ras (SARA).

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum optimalnya kegiatan sosialisasi ataupun pendidikan politik itu sendiri karena kurangnya personel dan kerangka pendanaan pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

tan ini, serta konflik intern partai di daerah pusat dan propinsi membawa dampak terhadap konflik intern partai di daerah kabupaten.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan Frekuensi pelaksanaan kegiatan program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan tentang pendidikan politik masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, serta menekan konflik internal Partai Politik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 104.603.750 atau 93,03% dari total pagu sebesar Rp. 112.440.350 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 20% atau Rp. 28.375.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 140.815.850*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 93,03%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pendidikan Politik dengan kegiatan:

- 1) Penyuluhan Kepada Masyarakat;
 - 2) Verifikasi dan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 3) Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Parpol; dan
 - 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
11. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Pada tahun 2017, frekuensi pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam tercapai 1 kali atau 25% dalam setahun dari target 4 kali pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Ben-

tuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Koordinasi dan Pemetaan Basis Sumber Daya Alam dan Daerah Rawan Bencana.

Sedangkan pada tahun 2017, frekuensi pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam tercapai 1 kali atau 25% dalam setahun dari target 4 kali pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa Koordinasi dan Pemetaan Basis Sumber Daya Alam dan Daerah Rawan Bencana.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, frekuensi pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya untuk 1 kali pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam setiap tahun, dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka frekuensi pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam tercapai 1 kali dalam setahun, belum mencapai target akhir RPJMD dengan frekuensi pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ditargetkan tercapai 12 kali dalam setahun.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam bertujuan pada mempersiapkan masyarakat secara dini dalam menghadapi risiko atau bahan bencana yang akan terjadi di daerah. Pemetaan daerah potensi bencana dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata bertujuan pada memberi informasi kepada masyarakat tentang daerah-daerah rawan bencana, agar masyarakat selalu siap dan siaga dalam melaksanakan aktivitas di sekitar daerah-daerah rawan bencana.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah lambannya deteksi dini dalam penanggulangan

bencana dan konflik sosial karena keterbatasan sarana pendukung serta minimnya alokasi anggaran yang dalam melaksanakan program dan kegiatan ini menyebabkan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini terlaksana tidak optimal.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kemampuan keuangan daerah yang ada yaitu dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 38.100.200 atau 99,52% dari total pagu sebesar Rp. 38.282.200 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 27% atau Rp. 14.175.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 52.457.700*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait hanya tercapai 25%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 99,52%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Koordinasi dan Pemetaan Basis Sumber Daya Alam dan Daerah Rawan Bencana.

VI. Sasaran Strategis Keenam : Optimalisasi Pengelolaan Obyek-Obyek Wisata.

Dalam mewujudkan *Recovery* Ekonomi, Sasaran Strategis Keenam yang diusung Pemerintah Kabupaten Lembata adalah

Optimalisasi Pengelolaan Obyek-Obyek Wisata. Sasaran Strategis Keenam bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam bidang ekonomi. Sasaran Strategis ini merupakan leading sektor dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam tersaji pada Tabel 3.27 berikut ini:

3.27. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Keenam

N O	INDIKATOR KINERJA	CA- PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Obyek Wisata	56	2	2	100%	3	3	2	3	3	2	72	82
2	Frekuensi Promosi	21	3	3	100%	9	9	8	6	6	3	62	34

Berdasarkan Tabel di atas diketahui:

1. Jumlah Obyek Wisata.

Pada tahun 2017, dikembangkan 2 obyek wisata, yaitu Obyek Wisata Pantai Waijarang, Kecamatan Nubatukan dan Obyek Wisata Wewanbelen di Desa Todanara, Kecamatan Ile Ape. Bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap obyek-obyek wisata ini berupa pembenahan sarana dan prasarana pada obyek-obyek wisata, sehingga semakin menarik dan layak dikunjungi.

Sedangkan pada tahun 2016, dikembangkan 3 obyek wisata, yaitu obyek wisata Pantai Bour, Obyek Wisata Bukit Cinta dan Obyek Wisata Bukit Doa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah obyek wisata mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Lembata memfokuskan diri pada pembenahan sarana dan prasarana serta promosi obyek wisata yang sudah ada.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka

jumlah obyek wisata di wilayah Kabupaten Lembata telah mencapai 72 obyek wisata, yang terdiri dari 56 obyek wisata yang ada pada awal RPJMD, 3 obyek wisata yang ada pada awal RPJMD, 3 obyek wisata yang ada pada tahun 2012, 3 obyek wisata yang ada pada tahun 2013, 2 obyek wisata yang ada pada tahun 2014, 3 obyek wisata yang ada pada tahun 2015, 3 obyek wisata yang ada pada tahun 2016 dan 2 obyek wisata yang ada pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah obyek wisata ditargetkan tercapai 82 obyek wisata.

Adapun manfaat dari obyek wisata yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Lembata adalah pada meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata, membawa dampak terhadap penambahan pendapatan daerah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah faktor transportasi dan infrastruktur di wilayah Kabupaten Lembata belum memadai, sehingga kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata belum sesuai harapan.



Denganadanya kendala ini, Pemerintah Kabupaten terus berupaya membenahi infrastruktur, menambah armada transportasi, terutama armada transportasi laut untuk memudahkan wisatawan agar dapat berkunjung ke Kabupate Lembata, serta melakukan eksplorasi dalam sektor pariwisata terus dengan berbagai cara, di antaranya:

- 1) Melakukan promosi daerah wisata Kabupaten Lembata melalui media online dengan melakukan *redesign Website* Pariwisata Kabupaten Lembata;

- 2) Melakukan penerbitan majalah Pesona Lembata, Kalender Event dan Guide Book Pariwisata Kabupaten Lembata; dan
- 3) Melakukan jalinan kerja sama promosi pariwisata melalui Media Cetak, yakni Surat Kabar Harian Pos Kupang, Kabar NTT, Fortuna, Trans Nusa, Holiday, Lion Mag, Paradiso, Pesona Lembata, Island dan Destinasi Kompas.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 2.223.295.376 atau 96,16% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.264.859.036 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 35% atau Rp. 583.897.950 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 1.680.961.086*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 96,16%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan;
 - 2) Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana pariwisata; dan
 - 3) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.
2. Frekuensi Promosi.

Pada tahun 2017, frekuensi promosi pariwisata dilaksanakan sebanyak 3 kali. Bentuk dan jenis promosi antara lain:

- 1) Penerbitan Majalah Cetak Pesona Lembata sebanyak 4 Edisi;
- 2) Jalinan Kerjasama Promosi Pariwisata melalui Media Cetak yakni SKH POS Kupang, Kabar NTT, Fortuna, Trans Nusa Holiday, Lion Mag, Paradiso dan Destinasi, Kompas; dan

- 3) Pelaksanaan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat Kabupaten Lembata dalam berbagai event kepariwisataan yang berskala lokal, regional dan nasional.

Sedangkan pada tahun 2016, frekuensi promosi pariwisata dilaksanakan sebanyak 6 kali. Bentuk dan jenis promosi antara lain:

- 1) Promosi melalui Media Online dengan melakukan *Redesign Website* Pariwisata Kabupaten Lembata;
- 2) Penerbitan Majalah Pesona Lembata, Kalender Event dan Guide Book Pariwisata Kabupaten Lembata, Buku Lembata Underwater dan Coloring Lembata;
- 3) Jalinan Kerjasama Promosi Pariwisata melalui Media Cetak yakni SKH POS Kupang, Kabar NTT, Fortuna, Trans Nusa Holiday, Lion Mag, Paradiso dan Destinasi, Kompas;
- 4) Menjalin Kerjasama Promosi Pariwisata melalui Televisi Nasional yakni Kompas TV, Trans 7, ANTV, MNC TV, TV One dan Metro TV;
- 5) Tour Tenun Ikat Lembata, Festival Bahari Nuhanera, Tour Fotografi, Lomba Foto Bawah Laut Internasional, Wonderful Sail 2 Indonesia, Atadei Lamalera Explore, Ekspedisi Batutara dan Tracking Gunung Ile Lewotolok, Lembata Exploring, Festival Tenu Ikat Lembata dan Festival Adventure Uyelewon;
- 6) Pameran Foto CINTA LEMBATA PESONA INDONESIA di Gedung Kementerian Pariwisata dan Art Hotel Jakarta;

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 frekuensi promosi mengalami penurunan dari 6 kali promosi (tahun 2016) ke 3 kali promosi (tahun 2017).

Penurunan ini disebabkan karena pada tahun ini, Kabupaten Lembata memfokuskan diri pada Suksesi Kepala Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Lembata kekurangan waktu dalam melaksanakan promosi potensi wisata di wilayah Kabupaten Lembata.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka frekuensi promosi telah mencapai 62 kali promosi, yang terdiri dari 21 kali promosi pada awal RPJMD, 9 kali promosi pada tahun

2012, 9 kali promosi pada tahun 2013, 8 kali promosi pada tahun 2014, 6 kali promosi pada tahun 2015, 6 kali promosi pada tahun 2016 dan 3 kali promosi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan capaian frekuensi promosi ditargetkan tercapai 34 kali.

Dengan adanya promosi pariwisata, Kabupaten Lembata mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, baik wisatawan manca Negara maupun wisatawan domestik). Dampak lanjut dari pelaksanaan promosi pariwisata adalah meningkatnya pendapatan daerah Kabupaten Lembata serta meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat pada daerah pariwisata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud adalah minimnya anggaran Pemerintah Kabupaten Lembata dalam melakukan promosi pariwisata pada level promosi yang lebih tinggi dan canggih, seperti mempublikasikan potensi pariwisata Kabupaten Lembata pada media televisi maupun surat kabar nasional, seperti SKH Kompas.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya pada mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Lembata, walaupun melalui media-media yang bisa dijangkau dengan kemampuan finansial Pemerintah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 10.946.400 atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 10.946.400 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 6% atau Rp. 660.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 11.606.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Ketigabelas Indikator Kinerja Dua *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud juga tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis Keenam Indikator Kinerja Dua didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata.

VII. Sasaran Strategis Ketujuh : Terpromosinya Obyek-Obyek Wisata Unggulan.

Dalam mewujudkan *Recovery* Ekonomi, Sasaran Strategis Ketujuh yang ingin dicapai Pemerintah Kabuapten Lembata adalah Terpromosinya Obyek-Obyek Wisata Unggulan. Sasaran Strategis Ketujuh ini masih memiliki tujuan yang sama dengan sasaran strategis yang lain dalam Misi Ketiga, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam bidang ekonomi. Sasaran Strategis ini merupakan leading sektor dalam melaksasnakan program dan kegiatan pada mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh tersaji pada Tabel 3.27 Berikut ini:

4.27. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Ketujuh

N O	INDIKATOR KINERJA	CA- PAIAN AWAL RPJMD AWAL	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARG ET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Lembaga Mitra	0	1	1	100%	*	*	*	1	1	1	3	6

*) Tidak ada data

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa:

Pada tahun 2017 tercapai 1 jenis kerja sama dengan lembaga mitra atau 100% dari target 1 lembaga mitra. Lembaga mitra itu adalah Asosiasi Perusahaan Biro Perjalanan Wisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (ASITA). Bentuk kerja sama dengan lembaga mitra ini adalah musyawara rutin dengan lembaga mitra untuk membentuk sinergitas dalam mendukung pembangunan di bidang pariwisata.

Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 1 jenis kerja sama dengan lembaga kemitraan dari target 15 lembaga mitra. Bentuk kerja sama berupa diklat pada 6 orang *guide* selam di Bali.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, tidak ada penambahan jumlah lembaga mitra yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lembata dalam bidang kepariwisataan.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD maka jumlah lembaga mitra mencapai 3 lembaga mitra, yang terdiri dari kerja sama dengan 1 lembaga mitra pada tahun 2015, kerja sama dengan 1 lembaga mitra pada tahun 2016 dan kerja sama dengan 1 lembaga mitra pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah lembaga mitra ditargetkan tercapai 6 lembaga mitra.

Kehadiran lembaga mitra di bidang pariwisata bagi masyarakat Kabupaten Lembata sangat membantu memajukan bidang pariwisata di daerah ini. Kehadiran lembaga mitra ini telah membawa kemajuan dalam bidang pariwisata di Kabupaten Lembata, seperti *guide* selam maupun *guide* bahasa bagi para wisatawan manca negara.

Adapun kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena rendahnya minat lembaga mitra untuk menjalin kerja sama kemitraan di bidang pariwisata dengan Kabupaten Lembata karena kondisi infrastruktur belum memungkinkan bagi pihak ketiga melakukan kerja sama dan berinvestasi di bidang ini.

Terhadap kegagalan ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus melakukan pembenahan infrastruktur sehingga dapat menarik minat lembaga mitra untuk melakukan kerja sama kemitraan dalam bidang pariwisata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 33.411.600 atau 97,38% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 34.311.600 (*pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 34.311.600*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya tercapai 97,38%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Bekerja Sama dengan Lembaga Lainnya.

VIII. Sasaran Strategis Kedelapan : Meningkatnya Sektor Pendukung Pariwisata.

Dalam mewujudkan *Recovery* Ekonomi, Sasaran Strategis Kedelapan yang diusung Pemerintah Kabuapten Lembata adalah Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Sasaran Strategis ini masih memiliki tujuan yang sama dengan sasaran strategis yang lain dalam Misi Ketiga, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam bidang ekonomi. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan sebagaimana tersaji pada Tabel 3.28 berikut ini:

4.28. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kedelapan

N O	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	8	8	100%	1	1	1	1	5	8	18	1

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, dilaksanakan 8 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 4 kali dan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah terlaksana sebanyak 4 kali.

Sedangkan pada tahun 2016, dilaksanakan 5 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 4 kali dan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah terlaksana sebanyak 1 kali.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 terdapat penambahan jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dari 5 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi pada tahun 2016 ke 8 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi pada tahun 2017.

Adapun keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Keenam Indikator Kinerja Tiga disebabkan karena adanya penambahan program perencanaan pembangunan ekonomi dari Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target RPJMD maka jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi telah terlaksana sebanyak 18 kali, yang terdiri dari 1 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi terlaksana pada awal RPJMD, 1 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi terlaksana pada tahun 2012, 1 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi terlaksana pada tahun 2013, 1 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi terlaksana pada tahun 2014, 1 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi terlaksana pada tahun 2015, 5 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi terlaksana pada tahun 2016 dan 8 kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi terlaksana pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi ditargetkan tercapai 1 kali koordinasi.

Adapun manfaat dari koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi adalah untuk mengentas kemiskinan daerah dengan merencanakan pembangunan di bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dokumen perencanaan, terutama perencanaan pembangunan ekonomi dalam rencana kerja perangkat daerah yang menangani urusan ekonomi, pada mewujudkan agenda

recovery ekonomi agar kehidupan masyarakat kecil dan masyarakat pedesaan dapat berdaya saing.



Penyulingan Tradisional Air Laut menjadi Garam. Salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan di Pesisir Pantai Utara Kab. Lembata.

Sumber: Bapelitbangda Kab. Lembata

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kondisi infrastruktur perlu dibenahi untuk memutuskan mata rantai kehidupan ekonomi masyarakat desa yang masih terisolir.

Selain itu, sarana dan prasarana transportasi, terutama transportasi darat dan laut juga perlu dibenahi untuk memacu pergerakan ekonomi dari desa ke kota, ataupun sebaliknya.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk melakukan pembenahan infrastruktur dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, serta pembenahan di bidang transportasi pada memacu pergerakan ekonomi.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 122.481.100 atau 95,61% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 128.099.100 (*Pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 13% atau Rp. 19.853.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 147.952.600*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100% dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 95,6%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan antara lain:

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; dan
- 2) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Misi Keempat: Peningkatan Pendapatan Daerah

Pencapaian Misi Keempat, yaitu Peningkatan Pendapatan Daerah dilakukan melalui upaya meningkatkan sumber pendanaan, sumber pendapatan dan kemitraan dengan dunia usaha (lokal, regional dan global), serta ketepatan alokasi bidang pembangunan. Peningkatan sumber pendapatan didorong selaras dengan peningkatan investasi daerah, pengembangan industri rumahan serta pemanfaatan potensi dan sumber daya alam Kabupaten Lembata, sebagai loncatan dalam pembangunan ekonomi yang mengarah kepada salah satu sasaran akhir, yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Capaian Kinerja dalam rangka mewujudkan Misi Keempat: Peningkatan Pendapatan Daerah sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- I. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Dalam mewujudkan Misi Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, Sasaran Strategis Pertama yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Pencapaian Sasaran Strategis Pertama didukung sepenuhnya oleh Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama tersaji pada Tabel 3.28 berikut ini:

4.29. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2017			Capaian Terhadap RPJMD						Capaian Hingga Tahun 2017	Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	14.064 Juta	31.730.890.356	37.513.050.360	118%	21.308.269.969,02	22.499.236,76	28.603.504,63	28.892.662	34.664.625.389	37.513.050.360	37.513.050.360	35.000.000.000
2	Jumlah Investor	3	5	-	0%	-	-	-	-	2	-	5	6
3	Nilai Kontribusi atas Investasi bagi Pemerintah Daerah	495.000.000	40.343.935,361	61.750.999,674	153,06%	31,528,628,444	31,840,793,082	32,152,957,720	38,632.265,628	38,632.265,628	61.750.999,674	61.750.999,674	2602 juta

Berdasarkan Tabel di atas diketahui:

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2017, jumlah pendapatan asli daerah tercapai Rp. 37.513.050.360 atau 184% dari target 31.730.890.356.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah pendapatan asli daerah tercapai Rp. 34.664.625.389.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata mengalami peningkatan dari Rp. 34.664.625.389 ke Rp. 37.513.050.360.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 maka Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata tercapai Rp. 37.513.050.360, melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Lembata dengan target capaian Rp. 35.000.000.000.

Pencapaian program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena adanya pembenahan dan penertiban obyek pajak yang selama ini tidak terakomodir dalam data obyek pajak daerah Kabupaten Lembata, yang dilakukan dengan cara:

1. Upaya ekstensifikasi, yaitu dengan melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan upaya intensifikasi, yaitu dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Mendorong optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pungutan pendapatan asli daerah secara berjenjang.
3. Pembinaan dan peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lembata sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata. Manfaat PAD dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata Nampak dalam upaya pembangunan fasilitas umum di daerah Kabupaten Lembata, seperti: perbaikan Pasar Barat (Pasar Pada) dan Pasar Timur (Pasar Lamahora), pembangunan pustu dan polindes dan pembangunan TK dan PAUD di wilayah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaan Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah, *pertama*: Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata belum sadar akan kewajibannya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata; *kedua*: regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah belum dilaksanakan secara optimal bagi aparat pengelola pendapatan daerah; *ketiga*: Intervensi program dan kegiatan belum sepenuhnya mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah; *keempat*: kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya menempuh beberapa solusi antara lain; *pertama*: peningkatan kesadaran aparat pemerintah guna meningkatkan tata kelola pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah, *kedua*: Pemerintah Kabupaten Lembata terus melakukan sosialisasi, baik secara formal maupun non formal dalam rangka membangun kesadaran pada wajib pajak dan retribusi daerah demi pembangunan daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp.

1.894.239.204 atau 92,45% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.048.914.450 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 12% atau Rp. 269.549.550 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.318.464.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 118%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 92,45%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

- 1) Pendataan Subyek dan Obyek Pajak;
- 2) Penagihan PAD dan Piutang Daerah;
- 3) Penyuluhan dan Sosialisasi Sadar Pajak;
- 4) Penyusunan *Roadmap* Potensi Pendapatan Asli Daerah;
- 5) Pengadaan Sarana Pemungutan PAD;
- 6) Penyusunan Produk Hukum tentang PAD;
- 7) Pendampingan Penerapan dan Pengoperasian Aplikasi SISMIOP PBB P2;
- 8) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Pendapatan Daerah;
- 9) Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Pendapatan Daerah dengan Dunia Usaha/Pelaku Usaha; dan
- 10) Studi Banding Pengelolaan PAD.

2. Jumlah Investor.

Pada tahun 2017 tidak ada penambahan jumlah investor di Kabupaten Lembata. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya sebatas pada koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan promosi.

Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 2 investor dari target 6 investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata. Kedua investor itu adalah: CV Cahaya Sinar Kasih dengan usaha perkebunan jati serta CV Baleo Cipta Fauna yang bergerak pada usaha ternak babi.

Capaian kinerja Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2017 tidak ada penambahan jumlah investor di Kabupaten Lembata.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka tercapai 5 investor, yaitu PT Emas Ikan Samudra Indonesia, PT East Atadei Geotermal, PT Cendana Indopearls, CV Cahana Sinar Kasih dan CV Baleo Cipta Fauna, belum mencapai target akhir RPJMD yaitu 6 investor.

Kehadiran investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lembata membawa manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Lembata dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan nilai kontribusi atas Investasi bagi Pemerintah Daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya disebabkan karena kehadiran investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kondisi infrastruktur Kabupaten Lembata masih belum memberikan harapan untuk para investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dengan kemampuan keuangan daerah yang ada sehingga para investor dapat berinvestasi di wilayah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp 121.009.999 atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 121.009.999 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 17% atau Rp. 25.422.801 dari pagu anggaran*

murni sebesar Rp. 146.432.800). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 153,06%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan antara lain:

- 1) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - 2) Promosi dan Kerjasama Investasi.
3. Nilai Kontribusi atas Investasi bagi Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2017, nilai kontribusi dan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar Rp. 61.750.999.674 atau 153,06% dari target Rp. 40.343.935.361.

Sedangkan pada tahun 2016, nilai kontribusi dan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar Rp. 40.343.935.361.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 nilai kontribusi dan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Lembata mengalami peningkatan dari Rp. 40.343.935.361 pada tahun 2016 ke Rp. 61.750.999.674 pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kontribusi investor.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan target akhir RPJMD dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka nilai kontribusi dan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Lembata telah mencapai Rp. 61.750.999.674, belum mencapai target akhir RPJMD, dengan nilai kontribusi dan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar Rp. 2602 Juta.

Manfaat Kontribusi investasi bagi Pemerintah Kabupaten Lembata adalah meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lembata. Penambahan nilai kontribusi investor mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata meningkat setiap tahun.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kondisi infrastruktur Kabupaten Lembata masih belum memberikan harapan untuk para investor untuk berinvestasi di wilayah kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dengan kemampuan keuangan daerah yang ada sehingga para investor dapat berinvestasi di wilayah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tiga sebesar Rp 121.009.999 atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 121.009.999 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 17% atau Rp. 25.422.801 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 146.432.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 153,06%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan antara lain:

- 1) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
- 2) Promosi dan Kerjasama Investasi.

II. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Investasi Daerah.

Dalam mewujudkan Misi Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Kedua yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Investasi Daerah. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua tersaji pada Tabel 3.29 berikut ini:

4.30. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kedua

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Publik	1	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	1	5

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, jumlah optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana publik masih tetap 1 sarana dan prasarana publik, yaitu Depot Mini BBM atau Jober (capaian pada awal RPJMD). Walaupun tidak ada capaian pada tahun 2017, namun optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana publik tetap berjalan dengan kegiatan pemeliharaan terhadap asset /fasilitas Depot Mini BBM/Jobber.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana publik juga masih tetap 1 sarana dan prasarana publik, yaitu Depot Mini BBM atau Jober (capaian pada awal RPJMD) dengan bentuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana publik sebatas pada pemeliharaan terhadap asset /fasilitas Depot Mini BBM/Jobber.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, tidak terjadi penambahan pada pemanfaatan sarana dan prasarana publik.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana publik masih sebatas pemeliharaan terhadap asset /fasilitas Depot Mini BBM/Jobber, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah sarana dan prasarana publik ditargetkan tercapai 5 sarana dan prasarana publik.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah walaupun telah memiliki Depot Mini BBM/Jobber, namun sarana dan prasarana publik ini belum berfungsi karena kolam labuh dermaga yang ada tidak dapat disandari Kapal Pertamina dengan bobot diatas 3000Dwt.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata masih melakukan pembenahan perencanaan teknis dermaga (kolam labuh), sehingga dapat disandari Kapal Pertamina dengan bobot diatas 3000 Dwt.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 146.233.900 atau 96,82% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 151.033.900 (*pagu anggaran ini tidak mengalami penurunan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 151.033.900*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 96,82%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Sarana/Prasarana Publik dengan kegiatan Koordinasi pelaksanaan Operasional Depot Mini BBM/Jobber.

Misi Kelima: Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur berupa infrastruktur jalan, listrik, air, sarana ibadah serta sarana sosial. Pembangunan infrastruktur tersebut dimaksudkan pada mewujudkan “Lembata Benderang dan Lembata Bersimbur Air 2014”. Di samping pada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada destinasi pariwisata guna mendukung pembangunan

pariwisata di Kabupaten Lembata. Capaian Kinerja dalam rangka mewujudkan Misi Kelima: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara.

Dalam mewujudkan Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Pertama yang diusung adalah Meningkatnya Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara. Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama sebagaimana tersaji pada Tabel 3.30 berikut ini:

3.30. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Pertama

NO	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Prosentase Panjang Ruas Jalan yang Memenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubun gkan Semua Pusat Kegiatan	20%	19,0 5 KM	17,05 KM	89,7 4%	4%	4%	5%	5,88 %	2,38 %	2,51%	43,77%	85%
2.	Prosentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pen- capaian SPM terhadap angka mobi- litas yang ditentukan	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	65%
3.	Prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Keselamatan Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubun gkan seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah	25%	-	-	-	10,4%	10,8 %	11,1%	10,8 %	0%	-	68%	60%
4.	Prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria keselamatan	25%	-	-	-	6,41%	8,80 %	7,65%	10,6 0%	0%	-	58,46%	50%

	terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubun gkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah												
5.	Prosentase Peralatan Kebinamar- gaan yang Dapat Ber- fungsi den- gan Baik	50%	4	6	100 %	82%	82%	82%	45%	64%	55%	55%	60%
6.	Prosentase dari Pelaya- nan Sistem Drainase yang Bersifat Struktural dan Non Struktural	35%	266, 67 M	266,67 M	100 %	2,14%	3,57 %	2,14%	1,57 %	-	0,04%	46,61%	75%
7.	Rasio Keter- sediaan Jaringan Irigasi	40	3.25 0 Me- ter	3.250 Meter	100 %	5	7	14	12	10	4	92	100
8.	Prosentase Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubun gkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	18,18%	2	-	0%	1%	1%	3%	1%	1%	0%	23,5%	100%
9.	Prosentase Jumlah Halte pada Setiap Kabupaten/ Kota yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	0%	2	2	100 %	*	*	*	0%	0%	100%	50%	100%
10.	Prosentase Jumlah Pelabuhan Penyeberang an pada Kabupaten/ Kota yang Memiliki Pelayanan Angkutan Penyeberang an yang Beroperasi pada Lintas Penyeberang an dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran										5,26%		
		0%	2 Unit	2 Unit	100 %	*	10%	26%	36,8 4%	0%		78,10%	50%
11.	Prosentase Jumlah Kapal Penyeberang an yang Beroperasi pada Lintas dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Telah Ditetapkan Lintas	50%	100 %	-	0%	20%	*	*	40%	20%	0%	130%	75%

Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota													
12.	Prosentase jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia Jaringan Jalan Kabupaten	7,55%	-	-	-	*	*	*	75%	75%		157,55%	58, 125%
13.	Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Trayek di Dalam Kabupaten/ Kota yang Menerapkan Standar Keselamatan	182	152	-	0%	-	-	-	-	-		182	1892
14.	Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan (Rambu, marka, Guardial dan PJU.	82	2	2	100 %	*	*	*	1	3	2	88	111
15.	Jumlah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji.	75	750 Unit	750 Unit	100 %	*	*	300	484	750	750	2466	1291

*) Tidak ada data

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Prosentase Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan.

Pada tahun 2017 prosentase Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan tercapai 87% atau 17,05 KM dari target 19,5 KM.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua pusat kegiatan tercapai 43,15% atau 16,19 KM dari target 37,52 KM.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase panjang ruas jalan yang menenuhi kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua pusat kegiatan mengalami peningkatan dari 16,19 KM pada tahun 2016 ke 17,05 KM pada tahun 2017.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan akhir RPJMD dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka Prosentase Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan tercapai 43,77% atau 298.05 Km, yang terdiri dari 20% atau 136 Km Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan pada awal RPJMD, 4% atau 27 Km Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan pada tahun 2012, 4% atau 27 Km Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan pada tahun 2013, 5% atau 34 Km Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan pada tahun 2014, 5,88% atau 40 Km Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan pada tahun 2015, 2,38% atau 16 Km Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan pada tahun 2016 dan 2,51% atau 17,01 Km Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD, dengan Prosentase Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua Pusat Kegiatan ditargetkan tercapai 50%.

Panjang Ruas Jalan yang Menenuhi Kriteria Keselamatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Semua

Pusat Kegiatan bermanfaat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan untuk memperlancar arus orang maupun barang serta menurunkan biaya transportasi orang maupun barang.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikato Kinerja ini adalah struktur tanah serta kualitas pengerjaan jalan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal nasional karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pengerjaan jalan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan untuk memenuhi kriteria keselamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 51.332.762.328 atau 90,15% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 56.939.580.709 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 23% atau Rp. 16.953.092.434 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 73.892.673.143*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 89,74%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 90,15%.

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Satu didukung oleh pelaksanaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pembangunan Jalan;
- 2) Pembangunan Jembatan; dan
- 3) Peningkatan Jalan.

2. Prosentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan ditargetkan.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka Prosentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan masih menggunakan kondisi awal RPJMD, yaitu 25%, belum mencapai target akhir RPJMD dengan Persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan ditargetkan tercapai 65%.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen agar pada tahun-tahun mendatang dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud pada Tahun Anggaran 2017, maka alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur.

3. Prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja “prosentase panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan dalam wilayah.”

Pada tahun 2016 juga, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja “prosentase panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh

panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan dalam wilayah.”

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2017 dan pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka Prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah tercapai 68% atau 463 Km (capaian tahun 2015), yang terdiri dari 25% atau 170 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan pada awal RPJMD, 10,4% atau 71 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan pada tahun 2012, 10,8% atau 73 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan pada tahun 2013, 11,1% atau 75 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan pada tahun 2014 dan 10,8% atau 73 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan pada tahun 2015, melampaui target akhir RPJMD dengan prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kondisi Jalan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan ditargetkan tercapai 60% atau 408 Km.

Analisis sumber daya keuangan dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat diukur karena pada tahun anggaran 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

4. Prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja “prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat kota dalam wilayah.”

Pada tahun 2016 juga, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja “prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat kota dalam wilayah.”

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena pada tahun 2017 dan pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka Prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah tercapai 58,46% atau 397 Km (capaian tahun 2015), yang terdiri dari 25% atau 170 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah pada awal RPJMD, 6,41% atau 44 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah pada tahun 2012, 8,80% atau 60 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah pada tahun 2013, 7,65% atau 52 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah pada tahun 2014 dan 10,6% atau 72 Km Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat

Kegiatan dalam Wilayah pada tahun 2015, melampaui target RPJMD dengan prosentase Panjang Jalan yang Memenuhi Kriteria Kecepatan terhadap Seluruh Panjang Jalan yang Menghubungkan Seluruh Pusat Kegiatan dalam Wilayah ditargetkan tercapai 50% atau 400 Km.

Analisis sumber daya keuangan dan analisis atas pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat diukur karena pada tahun anggaran 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

5. Prosentase Peralatan Kebinamargaan yang Dapat Berfungsi Dengan Baik.

Pada tahun 2017, peralatan kebinamargaan berfungsi dengan baik tercapai 100% atau 6 peralatan kebinamargaan dari target 6 peralatan kebinamargaan.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase peralatan kebinamargaan berfungsi dengan baik tercapai 100% atau 7 peralatan kebinamargaan dari target 7 peralatan kebinamargaan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase peralatan kebinamargaan dengan baik mengalami penurunan dari 64% atau 7 peralatan kebinamargaan pada tahun 2016 ke 55% atau 5 peralatan kebinamargaan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena peralatan kebinamargaan sudah tidak layak digunakan, sementara Pemerintah Kabupaten Lembata belum mencari alternatif pengadaan peralatan kebinamargaan.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD Hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, maka prosentase peralatan kebinamargaan berfungsi dengan baik tercapai 55% atau 6 peralatan kebinamargaan, belum mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase peralatan kebinamargaan dapat berfungsi dengan baik ditargetkan tercapai 60% atau 7 peralatan kebinamargaan.

Peralatan kebinamargaan milik Pemerintah Kabupaten Lembata bermanfaat untuk membantu Pemerintah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum, misal-

nya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lembata dalam melaksanakan pekerjaan jalan dan jembatan serta sebagai peralatan tanggap cepat darurat apabila terjadi bencana atau musibah yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan dan infrastruktur, seperti longsor yang menutupi badan jalan dan jematan ambruk, erta bencana banjir.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah peralatan kebinamargaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lembata belum sepenuhnya memenuhi tuntutan pelaksanaan urusan pekerjaan umum, karena kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan untuk menambah jumlah peralatan kebinamargaan menjadi lebih lengkap untuk mendukung pelaksanaan urusan pekerjaan umum di wilayah Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata melalui kemampuan keuangan daerah yang ada terus menambah jumlah peralatan kebinamargaan dan upaya memperbaiki peralatan kebinamargaan yang rusak agar dapat berfungsi dengan baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 11.829.300 atau 49,03% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 432.012.769,50 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 16% atau Rp. 59.974.473 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 372.038.297*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 49,03%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembangunan, Pengadaan

dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Kebinamargaan dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat.

6. Prosentase dari Pelayanan Sistem Drainase yang Bersifat Struktural dan Non Struktural.

Pada tahun 2017, prosentase pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural tercapai 100% atau pembangunan drainase 266,67 meter dari target 266,67 meter.

Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila capaian kinerja dari capaian awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka prosentase pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural tercapai 46,61% atau 326,26 Km drainase, yang terdiri dari 35% atau 245 Km dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural pada awal RPJMD, 2,14% atau 15 Km dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural pada tahun 2012, 3,57 % atau 25 Km dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural pada tahun 2013, 2,14% atau 15 Km dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural pada tahun 2014, 1,57% atau 11 Km dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural pada tahun 2015 dan 0,04% atau 0,26 Km dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural ditargetkan tercapai 75% atau 510 Km Drainase dari total keseluruhan 100% atau 679,9 Km drainase.

Saluran drainase dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian terhadap badan jalan yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Lembata. Dengan adanya saluran drainase yang bagus, sistem penyaluran air dapat berfungsi dengan baik sehingga mencegah banjir dan genangan air yang terjadi di badan jalan yang memungkinkan terjadinya kerusakan badan jalan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kondisi geografis wilayah Kabupaten Lembata yang berbukit dan tidak rata, menyebabkan banyak saluran drainase tidak dapat berfungsi dengan baik atau rusak karena tanah longsor menutupi saluran drainase yang dapat menyebabkan kerusakan badan jalan karena banjir atau genangan air.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk menambah jumlah jembatan yang berfungsi sebagai tempat penyaluran air banjir dan air hujan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 752.617.300 atau 92,63% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 812.508.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 71% atau Rp. 1.984.878.589 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.797.386.598*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 92,63%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

7. Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi.

Pada tahun 2017, rasio ketersediaan jaringan irigasi tercapai 100% atau penyediaan jaringan irigasi sepanjang 3250 meter dari target 3250 meter jaringan irigasi.

Sedangkan pada tahun 2016, rasio ketersediaan jaringan irigasi tercapai 100% atau penyediaan jaringan irigasi sepanjang 8206 meter dari target 8206 meter jaringan irigasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, rasio ketersediaan jaringan irigasi mengalami penurunan dari 10% atau 8206 meter pada tahun 2016 ke 4 % 3250 meter pada tahun 2017.

Penurunan ini disebabkan karena alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya diperuntukan penyediaan jaringan irigasi sepanjang 3250 meter.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD Hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD, maka rasio ketersediaan jaringan irigasi tercapai 92% 75.409 Meter, yang terdiri dari ketersediaan jaringan irigasi sebesar 40% atau 32.822 meter pada awal RPJMD, ketersediaan jaringan irigasi sebesar 5% atau 4103 meter pada tahun 2012, ketersediaan jaringan irigasi sebesar 7% atau 5744 meter pada tahun 2013, ketersediaan jaringan irigasi sebesar 14% atau 11.488 meter pada tahun 2014, ketersediaan jaringan irigasi sebesar 12% atau 9847 meter pada tahun 2015, ketersediaan jaringan irigasi sebesar 10% atau 8206 meter pada tahun 2016 dan ketersediaan jaringan irigasi sebesar 4% atau 2350 meter pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan rasio ketersediaan jaringan irigasi ditargetkan tercapai 100% atau 82.065 meter jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Lembata.

Jaringan irigasi dibangun dengan tujuan untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi, masyarakat petani Kabupaten Lembata dapat pengolah lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah iklim dan curah hujan tidak menentu menyebabkan jaringan irigasi yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik karena debit air yang digunakan dalam rangka pengairan dan irigasi mengalami penurunan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk terus melakukan pembenahan di bidang pengairan dan irigasi dengan kemampuan keuangan daerah yang ada sehingga masyarakat petani dapat Kabupaten Lembata dapat pengolah lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 5.113.245.264 atau 89,02% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 5.743.970.101 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 1% atau Rp. 48.602.301 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 5.695.367.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 89,02%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pembangunan Jaringan Irigasi; dan
 - 2) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.
8. Prosentase Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase jumlah angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota tercapai 100% atau 2 unit angkutan umum dari target 2 unit angkutan umum.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD Hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka prosentase jumlah angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota mencapai 23,5% atau 31 unit angkutan umum (capaian tahun 2016), yang terdiri dari 18,18% atau 24 unit Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada awal RPJMD, 1% atau 1 unit Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2012, 1% atau 1 unit Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, 3% atau 2 unit Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun

2014, 1% atau 1 unit Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dan 1% atau 1 unit Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2016, belum mencapai target akhir RPJMD dengan Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ditargetkan tercapai 100% atau 134 Unit angkutan umum.

Di wilayah Kabupaten Lembata, angkutan umum berperan sebagai salah satu sarana mobilitas masyarakat, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Dengan adanya angkutan umum, masyarakat daerah tertinggal dan daerah terpencil dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah keadaan topografi wilayah Kabupaten Lembata yang berbukit, menyebabkan ada beberapa daerah tertinggal dan terpencil masih terisolir karena belum dapat dijangkau angkutan umum.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pembuatan jalan dan jembatan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Diharapkan, pada tahun-tahun mendatang, semua daerah tertinggal dan terpencil di wilayah kabupaten lambat dapat dijangkau angkutan umum.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

9. Prosentase Jumlah Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek.

Pada tahun 2015, prosentase jumlah halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 100% atau 2 unit halte dari target 2 unit halte yang dibangun.

Sedangkan pada tahun 2016, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, maka prosentase jumlah halte yang dibangun tercapai 50% atau 2 halte, mencapai target akhir RPJMD dengan prosentase jumlah halte ditargetkan tercapai 100% atau 4 halte.

Pembangunan halte di Kabupaten Lembata bermanfaat sebagai tempat terminal kecil dalam wilayah kota, yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat perhentian angkutan kota, untuk memobilisasi penumpang dalam kota.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sarana dan fasilitas umum di bidang perhubungan. Masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas umum ini dengan aktivitas lain, seperti tempat tongkrongan masyarakat.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan penertiban dengan menerjunkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan tindakan-tindakan masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas umum ini dengan aktivitas lain.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 59.742.000 atau 100% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 59.742.000 (*pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran murni sebesar Rp.59.742.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Indikator Kinerja Empat didukung oleh pelaksanaan Program Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Pembangunan Halte.

10. Prosentase Jumlah Pelabuhan Penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran.

Pada tahun 2017, Prosentase Jumlah Pelabuhan Penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran tercapai 100% atau terbangunnya 2 unit pelabuhan penyebrangan dari target 2 unit pelabuhan penyebrangan.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran tidak dapat diukur karena pelaksanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada tahun ini adalah penambahan jumlah sarana dan fasilitas pelabuhan laut dan pedesaan sebanyak 15 jenis atau 100% dari target 15 jenis.

Capaian tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 maka prosentase jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran tercapai 78,10% atau 30 unit pelabuhan, yang terdiri dari 10% atau 4 unit Pelabuhan Penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran pada tahun 2013, 26% atau 10 unit Pelabuhan Penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran pada tahun 2014, 36,84% atau 14 unit Pelabuhan Penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran pada tahun 2015 dan 5,26% atau 2 unit Pelabuhan Penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran pada tahun 2017 melampaui target akhir RPJMD yaitu 50% atau 19 Unit Pelabuhan.

Pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Lembata bertujuan untuk mendukung tranpostasi laut antar daerah dalam Kabupaten Lembata, maupun antar kabupaten. Dengan adanya transportasi laut, kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten Lembata meningkat.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasara Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih minimnya sarana dan fasilitas pendukung pada pelabuhan penyebrangan, seperti ruang tunggu, menara/mercusuar serta sarana dan fasilitas pendukung lainnya.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan pembenahan berupa penambahan sarana dan fasilitas perhubungan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada agar pelayanan angkutan penyebrangan dapat berjalan secara optimal.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 954.062.900 atau 95,10% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 1.003.227.100 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 36% atau Rp. 566.060.900 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 1.569.288.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 95,10%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pelabuhan Laut.

11. Prosentase Jumlah Kapal Penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Telah Ditetapkan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2017, tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah

yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota sebesar 100% atau 1 jenis kapal penyeberangan dari target 1 unit kapal penyeberangan.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Jika realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka prosentase jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota tercapai 130% atau 7 unit kapal penyeberangan (capaian tahun 2016), yang terdiri dari 50% atau 3 unit kapal penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Telah Ditetapkan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada awal RPJMD, 20% atau 1 unit kapal penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Telah Ditetapkan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada tahun 2012, 40% atau 2 unit kapal penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Telah Ditetapkan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dan 20% atau 1 unit kapal penyeberangan yang Beroperasi pada Lintas dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Telah Ditetapkan Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada tahun 2016, telah melampaui target akhir RPJMD yaitu 75% kapal penyeberangan.

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, kapal laut/kapal penyeberangan merupakan salah satu transportasi yang paling ideal untuk mobilisasi masyarakat Kabupaten Lembata, baik mobilisasi dalam daerah di wilayah Kabupaten Lembata, maupun mobilisasi antar kabupaten.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih banyak kapal penyebrangan yang belum sepenuhnya menerapkan standar keselamatan pelayaran, seperti peralatan renang pada saat terjadinya musibah laut.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk menghindari musibah laut, seperti kapal tenggelam dengan adanya rekonedasi atau larangan berlayar pada saat cuaca buruk.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

12. Prosentase jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia Jaringan Jalan Kabupaten.

Pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten tercapai 75% atau 3 unit angkutan umum dari target 50% atau 2 unit angkutan umum dari total keseluruhan 100% atau 4 unit angkutan umum.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila capaian kinerja dari capaian awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka prosentase jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten tercapai 157,55% atau 11 unit angkutan umum (capaian tahun 2016), yang terdiri dari 7,55% atau 1 unit angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia Jaringan Jalan Kabupaten pada awal RPJMD, 75% atau 5 unit angkutan umum

yang melayani wilayah yang telah tersedia Jaringan Jalan Kabupaten pada tahun 2015 dan 75% atau 5 unit angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia Jaringan Jalan Kabupaten pada tahun 2016, melampaui target akhir RPJMD dengan prosentase jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten ditargetkan mencapai 58,125% atau 4 unit angkutan umum dari target 7 unit angkutan umum atau 100%.

Di wilayah Kabupaten Lembata, angkutan umum yang beroperasi pada wilayah yang tersedia jaringan jalan kabupaten berperan sebagai salah satu sarana mobilitas masyarakat di desa maupun di kota. Dengan adanya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan kabupaten, intensitas mobilisasi masyarakat meningkat.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah kondisi jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Lembata masih sangat memprihatinkan karena kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

13. Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Trayek di Dalam Kabupaten/Kota yang Menerapkan Standar Keselamatan.

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak ada pencapaian terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini. Hal ini disebabkan karena tidak ada pelaksanaan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila hasil kinerja dari kondisi awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2011–

2016, maka jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang menerapkan standar keselamatan tercapai 182 angkutan umum (capaian pada awal RPJMD), belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang menerapkan standar keselamatan ditargetkan tercapai 1892 angkutan umum.

14. Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, marka, Guardial dan PJU).

Pada tahun 2017, jumlah fasilitas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) sebanyak 2 fasilitas perlengkapan atau 100% dari target 2 fasilitas perlengkapan. Kedua fasilitas perlengkapan itu adalah 1 set papan penunjuk jalan dan marka jalan sepanjang 4000 meter.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah fasilitas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) sebanyak 3 fasilitas perlengkapan atau 100% dari target 3 fasilitas perlengkapan. Ketiga fasilitas perlengkapan itu adalah pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 15 unit, pengadaan marka jalan sebanyak 3500 meter dan pembangunan pagar pengaman jalan sepanjang 100 meter.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, mark, guardial dan PJU) mengalami penurunan dari 3 fasilitas perlengkapan jalan ke 2 fasilitas perlengkapan jalan. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017 alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya terbatas pada pengadaan 2 fasilitas perlengkapan jalan.

Apabila capaian kinerja dari capaian awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD, maka jumlah fasilitas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) mencapai 88 fasilitas perlengkapan jalan, yang terdiri dari 75 fasilitas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) diadakan pada awal RPJMD, 1 fasilitas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) diadakan pada tahun 2015, 3 fasilitas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) diadakan pada tahun 2016 dan 2 fasili-

tas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) diadakan pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 dengan jumlah fasilitas perlengkapan (rambu, marka, guardial dan PJU) , ditargetkan tercapai 111 fasilitas perlengkapan jalan.

Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardial dan PJU) diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, fasilitas perlengkapan jalan juga bermanfaat sebagai penunjuk arah dan tujuan bagi daerah-daerah di wilayah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih minimnya sarana dan fasilitas perlengkapan jalan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan jumlah fasilitas perlengkapan jalan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna Jalan di wilayah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 749.241.150 atau 96,66% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 775.140.650 (*pagu anggaran ini sudah mengalami peningkatan 4% atau Rp. 33.282.150 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 741.858.500*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 96,66%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Pengamanan Lalulintas dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas;
- 2) Pengadaan Marka Jalan; dan
- 3) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

15. Jumlah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji.

Pada tahun 2017, jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang wajib uji tercapai 750 unit kendaraan bermotor atau 100% dari target 750 unit kendaraan bermotor.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang wajib uji tercapai 750 kendaraan bermotor atau 98% dari target 764 unit kendaraan bermotor.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang wajib uji tidak mengalami penambahan.

Apabila capaian kinerja dari capaian awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka jumlah unit pengujian kendaraan bermotor yang wajib uji mencapai 2359 unit kendaraan bermotor, yang terdiri dari 75 unit kendaraan bermotor yang wajib uji pada awal RPJMD, 300 unit kendaraan bermotor yang wajib uji pada tahun 2014, 484 unit kendaraan bermotor yang wajib uji pada tahun 2015, 750 unit kendaraan bermotor yang wajib uji pada tahun 2016 dan 750 unit kendaraan bermotor yang wajib uji pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji ditargetkan tercapai 1291 unit kendaraan bermotor.

Pengujian kelayakan kendaraan bermotor bertujuan untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor untuk beroperasi di jalan raya. Hal dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalulintas serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih banyak masyarakat Kabupaten Lembata

yang belum sadar akan manfaat keselamatan dan kenyamanan dalam mengendara, sehingga tidak melengkapi kendaraanya dengan berbagai persyaratan, termasuk persyaratan wajib uji kelayakan kendaraan bermotor. Dampak lanjutnya adalah terjadi kecelakaan lalu lintas. Di Kabupaten Lembata, pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi karena kelalaian pengemudi yang tidak menerapkan standar keselamatan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam mengemudi melalui sosialisasi dan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya agar kendaraan bermotor yang beroperasi dapat memenuhi standar layak jalan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 137.422.300 atau 87,69% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 156.706.800 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 52% atau Rp. 53.467.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 103.239.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 87,69%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.

II. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan.

Dalam mewujudkan Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Kedua yang diusung adalah Meningkatnya Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan. Sasaran ini juga didukung secara penuh oleh Bagian Energi Baru dan Terbarukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua sebagaimana tersaji pada Tabel 3.31 Berikut ini:

3.31. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2017			Capaian Terhadap RPJMD						Capaian Hingga Tahun 2017	Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik.	8583 RT	3223	2706	83,95 %	4608	4709	5238	7295	1468	2706	33.977 RT	20.004 RT
2	Jumlah Lokasi Izin Usaha Pertambangan	10 IUP	-	-	0%	10	9	4	4	2	-	39 IUP	36 IUP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa:

1. Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik.

Pada tahun 2017, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik tercapai 2706 rumah tangga atau 83,95% dari target 3223 rumah tangga.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik tercapai 1468 rumah tangga.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami peningkatan dari 1468 rumah tangga ke 2706 rumah tangga.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya jalinan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan PT PLN Rayon Lembata dalam usaha interkoneksi jaringan listrik.

Apabila capaian kinerja dari capaian awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016, maka jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik tercapai 33.977 rumah tangga, yang terdiri dari 8583 rumah tangga yang menggunakan listrik pada awal

RPJMD, 4608 rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2012, 4709 rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2013, 5238 rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2014, 7295 rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2015, 1468 rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2016 dan 2706 rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan target jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebanyak 20.004 rumah tangga.

Pengembangan energi listrik bagi masyarakat Kabupaten Lembata bermanfaat untuk mengembangkan usaha ekonomi berbasis industri rumah tangga, pelayanan pemerintahan yang ada di wilayah desa dan kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satu pada tahun 2017 adalah; *pertama:* adanya gangguan/kerusakan baik pada mesin pembangkit maupun jaringan listrik, *kedua:* keterbatasan suplay bahan bakar minyak solar industri menyebabkan pelayanan operasional PLTD pada delapan wilayah tidak optimal, *ketiga:* rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber dari rekening listrik milik Pemerinah Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini Pemerintah Kabupaten Lembata telah bekerja sama dengan PT PLN Rayon Lembata untuk penerapan meteran listrik yang menggunakan pulsa (listrik pintar) untuk mengatasi kendala retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber dari rekening listrik milik Pemerinah Kabupaten Lembata serta kebijakan kerja sama interkoneksi jaringan listrik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata ke jaringan listrik milik PT PLN sedang dilakukan agar masyarakat desa dapat menikmati pelayanan listrik 24 jam.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis Kedua Indikator Kinerja Satu sebesar Rp. 6.215.485.531 atau 88,45% dari total pagu setelah perubahan

anggaran sebesar Rp. 7.026.732.000 (*pagu anggaran tidak mengalami penurunan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 7.026.732.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 83,95%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 88,45%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan antara lain:

- 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2) Fasilitasi dan Stimulasi Operasional PLTD;
 - 3) Perluasan Jaringan Listrik;
 - 4) Interkoneksi Jaringan Listrik; dan
 - 5) Uji Laik Operasi Ketenagalistrikan.
2. Jumlah Lokasi Izin Usaha Pertambangan.

Pada tahun 2017, tidak ada penambahan jumlah lokasi izin usaha pertambangan. Hal ini disebabkan karena urusan pertambangan yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lembata, pada tahun 2017, urusan ini dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah lokasi izin usaha pertambangan tercapai 2 lokasi atau 40% dari target 5 lokasi izin usaha pertambangan.

Capaian kinerja pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila capaian kinerja dari kondisi awal RPJMD hingga tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka jumlah lokasi izin usaha pertambangan tercapai 39 lokasi izin usaha pertambangan (capaian kinerja tahun 2016), yang terdiri dari 10 lokasi izin usaha pertambangan yang terjadi pada awal RPJMD, 10 lokasi izin usaha pertambangan yang terjadi pada tahun 2012, 9 lokasi izin usaha pertambangan yang terjadi pada tahun 2013, 4 lokasi izin usaha pertambangan yang terjadi pada tahun 2014, 4 lokasi izin usaha pertambangan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2 lokasi izin usaha pertambangan yang terjadi pada tahun 2016, melampaui target akhir RPJMD, dengan target usaha pertambangan ditargetkan tercapai 36 lokasi izin usaha pertambangan.

Penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena alasan pengalihan urusan di bidang pertambangan dari Kabupaten Lembata ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur:

III. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman yang Layak Huni.

Dalam mewujudkan Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Ketiga yang diusung adalah Meningkatnya Sarana dan Prasarana Permukiman yang Layak Huni. Sasaran Strategis ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua sebagaimana tersaji pada Tabel 3.32 Berikut ini:

3.32. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Ketiga

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARG ET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan	51%	48 Unit	48 Unit	100%	*	*	*	4,5%	0%	0,17 %	55,67%	82,7%

dan
kecukupan
minimum
luas
bangunan
serta
kesehatan
penghuniny
a

*) Tidak ada data

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya tercapai 100% atau pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya terapai 48 unit atau 100% dari target 48 unit rumah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Sedangkan pada tahun 2016, tidak ada palaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Capaian Kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena pada tahun 2016, tidak ada palaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD hingga tahun 2017 dibandingkan dengan tagret akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya mencapai 55,67%, yang terdiri dari 51% atau 14.429 cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang tercapai pada awal RPJMD, 4,5% atau 1237 cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya pada tahun 2015 dan 0,17% atau 48 cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya pada tahun 2017, belum mencapai

target akhir RPJMD dengan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya ditargetkan tercapai 82,7%.

Pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya di Kabupaten Lembata bertujuan pada menciptakan rumah hunian yang sehat, aman dan mendatangkan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Selain itu, pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya bertujuan pada membantu masyarakat Kabupaten Lembata yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu agar dapat memiliki rumah yang memenuhi standar keselamatan dan standar kesehatan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah minimnya tenaga pendamping atau fasilitator bagi masyarakat penerima bantuan rumah yang memenuhi standar keselamatan dan standar kesehatan, sehingga pelaksanaan kegiatan ini terkesan belum optimal.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada menambah tenaga pendamping atau fasilitator melalui pembukaan formasi CPNS pada tahun anggaran 2018 agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan optimal.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebesar Rp. 3.746.938.050 atau 99,01% dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.784.227.407 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 56% atau Rp. 1.364.783.507 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 2.491.443.900*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 99,01%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

IV. Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Penyediaan Air Bersih.

Dalam mewujudkan Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Keempat yang diusung adalah Meningkatnya Penyediaan Air Bersih. Sasaran ini didukung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua tersaji pada Tabel 3.33 Berikut ini:

1.33. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Keempat

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2016			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARG ET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat	30%	10.586	10.586	100%	*	*	25,78 %	24,20 %	14,07 %	7,54 %	78,57%	80%

*) Tidak ada data

Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa:

Pada tahun 2017, prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat tercapai 100% atau 10.586 masyarakat dari target 100% atau 10.586 masyarakat (*capaian kinerja ini merupakan luncuran dari Tahun Anggaran 2016*).

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat tercapai 58% atau 14.914 masyarakat dari target 100% atau 25.500 masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat mengalami penurunan dari 14.914 jiwa yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM (capaian tahun 2016) ke 10.586 jiwa yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM (capaian tahun 2017).

Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini merupakan tunggakan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 (luncuran) yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja sampai dengan tahun terakhir RPJMD dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat mencapai 78,59% atau 110.271 masyarakat, yang terdiri dari 30% atau 31.798 masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat pada awal RPJMD, 25,78% atau 27.325 masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat pada tahun 2014, 24,20% atau 25.650

masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat pada tahun 2015, 14,07% atau 14.913 masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat pada tahun 2016 dan 7,54% atau 10.586 masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan target capaian 80% atau 112.280 masyarakat dari total penduduk Kabupaten Lembata pada tahun 2017 sebanyak 140.350 jiwa.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Lembata. Di wilayah Kabupaten Lembata, akses terhadap air bersih diperoleh melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum adanya pemerataan distribusi air minum kepada masyarakat karena kurangnya debit air minum, sementara jumlah masyarakat yang mengakses air minum semakin bertambah tiap-tiap tahun.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan pengadaan sumur bor agar masyarakat dapat mengakses air bersih untuk kebutuhannya.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Keempat Indikator Kinerja ini adalah sebesar Rp. 1.961.784.350 atau 74,81% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 2.622.491.055 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 30% atau Rp. 1.109.008.091 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 3.731.499.146*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 74,81%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pengembangan Distribusi Air Minum; dan
- 2) Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih.

V. Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Fasilitas Komunikasi dan Informasi.

Dalam mewujudkan Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Kelima yang diusung adalah Meningkatnya Fasilitas Komunikasi dan Informasi. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata dan Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Lembata. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima tersaji pada Tabel 3.34 Berikut ini:

1.34. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kelima

No	Indikator Kinerja	Capaian Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2016			Capaian						Capaian Hingga Tahun 2017	Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Prosentase penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3

bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-komunikasi masyarakat													
2 . Prosentase kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah: Tidak dilaksanakan											5,96 %		
	0	9 Ke-lom-pok	9 Kelom-lom-pok	100%	*	*	*	-	-		5,96%	100	
3 . Jumlah surat kabar nasional / lokal	4	8	-	0%	3	2	-	-	-	-	9	10	
4 . Jumlah siaran radio lokal aktif	5	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0	7	
5 . Website milik Pemda	1	1	1	100%	-	-	1	-	-	-	1	1	
6 . Jumlah Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan Jumlah konferensi pers	50	350	350	100%	87	87	87	65	350	350	350	250	

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Prosentase Penyebaran Informasi secara Timbal Balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Masyarakat, baik Diminta maupun Tidak Diminta yang Dapat Dilakukan melalui Media Massa maupun Bentuk Media Komunikasi Lainnya dan/atau Lembaga-Lembaga Komunikasi Masyarakat.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka Prosentase penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada

masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat masih menggunakan capaian awal RPJMD, yaitu 0%, belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 dengan Prosentase penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat ditargetkan tercapai 8%.

2. Prosentase kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Pada tahun 2017, prosentase kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah tercapai 100% atau terbentuknya 9 kelompok dari target 9 kelompok.

Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Capaian Kinerja 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 karena pada tahun 2016 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka Prosentase kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

meningkatkan nilai tambah tercapai 5,96% atau 9 kelompok (capaian tahun 2017), belum mencapai target akhir RPJMD dengan Prosentase kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah ditargetkan tercapai 100%.

Kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah bertujuan untuk mempublikan informasi publik dan internet sehat.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud adalah rendahnya minat masyarakat untuk melaksanakan fungsi komunikasi sosial melalui internet karena komunikasi sosial melalui media ini dianggap belum begitu urgen dan mendatangkan manfaat bagi kehidupannya.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata terus melakukan sosialisasi dan pendekatan secara berkelanjutan agar masyarakat terbuka terhadap tuntutan teknologi informasi yang berkembang, termasuk komunikasi sosial melalui internet.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 43.485.750 atau 97,76%. Dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 44.843.850 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 38% atau Rp. 27.446.950 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 72.290.800*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 97,76%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan Kegiatan Kerjasama dengan Media Massa.

3. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal.

Pada tahun 2017 tidak ada penambahan jumlah surat kabar nasional/lokal yang ada di wilayah Kabupaten Lembata. Walaupun tidak ada penambahan, anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tetap dialokasikan pada peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan surat kabar nasional/lokal dalam upaya menyebarluaskan informasi pembangunan daerah.

Sedangkan pada tahun 2016 juga tidak ada penambahan jumlah surat kabar nasional/lokal yang ada di wilayah Kabupaten Lembata. Alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja ini pada peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan surat kabar nasional/lokal dalam upaya menyebarluaskan informasi pembangunan daerah.

Capaian kinerja Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 karena pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada penambahan jumlah surat kabar nasional/lokal.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah, maka jumlah surat kabar lokal/nasional sebanyak 9 surat kabar, yaitu Surat Kabar Harian Pos Kupang, Surat Kabar Harian Flores Pos, Surat Kabar Harian Timor Ekspres, Surat Kabar Harian Radar Timor, Surat Kabar Mingguan Suara Rakyat, Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Hariaan Lokal Aktualita, Surat Kabar Harian Lokal Likurai dan Surat Kabar Harian Media NTT, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah surat kabar lokal/nasional ditargetkan tercapai 10 surat kabar.

Pemerintah Kabupaten Lembata melakukan kerja sama dengan media surat kabar, baik nasional maupun lokal dengan tu-

juan pada penyebaran informasi pembangunan daerah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah adanya keterbatasan anggaran dalam melakukan kerja sama dengan kesembilan media surat kabar yang ada, sehingga tidak semua informasi pembangunan daerah Kabupaten Lembata terpublikasikan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada membuka website milik Pemerintah (www.lembatakab.go.id) pada mengakomodir informasi pembangunan daerah yang belum terpublikasikan melalui surat kabar, baik surat kabar lokal, maupun surat kabar nasional.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 220.356.950 atau 98,91%. Dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 222.784.900 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 81% atau Rp. 99.484.900 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 123.300.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 0%, tetapi realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 98,91%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan Kegiatan Kerjasama dengan Media Massa.

4. Jumlah Siaran Radio Aktif.

Indikator Kinerja Empat yaitu “Jumlah Siaran Radio Lokal Aktif” dalam rencana awal RPJMD sudah mencapai 5 siaran radio lokal. Namun dalam perkembangannya kelima siaran radio lokal ini tidak aktif karena alasan izin opsional. Dengan demikian

maka Pelaksanaan program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur, baik dari segi realisasi kinerja maupun dari segi analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

5. Jumlah *Website* Milik Pemda.

Pada Tahun 2017 masih terdapat 1 *Website* Milik Pemerintah Kabupaten Lembata masih dengan domain www.lembatakab.go.id.

Sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 1 *Website* Milik Pemerintah Kabupaten Lembata dengan domain www.lembatakab.go.id.

Walaupun sudah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD, namun masih ada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan berupa berupa pemeliharaan *website* Pemda masih tetap dilaksanakan.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah, maka *website* milik Pemerintah Kabupaten Lembata tercapai 1 *website*, mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 dengan *website* milik Pemda ditargetkan tercapai 1 *website*.

Website milik Pemerintah Kabupaten Lembata sebagai sarana bagi Pemerinah Kabupaten Lembata untuk mempublikasikan informasi pembangunan daerah, seperti informasi pembangunan daerah dan siaran pers. Selain itu, *website* milik Pemerintah Kabupaten Lembata digunakan pada menunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) yang telah berjalan mulai tahun 2015 serta mempermudah akses internet pada mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini yakni *Website* milik Pemerintah Kabupaten Lembata ini belum sepenuhnya mempublikasikan informasi pembangunan

Daerah Kabupaten Lembata. Hal ini disebabkan karena usia *website* ini belum mencapai lima tahun, sehingga saat ini Pemerintah Kabupaten Lembata sedang dalam proses untuk mempublikasikan semua program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan Daerah Kabupaten Lembata.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah, dalam hal ini semua SKPD pendukung dan pihak swasta untuk mempublikasikan semua program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan Daerah Kabupaten Lembata secara terbuka dan transparan agar semua pihak dapat mengikuti informasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kabupaten Lembata.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 224.010.700 atau 97,55% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 229.643.500 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 19% atau Rp. 53.154.900 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 282.798.400*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 97,55%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Penyediaan Jasa layanan Internet dan *Website* Pemerintah Daerah.

6. Jumlah Informasi Pembangunan Daerah dan Konferensi Pers.

Pada tahun 2017, jumlah informasi pembangunan daerah (IPD) dan jumlah konferensi pers tercapai 350 kali atau 100% dari target 350 kali. Bentuk informasi pembangunan dan konferensi pers yang dibuat adalah pengadaan kerja sama dengan Media Cetak Pos Kupang yang memuat siaran pers Pemerintah Kabupaten Lembata setiap hari terbitannya.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah informasi pembangunan daerah (IPD) dan jumlah konferensi pers tercapai 350 kali atau 100% dari target 350 kali. Bentuk informasi pembangunan dan konferensi pers yang dibuat adalah pengadaan kerja sama dengan Media Cetak Pos Kupang yang memuat siaran pers Pemerintah Kabupaten Lembata setiap hari terbitannya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 jumlah informasi pembangunan daerah dan konferensi pers tidak mengalami penambahan.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka Jumlah Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan Jumlah konferensi pers tercapai 350 Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan konferensi pers, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan Jumlah konferensi pers ditargetkan tercapai 250 Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan konferensi pers.

Informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata merupakan komitmen Pemerintah dalam mempublikasikan informasi pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan di Kabupaten Lembata secara terbuka dan transparan pada dapat diketahui dan diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lembata, demi meningkatkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan di Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja ini adalah media publikasi informasi pembangunan daerah Kabupaten Lembata tidak semuanya dikases oleh masyarakat Kabupaten Lembata karena karena media ini tersebar pada hanya segelintir masyarakat tertentu.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya untuk mengoptimalkan penyerapan informasi pembangunan daerah oleh masyarakat melalui media papan informasi agar masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 89.028.940 atau 98,40% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 90.475.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 27% atau Rp. 32.825.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 123.300.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 98,40%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

Misi Keenam: Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan

Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam secara optimal harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Pengelolaan potensi unggulan daerah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan daya dukung lingkungan. Capaian Kinerja dalam rangka mewujudkan Misi Keenam: Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan dijabarkan sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam mewujudkan Misi Kenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Pertama yang diusung adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran Strategis ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Lingkungan Hidup. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama tersaji pada Tabel 3.35 Berikut ini:

1.35. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Pertama

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi	4375 Ha	-	-	-	1766	1453	1527	10.597	10.597	-	30.315 Ha	6000 Ha
2	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Dikonservasi	2460 Ha	20 Ha	20 Ha	100%	*	*	3653	37	10	20	6180 Ha	3690 Ha
3	Cakupan Pengawasan terhadap Amdal	35	9 Kec. 50 lbg. usaha	9 Kec. 50 lbg. Usaha	100%	9	9	9	9	9	9	89	95
4	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	3 Ha	10 Ha	10 Ha	100%	10	10	10	10	10	10	63 Ha	90 Ha
5	Prosentase Penyebarluasan Informasi Bencana	50%	9 Desa/Kel	9 Desa/Kel	100%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	86%	90%
6	Prosentase Daerah Rawan Bencana yang Diban-gun	45%	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	*	*	*	6,12 %	5,10 %	5,10 %	61,32%	85%

*) Tidak ada data

Berdasarkan Tabel di atas diketahui:

1. Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi.

Pada Tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini karena urusan kehutanan yang semulanya menjadi kewenangan Kabupaten Lembata dilimpahkan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan pada tahun 2016, hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tercapai 10.597 Ha.

Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat diukur karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016, maka hutan dan lahan kritis yang telah direhabilitasi mencapai 30.315 Ha hutan dan lahan kritis Data tahun 2016), yang terdiri dari 4375 Ha hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada awal RPJMD, 1766 Ha hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2012, 1453 Ha hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2013, 1527 Ha hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2015, 10.597 Ha hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2015 dan 10.597 Ha hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2016, melampaui target RPJMD, dengan target hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tercapai 6000 Ha.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

2. Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Dikonservasi.

Pada tahun 2017, luas hutan dan lahan kritis yang dikonservasi seluas 20 Ha atau 100% dari target 20 Ha hutan dan lahan, yang terdiri dari konservasi 5 Ha hutan dan lahan kritis di Desa Napasabok, Kecamatan Ile Ape, konservasi 5 Ha hutan dan lahan kritis di Desa Wuakerong, Kecamatan Nagawutung, konservasi 5 Ha hutan dan lahan kritis di Desa Lamalera A, Kecamatan Wulandoni dan konservasi 5 Ha hutan dan lahan kritis di Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan.

Sedangkan pada tahun 2016, luas hutan dan lahan kritis yang dikonservasi sebesar 10 Ha.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017 luas hutan dan lahan kritis yang dikonservasi mengalami peningkatan dari 10 Ha hutan dan lahan pada tahun 2016 menjadi 20 Ha hutan dan lahan pada tahun 2017.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya upaya Pemerintah Kabupaten Lembata dalam peningkatan pelestarian hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Lembata.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 maka luas hutan dan lahan kritis yang dikonservasi tercapai 6.180 Ha, yang terdiri dari 2460 Ha hutan dan lahan kritis yang dikonservasi pada awal RPJMD, 3653 Ha hutan dan lahan kritis yang dikonservasi pada tahun 2014, 37 Ha hutan dan lahan kritis yang dikonservasi pada tahun 2015, 10 Ha hutan dan lahan kritis yang dikonservasi pada tahun 2016 dan 20 Ha hutan dan lahan kritis yang dikonservasi pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD, dengan hutan dan lahan kritis yang dikonservasi ditargetkan tercapai 3690 Ha.

Manfaat konservasi hutan dan lahan kritis di wilayah Kabupaten Lembata adalah pada mengurangi lahan kritis di luar kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan sangat kecil sehingga pengalokasian luasan lahan kritis/kerusakan hutan dan lahan dan cuaca yang tidak menentu.

Strategi yang dibangun pada memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan tersebut dengan melaksanakan kegiatan reboisasi atau penghijauan pada saat musim hujan dan pengadaaan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 101.712.500 atau 99,57% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 102.153.500 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 44% atau Rp. 79.073.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 102.153.500*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 99,57%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

3. Cakupan Pengawasan terhadap Amdal.

Pada tahun 2017, cakupan pengawasan terhadap AMDAL terlaksana pada 9 wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata.

Sedangkan pada tahun 2016, cakupan pengawasan terhadap AMDAL juga terlaksana pada 9 wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, pada tahun 2017, cakupan pengawasan terhadap AMDAL terlaksana pada 9 wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata. Hal ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya untuk pengawasan terhadap AMDAL pada 9 wilayah kecamatan di Kabupaten Lembata.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 maka cakupan pengawasan terhadap AMDAL tercapai 89 kali pada 9 wilayah kecamatan setiap tahun, yang terdiri dari 35 kali cakupan pengawasan terhadap AMDAL yang terjadi pada awal RPJMD, 9 kali cakupan pengawasan terhadap AMDAL pada tahun 2012, 9 kali cakupan pengawasan terhadap AMDAL pada tahun 2013, 9 kali cakupan pengawasan terhadap AMDAL pada tahun 2014, 9 kali cakupan pengawasan terhadap AMDAL pada tahun 2015, 9 kali cakupan pengawasan terhadap AMDAL pada tahun 2016 dan 9 kali cakupan pengawasan terhadap AMDAL pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan cakupan pengawasan terhadap AMDAL ditargetkan tercapai 95 pengawasan.

Pengawasan terhadap AMDAL dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan ketaatan penanggungjawab kegiatan dan/usaha.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah ketaatan penanggungjawab kegiatan dalam menyusun dokumen lingkungan sebagai instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah dan peran serta perbaikan kualitas lingkungan hidup pada lokasi kegiatan masih rendah.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya pada melakukan Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 663.901.450 atau 91,82% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 723.048.650 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penambahan 16% atau Rp. 98.099.050 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 624.949.600*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 91,82%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL.

4. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air.

Pada tahun 2017, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air tercapai 10 Ha atau 100% dari target 10 Ha.

Sedangkan pada tahun 2016, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air tercapai 10 Ha atau 100% dari target 10 Ha.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017 Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena anggarn yang dialokasikan tiap-tiap tahun hanya untuk Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air seluas 10 Ha.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 maka cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air tercapai 63 ha, yang terdiri dari 3 Ha wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dihijaukan pada awal RPJMD, 10 Ha wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dihijaukan pada 2012, 10 Ha wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dihijaukan pada 2013, 10 Ha wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dihijaukan pada 2014, 10 Ha wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dihijaukan pada 2015, 10 Ha wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dihijaukan pada 2016 dan 10 Ha wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang dihijaukan pada 2017, melampaui target akhir RPJMD, dengan hutan dan lahan kritis yang dikonservasi ditargetkan tercapai 90 Ha.

Manfaat terhadap wilayah rawan longsor dan sumber mata air adalah untuk mencegah terjadinya longsor di daerah rawan longsor dan menghijaukan daerah mata air untuk melestarikan sumber mata air. Pelaksanaan kegiatan ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Lembata, khususnya bencana tanah longsor dan bencana kekeringan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah masih ada segelintir masyarakat yang beraktivitas di sekitar daerah rawan longsor dan daerah mata air, misalnya dengan membuka ladang baru dengan cara menebang dan membakar

hutan, termasuk hutan di daerah mata air dan hutan pada daerah lawan longsor.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan upaya pencegahan terhadap kerusakan hutan di daerah rawan longsor dan daerah mata air dengan cara sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat hutan dan mata air pada kehidupannya. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Lembata juga telah menetapkan Peraturan Daerah pada menjaga kelestarian lingkungan di daerah rawan longsor dan daerah mata air.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 343.918.798 atau 89,19% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 385.622.956 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 8% atau Rp. 28.673.598 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 356.949.358*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan pada membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tercapai 89,19%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan kegiatan antara lain:

- 1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber air; dan
 - 2) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
5. Prosentase Penyebarluasan Informasi Bencana.

Pada tahun 2017, prosentase penyebarluasan informasi bencana tercapai 100% atau terlaksananya penyebarluasan informasi bencana ada 9 wilayah pada 9 wilayah kecamatan dari target rencana penyebarluasan informasi bencana ada 9 wilayah pada 9 wilayah kecamatan.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase penyebarluasan informasi bencana tercapai 100% atau terlaksananya penyebarluasan informasi bencana pada 9 wilayah kecamatan dari target rencana penyebarluasan informasi bencana pada 9 wilayah kecamatan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017 prosentase penyebarluasan informasi bencana tidak mengalami peningkatan.

Hal ini disebabkan karena adanya upaya alokasi anggaran pada melaksanakan program dan kegiatan ini terlaksana pada 9 desa pada 9 wilayah kecamatan tiap-tiap tahun, dari tahun pertama RPMJD sampai dengan tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah maka prosentase penyebarluasan informasi bencana tercapai 86% atau penyebarluasan informasi bencana pada 130 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Lembata, yang terdiri dari penyebarluasan informasi bencana sebesar 50% atau penyebarluasan informasi bencana pada 76 desa/kelurahan pada awal RPJMD, penyebarluasan informasi bencana sebesar 6% atau penyebarluasan informasi bencana pada 9 desa/kelurahan pada tahun 2012, penyebarluasan informasi bencana sebesar 6% atau penyebarluasan informasi bencana pada 9 desa/kelurahan pada tahun 2013, penyebarluasan informasi bencana sebesar 6% atau penyebarluasan informasi bencana pada 9 desa/kelurahan pada tahun 2014, penyebarluasan informasi bencana sebesar 6% atau penyebarluasan informasi bencana pada 9 desa/kelurahan pada tahun 2015, penyebarluasan informasi bencana sebesar 6% atau penyebarluasan informasi bencana pada 9 desa/kelurahan pada tahun 2016 dan penyebarluasan informasi bencana sebesar 6% atau penyebarluasan informasi bencana pada 9 desa/kelurahan pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD, dengan prosentase penyebarluasan informasi bencana ditargetkan tercapai 90% atau 136 Desa/Kelurahan.



Penyebarluasan informasi bencana di kabupaten Lembata bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi, resiko dan ancaman bencana, serta untuk meminimalisir tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat ketika terjadi bencana baik kerugian harta benda maupun keselamatan jiwa manusia.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah masih ada segelintir masyarakat yang masih bertahan pada wilayah atau daerah rawan bencana.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat agar masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana dapat direlokasikan ke daerah aman.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 11.612.400 atau 99,30% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 11.693.950 (*pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 11.693.950*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait

tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud hanya tercapai 4,17%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan Peman-tauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.

6. Prosentase Daerah Rawan Bencana yang Dibangun.

Pada tahun 2017, prosentase daerah raan bencana yang dibangun tercapai 100% atau terlaksananya pembangunan daerah rawan bencana pada 5 lokasi rawan bencana dari target 5 lokasi rawan bencana.

Sedangkan pada tahun 2016, prosentase daerah raan bencana yang dibangun tercapai 100% atau terlaksananya pembangunan daerah rawan bencana pada 5 lokasi rawan bencana dari target 5 lokasi rawan bencana.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, maka pada tahun 2017 prosentase daerah rawan bencana yang dibangun tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena anggaran pada membiayai program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Stragetis dan Indikator Kinerja ini dialokasikan pada pembangunan 5 daerah raan bencana.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011-2016 maka prosentase daerah rawan bencana yang dibangun tercapai 61,32% atau pepembangunan daerah rawan bencana sebanyak 60 titik/lokasi, yang terdiri dari pembangunnn daerah rawan bencana sebesar 45% atau pembangu-nan daerah rawan bencana sebanyak 44 titik/lokasi pada awal RPJMD, pembangunan daerah rawan bencana sebesar 6,12% atau pembangunan daerah rawan bencana sebanyak 6 titik/lokasi pada tahun 2015, pembangunan daerah rawan bencana sebesar 5,10% atau pembangunan daerah rawan bencana sebanyak 5 titik/lokasi pada tahun 2016, pembangunan daerah rawan bencana sebesar 5,10% atau pembangunan daerah rawan bencana sebanyak 5 ti-

titik/lokasi pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD, dengan prosentase penyebaran informasi bencana ditargetkan tercapai 85% atau 83 titik/lokasi dari total keseluruhan 98 lokasi/titik rawan bencana.

Pembangunan daerah rawan bencana di Kabupaten Lembata bertujuan pada melindungi masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana dari musibah bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Lembata, seperti gempa bumi, bencana banjir dan gunung meletus.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan daerah rawan bencana.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata berupaya pada terus membangun daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Lembata dengan kemampuan keuangan yang ada.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 1.269.300 atau 4,17% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 30.439.000 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 12% atau Rp. 4.000.300 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 34.439.300*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya tercapai 4,17%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan kegiatan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

II. Sasaran Strategis Kedua : Terbentuknya Kelompok Peduli Lingkungan.

Dalam mewujudkan Misi Kenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016, Sasaran Strategis Kedua yang diusung adalah Terbentuknya Kelompok Peduli Lingkungan. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama tersaji pada Tabel 3.36 Berikut ini:

1.36. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kedua

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1.	Pelayanan Informasi Status Lingkungan Hidup	3	2	2	100%	2	2	2	2	2	2	5	9
2.	Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	3	9	7	77,78 %	*	*	*	9	6	7	25	8
3.	Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan	2631	20 Ha	20 Ha	100%	*	10	10	10	10	20	2571 Ha	1783 Ha
4.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
5.	Penegakkan Hukum Lingkungan	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80

*) Tidak ada data

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Pelayanan Informasi Status Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2017, tersusunnya dokumen pelayanan informasi status lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen atau 100% dari target 2 dokumen pelayanan informasi status lingkungan hidup. Dokumen itu adalah dokumen Laporan Status Lingkungan Hidup dan Dokumen Basis Data Status Lingkungan Hidup.

Sedangkan pada tahun 2016, juga tersusunnya dokumen pelayanan informasi status lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen atau 100% dari target 2 dokumen pelayanan informasi status lingkungan hidup. Dokumen itu adalah dokumen Laporan Status Lingkungan Hidup dan Dokumen Basis Data Status Lingkungan Hidup.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, pelayanan informasi status lingkungan hidup tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kedua dokumen tersebut di atas merupakan dokumen pelayanan informasi status lingkungan hidup yang rutin dihasilkan setiap tahun, dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah pelayanan informasi status lingkungan hidup tercapai 2 informasi status lingkungan hidup, yang terdiri dari 3 informasi status lingkungan hidup yang tersusun pada awal RPJMD, dan 2 informasi status lingkungan hidup yang tersusun dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan informasi status lingkungan hidup yang tersusun ditargetkan tercapai 9 informasi status lingkungan hidup.

Pelayanan informasi status lingkungan hidup bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang status lingkungan hidup sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi bidang lingkungan hidup melalui dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah basis data yang dipergunakan dalam penyusunan SLHD masih kurang tersedia secara maksimal.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan tersebut dengan pengambilan data primer dan data sekunder melalui format data yang diberikan sampai di Pemerintah Kecamatan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 56.283.500 atau 96,79% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar

Rp. 58.150.000 (pagu anggaran ini sudah mengalami peningkatan 3% atau Rp. 1.450.000 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 56.700.000). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 96,79%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dengan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

2. Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan.

Pada tahun 2017, terbentuk 7 kelompok peduli lingkungan hidup, yaitu:

1. Kelompok Sarabisa, Desa lamalera A, Kecamatan Wulandoni;
2. Kelompok Lolon Aya Desa Napasoabok, Kecamatan Ile Ape;
3. Kelompok Tite Hena, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan;
4. Kelompok Tubung One, Desa Wailolong, Kecamatan Omesuri;
5. Kelompok Siaga Bencana Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape;
6. Kelompok Siaga Bencana Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan; dan
7. Kelompok Satu Desa Atu' Walupang, Kecamatan Buyasuri.

Sedangkan pada tahun 2016, jumlah kelompok peduli lingkungan hidup pada tahun 2016 tercapai 6 kelompok peduli lingkungan hidup. Keenam kelompok Peduli Lingkungan Hidup tersebut adalah:

1. Kelompok Merpati Putih Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape;
2. Kelompok Usaha Muda Desa kalikur WL, Kecamatan Buyasuri;
3. Kelompok Tani Sedang Mekar Wuakerong, Kecamatan Nagawutung;
4. Kelompok Tani Mula Wai Boto, Desa Labalimut, Kecamatan Nagawutung;

5. Kelompok Tani Eroq Reu Desa Leuburi, Kecamatan Buyasuri; dan

6. Kelompok Tani Wailaba Desa Tanjung Batu, Kecamatan Ile Ape.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, jumlah kelompok peduli lingkungan mengalami peningkatan dari 6 kelompok pada tahun 2016 ke 7 kelompok pada tahun 2017.

Apabila realisasi kinerja dari kondidi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah kelompok peduli lingkungan hidup tercapai 25 kelompok, yang terdiri dari 3 kelompok peduli lingkungan hidup yang terbentuk pada awal RPJMD, 9 kelompok peduli lingkungan hidup yang dibentuk pada tahun 2015, 6 kelompok peduli lingkungan hidup yang dibentuk pada tahun 2016 dan 7 kelompok peduli lingkungan hidup yang dibentuk pada tahun 2017, melampaui target akhir RPJMD dengan jumlah kelompok peduli lingkungan hidup ditargetkan tercapai 8 kelompok.

Kelompok peduli lingkungan hidup dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan keterbukaan informasi bidang lingkungan hidup melalui dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan indikator kinerja ini adalah keberlanjutan kelompok dan kurang teraksesnya informasi SLHD ke masyarakat.

Strategi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan tersebut dengan memberikan pemahaman (sosialisasi) terlebih dahulu sebelum dilaksanakan kegiatan ini.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp.343.918.798 atau 89,19% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 385.622.956 (*pagu anggaran ini tidak menga-*

lami penurunan dari pagu anggaran murni Rp. 385.622.956). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 77,78%, dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 89,19%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air dengan kegiatan antara lain:

- 1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber air; dan
- 2) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
3. Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan.

Pada tahun 2017, kerusakan hutan dan lahan berkurang 20 Ha atau 100% dari target pengurangan kerusakan hutan dan lahan 20 Ha.

Sedangkan pada tahun 2016 kerusakan hutan dan lahan berkurang 10 Ha.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017, pengurangan kerusakan kawasan hutan dan lahan mengalami peningkatan dari 10 Ha ke 20 Ha. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka pengurangan kerusakan kawasan hutan dan lahan tercapai 2571 Ha, yang terdiri dari pengurangan kerusakan kawasan hutan dan lahan seluas 2631 Ha pada awal RPJMD, pengurangan kerusakan kawasan hutan dan lahan seluas 10 Ha pada tahun 2013, pengurangan kerusakan kawasan hutan dan lahan seluas 10 Ha pada tahun 2014, penguran-

gan kerusakan kawasan hutan dan lahan seluas 10 Ha pada tahun 2015, pengurangan kerusakan kawasan hutan dan lahan seluas 10 Ha pada tahun 2016 dan pengurangan kerusakan kawasan hutan dan lahan seluas 20 Ha pada tahun 2017, belum mencapai target akhir RPJMD dengan luas kerusakan kawasan hutan dan lahan ditargetkan diturunkan menjadi 1783 Ha.

Manfaat di laksanakan kegiatan pengurangan kawasan hutan dan lahan kritis di kabupaten Lembata bertujuan untuk mengurangi lahan kritis di luar kawasan hutan, sekaligus menambah areal atau luasan hutan dan lahan yang bersifat produktif dan bermanfaat sebagai hutan dan lahan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat petani di wilayah Kabupaten Lembata.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja ini adalah minimnya alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan indikator Kinerja ini sehingga luasan lahan kritis yang dikurangi juga tercapai tidak maksimal dan tidak sesuai dengan target yang dicapai pada akhir RPJMD.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan sendiri secara swadaya maupun perorangan dalam rangka pengurangan hutan dan lahan kritis, seperti reboisasi dan pengadaan terasering.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp.101.712.500 atau 99,57% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 102.153.500 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 44% atau Rp. 79.073.500 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 181.227.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 100%, dan realisasi

keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 99,57%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena capaian kinerja yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini hanya terfokus pada kegiatan peningkatan operasi sarana dan prasarana persampahan dan operasional tempat pembuangan akhir berupa biaya operasional 2 truk sampah dan pembayaran jasa 30 tenaga kebersihan (pasukan kuning) yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kebersihan kota.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk masih menggunakan capaian awal RPJMD dengan rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk sebesar 0,3 belum mencapai target akhir RPJMD dengan rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk ditargetkan tercapai 0,5.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen agar pada tahun-tahun mendatang mengejar capaian terhadap Indikator Kinerja ini sesuai dengan target RPJMD.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp.745.531.561 atau 97,29% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 766.330.040 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 6% atau Rp. 51.631.800 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 817.961.840*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak tercapai, sedangkan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tercapai 97,29%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Persampahan dengan kegiatan Peningkatan Operasi Prasarana dan Sarana Persampahan.

5. Penegakkan Hukum Lingkungan.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017, maka penegakkan hukum lingkungan masih menggunakan capaian awal RPJMD dengan penegakkan hukum lingkungan tercapai 0,3 belum mencapai target akhir RPJMD dengan penegakkan hukum lingkungan ditargetkan tercapai 0,80.

Terhadap kendala di atas, Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen agar pada tahun-tahun mendatang mengejar capaian terhadap Indikator Kinerja ini sesuai dengan target RPJMD.

Karena ketiadaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud pada Tahun Anggaran 2017, maka alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud tidak dapat diukur.

II. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan.

Dalam mewujudkan Misi Kenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016,

Sasaran Strategis Ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan. Berikut Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama tersaji pada Tabel 3.37 Berikut ini:

1.37. Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Kedua

N O	INDIKATOR KINERJA	CA-PAIAN AWAL RPJMD	REALISASI TAHUN 2017			CAPAIAN TERHADAP RPJMD						CAPAIAN HINGGA TAHUN 2017	TARGET AKHIR RPJMD
			TAR GET	REALI SASI	% CAPAI AN	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Regulasi tentang Rencana Tata Ruang	5	1	-	0%	-	1	-	-	-	-	6	100
2	Penyelesaian Izin Lokasi	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	240
3	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Pertanahan	0	-	-	-	*	*	*	1	1	-	2	6

*) Tidak ada data

Berdasarkan Tabel di atas diketahui:

1. Jumlah Regulasi tentang Rencana Tata Ruang.

Pada tahun 2017, jumlah regulasi tentang rencana tata ruang tidak tercapai atau 0% dari target 1 regulasi tentang rencana tata ruang, yaitu Dokumen Ranperda RDTR & PZ Kawasan Perkotaan Lewoleba. Capaian kinerja ini disebabkan karena, regulasi tentang rencana detail tata ruang dan tata wilayah (Ranperda RDTR & PZ Kawasan Perkotaan Lewoleba) belum mencapai roses finalisasi.

Sedangkan pada tahun 2016, tidak disusun regulasi tentang rencana tata ruang.

Apabila realisasi kinerja dari capaian awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2011–2016, maka jumlah regulasi tentang rencana tata ruang tercapai 6 regulasi, yang terdiri dari 5 regulasi tentang rencana tata ruang yang disusun pada awal RPJMD dan 1 regulasi tentang rencana tata ruang yang disusun pada tahun 2013, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah regulasi tentang rencana tata ruang ditargetkan tercapai 100 regulasi.

Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruag dan Penetapan Zona Kawasan Perkotaan Lewoleba bertujuan untuk kepentingan penataan ruang dan wilayah Kabupaten Lembata dalam rangka menciptakan keteraturan di kota Lewoleba pada khususnya dan Kabupaten Lembata pada umumnya. Dengan adanya Perda penataan Kota, semua pembangunan di kota lewoleba dapat dikendalikan dan ditata sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini adalah belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana detail tata ruag dan penetapan zona kawasan perkotaan Lewoleba, sehingga pembangunan di wilayah Kabupaten Lembata terkesan belum memenuhi standar penataan kota.

Terhadap kendala ini Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruag dan Penetapan Zona Kawasan Perkotaan Lewoleba agar segala jenis pembangunan dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mewujudkan kota Lewoleba yang tertata dan teratur.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 166.931.400 atau 87,53% dari total pagu setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 190.719.900 (*pagu anggaran ini sudah mengalami penurunan 30% atau Rp. 82.112.100 dari pagu anggaran murni sebesar Rp. 272.832.000*). Dari pagu dan realisasi keuangan seperti yang telah digambarkan maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini *belum efisien* karena capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait tercapai 0%, tetapi realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud telah tercapai 87,53%.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Program Program Perencanaan Tata Ruang dengan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

2. Penyelesaian Izin Lokasi.

Dari tahun pertama RPJMD hingga tahun 2017 tidak ada penyelesaian izin lokasi.

Apabila realisasi kinerja dari target awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2011–2016 maka jumlah penyelesaian ijin lokasi tidak tercapai, sedangkan target akhir RPJMD, jumlah penyelesaian ijin lokasi sebanyak 115 ijin lokasi, capaian pada awal RPJMD.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini disebabkan karena tidak ada pengajuan berkas permohonan izin lokasi baik dari orang pribadi atau perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dimaksud.

3. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pertanahan.

Pada tahun 2017, tidak ada capaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Sedangkan pada tahun 2016, disusunnya 1 dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Pertanahan dari target 2 dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Pertanahan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pertanahan yang dihasilkan pada tahun 2017 tidak dapat diukur karena tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

Apabila realisasi kinerja dari kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2011–2016, maka jumlah dokumen kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Pertanahan tercapai 2 dokumen (capaian tahun 2016), yang terdiri dari 1 dokumen kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Pertanahan yang disusun pada tahun 2015 dan 1 dokumen kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Administrasi Pertanahan yang disusun pada tahun 2016, belum mencapai target akhir RPJMD dengan jumlah dokumen kebijakan Pemerintah Daerah bidang administrasi pertanahan ditargetkan tercapai 6 dokumen.

Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah di bidang administrasi pertanahan disusun dengan tujuan pada dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata maupun masyarakat dalam melaksanakan tugas dan urusan di bidang pertanahan.

Adapun kendala yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indiktor Kinerja dimaksud adalah belum adanya pemahaman aparatur dan masyarakat Kabupaten Lembata tentang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang administrasi pertanahan.

Terhadap kendala ini, Pemerintah Kabupaten Lembata telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Pertanahan agar Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dapat memahami kebijakan Pemerintah Daerah di bidang administrasi pertanahan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini tidak dapat diukur karena pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini.

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata, pada tahun 2017 didukung dengan pagu pendapatan sebesar Rp. 736.532.404.867,00 dengan realisasi pendapatan Rp. 731.607.806.482,62 atau 99,33%, dan pagu belanja sebesar Rp. 621.869.823.899,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 574.460.092.557,40 atau 92,38%. Rincian pendapatan dan belanja sebagai berikut:

NO	JENIS PENDAPATAN/BELANJA	PAGU	REALISASI
I.	PENDAPATAN	Rp. 736.532.404.867,00	Rp. 731.607.806.482,62
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.36.827.621.685,00	Rp.37.994.275.808,69
2.	Pendapatan Transfer	Rp.695.404.783.182,00	Rp.689.313.530.673,93
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp.4.300.000.000,00	Rp.4.300.000.000,00
II.	BELANJA	Rp. 621.869.823.899,00	Rp.574.460.092.557,40
1.	Belanja Operasi	Rp.491.317.240.541,00	Rp.460.900.282.314,00
2.	Belanja Modal	Rp.129.252.583.358,00	Rp.113.059.810.243,00
3.	Belanja Tak Terduga	Rp.1.300.000.000,00	Rp.500.000.000,00

Pagu Anggaran tersebut digunakan pada membiayai semua program dan kegiatan yang tersebar pada 35 (tiga Puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung dalam pencapaian sasaran dapat dilihat dalam Lampiran II.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata atau disingkat LAKIP Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 merupakan laporan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2017. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud pada menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2011–2016 dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata selama tahun 2017 menunjukkan keberhasilan pada mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2016 yang telah diukur dalam 37 (tiga puluh tujuh) Sasaran Strategis dan 130 (seratus tiga puluh) Indikator Kinerja.

Dari ke-130 Indikator Kinerja, 102 Indikator Kinerja dapat diukur berdasarkan prosentase skala capaian kinerja, 24 Indikator tidak dapat diukur karena tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 dan 1 indikator kinerja, yaitu Opini BPK belum dapat diukur karena pencapaian indikator kinerja terkait masih dalam penilaian BPK RI.

Pada menentukan Skala Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata, maka capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Lembata diukur melalui 102 Indikator Kinerja dapat diukur berdasarkan prosentase skala capaian kinerja. Capaian program kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah **90.81%** sehingga masuk dalam kategori capaian kinerja “**BAIK**” dengan gambaran sebagai berikut:

1. Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti Diklat PIM tercapai 87% atau 20 Aparatur dari target 39 Aparatur;
2. Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian tercapai 2 dokumen kepegawaian atau 100%;
3. Presentase Penurunan Temuan Administrasi Keuangan tercapai 59,65%;
4. Prosentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat Profesi tercapai 267%;
5. Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan tercapai 95% atau 50.098 penduduk dari target 52.8238 Penduduk;
6. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Sebanyak 19 kali atau 119% dari target 16 kali;
7. Prosentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai dengan Bidanganya tercapai 100% ata 50 aparatur dari target 50 aparatur;
8. Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda, Perbub dan Surat Keputusan Bupati) yang dihasilkan sebanyak 589 Produk Hukum Daerah atau 218% dari target 270 produk hukum daerah;
9. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Dipublikasi tercapai 4 Peraturan Perundang-Undangan atau 40% dari target 10 Peraturan Perundang-undangan;
10. Jumlah Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda dengan capaian 46 Kegiatan atau 92% dari target 50 kegiatan;
11. Jumlah Kerjasama Daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda dengan Pihak Ketiga) dengan capaian 0% dari target 5 Jenis Kerjasama;

12. Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah tercapai 4 kali koordinasi atau 100% dari target 4 kali koordinasi dan pengawasan badan Usaha Milik Daerah;
13. Jumlah Perda/Perbub/Keputusan Bupati mengenai Organisasi Perangkat Daerah dengan capaian 35 Perda/Perbub/Keputusan Bupati atau 81,39% dari target 43 Perda/Perbub/Keputusan Bupati;
14. Jumlah Peraturan Bupati tentang Tatalaksana tercapai 1 Peraturan Bupati atau 50% dari target 2 Peraturan Bupati;
15. Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tercapai 3 dokumen atau 75% dari target 4 Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
16. Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan sebanyak 22 kali atau 91,67% dari target 24 kali penyelenggaraan pemerintahan wilayah bawahan;
17. Prosentase Anggota DPR yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD tercapai 100% atau 25 anggota DPRD dari target 25 anggota DPRD;
18. Prosentase Sekolah Menerapkan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Baik tercapai 100% atau 446 sekolah dari target 446 sekolah;
19. Prosentase Penduduk Usia Dini yang Mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini tercapai 87,41% atau 4126 penduduk usia dini dari target 4716 penduduk usia dini;
20. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tercapai 73% atau 27.045 penduduk dari target 37.071 penduduk usia pendidikan dasar 9 tahun;
21. Prosentase Penduduk Usia Sekolah yang Mengenyam Pendidikan Menengah tercapai 58,25% atau 5002 penduduk dari target 8587 penduduk usia pendidikan menengah;
22. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dalam Kondisi Baik tercapai 50 sarana dan prasarana pendidikan atau 100% dari target 50 sarana dan prasarana pendidikan dasar 9 tahun;

23. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik tercapai 8 sarana dan prasarana atau 30,76% dari target 26 Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
24. Jumlah Pendidik yang Memenuhi Syarat Kompetensi tercapai 50 pendidik atau 35,12% dari target 142 pendidik;
25. Jumlah Perpustakaan Desa Sebanyak 46 Perpustakaan atau 657% dari target 7 Perpustakaan Desa;
26. Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS/Puskesmas/Pustu/Puskesdes tercapai 93,75% atau 18.750 Pcs Obat dan Perbekalan Kesehatan dari target 20.000 Pcs;
27. Frekuensi Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar tercapai 100% atau 12 kali dari target 12 kali Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar dalam kurun waktu setahun;
28. Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan tercapai 11 kali atau 92% dari target 12 kali pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dalam kurun waktu setahun;
29. Jumlah SOP Pelayanan Kesehatan tercapai 8 SOP atau 100% dari target 8 SOP;
30. Jumlah Lembaga Kemitraan tercapai 2 Lembaga mitra atau 200% dari target 1 lembaga mitra;
31. Prosentase Penurunan Gizi Buruk tercapai 71,65% atau penurunan kasus gizi buruk sebanyak 1,50% dari target 1,0%;
32. Jumlah Kasus AKB/AKI sebanyak 32 kasus atau 111% dari target 36 kasus;
33. Prosentase Desa /Kelurahan STBM tercapai 11% atau 17 desa/kelurahan STBM dari target 151 Desa/kelurahan STBM;
34. Prosentase RTM yang Memperoleh JamKemas/JamKesda/Jampersal/Rujukan tercapai 96,15% atau 625 rumah tangga miskin dari target 650 Rumah tangga miskin;
35. Prosentase PMKS tercapai 186% atau 93 PMKS dari target 50 PMKS;
36. Jumlah Kawasan Transmigrasi tidak tercapai atau 0% dari target 10 kawasan transmigrasi;
37. Prosentase Akseptor KB tercapai 131,38% atau 2667 Akseptor dari target 2030 akseptor;

38. Prosentase Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja tercapai 96% atau 240 Remaja dari target 250 Remaja;
39. Cakupan Peserta KB Aktif tercapai 301,88 Peserta atau 96,60% dari target 3200 Peserta KB Aktif;
40. Frekuensi Penyuluhan tercapai 3 kali atau 100% dari target 3 kali penyuluhan;
41. Jumlah Sarana dan Prasarana KB tercapai 18 jenis Sarana dan Prasarana KB atau 100% dari target 18 jenis Sarana dan Prasarana KB;
42. Prosentase Tenaga Kerja Terlatih tercapai 8 tenaga kerja atau 67% dari target 12 tenaga kerja;
43. Jumlah PJTKI yang Terfasilitasi tidak tercapai atau 0% dari target 3 PJTKI;
44. Frekwensi Kegiatan Wawasan Kebangsaan tercapai 3 kali dalam setahun atau 100% dari target 3 kali kegiatan wawasan kebangsaan dalam setahun;
45. Jumlah Fasilitas Kegiatan Keagamaan Sebanyak 6 kali atau 100% dari target 6 kali fasilitas kegiatan keagamaan;
46. Jumlah Sarana Rumah Ibadah Terdampingi Sebanyak 45 sarana dan prasarana Rumah Ibadah atau 100% dari target 45 sarana dan prasarana Rumah Ibadah;
47. Jumlah budaya yang dilestarikan tercapai 2 budaya atau 100% dari target 2 budaya;
48. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi tercapai 14 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya atau 100% dari target 14 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya;
49. Jumlah dan jenis sekolah luar biasa tidak tercapai atau 0% dari target 1 sekolah luar biasa;
50. Data Base PMKS tidak tercapai atau 0% dari target capaian 1 dokumen;
51. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah tidak tercapai atau 0% dari target capaian 2 dokumen penelitian dan pengembangan komoditas unggulan daerah;

52. Jumlah Kerjasama Pembangunan dengan target capaian 4 jenis kerjasama atau 100% dari target 4 jenis kerjasama pembangunan;
53. Prosentase Kenaikan Produksi Pertanian dan Perkebunan tercapai 100% atau 15.000 ton dari target 15.000 Ton produksi pertanian dan perkebunan;
54. Prosentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan tercapai 92,25% atau 846,1 Ton dari target 917,2 Ton;
55. Prosentase Kenaikan Ketahanan Pangan tercapai 25% dari target 100%;
56. Prosentase Kenaikan Kapasitas Penyuluh tercapai 100% atau 83 penyuluh dari target 83 penyuluh;
57. Jumlah Sarana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan tercapai 1 sarana atau 50% dari target 2 sarana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
58. Prosentase Kenaikan Produksi Ikan Tangkap tercapai 105% atau 7137 Ton dari target 6800 Ton;
59. Produksi Rumput Laut tercapai 36% atau 2854 Ton dari target 7850 Ton;
60. Jumlah Pelaku UMKM yang Terlatih tercapai 200 pelaku UMKM atau 63% dari target 320 pelaku UMKM;
61. Jumlah Koperasi Aktif tercapai tercapai 2 koperasi atau 100% target 2 Koperasi aktif;
62. Lama proses perijinan tercapai 1 hari atau 100% dari target 1 hari;
63. Tersedianya Dokumen Statistik Perijinan tercapai 1 dokumen atau 100% dari target 1 dokumen statistik perijinan;
64. Jumlah SITU yang ditetapkan tercapai 249 SITU 100% dari target 250 SITU;
65. Jumlah Linmas tercapai 1963 Linmas atau 99,13% dari target 1963 Linmas;
66. Angka kriminalitas tercapai 12 kasus kriminal atau 100% dari target 12 kasus kriminal;
67. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat terlaksana sebanyak 2 kali atau 100% dari target 2 kali;

68. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam tercapai 1 kali atau 25% dari target 4 kali Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
69. Jumlah Obyek Wisata tercapai 2 obyek wisata atau 100% dari target 2 obyek wisata;
70. Frekuensi Promosi tercapai 3 kali promosi atau 100% dari target 3 kali promosi;
71. Jumlah Lembaga Mitra tercapai 1 lembaga mitra atau 100% dari target 1 lembaga mitra;
72. Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi tercapai 8 kali atau 100% dari target 8 kali Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
73. Jumlah Pendapatan Asli Daerah tercapai Rp. 37.513.050.360 atau 118% dari target capaian Rp. 31.730.890.356;
74. Jumlah Investor tidak tercapai atau 0% dari target 5 investor;
75. Nilai Kontribusi atas Ivestasi bagi Pendapatan Daerah tercapai Rp. 61.750.999.674 atau 153% dari target 40.343.935.361;
76. Jumlah Optimalisasi Pemanfaatan Sarana/Prasarana Publik tercapai 1 sarana dan prasarana publik atau 100% dari target 1 sarana dan prasarana publik;
77. Persentase panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan pada akhir tahun pencapaian SPM Terhadap Panjang jalan ruas-ruas jalan yang menghubungkan Semua Pusat Kegiatan dalam wilayah tercapai 89,7% atau 17,05 KM dari target 19,05 KM;
78. Prosentase peralatan kebinamargaan yang dapat berfungsi dengan baik tercapai 100% atau 6 peralatan kebinamargaan dari target capaian 60% atau 4 peralatan kebinamargaan;
79. Persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non struktural tercapai 100% atau 266,67 Meter dari target 266,67 Meter;
80. Rasio Ketersediaan jaringan Irigasi tercapai 3.250 meter atau 100% dari target 3.250 Meter;

81. Prosentase jumlah angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota tidak tercapai atau 0% dari target 100% atau 2 angkutan umum;
82. Prosentase jumlah halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 100% atau 2 halte dari target 2 halte;
83. Prosentase Jumlah pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran tercapai 100% atau 2 unit pelabuhan penyebrangan dari target 2 unit pelabuhan penyebrangan;
84. Prosentase Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota tidak tercapai atau 0% dari target 100%;
85. Jumlah angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota yang menerapkan standar keselamatan tercapai 0% dari target 152 angkutan umum;
86. Prosentase Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka, dan Guardrail, dan PJU) yang ada di Kabupaten dengan tercapai 100% pengadaan 2 unit fasilitas perlengkapan jalan dari target 2 unit fasilitas perlengkapan jalan;
87. Prosentase Jumlah Unit Pengujian kendaraan bermotor yang Wajib Uji dengan tercapai 100% atau 750 unit dari target 750 unit kendaraan bermotor;
88. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik tercapai 2706 rumah tangga atau 83,95% dari target 3223 rumah tangga;
89. Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya tercapai 48 unit atau 100% dari target 48 unit;

90. Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir SPM terhadap total masyarakat tercapai 100% atau 10.586 dari target 10.586;
91. Jumlah surat kabar nasional / lokal tidak tercapai atau 0% dari target 8 surat kabar;
92. Website milik Pemda tercapai 1 website atau 100% dari target 1 website;
93. Jumlah Informasi Pembangunan Daerah (IPD) dan Jumlah konferensi pers tercapai 350 kali atau 100% dari target 350 kali;
94. Luas hutan dan lahan kritis yang dikonservasi tercapai 20 Ha atau 100% dari target 20 Ha;
95. Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL tercapai 100% atau pengawasan terhadap AMDAL pada 9 wilayah kecamatan dan 50 lembaga usaha atau 100% dari target 9 wilayah kecamatan dan 50 lembaga usaha;
96. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air tercapai 10 Ha atau 100% dari target 10 Ha;
97. Prosentase Penyebarluasan Informasi Bencana tercapai 100% atau penyebarluasan informasi bencana pada 9 desa dan kelurahan dari target 9 desa dan kelurahan;
98. Prosentase Daerah Rawan Bencana yang Dibangun tercapai 100% atau 5 lokasi dari target 5 lokasi;
99. Pelayanan Informasi Status Lingkungan Hidup tercapai 2 dokumen informasi Status Lingkungan Hidup atau 100% dari target 2 dokumen informasi Status Lingkungan Hidup;
100. Jumlah Kelompok Peduli Lingkungan tercapai 7 kelompok atau 77,78% dari target 9 kelompok;
101. Kerusakan kawasan Hutan dan Lahan diturunkan seluas 20 Ha atau 100% dari target 20 Ha;
102. Jumlah Regulasi tentang Rencana Tata Ruang tidak tercapai atau 0% dari target 1 regulasi (Perda);

Dari ke-130 Indikator Kinerja, 26 indikator kinerja tidak dapat diukur karena pada tahun 2017 tidak ada program dan kegiatan yang

mendukung pelaksanaan indikator kinerja dimaksud. Ke-25 Indikator Kinerja ini tidak dilaksanakan karena tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Indikator tersebut, serta pengalihan urusan atau kewenangan daerah dari Kabupaten Lembata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ke-25 Indikator Kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) & ABK;
3. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana;
4. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi;
5. Frekuensi Konseling KB;
6. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta;
7. Jumlah Lapangan Olahraga;
8. Jumlah sanggar seni budaya, sekolah dan masyarakat yang aktif;
9. Cakupan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
10. Prosentase Kenaikan Hasil Hutan;
11. Jumlah Kelompok Binaan LPM;
12. Jumlah SOP;
13. Unsur Masyarakat Pemangku Kepentingan: Tidak dilaksanakan;
14. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
15. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
16. Prosentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan;
17. Prosentase Panjang jalan yang memenuhi kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan;
18. Prosentase Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten;
19. Jumlah Lokasi Ijin Usaha Pertambangan;
20. Prosentase kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif

yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah;

21. Jumlah siaran radio lokal aktif;
22. Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha);
23. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap jumlah penduduk;
24. Penegakan hukum lingkungan;
25. Jumlah Penyelesaian Ijin Lokasi; dan
26. Jumlah Dokumen Kebijakan Pemda di Bidang Administrasi Per-tanahan.

4.2. Strategi

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata di masa yang akan datang, maka disarankan agar:

1. Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun mendatang harus menrapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diukur secara efektif dan efisien;
2. Pemerintah Kabupaten Lembata perlu meningkatkan kapasitas SDM Aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada mempercepat proses penyusunan dokumen-dokumen kinerja pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun ke depan perlu meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai program dan kegiatan yang mendukung sarana strategis dan indikator kinerja dalam rangka mengejar target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata tahun 2017–2012.
4. Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun mendatang diharapkan agar mempublikasikan dokumen kinerja terutama dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
5. Pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun-tahun mendatang diharapkan agar menerapkan sistem pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan daerah baik terhadap kebijakan rencana, pelaksanaan rencana maupun hasil rencana harus dilakukan secara berkala sebagai sumber data dan informasi perencanaan pembangunan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2017 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi pada kegiatan/kinerja yang akan datang.

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR, ST

Lampiran I:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
Jl. Trans Lembata No. 1 Telp/Fax (0383) 41083



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DRS. SINUN PETRUS MANUK

JABATAN : PENJABAT BUPATI LEMBATA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Lewoleba, Maret 2017

BUPATI LEMBATA,

DRS. SINUN PETRUS MANUK

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	Misi I: Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	
1	Program Pendidikan Kedinasan	85,402,962
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	2,099,628,211
3	Program Pembinaan Sistem Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian	171,041,600
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	699,279,600
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	149,286,000
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,667,494,400
7	Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	211,157,600
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	187,965,000
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	104,509,500
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,099,628,211
11	Program Penataan Peraturan PerundangUndangan	858,930,130
12	Program Peningkatan Kesadaran Hukum	130,350,000
13	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Keprotokolan Pemda	-
14	Program Pengembangan Kerjasama daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda dengan Pihak Ketiga)	-
15	Program Pembinaan BUMD	38,335,800
16	Program Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	186,712,950
17	Program Penataan Tatalaksana Pemerintah Daerah	41,594,600
18	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	130,566,900
19	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Daerah	77,660,600

20	Program Peningkatan Kualitas Proses Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi dan Tatalaksana	51,643,200
21	Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawah	
22	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10,528,556,300
	Misi Kedua: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	
23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	463,943,000
24	Program Pendidikan Anak Usia Dini	589,012,200
25	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	13,588,868,350
26	Program Pendidikan Menengah	2,177,301,879
27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Pendidikan Dasar)	-
28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Pendidikan Menengah)	-
29	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,144,329,150
30	Program Pengambagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	652,547,100
31	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,272,046,300
32	Program Pengawasan Obat dan Makanan	149,397,000
33	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	42,087,000
34	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	24,075,619,650
35	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan	2,701,663,700
36	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	876,507,000
37	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	651,372,300
38	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	24,075,619,650
39	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah	
40	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
41	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	117,886,200
42	Program Keluarga Berencana	448,259,800

43	Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja	65,174,600
44	Program Pelayanan Kontrasepsi	64,726,900
45	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Keluarga Berencana	205,430,400
46	Program Pengembangan Informasi dan Konseling	-
47	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-
48	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana	1,822,950,000
49	Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja	112,140,200
50	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	70,173,800
51	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	156,182,350
52	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama	662,068,200
53	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama	464,390,800
54	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-
55	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	34,439,300
56	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-
57	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-
58	Program Pendidikan Luar Biasa	48,964,800
59	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-
	Misi III: Recovery Ekonomi	
60	Program Penelitian dan Pengembangan	254,537,400
61	Program Kerjasama Pembangunan	111,090,000
62	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2,857,797,600
63	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,633,944,500
64	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	-
65	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,262,070,150
66	Program Pemberdayaan Penyuluh	440,749,700

67	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan	495,480,200
68	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,816,163,250
69	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	471,106,300
70	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-
71	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	150,000,000
72	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	38,595,200
73	Program Pelayanan Perijinan Terpadu	284,038,500
74	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu	-
75	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Perijinan	-
76	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perekonomian	
77	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
78	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	218,461,800
79	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-
80	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	-
81	Program Pencegahan Dini Penaggulangan Korban Bencana Alam	-
82	Program Pendidikan Politik Masyarakat	140,815,850
83	Program Pelayanan Perijinan Terpadu	150,316,400
84	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,680,961,086
85	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	11,606,400
86	Program Pengembangan Kemitraan	80,235,600
87	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	147,952,600
	Misi IV: Peningkatan Pendapatan Daerah	
88	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	2,318,464,000
89	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	147,952,600
90	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
91	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sarana / Prasarana Publik	151,033,900

	Misi V: Percepatan Pembangunan Infrastruktur	
92	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	73,892,673,143
93	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	73,892,673,143
94	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	73,892,673,143
95	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	73,892,673,143
96	Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Kebinamargaan	372,038,297
97	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	2,797,386,598
98	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	5,695,367,800
99	Program Pengendalian Banjir	1,759,216,200
100	Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	2,299,788,400
101	Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	2,299,788,400
102	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	39,078,200
103	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	39,078,200
104	Program Peningkatan Pengamanan Lalulintas	741,858,500
105	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	103,239,800
106	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
107	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.	-
108	Program Pengendalian Banjir	1,759,216,200
109	Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	
110	Program Pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3,731,499,146
111	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	46,900,550
112	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
113	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	177,371,500
114	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	24,478,900
115	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	123,300,000

	Misi VI: Penataan Ruangan Berwawasan Lingkungan	
116	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
117	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
118	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	624,949,600
119	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	356,949,358
120	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	
121	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	56,700,000
122	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-
123	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	181,227,000
124	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup	-
125	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-
126	Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana	
127	Program Optimalisasi Izin lokasi Buka Tanah Serta Data Subyek dan Obyek Tanah	-
128	Program Peningkatan Kualitas Proses Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pertanahan	57,875,000

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

DRS. SINUN PETRUS MANUK

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Target Pelaksanaan Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Unit Kerja Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT DAERAH						29,012,154,150	26,183,601,624	90.25		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2,536,670,100	2,359,236,910	93.01		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	386,861,000	360,470,000	93.18	Bagian TUK	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	297,508,000	238,733,838	80.24	Bagian TUK	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52 unit	52 unit	100	75,000,000	25,834,275	34.45	Bagian TUK	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	152,619,000	151,889,903	99.52	Bagian TUK	
			Penyediaan Jasa Sewa Gedung	1 unit	1 unit	100	90,000,000	90,000,000	100.00	Bagian TUK	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	43 jenis	42.16 jenis	98.05	151,374,600	148,432,231	98.06	Bagian TUK	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	0.99 paket	99	110,960,000	110,146,950	99.27	Bagian TUK	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	100	19,761,000	19,736,600	99.88	Bagian TUK	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 koran	5 koran	100	30,000,000	30,000,000	100.00	Bagian TUK	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	5770 OMKN	5,471.71 OMKN	95	345,216,400	343,523,000	99.51	Bagian TUK	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	40 kali	38.23 kali	96	824,440,000	787,973,313	95.58	Bagian TUK	
			Pengelolaan Arsip cinamis pimpinan	1 dokumen	1 dokumen	100	34,930,100	34,519,500	98.82	Bagian TUK	
			Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	18,000,000	17,977,300	99.87	Bagian TUK	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur					4,850,970,450	4,510,252,222	92.98		
			Pembangunan Rumah Dinas	1 dokumen	1 dokumen	100	50,945,000	50,748,000	99.61		
			Pengadaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	316,895,000	306,350,000	96.67		
			Pengadaan Mobil Jabatan	2 unit	2 unit	100	1,350,898,800	1,349,142,000	99.87		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	3 unit	100	965,774,900	899,000,000	93.09		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5 paket	4 paket	80	432,867,250	326,064,000	75.33		
			Pengadaan Jaringan Listrik, Telepon dan Air Kantor	1 paket	1 paket	100	231,800,000	199,753,000	86.17		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit	2 unit	100	236,064,000	232,665,500	98.56		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	2 unit	2 unit	100	342,724,500	293,708,440	85.70		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	10 unit	100	549,894,000	496,804,592	90.35		
			Pemeliharaan Jaringan Instalasi	1 paket	1 paket	100	100,432,000	91,189,500	90.80		
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	1 unit	1 unit	100	212,075,000	205,055,000	96.69		
			Rehabilitasi sdang/berat kendaraan dinas/Operasional	5 unit	4.93 unit	99	60,600,000	59,772,190	98.63		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					508,570,000	414,878,950	81.58		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	12 orang	100	255,587,000	233,403,200	91.32	Sekteratiat	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	2 orang	2 orang	100	252,983,000	181,475,750	71.73	Sekteratiat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					902,604,000	858,930,950	95.16		
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	132,138,700	124,814,700	94.46	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	770,465,300	734,116,250	95.28	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Program Penataan Lingkungan Kantor					124,077,000	118,778,450	95.73		
			Penataan Taman	1 paket	1 paket	100	124,077,000	118,778,450	95.73		

		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					68,698,800	67,800,800	98.69		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	7 dokumen	6 dokumen	86	68,698,800	67,800,800	98.69	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					225,206,300	223,287,506	99.15		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	225,206,300	223,287,506	99.15	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					78,696,000	75,700,200	96.19		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	78,696,000	75,700,200	96.19	Sub Bagian Aset	
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media					509,402,000	499,843,690	98.12		
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1 paket	0.98 paket	98	90,475,000	89,028,940	98.40		
			Pengumpulan Informasi Penyelenggara Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 dokumen	0.98 dokumen	98	82,152,300	80,193,300	97.62		
			Penyediaan dan Publikasi Kehumasan	1 paket	0.97 paket	97	113,989,800	110,264,500	96.73		
			Kerjasama dengan Media Massa	8 mass media	8 mass media	100	222,784,900	220,356,950	98.91		
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					229,643,500	224,010,700	97.55		
			Penyediaan Jasa Layanan Internet dan Website Pemda	12 bulan	12 bulan	100	229,643,500	224,010,700	97.55		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan					7,026,732,000	6,221,275,531	88.54		
			Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	88,353,200	64,016,200	72.45		
			Fasilitasi dan Stimulasi Operasional PLTD	8 PLTD	6.20 PLTD	78	1,217,208,400	943,239,400	77.49		
			Perluasan Jaringan Listrik	1 paket	1 paket	100	2,676,580,300	2,305,818,431	86.15		
			Interkoneksi Jaringan Listrik	2 paket	2 paket	100	2,794,623,600	2,779,572,000	99.46		
			Uji laik operasi ketenagalistrikan	5 SLO	4 SLO	80	249,966,500	128,629,500	51.46		
		Program Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi					633,678,000	420,622,998	66.38		
			Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Jaringan	18 unit	18 unit	100	633,678,000	420,622,998	66.38		
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					1,029,760,700	981,008,104	95.27		
			Fasilitasi Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemda dan DPRD	270 dokumen	589 dokumen	218	1,029,760,700	981,008,104	95.27		
		Program Pembinaan BUMD					31,118,000	27,036,400	86.88		
			Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan Daerah/BUMD	4 kali	4 kali	100	31,118,000	27,036,400	86.88		
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					79,477,500	55,925,300	70.37		
			Penyusunan Perbup tentang Penjabaran Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen	100	79,477,500	55,925,300	70.37		
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum Lainnya					933,019,250	791,261,009	84.81		
			Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lainnya di Bidang Kemasyarakatan	9 kali	9 kali	100	58,605,200	54,588,500	93.15		
			Fasilitasi Biaya Mahasiswa kader potensial	1 SK	1 SK	100	29,089,900	28,896,200	99.33		

			Operasional Pelayanan Pemerintahan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	4 kali	3 kali	75	105,523,200	86,651,837	82.12		
			Fasilitasi HUT RI, HUT Otonomi Daerah dan HUT Negara lainnya	3 kali	3 kali	100	151,217,550	139,925,900	92.53		
			Fasilitasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Lembata	12 bulan	12 bulan	100	166,906,700	155,230,330	93.00		
			Fasilitasi Ormas PMI, Dharma Wanita dan GOP TKI	2 kali	2 kali	100	421,676,700	325,968,242	77.30		
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					152,471,900	150,294,500	98.57		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	6 kali	6 kali	100	89,640,200	87,474,200	97.58		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi Instansi Vertikal dan Daerah	3 kali	3 kali	100	5,552,300	5,552,300	100.00		
			Fasilitasi Rapat Lengkap Pamong Praja	2 kali	2 kali	100	57,279,400	57,268,000	99.98		
		Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Bawahan					124,789,700	113,853,850	91.24		
			Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100	53,087,000	51,680,750	97.35		
			Pengkajian/Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100	71,702,700	62,173,100	86.71		
		Program Pengembangan Kerjasama Daerah (Antar Pemda dan Antar Pemda dengan Pihak Ketiga)					74,391,600	1,553,600	2.09		
			Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga	5 MOU		0	74,391,600	1,553,600	2.09		
		Program Peningkatan Kualitas Proses kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan					14,784,000	14,779,050	99.97		
			Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Pejabat Negara, DPRD dan Pengembangan Wilayah	1 dokumen	1 dokumen	100	14,784,000	14,779,050	99.97		
		Program Peningkatan Managemen Penyelenggaraan Pemerintahan					270,241,400	243,245,400	90.01		
			Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 dokumen	1 dokumen	100	59,642,300	57,471,000	96.36		
			Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2 dokumen	2 dokumen	100	84,512,700	62,961,500	74.50		
			Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	1 dokumen	1 dokumen	100	80,502,600	78,210,100	97.15		
			Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	45,583,800	44,602,800	97.85		
		Program Peningkatan Koordinasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD serta Penyelenggaraan Pemilu					536,111,250	533,957,250	99.60		
			Destinasi Kegiatan Pemilu (Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan DPD)	9 kecamatan	9 kecamatan	100	536,111,250	533,957,250	99.60		
		Program Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Bawahan					230,319,400	228,836,900	99.36		

			Fasilitasi dan Koordinasi Kunjungan Kerja/Inpeksi Kepala Daerah/WKDH	36 kali	36 kali	100	230,319,400	228,836,900	99.36		
		Program Peningkatan Kualitas Proses Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Hukum dan HAM					47,318,200	36,582,986	77.31		
			Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Hukum	1 dokumen	1 dokumen	100	47,318,200	36,582,986	77.31		
		Program Peningkatan Kesadaran Hukum					222,698,000	201,020,080	90.27		
			Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan fasilitasi penyuluhan hukum terpadu	10 Peraturan Perundang-Undangan, 350 Buku	4 Peraturan Perundang-Undangan, 350 Buku	40	120,590,000	109,461,500	90.77		
			Pembentukan Desa Sadar Hukum	9 desa	9 desa	100	102,108,000	91,558,580	89.67		
		Program Penegakan Hukum dan HAM					50,746,800	47,018,054	92.65		
			Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	2 laporan	2 laporan	100	50,746,800	47,018,054	92.65		
		Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum					75,000,000	68,702,565	91.60		
			Penanganan Perkara/Gugatan Perkara Perdata dan Tatausaha Negara	2 kasus	2 kasus	100	75,000,000	68,702,565	91.60		
		Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah					199,149,000	193,131,915	96.98		
			Koordinasi dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi Dana DAK	4 dokumen	4 dokumen	100	103,577,200	98,276,915	94.88		
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	14 laporan	14 laporan	100	78,335,500	77,787,500	99.30		
			Pelaksanaan Percepatan Realisasi APBD melalui Sistim Monitoring TEPRa (Sismontep)	1 dokumen	1 dokumen	100	17,236,300	17,067,500	99.02		
		Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa					445,468,850	387,899,772	87.08		
			Optimalisasi LPSE Kabupaten Lembata	35 OPD	35 OPD	100	180,969,000	134,324,410	74.23	Bagian ULP	
			Operasional Unit Layanan Pengadaan	2 laporan	2 laporan	100	153,294,350	151,192,811	98.63	Bagian ULP	
			Bimbingan Teknis LPSE	2 orang	2 orang	100	31,912,000	25,732,817	80.64	Bagian ULP	
			Pelatihan Aplikasi SPSE	50 orang	50 orang	100	29,987,900	28,222,534	94.11	Bagian ULP	
			Monitoring dan Evalusi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 laporan	2.78 laporan	70	49,305,600	48,427,200	98.22	Bagian ULP	
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Sarana/Prasarana Publik					146,233,900	129,563,078	88.60		
			Fasilitasi Pengamanan Sarana Prasarana Daerah	12 bulan	12 bulan	100	146,233,900	129,563,078	88.60		
		Program Peningkatan Kualitas Proses kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan SDA					184,315,000	176,295,899	95.65		
			Perumusan, Pemantauan, Evaluasi dan Revisi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan dan Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	100	17,928,900	16,221,199	90.48		
			Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kelautan	1 dokumen	1 dokumen	100	166,386,100	160,074,700	96.21		
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perekonomian					73,898,900	67,876,299	91.85		
			Koordinasi Penyaluran RASKIN dan BBM	2 laporan	2 laporan	100	73,898,900	67,876,299	91.85		

		Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Bidang Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra					36,797,800	31,269,900	84.98		
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemda di Bidang Kemasyarakatan dan Kesra	2 dokumen	2 dokumen	100	36,797,800	31,269,900	84.98		
		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama					1,113,656,000	1,012,176,700	90.89		
			Fasilitasi Dialog Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	2 kali	2 kali	100	132,809,800	119,750,800	90.17	Bagian Kesra	
			Fasilitasi Lembaga FKUB Kabupaten Lembata	1 kali	1 kali	100	24,465,000	22,412,700	91.61	Bagian Kesra	
			Fasilitasi Manasik Haji	3 kali	3 kali	100	130,507,500	113,034,500	86.61	Bagian Kesra	
			Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Ibadah	1 unit	1 unit	100	485,524,400	475,499,400	97.94	Bagian Kesra	
			Fasilitasi Pembinaan Rohani Kelompok Kategorial	3 kel	3 kel	100	306,841,800	249,571,800	81.34	Bagian Kesra	
			Doa dan Hiburan Menyongsong Tahun Baru	1 kali	1 kali	100	23,466,700	23,466,700	100.00	Bagian Kesra	
			Fasilitasi Buka Puasa Bersama	1 kali	1 kali	100	10,040,800	8,440,800	84.07	Bagian Kesra	
		Program Penataan Organisasi Pemerintah Daerah					170,030,350	126,631,720	74.48		
			Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda tentang OPD	3 dokumen	0 dokumen	0	106,215,550	63,691,050	59.96	Subag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi	
			Penyusunan Rancangan Perbup tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Jabatan	40 20 Perbup, 20 Keputusan Bupati	3 Perbup	8	63,814,800	62,940,670	98.63	Subag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi	
		Program Penataan Tatalaksana Pemerintah Daerah					39,629,600	37,027,300	93.43		
			Penyusunan Perbup tentang Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	2 Perbup	1 Perbup	50	39,629,600	37,027,300	93.43	Subag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi	
		Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah					121,253,500	109,890,591	90.63		
			Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi LHP APIP	4 dokumen	4 dokumen	100	62,983,500	60,877,091	96.66	Sub Bagian Kinerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi	
			Optimalisasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Pemberantasan Korupsi	1 dokumen	1 dokumen	100	58,270,000	49,013,500	84.11	Sub Bagian Kinerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi	
		Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					154,754,600	142,796,559	92.27		
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4 dokumen	3 dokumen	75	104,929,700	95,088,559	90.62	Sub Bagian Kinerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi	
			Pendampingan Penyusunan LAKIP SKPD	35 OPD	35 OPD	100	20,792,200	20,792,200	100.00	Sub Bagian Kinerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	29,032,700	26,915,800	92.71	Sub Bagian Kinerja Perangkat Daerah Bagian Organisasi	
		Program Peningkatann Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dam Keprotokoleran Pemda					4,759,770,800	4,279,347,936	89.91		
			Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	8 kali	8 kali	100	341,775,900	249,327,400	72.95		

			Koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	22 kali	22 kali	100	1,662,148,000	1,652,258,120	99.40		
			Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100	1,936,193,938	1,851,232,716	95.61		
			Pengadaan Fasilitas Rujab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 paket	3 paket	75	582,699,262	324,151,000	55.63		
			Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 dokumen	0 dokumen	0	77,482,900	67,887,600	87.62		
			Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Pelayanan Umum	1 dokumen	0 dokumen	0	76,978,900	64,021,900	83.17		
			Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bidang Daya Saing Daerah	1 dokumen	0 dokumen	0	78,386,900	66,364,200	84.66		
			Penataan Taman Rumah Jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	1 paket	1 paket	100	4,105,000	4,105,000	100.00		
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN						81,746,796,091	72,588,643,934	88.80		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,597,964,198.50	1,362,953,542	85.29		
			Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	350 Meterai	350 Meterai	100	118,698,000	117,057,000	98.62	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan Telepon dan Listrik	12 Bulan Telepon dan Listrik	100	704,711,221	486,917,842	69.09	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23 Kendaraan Roda Dua, 3 Roda 4, 3 roda 6, a tronton	23 Kendaraan Roda Dua, 3 Roda 4, 3 roda 6, a tronton	100	60,152,000	57,981,300	96.39	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	43 Jenis	43 Jenis	100	50,409,800	50,382,500	99.95	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148,500 Lembar, 80 Blok, 800 Buku	148,500 Lembar, 80 Blok, 800 Buku	100	49,256,000	49,226,000	99.94	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Surat Kabar, 1 paket Iklan	3 Surat Kabar, 1 paket Iklan	100	16,271,177.50	15,255,000	93.75	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1800 Dos Makan, 24 Dos Air	1800 Dos Makan, 24 Dos Air	100	36,660,000	36,640,000	99.95	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	206 Kali Dalam Daerah, 19 Kali Luar Daerah	206 Kali Dalam Daerah, 19 Kali Luar Daerah	100	561,806,000	549,493,900	97.81	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					392,691,500	290,789,100	74.05		
			Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Lab	1 Unit Gedung Lab	100	33,284,100	3,263,500	9.80	Sekteratit	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket SIPKD	1 Paket SIPKD	100	105,659,500	60,345,000	57.11	Sekteratit	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26 sc dan 5.109 liter BBM, 125 Liter Pelumas	26 sc dan 5.109 liter BBM, 125 Liter Pelumas	100	157,956,900	135,312,672	85.66	Sekteratit	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	500 Liter BBM, 23 Unit	500 Liter BBM, 23 Unit	100	95,791,000	91,867,928	95.90	Sekteratit	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					304,278,000	258,607,600	84.99		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal/Teknis	9 Orang	9 Orang	100	154,102,000	118,096,800	76.64	Sekteratit	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	100	60,293,000	52,413,000	86.93	Sekteratit	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	1 Orang	1 Orang	100	89,883,000	88,097,800	98.01	Sekteratit	

		Program Pengembangan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan'					165,247,200	164,538,200	99.57		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5,623,650	5,601,150	99.60	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4,948,650	4,936,050	99.75	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	15 Orang	15 Orang	100	154,674,900	154,001,000	99.56	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					17,188,400	15,479,500	90.06		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	17,188,400	15,479,500	90.06	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					17,889,950	17,762,850	99.29		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4,305,850	4,264,150	99.03	Sekretariat	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedural	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6,736,650	6,694,650	99.38	Sekretariat	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6,847,450	6,804,050	99.37	Sekretariat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					88,539,450	86,103,650	97.25		
		Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	88,539,450	86,103,650	97.25	Sub Bagian Aset	
							56,939,580,709	51,332,762,328	90.15		
			Pembangunan Jalan	0.94 KM	0.94 KM	100	3,047,686,850	2,582,535,820	84.74	Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan	
			Pembangunan Jembatan	4 unit	4 unit	100	1,372,824,614	1,109,324,200	80.81	Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan	
			Peningkatan Jalan	18.11 KM	18.11 KM	100	52,519,069,245	47,640,902,308	90.71	Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					812,508,000	752,617,300	92.63		
			Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	266.67 Meter	266.67 Meter	100	812,508,000	752,617,300	92.63	Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					435,403,100	217,978,100	50.06		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3 paket	3 paket	100	299,950,000	101,225,000	33.75	Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan	5 Paket Luncuran	5 Paket Luncuran	100	135,453,100	116,753,100	86.19	Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan	
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan					58,600,000	49,975,000	85.28		
			Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	2 Paket Luncuran	2 Paket Luncuran	100	58,600,000	49,975,000	85.28	Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan	
		Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan arana dan dan Fasilitas Kebinamargaan					432,012,769.50	211,829,300	49.03		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	1 Paket dan 46 SC	1 Paket dan 46 SC	100	432,012,769.50	211,829,300	49.03	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya					5,743,970,101	5,113,245,264	89.02		
			Pembangunan Jaringan Irigasi	6 Paket Perencanaan	6 Paket Perencanaan	100	605,996,151	353,694,264	58.37	Seksi Pengembangan Sistim Irigasi Penatagunaan Sumber Daya Air	
			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	5 Daerah Irigasi	5 Daerah Irigasi	100	5,137,973,950	4,759,551,000	92.63	Seksi Pengembangan Sistim Irigasi Penatagunaan Sumber Daya Air	

		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					2,622,491,055	1,961,784,350	74.81		
			Pengembangan Distribusi Air Minum	10 Paket Luncuran	10 Paket Luncuran	100	2,390,414,755	1,789,636,350	74.87	Seksi Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	
			Pengembangan Jaringan Air Minum/Air Bersih	10 Bak PAH	10 Bak PAH	100	232,076,300	172,148,000	74.18	Seksi Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	
		Program Pengendalian Banjir					364,656,350	303,258,450	83.16		
			Penndalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	2 Paket Perencanaan	2 Paket Perencanaan	100	188,556,350	153,308,450	81.31	Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai	
			Pembangunan Kanal Pengendali Banjir	2 Paket Luncuran	2 Paket Luncuran	100	176,100,000	149,950,000	85.15	Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan					300,278,208	300,227,000	99.98		
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	2 Paket Luncuran	2 Paket Luncuran	100	300,278,208	300,227,000	99.98	Seksi Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	
		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan					6,401,362,550	5,391,180,750	84.22		
			Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan	2.53 KM	2.53 KM	100	6,182,574,300	5,333,204,500	86.26	Seksi Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perkotaan	5 Paket Luncuran	5 Paket Luncuran	100	106,715,750	55,775,750	52.27	Seksi Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	
			Pembangunan Rest Area	4 Paket Luncuran	4 Paket Luncuran	100	38,372,500	1,850,500	4.82	Seksi Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	
			Normalisasi Lahan Kawasan Kuliner	5 Paket Luncuran		0	73,700,000	350,000	0.47	Seksi Pengelolaan Air Bersih Perkotaan	
		Program Pengamanan Pantai					1,800,866,700	1,726,632,500	95.88		
			Pembangunan Talud Pengaman Pantai	3.15 KM	3.15 KM	100	1,800,866,700	1,726,632,500	95.88	Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai	
		Program Perencanaan Tata Ruang					190,719,900	166,931,400	87.53		
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	2 Dokumen Ranperda RDTR dan PZZ Kawasan Perkotaan	2 Dokumen Ranperda RDTR dan PZZ Kawasan Perkotaan	100	190,719,900	166,931,400	87.53	Seksi Pengaturan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Program Pengendalian, Pemanfaatan Ruang					25,374,700	12,232,800	48.21		
			Koordinasi dan Fasilitasi Advice Planing	50 Dokumen Advice Planing	24 Dokumen Advice Planing	48	25,374,700	12,232,800	48.21	Seksi Pengaturan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Program Pembinaan Penataan Ruang					85,849,000	64,378,650	74.99		
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	4 Kali Rapat Rutin, 4 Kali Rapat Khusus, 1 Kali Rapat Koordinasi	3 Kali Rapat Rutin, 4 Kali Rapat Khusus, 1 Kali Rapat Koordinasi	75	85,849,000	64,378,650	74.99	Seksi Pengaturan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Program Pengawasan Penataan Ruang					24,407,200	18,753,500	76.84		
			Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Ruang	76.84	24,407,200	18,753,500	76.84	Seksi Pengaturan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan					1,673,159,400	1,614,099,850	96.47		
			Pembangunan Halte	1 Paket Luncuran	1 Paket Luncuran	100	59,742,000	59,742,000	100.00	Seksi	
			Pengadan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Laut	2 Unit Jetty dan 1 fasilitas pelabuhan laut Lewoleba	2 Unit Jetty dan 1 fasilitas pelabuhan laut Lewoleba	100	1,003,227,100	954,062,900	95.10	Seksi Pelabuhan dan Keselamatan	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat	150 Meter Pagar BRC	150 Meter Pagar BRC	100	482,983,100	477,522,500	98.87	Seksi Manajemn Lalu Lintas dan Angkutan	
			Pengadaan Sarana dan Fasilitas Jalan	150 unit	150 unit	100	127,207,200	122,772,450	96.51	Bidang LLAJ	
		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan					288,582,000	237,094,000	82.16		

			Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Paket Pemeliharaan, 2 Paket Luncuran	1 Paket Pemeliharaan, 2 Paket Luncuran	100	288,582,000	237,094,000	82.16	Seksi Lalu Lintas Laut	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					31,328,200	30,765,500	98.20		
			Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dan Jalan Raya	2 Kali, 9 Kecamatan	2 Kali, 9 Kecamatan	100	31,328,200	30,765,500	98.20	Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan	
		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas					775,140,650	749,241,150	96.66		
			Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	1 Set	1 Set	100	158,743,500	154,163,500	97.11	Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan	
			Pengadaan Marka Jalan	4,000 Meter	4,000 Meter	100	208,976,550	202,564,650	96.93	Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan	
			Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	300 Meter	300 Meter	100	407,420,600	392,513,000	96.34	Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan	
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					156,706,800	137,422,300	87.69		
			Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	750 Unit Wajib Uji	750 Unit Wajib Uji	100	156,706,800	137,422,300	87.69	Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan	
3	INSPEKTORAT						1,593,244,600	1,542,532,006	96.82		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					292,533,773	290,404,697	99.27		
			Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	20,351,000	20,219,320	99.35	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	17,981,000	17,353,968	96.51	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	9 unit	100	8,052,000	8,051,200	99.99	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 Jenis,12 bulan	10 Jenis,12 bulan	100	19,748,600	19,748,600	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 jenis	32 jenis	100	30,541,500	30,541,500	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,125 lembar 130 buku	45,125 lembar 130 buku	100	16,817,200	16,817,200	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	4 jenis	100	790,600	790,600	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	100	3,320,000	3,300,000	99.40	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11 kali	11 kali	100	149,726,100	148,968,836	99.49	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penetapan Angka Kredit	4 kali	2 kali	50	25,205,773	24,613,473	97.65	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					161,718,427	123,652,122	76.46		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16 jenis	13 jenis	81.25	121,670,700	83,803,813	68.88	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	9 unit	100	32,771,300	32,746,509	99.92	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6 jenis	6 jenis	100	7,276,427	7,101,800	97.60	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					4,671,000	4,671,000	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100	4,671,000	4,671,000	100.00	Subag Keuangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					5,663,400	5,663,400	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5,663,400	5,663,400	100.00	Subag Keuangan & Perencanaan Program/Kegiatan	

		Program Penataan Peraturan Peundang-undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					6,491,500	6,491,500	100.00		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	3 Dokumen	3 Dokumen	100	6,491,500	6,491,500	100.00	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian Data, Evaluasi dan Pelaporan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					70,305,000	70,305,000	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA/DPPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	70,305,000	70,305,000	100.00	Subag Keuangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					27,771,400	27,771,400	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	27,771,400	27,771,400	100.00	Subbag Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kepala Daerah					835,720,100	834,784,107	99.89		
			Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	81 obrik	81 obrik	100	485,360,000	485,360,000	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 Obrik	1 Obrik	100	5,560,000	5,560,000	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penanganan Kasis pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya	2 Obrik	2 Obrik	100	17,528,000	17,528,000	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Iventarisasi Hasil Temuan Pngawasan	12 bulan, 2 kali	12 bulan, 2 kali	100	66,539,000	66,539,000	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Koordinasi Pengawasan yang lebih Komperhensif	20 Kasus	20 Kasus	100	29,588,100	29,588,100	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	4 lembaga, 12 bulan	4 lembaga, 12 bulan	100	231,145,000	230,209,007	99.60	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian Data, Evaluasi dan Pelaporan	
		Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					188,370,000	178,788,780	94.91		
			Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	11 orang	11 orang	100	123,378,000	119,144,638	96.57	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Pelatihan Teknis Pengawaan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	5 orang	5 orang	100	64,992,000	59,644,142	91.77	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
4	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						1,245,437,040	1,107,029,008	88.89		
		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran					195,713,800	177,311,776	90.60		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 jenis	5 jenis	100	64,601,000	59,924,000	92.76		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jasa	4 Jasa	100	14,460,000	9,213,116	63.71	Subbag Tatausaha, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13 kendaraan	13 kendaraan	100	6,700,000	3,345,320	49.93	Subbag Tatausaha, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	35 jenis ATK	35 jenis ATK	100	17,540,300	17,482,600	99.67	Subbag Tatausaha, Organisasi dan	
			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	14,670,000	14,670,000	100.00	Subbag Tatausaha, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Jenis	3 Jenis	100	5,160,000	5,040,000	97.67	Subbag Tatausaha, Organisasi dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	34 kali	34 kali	100	72,582,500	67,636,740	93.19	Subbag Tatausaha, Organisasi dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					177,106,100	170,085,017	96.04		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	27 Unit	27 Unit	100	31,828,800	30,024,000	94.33	Subbag Pengelolaan Barang dan Pengguna dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	100	57,286,500	57,055,500	99.60	Subbag Pengelolaan Barang dan Pengguna dan Perkantoran	

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	4 Unit	100	78,330,400	73,351,517	93.64	Subbag Pengelolaan Barang dan Pengguna dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	9,660,400	9,654,000	99.93	Subbag Pengelolaan Barang dan Pengguna dan Perkantoran	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					118,456,600	104,006,600	87.80		
			Penyusunan Lakip dan LPPD SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4,438,900	4,438,900	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	11,731,700	11,731,700	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	102,286,000	87,836,000	85.87	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Pengembangan Sektoral					5,561,400	5,561,400	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	5,561,400	5,561,400	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					10,981,200	7,320,800	66.67		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3,660,400	3,660,400	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3,660,400	3,660,400	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 Dokumen	0 dokumen	0	3,660,400	-	0.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					12,567,100	12,567,100	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	12,567,100	12,567,100	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					20,815,500	20,815,500	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	20,815,500	20,815,500	100.00	Kasubag Pengelolaan Barang dan Pengguna dan Perkantoran	
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah					41,161,400	39,047,969	94.87		
			Penataan Arsip Statis	3 dokumen arsip daerah	3 dokumen arsip daerah	100	41,161,400	39,047,969	94.87	Kasubid Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi					32,771,000	32,771,000	100.00		
			Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	40 orang, 8 orang KSO	40 orang, 8 orang KSO	100	32,771,000	32,771,000	100.00	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					630,302,940	537,541,846	85.28		
			Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajaran	40 orang	40 orang	100	248,401,600	236,735,100	95.30	Seksi Pembiaan dan Pengawasan Kearsipan	
			Survey, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	13 Perpustakaan, 1 orang KSO	13 Perpustakaan, 1 orang KSO	100	67,878,800	63,605,800	93.70	Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan	
			Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	18 perpustakaan di 9 kecamatan		0	69,794,940		0.00		
			Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	270 orang	270 orang	100	192,371,600	190,816,446	99.19	Seksi Pengembangan, pelestarian dan Pengelolaan Bahan Perpustakaan & Seksi Layanan Otomasi Perpustakaan	

			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	13 Perpustakaan	13 Perpustakaan	100	51,856,000	46,384,500	89.45	Seksi Layanan Otomasi Perpustakaan	
5	DINAS PERIKANAN						3,870,593,751	3,745,195,072	96.76		
		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir					100,082,700	98,130,700	98.05		
			Pembinaan Sentra-Sentra Produksi Usaha Perikanan	9 Sentra, 9 kecamatan (160 kelompok)	9 Sentra, 9 kecamatan (160 kelompok)	100	100,082,700	98,130,700	98.05	Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan					443,920,200	434,752,608	97.93		
			Pengembangan Data Base Perikanan	1 Dokumen	1 dokumen	100	46,830,000	46,530,000	99.36	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
			Pengembangan Sistim MCS (Monitoring, Controlling dan Surveylance) dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	40 kasus	40 kasus	100	354,590,200	345,737,800	97.50	Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
			Optimalisasi Armada Pengawasan Laut dan Pantai	4 Armada	4 Armada	100	42,500,000	42,484,808	99.96	Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan					442,094,300	426,970,849	96.58		
			Pendampingan DAK Program Pengembangan Budidaya Perikanan	12 orang pegawai honorer, 12 bulan	12 orang pegawai honorer, 12 bulan	100	442,094,300	426,970,849	96.58	Seksi Perikanan Budidaya	
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap					1,603,904,832	1,554,222,014	96.90		
			Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	5 unit kapal 1 GT, 5 Unit kapal 2 GT dan 5 unit mesin ketinting	5 unit kapal 1 GT, 5 Unit kapal 2 GT dan 5 unit mesin ketinting	100	1,251,568,532	1,221,741,032	97.62	Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	
			Pendampingan DAK Program Pengembangan Perikanan Tangkap	9 orang pegawai honorer, 12 bulan	9 orang pegawai honorer, 12 bulan	100	352,336,300	332,480,982	94.36	Seksi Perikanan Tangkap dan Kenelayanan	
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					124,505,000	119,577,000	96.04		
			Lomba Masak Ikan (Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi)	2 kali lomba di tingkat kabupaten dan propinsi	2 kali lomba di tingkat kabupaten dan propinsi	100	124,505,000	119,577,000	96.04	Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					461,276,900	440,453,213	95.49		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis surat & 9 orang honorer, 12 bulan	2 jenis surat & 9 orang honorer, 12 bulan	100	180,292,000	174,765,000	96.93	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis (listrik air, telepon), 12 bulan	3 jenis (listrik air, telepon), 12 bulan	100	24,000,000	17,143,272	71.43	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 STNK & 17 unit pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4	3 STNK & 17 unit pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4	100	11,650,000	10,074,942	86.48	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5 jenis dan 1 orang pegawai honorer, 12 bulan	5 jenis dan 1 orang pegawai honorer, 12 bulan	100	19,758,600	18,049,600	91.35	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	20 jenis ATK	20 jenis ATK	100	24,920,700	24,920,400	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis 90 buku & penggandaan 75.000 lembar	2 jenis 90 buku & penggandaan 75.000 lembar	100	27,567,000	27,567,000	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis peralatan komponen instalasi listrik	2 jenis peralatan komponen instalasi listrik	100	369,400	369,400	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	

			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis, 12 bulan	2 jenis, 12 bulan	100	1,920,000	1,740,000	90.63	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	8 kali makan	8 kali makan	100	6,299,200	6,294,700	99.93	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	19 kali perjalanan DD dan 8 kali perjalanan LD	19 kali perjalanan DD dan 8 kali perjalanan LD	100	164,500,000	159,528,899	96.98	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					170,432,050	166,054,000	97.43		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor	3 unit komputer, 4 unit laptop, 2 unit printer, 14 unit meja kerja, 30 unit kursi dan 4 unit lemari	3 unit komputer, 4 unit laptop, 2 unit printer, 14 unit meja kerja, 30 unit kursi dan 4 unit lemari	100	128,752,850	126,489,000	98.24	Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit gedung, 1 tahun	1 unit gedung, 1 tahun	100	6,272,000	6,272,000	100.00	Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14 unit roda 2 seama 1 tahun	14 unit roda 2 seama 1 tahun	100	12,557,200	12,543,000	99.89	Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7 jenis peralatan 1 tahun	7 jenis peralatan 1 tahun	100	22,850,000	20,750,000	90.81	Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					374,328,769	355,033,488	94.85		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal/Teknis	22 orang aparatur Dinas Perikanan	22 orang aparatus Dinas Perikanan	100	69,800,000	68,664,359	98.37	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang aparatur Dinas Perikanan	6 orang aparatur Dinas Perikanan	100	31,330,000	30,391,636	97.00	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	4 orang aparatur Dinas Perikanan	4 orang aparatur Dinas Perikanan	100	273,198,769	255,977,493	93.70	Sub Bagian TU, Organisasi & Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					113,288,400	113,288,400	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	113,288,400	113,288,400	100.00	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					7,817,600	7,799,200	99.76		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Perencanaan	100	7,817,600	7,799,200	99.76	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					5,829,400	5,800,000	99.50		
			Penysunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5,829,400	5,800,000	99.50	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					23,113,600	23,113,600	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	23,113,600	23,113,600	100.00	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
6	BADAN KEUANGAN DAERAH						11,021,656,829	10,294,764,827	93.40		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					844,886,820	805,904,600	95.39		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat	500 surat	100	26,451,630	26,289,260	99.39	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 telepon, metran air, meteran listrik, 12 bulan	1 telepon, metran air, meteran listrik, 12 bulan	100	152,400,000	127,357,209	83.57	Sub Bagian Adm. Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit roda 4 dan 43 unit roda dua	3 unit roda 4 dan 43 unit roda dua	100	42,264,440	35,475,590	83.94	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15 jenis, KSO 6 orang, 12 bulan	15 jenis, KSO 6 orang, 12 bulan	100	107,914,500	107,684,500	99.79	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Sewa Gedung	2 gedung	2 gedung	100	49,108,000	49,062,000	99.91	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 buah buku, 80.000 lmr foto copy dan 70 jilid buku	15 buah buku, 80.000 lmr foto copy dan 70 jilid buku	100	44,645,250	44,621,250	99.95	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	100	32,532,000	31,642,500	97.27	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis surat kabar	2 jenis surat kabar	100	2,280,000	2,230,000	97.81	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	9 kali PD dalam daerah & 18 kali PD luar daerah	9 kali PD dalam daerah & 18 kali PD luar daerah	100	387,291,000	381,542,291	98.52	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					314,335,209	290,574,285	92.44		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	113,856,975	108,623,000	95.40	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit gedung	1 unit gedung	100	13,000,000	12,030,000	92.54	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit roda empat & 43 unit roda dua	3 unit roda empat & 43 unit roda dua	100	153,478,234	136,427,785	88.89	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit	4 unit	100	34,000,000	33,493,500	98.51	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					24,846,700	620,080,378	2495.62		
			Pengadaan Mesin/Kartu Absen/Kartu Nama Pegawai	1 paket, 1 mesin absensi	1 paket, 1 mesin absensi	100	24,846,700	24,836,000	99.96	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					304,156,000	297,622,189	97.85		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	100	39,350,000	33,121,000	84.17	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	2 orang aparat yang mengikuti diklat	2 orang aparat yang mengikuti diklat	100	264,806,000	264,501,189	99.88	Sub Bagian Tatausaha Organisasi dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					270,283,000	241,701,450	89.43		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	20,835,400	20,648,700	99.10	Sub Bagian Adm. Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	43,623,000	43,545,450	99.82	Sub Bagian Adm. Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100	205,824,600	177,507,300	86.24	Sub Bagian Adm. Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Penataan Lingkungan Kantor					225,147,800	267,350,400	118.74		
			Pembangunan Pagar	1 unit	1 unit	100	225,147,800	225,147,800	100.00	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					32,718,400	21,101,300	64.49		
			Penyusunan Renstra, Renja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	32,718,400	21,101,300	64.49	Sub Bagian Administrasi Keuangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					70,936,300	70,883,000	99.92		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100	70,936,300	70,883,000	99.92	Sub Bagian Administrasi Keuangan & Perencanaan Program/Kegiatan	

		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan barang pengguna					48,047,100	48,003,400	99.91		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	48,047,100	48,003,400	99.91	Sub Bagian Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					8,886,299,500	7,631,543,825	85.88		
			Penyusunan Standar Satuan Harga	50 dokumen	50 dokumen	100	24,315,900	23,828,000	97.99	Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset	
			Penyusunan Rancangan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 perbup	100	724,489,400	632,883,726	87.36	Sub Bidang Penyusunan Anggaran	
			Penyusunan Rancangan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 perbup	100	598,811,150	574,756,598	95.98	Sub Bidang Penyusunan Anggaran	
			Penyusunan Rancangan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup	100	719,835,750	672,219,022	93.39	Sub Bidang Pelaporan dan Keuangan	
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100	182,326,050	181,168,638	99.37	Sub Bidang Pelaporan dan Keuangan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	8 orang	8 orang	100	648,180,000	549,388,567	84.76	Sub Bidang Penyusunan Anggaran	
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	504,633,200	458,746,900	90.91	Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset	
			Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100	71,688,550	62,144,749	86.69	Subid Penatausahaan dan Pengendalian Aset Daerah	
			Revaluasi/Appraisal/Penghapusan Barang Daerah	1 paket	1 paket	100	311,410,200	59,900,980	19.24	Subid Pemanfaatan dan Pemindatanganan Daerah	
			Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	1,579,191,100	1,509,667,800	95.60	Sub Bagian Adm. Keuangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Juknis Penyusunan dan Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	44,885,600	26,116,550	58.18	Subid Pengendalian Anggaran	
			Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Barang Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	340,764,100	19,245,205	5.65	Subid Pemanfaatan dan Pemindatanganan Daerah	
			Pendampingan, Penerapan dan Pengoperasian Sistim Aplikasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD	50 orang	50 orang	100	340,647,750	246,777,797	72.44	Subid Pembinaan Akuntansi	
			Fasilitasi Majelis TP/TGR/PPKN dan Sekretariat TP/TGR/PPKN	2 tim	2 tim	100	80,462,700	69,709,272	86.64	Subid Pembinaan Akuntansi	
			Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah	45 buku	45 buku	100	13,015,100	3,241,300	24.90	Subid Analisa Kebutuhan Aset	
			Pengelolaan Administrasi Penerimaan Daerah	12 bulan	12 bulan	100	69,675,600	68,024,949	97.63	Sub Bidang Penerimaan	
			Pengelolaan Administrasi Pengeluaran Daerah	12 bulan	12 bulan	100	386,938,600	384,134,924	99.28	Sub Bidang Pengeluaran	
			Pengelolaan Administrasi Gaji	12 bulan	12 bulan	100	196,114,300	195,349,644	99.61	Sub Bidang Pengeluaran	
			Pendataan Subyek dan Obyek Pajak	2000 OP	2000 OP	100	343,549,100	333,453,430	97.06	Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran	
			Penagihan PAD dan Piutang Daerah	12 bulan	12 bulan	100	531,524,200	514,395,800	96.78	Bidang Pelaksanaan Pendapatan	
			Penyuluhan dan Sosialisasi Sadar Pajak	825 orang	825 orang	100	70,691,200	59,138,500	83.66	Sub Bidang Penagihan & Penyuluhan dan Keberatan	
			Road Map Potensi Pendapatan Asli Daerah	12 bulan	12 bulan	100	261,747,300	256,450,900	97.98	Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan	
			Pengadaan Sarana Pemungutan PAD	12 bulan	12 bulan	100	254,141,000	235,100,896	92.51	Sub Bidang Penetapan dan Informasi	

[illegible]

		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					24,923,100	24,910,400	99.95		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	4 Dokumen LAKIP & LPPD	4 Dokumen LAKIP & LPPD	100	9,741,700	9,729,100	99.87	Sekretariat	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 Laporan (semesteran & tahunan)	2 Laporan (semesteran & tahunan)	100	15,181,400	15,181,300	100.00	Sekretariat	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					12,104,700	12,104,700	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	4 Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, Evaluasi Renja 4 triwulan	4 Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, Evaluasi Renja 4 triwulan	100	12,104,700	12,104,700	100.00		
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					129,037,300	125,377,300	97.16		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 jenis dokumen:RKA,DPA,DPPA,RDPPA & DPPA	5 jenis dokumen:RKA,DPA,DPPA, RDPPA & DPPA	100	129,037,300	125,377,300	97.16	Sekretariat	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					24,705,000	24,705,000	100.00		
			Administrasi Pengloaan Barang Pengguna SKPD	3 dokumen LBPS, LBPT dan 2	3 dokumen LBPS, LBPT dan 2 semesteran	100	24,705,000	24,705,000	100.00	Sekretariat	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					1,794,785,350	1,672,678,448	93.20		
			Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSD	50 orang peserta	50 orang peserta	100	349,557,200	230,624,028	65.98	MUTASI	
			Seleksi Penerimaan Calon PNSD dan Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNSD	1 paket	1 paket	100	64,279,400	64,250,300	99.95	P2ASN	
			Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	100 orang PNSD	100 orang PNSD	100	37,436,700	37,434,300	99.99	P2ASN	
			Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD	20 kasus	20 kasus	100	81,131,700	79,738,700	98.28	P2ASN	
			Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	68 orang	68 orang	100	925,000,000	925,000,000	100.00	P2ASN	
			Promosi dan Penetapan Pensiun PNSD	850 orang PNSD	850 orang PNSD	100	168,538,500	168,538,022	100.00	MUTASI	
			Ujian Dinas Tk. I, Tingkat II, Mutasi Jabatan	250 orang ujian dinas dan 5 kali mutasi	250 orang ujian dinas dan 5 kali mutasi	100	49,809,000	49,184,199	98.75	MUTASI	
			Penyelenggaraan Rapat Baperjakat	10 kali rapat	10 kali rapat	100	8,115,600	8,115,200	100.00	MUTASI	
			Penetapan PMK, PWK dan Berkala	150 orang PNSD/CPNSD	150 orang PNSD/CPNSD	100	40,617,500	40,602,149	99.96	MUTASI	
			Penetapan Taspem, Karis, Karsu dan Karpeg	100 orang PNSD	100 orang PNSD	100	38,626,000	37,569,800	97.27	MUTASI	
			Penyusunan Bezetting/Formasi Kebutuhan PNSD	1 dokumen	1 dokumen	100	20,088,500	20,086,500	99.99	P2ASN	
			Pendataan dan Penataan Tenaga Honorer Daerah	277 TKD	277 TKD	100	11,585,250	11,535,250	99.57	P2ASN	
		Program Pembinaan Sistim Administrasi Kearsipan dan Dokumen Kepegawaian					154,340,650	153,553,900	99.49		
			Pengumpulan dan Klasifikasi Data	2 kegiatan, 1 tenaga KSO	2 kegiatan, 1 tenaga KSO	100	92,087,850	92,087,800	100.00	INKA	
			Penyusunan Sistim Katalog Data	20 dokumen	20 dokumen	100	17,775,400	17,089,200	96.14	INKA	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kepegawaian	15 arsip	15 arsip	100	11,573,650	11,573,650	100.00	INKA	

			Penyusunan DUK dan Nominatif PNSD/CPNSD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata	2 Dokumen (DUK & Nominatif)	2 Dokumen (DUK & Nominatif)	100	12,394,150	12,393,750	100.00	INKA	
			Sosialisasi Penerapan Kartu Pegawai Elektronik	300 orang PNS	300 orang PNS	100	20,509,600	20,409,500	99.51	INKA	
		Program Peningkatan Kesejahteraan PNSD					60,103,150	58,917,900	98.03		
			Pekan Olahraga Seni dan Bidaya Tingkat Provinsi	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	100	58,681,250	57,496,000	97.98		
			Pembinaan Mental Spiritual PNS	4 kali kegiatan	4 kali kegiatan	100	1,421,900	1,421,900	100.00		
8	SEKRETARIAT DPRD						20,891,262,846	18,063,249,150	86.46		
		Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa					219,118,000	170,699,272	77.90		
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	24 Edisi	1 Edisi	4.17	219,118,000	170,699,272	77.90	Bagian Publikasi dan Komunikasi Subag. Informasi Publikasi Dokumen dan	
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					9,758,347,200	8,516,175,560	87.27		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Ranperda	8 Ranperda	100	3,466,692,200	3,214,237,816	92.72	Bagian Persidangan Subag. Perundang-undangan	
			Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	2 kali	2 kali	100	67,200,000	38,300,000	56.99	Bagian Persidangan Subag. Perundang-undangan	
			Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	4 kali rapat	4 kali rapat	100	319,051,000	295,084,600	92.49	Bagian Persidangan Subag. Risalah	
			Rapat-rapat Paripurna	1 paket	1 paket	100	92,614,000	78,809,400	85.09	Bagian Persidangan Subag. Risalah dan Persidangan	
			Kegiatan Reses	3 kali reses	3 kali reses	100	2,342,790,000	2,167,278,600	92.51	Bagian Persidangan Subag. Risalah dan Persidangan	
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	2 kali kunjungan kerja	2 kali kunjungan kerja	100	172,800,000	162,300,000	93.92	Bagian Persidangan Subag. Risalah	
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	25 orang, 3 orang bimtek	25 orang, 3 orang bimtek	100	3,136,900,000	2,400,865,144	76.54	Bagian Persidangan Subag. Persidangan	
			Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-undangan	2 kali 8 perda	2 kali 8 perda	100	118,100,000	118,000,000	99.92	Bagian Persidangan Subag. Perundang-undangan	
			Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara)	1 kali	1 kali	100	42,200,000	41,300,000	97.87	Bagian Persidangan Subag. Risalah dan Persidangan	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan					755,490,000	663,770,899	87.86		
			Peningkatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarga	25 orang	25 orang	100	755,490,000	663,770,899	87.86	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					6,090,175,600	5,739,302,240	94.24		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket	1 Paket	100	705,559,800	663,890,270	94.09	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan (listrik, telepon & air)	12 bulan (listrik, telepon & air)	100	173,040,000	140,890,159	81.42	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	1 paket	100	558,438,000	418,584,061	74.96	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Adminitasi Keuangan	1 dokumen keuangan	1 dokumen keuangan	100	165,470,000	147,659,000	89.24	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	1 paket	100	707,214,500	683,767,380	96.68	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket	100	113,082,900	112,987,975	99.92	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100	97,475,000	79,214,200	81.27	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100	18,919,400	18,880,980	99.80	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1 paket	100	62,400,000	40,560,000	65.00	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1 paket	1 paket	100	148,560,000	143,920,600	96.88	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 paket	1 paket	100	3,340,016,000	3,288,947,615	98.47	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2,595,175,896	1,643,457,649	63.33		
			Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	818,357,021	55,792,421	6.82	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 paket perlengkapan	1 paket perlengkapan	100	761,050,000	750,500,000	98.61	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	

			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	8 jenis	6 jenis	75.00	164,723,800	135,425,000	82.21	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	46,070,000	44,448,400	96.48	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4 unit	4 unit	100	261,313,153	228,464,534	87.43	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit Roda 2 & 10 unit roda 4	10 Unit Roda 2 & 10 unit roda 4	100	490,561,922	397,239,094	80.98	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	53,100,000	31,588,200	59.49	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					258,723,100	234,225,000	90.53		
			Pengadaan Pakian Dinas beserta perlengkapannya	4 jenis 116 stell	4 jenis 116 stell	100	258,723,100	234,225,000	90.53	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					958,238,850	864,525,880	90.22		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 jenis bimtek	8 jenis bimtek	100	711,941,000	648,137,386	91.04	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	4 orang PIM IV	4 orang PIM IV	100	246,297,850	216,388,494	87.86	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					237,911,000	216,595,850	91.04		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	13,442,000	9,826,850	73.11	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	3 dokumen keuangan	3 dokumen keuangan	100	224,469,000	206,769,000	92.11	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					7,348,000	5,101,000	69.42		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	3 dokumen renstra dan renja	3 dokumen renstra dan renja	100	7,348,000	5,101,000	69.42	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					6,428,200	5,304,700	82.52		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	6,428,200	5,304,700	82.52	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	

		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan barang pengguna					4,307,000	4,091,100	94.99		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen laporan barang	2 dokumen laporan barang	100	4,307,000	4,091,100	94.99	Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Subag Umum Kepegawaian, Tatausaha Pimpinan, Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						1,556,885,950	1,430,096,090	91.86		
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					149,262,700	60,406,300	40.47		
			Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Pengamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	104,079,400	15,480,500	14.87	Subid Penangan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	
			Fasilitas Penanganan Konflik di Wilayah	7 Konflik	7 Konflik	100	22,055,100	21,955,100	99.55	Subid Penangan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	
			Monitoring dan Pengawasan Orang/Lembaga Asing	6 kegiatan	6 kegiatan	100	23,128,200	22,970,700	99.32	Subid Wasdin dan Kerjasama Intelkam	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					195,857,500	194,821,780	99.47		
			Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	9 kegiatan & 1 laporan	9 kegiatan & 1 laporan	100	6,000,000	6,000,000	100.00	Subid Wawasan Kebangsaan	
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	1 kegiatan	1 kegiatan	100	52,894,900	52,866,400	99.95	Subid Bina Idiologi dan Bela Negara	
			Fasilitasi Operasional Kominda	3 kegiatan rapat	3 kegiatan rapat	100	89,846,500	88,893,180	98.94	Subid Kerjasama Intelkam	
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	16,045,600	15,991,700	99.66	Subid Bina Idiologi dan Bela Negara	
			Pemutakhiran Data Base dan LSM se Kabupaten Lembata	1 kegiatan	1 kegiatan	100	31,070,500	31,070,500	100.00	Subid Kelembagaan Partai Politik	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					188,938,200	179,364,506	94.93		
			Fasilitasi Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat	4 kegiatan, 4 rekomendasi	4 kegiatan, 4 rekomendasi	100	28,746,600	28,711,800	99.88	Subid Wasdin dan Kerjasama Intelkam	
			Fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Kebangsaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	54,343,600	45,073,036	82.94	Subid Idiologi dan Bela Negara	
			Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Agraris	1 kegiatan	1 kegiatan	100	67,565,800	67,479,470	99.87	Subid Ketahanan Ekonomi	
			Koordinasi dan Pemetaan Basis Sumber Daya Alam dan Daerah Rawan Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100	38,282,200	38,100,200	99.52	Subid Ketahanan SDA	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat					112,440,350	104,603,750	93.03		
			Penyuluhan Kepada Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100	22,427,100	22,427,100	100.00	Subid Partai Politik	
			Verifikasi dan Bantuan Keuangan Partai Politik	1 kegiatan	1 kegiatan	100	19,875,100	19,865,100	99.95	Subid Partai Politik	
			Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Parpol	1 kegiatan	1 kegiatan	100	56,348,700	48,522,100	86.11	Subid Partai Politik	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	13,789,450	13,789,450	100.00	Subid Partai Politik	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					565,282,500	560,207,504	99.10		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis, 2 KSO	2 jenis, 2 KSO	100	41,716,000	41,169,320	98.69	Subbagian Umum dan Kepegawaian	

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan, 3 jenis	12 bulan, 3 jenis	100	12,900,000	12,889,449	99.92	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit motor dan 1 unit mobil	11 unit motor dan 1 unit mobil	100	6,650,000	4,957,635	74.55	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 jenis bahan 3 KSO	16 jenis bahan 3 KSO	100	59,247,900	58,431,000	98.62	Sekretariat	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	33 jenis	33 jenis	100	21,719,400	21,719,400	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,894 lembar foto copy, jilid 117 buku	22,894 lembar foto copy, jilid 117 buku	100	19,575,000	19,575,000	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	100	1,435,600	1,435,600	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis	100	42,050,200	40,500,000	96.31	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	100	5,400,000	5,360,000	99.26	Sekretariat	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10 kali rapat & 10 kali konsultasi	10 kali rapat & 10 kali konsultasi	100	354,588,400	354,170,100	99.88	Sekretariat	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					75,696,600	74,024,600	97.79		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	5,386,000	5,386,000	100.00	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit roda 2, 1 unit roda 4, 1 org KSO	11 unit roda 2, 1 unit roda 4, 1 org KSO	100	67,810,600	66,138,600	97.53	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	2,500,000	2,500,000	100.00	Sekretariat	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100,074,000	99,596,500	99.52		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 kali	4 kali	100	100,074,000	99,596,500	99.52	Sekretariat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					129,747,650	129,224,550	99.60		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	3,285,250	3,285,250	100.00	Subag. Keuangan & Subag. Perencanaan Program	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	15,897,700	15,874,600	99.85	Subag. Keuangan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	110,564,700	110,064,700	99.55	Subag. Keuangan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					15,846,700	15,846,600	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	6,059,100	6,059,100	100.00	Subag. Perencanaan Program	
			Penyusunan Profil Pembangunan Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	100	9,787,600	9,787,500	100.00	Subag. Perencanaan Program	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					11,739,750	-	0.00		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen	100	3,756,500	-	0.00	Subag. Perencanaan Program	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	3,785,400	-	0.00	Subag. Perencanaan Program	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	10 %		0	4,197,850	-	0.00	Subag. Perencanaan Program	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan barang pengguna					12,000,000	12,000,000	100.00		

			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	1 kegiatan	1 Kegiatan	100	12,000,000	12,000,000	100.00	Subag. Keuangan	
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						3,280,131,186	3,201,249,636			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					566,542,750	560,464,060	98.93		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 org KSO, 100 lembar	9 org KSO, 100 lembar	100	182,812,000	182,811,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	100	20,700,000	17,026,000	82.25	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	8 bulan	67	6,700,000	4,839,600	72.23	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15 unit	15 unit	100	172,996,900	172,996,800	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Sewa Gedung	2 unit	1 unit	50	22,000,000	22,000,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis	38 jenis	100	24,120,900	24,120,900	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,497 lembar, 80 buku	45,497 lembar, 80 buku	100	17,055,950	17,055,950	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 surat kabar/majalah	2 surat kabar/majalah	100	2,460,000	2,460,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	41 kali	41 kali	100	117,697,000	117,153,810	99.54	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					86,273,000	85,613,000	99.23		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	49,800,000	49,140,000	98.67	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda empat, 14 unit roda dua	1 unit roda empat, 14 unit roda dua	100	25,973,500	25,973,500	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	23 unit laptop, 2 unit PC, 5 unit printer, 4 unit almari, 1 unit meja	23 unit laptop, 2 unit PC, 5 unit printer, 4 unit almari, 1 unit meja	100	10,499,500	10,499,500	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					31,645,000	31,645,000	100.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	2 orang	100	31,645,000	31,645,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					17,094,400	17,094,400	100.00		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	8,232,400	8,232,400	100.00	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	8,862,000	8,862,000	100.00	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					9,312,400	9,312,400	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	9,312,400	9,312,400	100.00	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					132,279,200	131,779,200	99.62		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	132,279,200	131,779,200	99.62	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Pengelolaan Kekayaan Daerah					126,867,400	97,688,200	77.00		
			Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	2 rumah adat	2 rumah adat	100	30,439,000	1,269,300	4.17	Sub Bidang Kebudayaan	
			Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	14 Budaya, Sutus & Cagar Budaya	14 Budaya, Sutus & Cagar Budaya	100	96,428,400	96,418,900	99.99	Sub Bidang Kebudayaan	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					10,946,400	10,946,400	100.00		

			Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	3 media cetak	3 media cetak	100	10,946,400	10,946,400	100.00	Sub Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					2,264,859,036	2,223,295,376	98.16		
			Pengembangan Obyek Wisata Unggulan	1 paket	1 paket	100	277,690,000	277,690,000	100.00	Sub Bidang Pengembangan Destinasi	
			Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	4 paket	4 paket	100	1,709,354,600	1,668,855,340	97.63	Sub Bidang Pengembangan Destinasi	
			Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	3 paket	3 paket	100	277,814,436	276,750,036	99.62	Sub Bidang Pengembangan Destinasi	
		Program Pengembangan Kemitraan					34,311,600	33,411,600	97.38		
			Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	10 pokdarwis	10 pokdarwis	100	34,311,600	33,411,600	97.38	Sub Bidang Kebudayaan	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						3,100,183,048	2,819,372,824	90.94		
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					723,048,650	663,901,450	91.82		
			Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100	198,087,200	169,088,200	85.36		
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	9 kecamatan	9 kecamatan	100	39,884,500	30,342,000	76.07		
			Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup	9 kecamatan	9 kecamatan	100	45,750,500	45,449,650	99.34		
			Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	9 kecamatan	9 kecamatan	100	97,590,200	97,538,900	99.95		
			Koordinasi Peyuluhan AMDAL	9 kecamatan	9 kecamatan	100	58,816,550	56,202,300	95.56		
			Program Pelaksanaan Adywiyata	27 sekolah	27 sekolah	100	95,384,300	85,412,100	89.55		
			Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1500 anakan, 5 km parit	1500 anakan, 5 km parit	100	37,513,000	35,777,000	95.37		
			Peningkatan Kapasitas UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup	60 titik 9 kecamatan	60 titik 9 kecamatan	100	150,022,400	144,091,300	96.05		
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					385,622,956	343,918,798	89.19		
			Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	2 mata air, 10 Ha	2 mata air, 10 Ha	100	106,533,198	105,218,698	98.77		
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	4 ha, 2 lokasi	4 ha, 2 lokasi	100	279,089,758	238,700,100	85.53		
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam					102,153,500	101,712,500	99.57		
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4 desa, 4 kecamatan, 20 ha	4 desa, 4 kecamatan, 20 ha	100	102,153,500	101,712,500	99.57		
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					58,150,000	56,283,500	96.79		
			Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	2 dokumen, 50 buku	2 dokumen, 50 buku	100	58,150,000	56,283,500	96.79		
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					491,938,800	475,538,800	96.67		
			Penataan RTH	2 ha	2 ha	100	491,938,800	475,538,800	96.67		

		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					766,330,040	612,549,061	79.93		
			Peningkatan Operasi Prasarana dan Sarana Persampahan	2 unit truk sampah, 30 orang tenaga kebersihan	2 unit truk sampah, 30 orang tenaga kebersihan	100	630,899,540	612,549,061	97.09		
			Operasional TPA	1 TPA	1 TPA	100	135,430,500	132,982,500	98.19		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					274,172,811	268,888,996	98.07		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	22,968,000	22,560,000	98.22		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	12,000,000	11,733,050	97.78	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	5,200,000	2,317,700	44.57	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	19,824,200	19,416,200	97.94	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	28,203,800	28,202,700	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	11,700,000	11,700,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	2,040,000	975,000	47.79	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 tempat Lewoleba, Kupang, Denpasar, Jakarta	4 tempat Lewoleba, Kupang, Denpasar, Jakarta	100	172,236,811	171,984,346	99.85	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					110,784,491	109,019,719	98.41		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	27,540,300	27,023,600	98.12		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	73,073,091	72,195,819	98.80		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	10,171,100	9,800,300	96.35		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					127,144,900	126,733,100	99.68		
			Penyusunan, Pelaporan Keuangan SKPD	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	127,144,900	126,733,100	99.68		
		Program Perencanaan Pembangunan Sektor					9,670,600	9,663,400	99.93		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	9,670,600	9,663,400	99.93		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					51,166,300	51,163,500	99.99		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	1 tempat Lewoleba	1 tempat Lewoleba	100	51,166,300	51,163,500	99.99		
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						11,893,859,993	12,043,866,430	101.26		
		Program Pengembangan Perumahan					3,784,227,409	3,698,188,750	97.73		
			Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	48 unit	48 unit	100	3,784,227,409	3,698,188,750	97.73	Seksi Perencanaan Penatan Perumahan Rakyat	

		Program Lingkungan Sehat Perumahan					4,718,503,284	4,327,903,300	91.72		
			Pembangunan Sanitasi	36 unit	36 unit	100	4,718,503,284	4,327,903,300	91.72	Seksi Perencanaan Penatan Perumahan Rakyat	
		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)					1,205,285,200	1,184,551,700	98.28		
			Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)	4 desa	4 desa	100	1,205,285,200	1,184,551,700	98.28	Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					423,632,800	360,694,200	85.14		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	47,452,000	37,763,000	79.58	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	117,232,000	97,956,400	83.56	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	4 unit	100	4,350,000	2,582,400	59.37	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13 jenis barang	13 jenis barang	100	56,968,400	45,370,400	79.64	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 jenis barang	30 jenis barang	100	40,838,600	40,838,600	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	100	2,931,300	2,928,100	99.89	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	4,755,500	4,755,500	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	100	1,800,000	600,000	33.33	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 kegiatan	4 kegiatan	100	147,305,000	127,899,800	86.83	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					274,719,300	265,323,000	96.58		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16 unit	16 unit	100	144,898,500	144,880,500	99.99	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 kali	1 kali	100	124,820,800	118,227,500	94.72	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	2 jenis barang	2 jenis barang	100	5,000,000	2,215,000	44.30	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					222,098,300	182,224,500	82.05		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	3 orang	100	72,474,000	46,636,500	64.35	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	2 orang	2 orang	100	149,624,300	135,588,000	90.62	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					154,785,000	122,315,000	79.02		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5,035,400	5,035,400	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 Dokumen	100	149,749,600	117,279,600	78.32	Subbagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektor					5,557,400	5,557,400	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	5,557,400	5,557,400	100.00	Subbagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					31,310,400	885,760,440	2828.97		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	31,310,400	28,510,400	91.06	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					879,022,400	837,951,940	95.33		
			Perencanaan Penggunaan Tanah, Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi Tanah	4 dokumen	4 dokumen	100	21,548,600	19,298,100	89.56	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
			Penyuluhan Pertanahan Terpadu	50 orang	50 orang	100	17,070,200	17,070,200	100.00	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	

			Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat	80 bidang	80 bidang	100	320,708,400	292,522,440	91.21	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
			Pengadaan Pilar	300 buah	300 buah pilar	100	110,391,000	110,341,000	99.95	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
			Pengadaan Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah	15 buah	15 buah	100	56,320,800	56,320,800	100.00	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
			Penyerahan hasil pengadaan tanah	80 jumlah sertifikat milik pemda		0	9,000,000		0.00	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
			Persiapan pengadaan tanah	1 paket	1 paket	100	98,983,400	97,399,400	98.40	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
			Pelaksanaan Pengadaan Tanah	3 dokumen	3 dokumen	100	245,000,000	245,000,000	100.00	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					67,309,400	60,510,400	89.90		
			Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	9 dokumen	9 dokumen	100	67,309,400	60,510,400	89.90	Seksi Penyelesaiaan Permasalahan Tanah	
		Program Koordinasi Administrasi Pertanahan yang menjadi Kewenangan Pemda					69,534,100	63,816,600	91.78		
			Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan	87 dokumen	87 dokumen	100	61,756,600	56,681,100	91.78	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
			Penataan administrasi pertanahan	5 dokumen	5 dokumen	100	7,777,500	7,135,500	91.75	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
		Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintahan Bidang Administrasi Pertanahan					57,875,000	49,069,200	84.78		
			Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Bimtek Masalah Kebijakan Bidang Pertanahan	3 orang	3 orang	100	57,875,000	49,069,200	84.78	Seksi Administrasi Pengadaan Tanah	
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						2,381,996,987	2,341,170,035	98.29		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					273,377,280	269,838,458	98.71		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	18,000,000	16,185,001	89.92	Sub Bagian Tata Usaha Organisasi dan Kepegawaia	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14 unit kendaraan	14 unit kendaraan	100	6,400,000	6,247,825	97.62	Subbag Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	150 alat kebersihan	150 alat kebersihan	100	3,293,360	3,293,360	100.00	Sub Bagian Tata Usaha Organisasi dan Kepegawaia	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1,278 ATK	1,278 ATK	100	32,866,970	32,820,576	99.86	Subbag Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75 buku	75 buku	100	15,796,700	15,796,700	100.00	Sub Bagian Tata Usaha Organisasi dan Kepegawaia	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 surat kabar	1 surat kabar	100	2,900,000	2,900,000	100.00	Sub Bagian Tata Usaha Organisasi dan Kepegawaia	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 kegiatan	4 kegiatan	100	194,120,250	192,594,996	99.21	Sub Bagian Tata Usaha Organisasi dan Kepegawaia	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					36,737,480	36,736,530	100.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14 unit kendaraan	14 unit kendaraan	100	35,637,480	35,636,530	100.00	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna dan Kantor	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	2 paket	2 paket	100	1,100,000	1,100,000	100.00	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna dan Kantor	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					131,336,675	119,336,495	90.86		
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	131,336,675	119,336,495	90.86	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					9,189,177	9,189,177	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	9,189,177	9,189,177	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					17,377,270	17,377,270	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	17,377,270	17,377,270	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	

		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					29,170,560	29,170,560	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	29,170,560	29,170,560	100.00	Subbag Pengelolaan Barang Pengguna	
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum					1,845,418,500	1,820,131,500	98.63		
			Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	5 Perda	5 Perda	100	275,755,500	265,445,500	96.26	Seksi Perda Penyelidikan dan Penyidikan	
			Operasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	12 bulan	12 bulan	100	754,623,700	739,926,700	98.05	Seksi Operasi dan Pengendalian	
			Pengamanan dan Pengawalan Pejabat	17 kali	17 kali	100	17,094,400	17,094,400	100.00	Seksi Ketentraman dan Keterrtiban	
			Patroli Kota dan Pengamanan Tempat/Kondisi Tertentu	9 kali	140 kali patroli kota	1556	782,538,000	782,258,000	99.96	Seksi Ketentraman dan Keterrtiban	
			Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	5 kali	5 kali	100	15,406,900	15,406,900	100.00	Seksi Pembinaan & Pengawasan Bidang Perda	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					26,591,400	26,591,400	100.00		
			Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,963 orang	1,963 orang	100	10,195,900	10,195,900	100.00	Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
			Kegiatan Bina Potensi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100	16,395,500	16,395,500	100.00	Seksi Kesiap Siagaan Bina Potensi Masyarakat	
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					12,798,645	12,798,645	100.00		
			Penerimaan Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran	54 orang (6 kecamatan)	54 orang (6 kecamatan)	100	7,915,300	7,915,300	100.00	Seksi Penyelamatan dan Pelatihan Sarana dan Prasarana	
			Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	9 kali pengendalian	18 kali monitoring dan patroli wilayah	200	4,883,345	4,883,345	100.00	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						10,414,258,150	7,007,774,022	67.29		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					340,190,250	334,042,725	98.19		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 lembar, 2 KSO, 12 bulan	90 lembar, 2 KSO, 12 bulan	100	39,956,000	39,953,000	99.99		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 unit telepon, 1 unit meteran listrik & 1 unit wifi	1 unit telepon, 1 unit meteran listrik & 1 unit wifi	100	17,400,000	16,563,658	95.19	BPBD (Sekretariat)	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit roda 2, 4 unit roda 4	11 unit roda 2, 4 unit roda 4	100	15,350,000	10,425,800	67.92	BPBD (Sekretariat)	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 jenis, 2 KSO 12 bulan	12 jenis, 2 KSO 12 bulan	100	39,457,000	39,457,000	100.00	BPBD (Sekretariat)	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	39 jenis, 12 bulan	39 jenis, 12 bulan	100	35,076,750	35,076,750	100.00	BPBD (Sekretariat)	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51,681 lembar, 80 buku	51,681 lembar, 80 buku	100	16,564,500	16,564,500	100.00	BPBD (Sekretariat)	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 surat kabar	2 surat kabar	100	1,800,000	1,755,000	97.50	BPBD (Sekretariat)	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	175 kali dalam daerah & 5 kali luar daerah	175 kali dalam daerah & 5 kali luar daerah	100	174,586,000	174,247,017	99.81	BPBD (Sekretariat)	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					239,442,325	222,630,108	92.98	BPBD (Sekretariat)	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit mesin absensi, 1 paket terali, 1 unit PC & 1 unit meteran listrik	1 unit mesin absensi, 1 paket terali, 1 unit PC & 1 unit meteran listrik	100	26,612,933	17,519,000	65.83	BPBD (Sekretariat)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 jenis	10 jenis	100	2,225,900	2,177,500	97.83	BPBD (Sekretariat)	

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda 6, 5 unit roda 4, 2 unit roda 2 & 4 orang KSO	1 unit roda 6, 5 unit roda 4, 2 unit roda 2 & 4 orang KSO	100	203,603,492	195,933,608	96.23	BPBD (Sekretariat)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit printer, 3 unit laptop dan 1 unit computer PC	4 unit printer, 3 unit laptop dan 1 unit computer PC	100	7,000,000	7,000,000	100.00	BPBD (Sekretariat)	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					106,725,000	97,830,500	91.67		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal/Teknis	1 orang	1 orang	100	21,900,000	13,007,500	59.39	BPBD (Sekretariat)	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	1 orang	1 orang	100	84,825,000	84,823,000	100.00	BPBD (Sekretariat)	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					157,205,800	151,885,500	96.62		
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	5 dokumen laporan, 2 KSO	5 dokumen laporan, 2 KSO	100	157,205,800	151,885,500	96.62	BPBD (Sekretariat)	
		Program Perencanaan Pembangunan Internal SKPD					24,563,150	24,524,150	99.84		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	7 dokumen, 1 KSO	7 dokumen, 1 KSO	100	24,563,150	24,524,150	99.84	BPBD (Sekretariat)	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					41,863,300	41,100,800	98.18		
			Peyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen & 1 orang KSO	4 dokumen & 1 orang KSO	100	41,863,300	41,100,800	98.18	BPBD (Sekretariat)	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					27,512,800	10,458,300	38.01		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	9 laporan	9 laporan	100	27,512,800	10,458,300	38.01	BPBD (Sekretariat)	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					5,146,177,725	4,759,500,123	92.49		
			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	9 kecamatan, 1 Laporan	9 kecamatan, 1 Laporan	100	11,693,950	11,612,400	99.30	BPBD (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	
			Penanganan Bencana, Pasca Bencana dan Kelembagaan	2 lokasi 2 dokumen	2 lokasi 2 dokumen	100	4,384,429,150	4,031,429,099	91.95	BPBD (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	
			Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari ancaman/Korban Bencana Alam	9 kecamatan	9 kecamatan	100	13,722,800	13,672,000	99.63	BPBD (Bidang Kedauaratan dan Logistik)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	1 paket bantuan, 1 gedung/gudang, 8 KSO	1 paket bantuan, 1 gedung/gudang, 8 KSO	100	199,884,000	195,955,999	98.03	BPBD (Bidang Kedauaratan dan Logistik)	
			Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	1 paket	1 paket	100	401,424,200	374,911,700	93.40	BPBD (Bidang Kedauaratan dan Logistik)	
			Publikasi/Sosialisasi Resiko Penanggulangan Bencana	120 orang, 2 desa	120 orang, 2 desa	100	24,722,100	23,652,100	95.67	BPBD (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Kelompok/Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan/Kelompok Relawan	20 orang anggota forum PRB	20 orang anggota forum PRB	100	7,173,100	7,172,500	99.99	BPBD (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	
			Desa Kelurahan Tangguh Bencana dan Sekolah/Madrasah Aman Bencana	1 sekolah, 60 orang, 1 orang KSO	1 sekolah, 60 orang, 1 orang KSO	100	61,082,100	60,207,500	98.57	BPBD (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	
			Gladi/Simulasi Kesiapsiagaan di Daerah Rawan Bencana	75 orang peserta geladi	75 orang peserta geladi	100	42,046,325	40,886,825	97.24	BPBD (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	
		Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana					4,330,577,800	1,365,801,816	31.54		

			Pembangunan Daerah Rawan Bencana	5 lokasi	5 lokasi	100	30,577,800	25,534,402	83.51	BPBD (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 paket, 37 dokumen	1 paket, 37 dokumen	100	4,300,000,000	1,340,267,414	31.17	BPBD (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						1,358,636,350	1,341,957,215	98.77		
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					90,406,698	89,285,198	98.76		
			Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	12 orang (3 kelompok)	12 orang (3 kelompok)	100	90,406,698	89,285,198	98.76	Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja					62,020,799	61,323,799	98.88		
			Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	20 orang terampil house keeping	15 orang terampil house keeping	75	62,020,799	61,323,799	98.88	Seksi Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					55,726,300	54,120,019	97.12		
			Pembinaan dan Pengembangan tenaga Hubungan Industrial	10 perusahaan, 9 kecamatan	10 perusahaan, 9 kecamatan	100	55,726,300	54,120,019	97.12	Seksi Hubungan Industrial	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi					121,009,999	121,009,999	100.00		
			Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	2 kali rapat	2 kali rapat	100	87,441,799	87,441,799	100.00	Seksi Pengembangan Penanaman Modal	
			Promosi dan Kerjasama Investasi	1 dokumen	1 dokumen	100	33,568,200	33,568,200	100.00	Seksi Promosi dan Kerjasama	
		Program Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal					50,890,200	49,878,700	98.01		
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100	50,890,200	49,878,700	98.01	Seksi Pengembangan Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Peijinan Terpadu					286,002,699	284,999,699	99.65		
			Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu	2 Komponen	2 Komponen	100	152,921,199	152,118,199	99.47	Seksi Perizinan Jasa Usaha & Perizinan Tertentu	
			Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100	18,858,700	18,858,700	100.00	Seksi Perizinan Jasa Usaha & Perizinan Tertentu	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu	2 orang	2 orang	100	28,298,000	28,098,000	99.29	Seksi Perizinan Jasa Usaha & Perizinan Tertentu	
			Penanganan Pengaduan Masyarakat	50 jenis	50 jenis	100	59,751,400	59,751,400	100.00	Seksi Data, Informasi dan Pengaduan	
			Pembuatan dan Pengembangan Data Base Perizinan	1 dokumen	1 dokumen	100	26,173,400	26,173,400	100.00	Pelayanan Pengaduan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					318,908,798	314,180,690	98.52		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100	63,288,400	63,282,400	99.99	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	100	12,000,000	10,697,242	89.14	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	7 unit	6 unit	86	1,800,000	1,000,650	55.59	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 jenis	2 jenis	100	58,884,800	58,884,800	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	37 jenis	37 jenis	100	27,815,700	27,815,700	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	100	20,417,000	20,417,000	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	4 jenis	100	1,945,400	1,945,400	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	100	1,740,000	1,740,000	100.00	Sekretariat	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	18 kali	18 kali	100	131,017,498	128,397,498	98.00	Sekretariat	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					110,623,357	109,678,051	99.15		

			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 jenis	9 jenis	900	76,076,200	75,730,150	99.55	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	6 unit	86	23,185,950	23,111,400	99.68	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	11,361,207	10,836,501	95.38	Sekretariat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					126,979,200	126,149,200	99.35		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD	2 dokumen	2 dokumen	100	5,503,700	5,503,700	100.00	Sekretariat	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	6,998,500	6,998,500	100.00	Sekretariat	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	114,477,000	113,647,000	99.27	Sekretariat	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral SKPD					6,734,000	6,734,000	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	6,734,000	6,734,000	100.00	Sekretariat	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					7,068,200	6,968,200	98.59		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	7,068,200	6,968,200	98.59	Sekretariat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					22,652,900	22,585,300	99.70		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	22,652,900	22,585,300	99.70	Sekretariat	
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					53,736,300	49,402,300	91.93		
			Penyediaan dan Pengelolaan Prasana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	2 kelompok	2 kelompok	100	53,736,300	49,402,300	91.93	Seksi Transmigrasi	
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					45,876,900	45,642,060	99.49		
			Pelatihan Transmigrasi Lokal	30 orang	30 orang	100	45,876,900	45,642,060	99.49	Seksi Transmigrasi	
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						922,679,475	900,596,807	97.61		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					301,452,075	289,887,916	96.16		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 lembar meterai, 200 TKD/KSO	20 lembar meterai, 200 TKD/KSO	100	40,616,000	40,616,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 meteran listrik 12 bulan & rekening telepon 3 unit 12 bulan	2 meteran listrik 12 bulan & rekening telepon 3 unit 12 bulan	100	30,550,000	19,841,031	64.95	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	4 unit roda 2	2 unit roda 2	50	1,000,000	454,060	45.41	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	14 jenis, 1 KSO	14 jenis, 1 KSO	100	20,694,175	20,691,200	99.99	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	43 jenis, 12 bulan	43 jenis, 12 bulan	100	21,395,000	21,393,750	99.99	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000 lembar, 25 buku	15,000 lembar, 26 buku	100	5,617,900	5,615,900	99.96	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 surat kabar 12 bulan	2 surat kabar 12 bulan	100	2,040,000	1,740,000	85.29	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	7 kali Perjalanan LD, 220 Perjalanan DD	7 kali Perjalanan LD, 200 Perjalanan DD	100	179,539,000	179,535,975	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					242,854,500	234,192,300	96.43		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda 2	1 unit roda 2	100	31,221,300	29,710,000	95.16	Subbagian Umum dan Kepegawaian	

			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit PC, 4 unit laptop, 4 unit printer, 16 unit meubeler	1 unit PC, 4 unit laptop, 4 unit printer, 16 unit meubeler	100	84,877,700	84,877,700	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 gedung kantor, 1 kali	2 gedung kantor, 1 kali	100	2,049,200	2,049,200	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda 4, 8 unit roda 2	1 unit roda 4, 7 unit roda 2	100	121,706,300	114,555,400	94.12	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 gedung kantor, 4 kali	1 gedung kantor, 4 kali	100	3,000,000	3,000,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					79,437,000	79,016,991	99.47		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal/Teknis	2 orang	2 orang	100	7,800,000	7,380,000	94.62	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	1 orang PIM	1 orang PIM	100	71,637,000	71,636,991	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					98,864,700	98,859,500	99.99		
			Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2 dokumen laporan, 1 KSO	2 dokumen laporan, 1 KSO	100	24,464,700	24,459,500	99.98	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	8 orang PNS	8 orang PNS	100	74,400,000	74,400,000	100.00	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					25,473,700	25,468,500	99.98		
			Peyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja OPD	1 orang, 2 jenis dokumen	1 orang, 2 jenis dokumen	100	25,473,700	25,468,500	99.98	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					3,609,800	3,602,000	99.78	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	3,609,800	3,602,000	99.78	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					21,005,600	21,005,600	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen barang, 2 KSO	2 dokumen barang, 2 KSO	100	21,005,600	21,005,600	100.00	Sub Bagian Aset	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa					36,542,950	36,482,950	99.84		
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	9 kelompok KOMSODES, 1 orang KSO	9 kelompok KOMSODES, 1 orang KSO	100	36,542,950	36,482,950	99.84		
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					44,843,850	43,485,750	96.97		
			Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	1 orang KSO, 300 siswa	1 orang KSO, 300 siswa	100	44,843,850	43,485,750	96.97		
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					68,595,300	68,595,300	100.00		
			Pengelolaan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	15 buku	15 buku	100	68,595,300	68,595,300	100.00		
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						6,560,428,408	6,316,466,916	96.28		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan					1,128,180,450	1,114,413,650	98.78		
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 kali	1 kali	100	178,711,600	177,150,800	99.13	Bidang Ketahanan Pangan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
			Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	9 kecamatan	9 kecamatan	100	171,263,300	171,112,500	99.91	Bidang Ketahanan Pangan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	3 kali	3 kali	100	143,716,350	139,619,050	97.15	Bidang Ketahanan Pangan Seksi Konsumsi dan Mutu Pangan	

			Pengembangan Kelembagaan Kटना Tingkat Kabupaten/Kecamatan	85 %	85 %	100	252,403,700	245,420,600	97.23	Bidang KP2MP Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan	
			Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Agribisnis	100 orang	100 orang	100	205,679,900	204,915,100	99.63	Bidang KP2MP Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan	
			Pendampingan Program Pengembangan Agribisnis Pedesaan (PUAP)	142 Gapoktan	142 Gapoktan	100	176,405,600	176,195,600	99.88	Bidang KP2MP Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan	
		Program Pemberdayaan Penyuluh					382,890,450	381,118,950	99.54		
			Penyusunan Program dan Programa Penyuluh	3 dokumen	3 dokumen	100	382,890,450	381,118,950	99.54	Bidang KP2MP Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan	
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					499,110,100	469,411,100	94.05		
			Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	1 paket	1 paket	100	133,137,500	120,331,250	90.38	Bidang Tanaman Hortikultura Seksi Penanganan OPT, Pengolahan dan Pemasaran Hasil	
			Pengembangan Pembenihan dan Pembibitan Pertanian/Perkebunan	4 komoditi	4 komoditi	100	365,972,600	349,079,850	95.38	Bidang Tanaman Hortikultura Seksi Penanganan OPT, Pengolahan dan Pemasaran Hasil	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					3,251,933,600	3,150,618,005	96.88		
			Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	17 Ha	17 Ha	100	329,807,150	272,119,300	82.51	Bidang Perkebunan Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan	
			Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	353 pohon	353 pohon	100	52,721,400	52,243,400	99.09	Bidang Perkebunan Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan	
			Pembuatan Jalan Pertanian	9 Km	9 Km	100	386,648,600	386,498,600	99.96	Bidang KP2MP Seksi Pengolahan Lahan, Air dan Pestisida	
			Pengelolaan Lahan dan Air	14 unit	14 unit	100	1,371,361,000	1,369,291,901	99.85	Bidang KP2MP Seksi Pengolahan Lahan, Air dan Pestisida	
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produksi	1 jenis	1 jenis	100	291,232,100	284,070,555	97.54	Bidan TPH Seksi Pengembanan Produksi Tanaman Hortikultura	
			Pengembangan Diversifikasi Tanaman	11,000 anakan	11,000 anakan	100	214,638,950	184,554,143	85.98	Bidang Perkebunan Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	2 jenis	2 jenis	100	605,524,400	601,840,106	99.39	Bidang KP2MP Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					601,072,800	579,814,437	96.46		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	140,956,400	140,656,000	99.79	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	49,872,800	34,885,953	69.95	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	53 unit	53 unit	100	12,780,800	9,207,894	72.04	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	39,844,200	39,840,400	99.99	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis ATK	38 jenis ATK	100	53,642,600	53,613,600	99.95	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000 lembar, 300 buku	45,000 lembar, 300 buku	100	19,730,000	19,730,000	100.00	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	1 jenis	100	3,648,000	2,590,000	71.00	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	62 kali	62 kali	100	280,598,000	279,290,590	99.53	Sekretarian Sub Bagian Perencanaaan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					50,007,400	50,007,400	100.00		
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	47,371,400	47,371,400	100.00	Sekretarian Sub Bagian Keuangan	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	2,636,000	2,636,000	100.00	Sekretarian Sub Bagian Perencanaaan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					30,868,000	30,841,400	99.91		
			Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	26,538,700	26,512,100	99.90	Sekretarian Sub Bagian Perencanaaan	

			Penyusunan Profil Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	100	4,329,300	4,329,300	100.00	Sekretarian Sub Bagian Perencanaaan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					78,949,200	78,949,200	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	78,949,200	78,949,200	100.00	Sekretarian Sub Bagian Perencanaaan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					4,937,350	4,937,350	100.00		
			Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)	2 dokumen	2 dokumen	100	4,937,350	4,937,350	100.00	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					234,680,087	214,770,706	91.52		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	25 unit	25 unit	100	109,794,387	101,580,500	92.52	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	2 unit	100	124,885,700	113,190,206	90.64	Sekretariat, Seksi Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					297,798,971	241,584,718	81.12		
			Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis	3 orang	2 orang	67	297,798,971	241,584,718	81.12	Bidang KP2MP Seksi Pengmbangan Kelembagaan dan Penyuluhan	
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						7,655,433,451	5,669,770,575	74.06		
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					96,133,200	90,373,060	94.01		
			Perencanaan, Koodinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	2 kali	2 kali	100	29,749,700	29,511,860	99.20	Bidang UKM Seksi Bina Usaha, Kemitraan & Permodalan UKM	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	320 orang	320 orang	100	66,383,500	60,861,200	91.68	Bidang UKM Seksi Bina Kelembagaan UKM	
		Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					158,033,600	364,760,299	230.81		
			Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	2 kali	2 kali	100	158,033,600	155,308,199	98.28	Bidang Perdagangan Seksi Promosi	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					211,211,500	209,452,100	99.17		
			Pembangunan Sistim Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	20 KUKM	20 KUKM	100	158,516,000	157,550,600	99.39	Bidang Koperasi Seksi Bina Usaha Kemitraan & Permodalan Koperasi	
			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	2 koperasi	2 koperasi	100	52,695,500	51,901,500	98.49	Bidang Koperasi Seksi Kelembagaan Koperasi	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					3,965,463,331	2,002,086,086	50.49		
			Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	56.25 ton	56.25 ton	100	1,775,011,700	1,032,781,162	58.18	Bidang Industri Seksi Sistim Informasi dan Izin Industri	
			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri	8 IKM, 16 kali	8 IKM, 16 kali	100	282,989,400	243,295,400	85.97	Bidang Industri Seksi Industri Agro, Makanan Laut & Perikanan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 unit	1 unit	100	1,907,462,231	726,009,524	38.06	Bidang Industri Seksi Industri Aneka	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					369,939,000	266,718,180	72.10		

			Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	28 kali, 9 kecamatan	28 kali, 9 kecamatan	100	21,709,000	21,709,000	100.00	Bidang Perdagangan Seksi Bina Pasar & Perlindungan Konsumen	
			Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	7 lokasi	7 lokasi	100	348,230,000	245,009,180	70.36	Bidang Perdagangan Seksi Bina Pasar & Perlindungan Konsumen	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					1,921,056,700	1,839,437,377	95.75		
			Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	60 perusahaan	60 perusahaan	100	20,997,600	20,997,600	100.00	Bidang Perdagangan Seksi Peijinan & Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	3 paket	3 paket	100	1,502,770,500	1,449,564,077	96.46	Bidang Perdagangan Seksi Peijinan & Sarana Distribusi Perdagangan	
			Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan	12 kali	12 kali	100	82,053,900	81,180,000	98.93	Bidang Perdagangan Seksi Peijinan & Sarana Distribusi Perdagangan	
			Optimalisasi Pengelolaan Pasar	2 buah pasar	2 buah pasar	100	315,234,700	287,695,700	91.26	Bidang Perdagangan Seksi Peijinan & Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					561,524,820	552,603,273	98.41		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket 12 bulan	1 paket 12 bulan	100	18,000,000	17,926,000	99.59	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	2 jenis	100	17,160,000	14,593,000	85.04	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	4 unit	40	7,555,000	5,371,738	71.10	Sub Bagian Sekretariat (Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran)	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 jenis	12 jenis	100	19,824,900	19,672,000	99.23	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Sewa Gedung	2 unit	2 unit	100	25,000,000	25,000,000	100.00	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 jenis ATK	32 jenis ATK	100	95,025,600	95,025,600	100.00	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	100	124,993,420	124,993,420	100.00	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	8 jenis	100	2,097,900	1,453,000	69.26	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	100	3,180,000	1,590,000	50.00	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	500 dos	500 dos	100	46,920,000	46,920,000	100.00	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	28 kali	28 kali	100	201,768,000	200,058,515	99.15	Subbagian Sekretariat (TU, Organisasi & Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					92,326,600	88,568,500	95.93		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	5,511,300	5,197,500	94.31	Sub Bagian Sekretariat (Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	10 unit	100	80,815,300	77,396,000	95.77	Sub Bagian Sekretariat (Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran)	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	11 unit	11 unit	100	6,000,000	5,975,000	99.58	Sub Bagian Sekretariat (Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran)	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					215,325,200	191,551,200	88.96		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD	2 laporan	2 laporan	100	66,096,000	46,516,000	70.38	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3 laporan	3 laporan	100	149,229,200	145,035,200	97.19	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Penganggaran Internal SKPD					42,965,500	42,841,500	99.71		
			Penyusunan Renstra, Renja	2 dokumen	2 dokumen	100	42,965,500	42,841,500	99.71	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Penganggaran Internal SKPD					13,193,000	13,118,000	99.43		

			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	13,193,000	13,118,000	99.43	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang/Aset Daerah					8,261,000	8,261,000	100.00		
			Penyusunan Laporan Barang Penggunaan Semester dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan	2 dokumen	2 dokumen	100	8,261,000	8,261,000	100.00	Sub Bagian Sekretariat (Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran)	
20	DINAS PETERNAKAN						2,748,312,250	2,716,005,371	98.82		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					451,066,250	441,381,621	97.85		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 jenis, 9 KSO	3 jenis, 9 KSO	100	169,927,000	167,147,000	98.36	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis Jasa	3 jenis Jasa	100	28,320,000	25,390,760	89.66	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit motor, 1 unit mobil	22 unit motor, 1 unit mobil	100	9,050,000	5,789,500	63.97	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 KSO, 15 jenis	1 KSO, 15 jenis	100	21,116,400	20,878,400	98.87	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis	46 jenis	100	33,145,400	33,139,700	99.98	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100	10,947,250	10,936,250	99.90	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	3 jenis	100	2,393,000	2,392,000	99.96	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	1 jenis	100	1,800,000	1,560,000	86.67	Dinas Peternakan	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	2 jenis, 5 kali rapat	2 jenis, 5 kali rapat	100	8,347,200	8,330,400	99.80	Dinas Peternakan	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	9 kecamatan dalam daerah dan 4 kali LD	9 kecamatan dalam daerah dan 4 kali LD	100	166,020,000	165,817,611	99.88	Dinas Peternakan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					82,276,840	81,206,000	98.70		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	3 unit	100	4,514,400	4,200,000	93.04		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 jenis dan 3 paket	4 jenis dan 3 paket	100	11,960,000	11,680,000	97.66		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit roda 2 & 1 unit mobil, 1 KSO	22 unit roda 2 & 1 unit mobil, 1 KSO	100	62,802,440	62,336,000	99.26		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	100	3,000,000	2,990,000	99.67		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					133,834,800	126,065,250	94.19		
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	133,834,800	126,065,250	94.19		
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					4,398,760	4,362,800	99.18		
			Perayaan Hari besar Nasional dan Daerah Lainnya	2 kegiatan	2 kegiatan	100	4,398,760	4,362,800	99.18		
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					11,723,800	11,684,900	99.67		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	11,723,800	11,684,900	99.67		
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					5,472,300	5,445,700	99.51		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen, 10 buku	1 dokumen, 10 buku	100	1,824,100	1,805,000	98.95		

			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen, 10 buku	1 dokumen, 10 buku	100	1,824,100	1,817,600	99.64		
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen, 10 buku	1 dokumen, 10 buku	100	1,824,100	1,823,100	99.95		
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					9,037,100	9,033,300	99.96		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100	9,037,100	9,033,300	99.96		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					30,154,800	30,138,000	99.94		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	30,154,800	30,138,000	99.94		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					499,930,600	493,864,450	98.79		
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	2 unit , 4 penyakit, 2 paket	2 unit , 4 penyakit, 2 paket	100	429,925,200	424,462,450	98.73		
			Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 paket	3 paket	100	70,005,400	69,402,000	99.14		
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					1,467,238,000	1,460,159,950	99.52		
			Pembibitan dan Perawatan Ternak	1 lokasi	1 lokasi	100	73,469,700	72,521,500	98.71		
			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	18 ekor kambing PE & 40 ekor babi	18 ekor kambing PE & 40 ekor babi	100	260,495,200	258,368,900	99.18		
			Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	9 kecamatan, 14 orang & 8 jenis	9 kecamatan, 14 orang & 8 jenis	100	18,732,800	18,718,250	99.92		
			Pengembangan Agribisnis Peternakan	3 kawasan	3 kawasan	100	881,010,500	878,767,100	99.75		
			Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha Tani Peternakan	2 kali, 9 kecamatan, 10 orang	2 kali, 9 kecamatan, 10 orang	100	66,200,700	66,137,900	99.91		
			Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan	2 kali, 18 orang, 3 kecamatan	2 kali, 18 orang, 3 kecamatan	100	25,861,800	25,813,100	99.81		
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Peternakan	3 kali, 9 kecamatan, 10 orang	3 kali, 9 kecamatan, 10 orang	100	141,467,300	139,833,200	98.84		
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					26,956,700	26,948,000	99.97		
			Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100	26,956,700	26,948,000	99.97		
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan					26,222,300	25,715,400	98.07		
			Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	20 orang, 2 kecamatan	20 orang, 2 kecamatan	100	26,222,300	25,715,400	98.07		
21	DINAS KESEHATAN						42,474,954,394	34,155,674,606	80.41		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,218,993,153	1,077,991,650	88.43		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 TKD, 2 KSO, 2 jenis belanja	1 TKD, 2 KSO, 2 jenis belanja	100	64,424,000	55,043,000	85.44	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	100	62,100,000	47,281,600	76.14	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 org sopir KSO, terlaksanya pengurusan KIR STNK dan pajak roda 4 2 buah & roda 2 25 buah	4 org sopir KSO, terlaksanya pengurusan KIR STNK dan pajak roda 4 2 buah & roda 2 25 buah	100	127,640,000	115,540,900	90.52	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 KSO, 10 PNS	1 KSO, 10 PNS	100	184,433,000	177,885,800	96.45	Dinas Kesehatan	

			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7 KSO, 1 TKD, 1 paket kebersihan & puskesmas 1 paket	7 KSO, 1 TKD, 1 paket kebersihan & puskesmas 1 paket	100	140,916,300	140,566,300	99.75	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 paket ATK	1 paket ATK	100	30,769,600	30,769,600	100.00	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 blok kartu kendali, kartu inventaris 25 lembar, kartu kendali 25 lembar, 1 paket kartu pasien, pengagandaan 114.878 lembar	12 blok kartu kendali, kartu inventaris 25 lembar, kartu kendali 25 lembar, 1 paket kartu pasien, pengagandaan 114.878 lembar	100	22,868,900	22,868,850	100.00	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 buah fitting tempel, 10 buah kabel rol, 20 buah saklar, 20 buah stop kontak, 80 buah lampu	20 buah fitting tempel, 10 buah kabel rol, 20 buah saklar, 20 buah stop kontak, 80 buah lampu	100	3,958,650	3,958,650	100.00	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 exemplar media massa	48 exemplar media massa	100	4,990,000	2,796,500	56.04	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1,152 OMKN dan 772 Orang minum	1,152 OMKN dan 772 Orang minum	100	48,847,200	21,448,150	43.91	Dinas Kesehatan	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	16 kali kegiatan dalam 1 tahun	16 kali kegiatan dalam 1 tahun	100	375,525,903	328,688,400	87.53	Dinas Kesehatan	
			Penetapan angka kredit	100 dok. PAK	100 dok. PAK	100	152,519,600	131,143,900	85.98		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,897,876,127	1,641,735,860	86.50		
			Pembangunan Rumah Dinas	1 unit	1 unit	100	109,842,150	109,842,150	100.00	Dinas Kesehatan	
			Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	94,900,000	94,150,000	99.21	Dinas Kesehatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 mobil, 15 motor	1 mobil, 15 motor	100	703,871,400	482,249,008	68.51	Dinas Kesehatan	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	121 unit	121 unit	100	713,141,577	711,596,452	99.78	Dinas Kesehatan	
			Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air Kantor	3 unit	3 unit	100	26,500,000	26,500,000	100.00	Dinas Kesehatan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 unit	3 unit	100	178,475,000	174,535,000	97.79	Dinas Kesehatan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit, 4.600 liter BBM, 24 kaleng oli	9 unit, 4.600 liter BBM, 24 kaleng oli	100	61,150,800	40,013,250	65.43	Dinas Kesehatan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	68 buah perlengkapan	68 buah perlengkapan	100	9,995,200	2,850,000	28.51	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					407,080,850	336,489,450	82.66		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal/teknis	1 paket	1 paket	100	210,232,200	152,897,150	72.73	Dinas Kesehatan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	2 orang	100	7,650,000	-	0.00	Dinas Kesehatan	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	2 orang	2 orang	100	189,198,650	183,592,300	97.04	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					94,104,400	71,600,900	76.09		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	3,805,400	3,787,900	99.54	Dinas Kesehatan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	90,299,000	67,813,000	75.10	Dinas Kesehatan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					175,600,500	94,561,300	53.85		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	175,600,500	94,561,300	53.85	Dinas Kesehatan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					149,379,500	123,324,000	82.56		

			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	149,379,500	123,324,000	82.56	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					87,551,100	86,951,100	99.31		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	87,551,100	86,951,100	99.31	Dinas Kesehatan	
		Program Obat dan Pembekalan Kesehatan					2,221,446,808	2,001,390,391	90.09		
			Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan	1 paket	1 paket	100	2,015,005,108	1,852,868,891	91.95	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Pembekalan Kesehatan	20,000 etiket obat, 10 paket packing obat, 4 paket pengiriman, 2000 lembar cetak kartu, 4 kegiatan sewa ruangan, 28 kali sewa kndaraan, Mami 227 orang	20,000 etiket obat, 10 paket packing obat, 4 paket pengiriman, 2000 lembar cetak kartu, 4 kegiatan sewa ruangan, 28 kali sewa kndaraan, Mami 227 orang	100	206,441,700	148,521,500	71.94	Dinas Kesehatan	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat					25,841,588,685	22,369,052,705	86.56		
			Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya	1 paket	1 paket	100	25,695,274,985	22,325,546,805	86.89	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan	9 kecamatan	9 kecamatan	100	146,313,700	43,505,900	29.73	Dinas Kesehatan	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan					122,460,500	72,234,500	58.99		
			Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang obat dan makanan	9 kelompok	9 kelompok	100	27,010,000	9,853,000	36.48	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	9 kecamatan & 1 IFK	9 kecamatan & 1 IFK	100	95,450,500	62,381,500	65.35	Dinas Kesehatan	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					628,212,765	468,232,900	74.53		
			Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	9 puskesmas, 33 pustu, 85 polindes	9 puskesmas, 33 pustu, 85 polindes	100	165,318,200	160,143,200	96.87	Dinas Kesehatan	
			Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	9 puskesmas, 33 pustu, 82 polindes	9 puskesmas, 33 pustu, 82 polindes	100	462,894,565	308,089,700	66.56	Dinas Kesehatan	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat					998,365,400	728,874,200	73.01		
			Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	9 puskesmas	9 puskesmas	100	11,459,900	10,659,900	93.02	Dinas Kesehatan	
			Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	34 ibu hamil KEK, 20 balita gizi buruk	34 ibu hamil KEK, 20 balita gizi buruk	100	503,436,300	337,306,300	67.00	Dinas Kesehatan	
			Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	9 puskesmas	9 puskesmas	100	483,469,200	380,908,000	78.79	Dinas Kesehatan	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat					624,507,900	420,652,200	67.36		
			Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	35 Depo Air	35	100	121,939,600	114,496,600	93.90	Dinas Kesehatan	
			Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	10 Desa	10	100	261,972,000	144,102,000	55.01	Dinas Kesehatan	
			Pembinaan dan Pengembangan UKS	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100	223,971,300	146,128,600	65.24	Dinas Kesehatan	
			Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100	16,625,000	15,925,000	95.79	Dinas Kesehatan	

		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					1,444,836,956	610,687,500	42.27		
			Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamyk	151 desa	151 desa	100	454,050,600	19,748,700	4.35	Dinas Kesehatan	
			Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah	315 posyandu, 170 SD	315 posyandu, 170 SD	100	313,384,950	184,365,450	58.83	Dinas Kesehatan	
			Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100	574,442,206	371,356,350	64.65	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan Surveyance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	9 puskesmas	9 puskesmas	100	102,959,200	35,217,000	34.20	Dinas Kesehatan	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					1,437,027,700	1,000,065,300	69.59		
			Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	9 puskesmas	9 puskesmas	100	1,304,273,400	940,572,900	72.11	Dinas Kesehatan	
			Penyusunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	32 buku, 9 puskesmas	32 buku, 9 puskesmas	100	132,754,300	59,492,400	44.81	Dinas Kesehatan	
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pembantu dan Jaringannya					2,012,598,550	1,838,716,750	91.36		
			Realisasi Sedang/Berat Puskesmas	1 unit	1 unit	100	1,981,461,800	1,807,580,000	91.22	Dinas Kesehatan	
			Penambahan Ruang Puskesmas/Puskesmas Pembantu	1 paket	1 paket	100	31,136,750	31,136,750	100.00	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					250,071,200	72,092,200	28.83		
			Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	51 orang	51 orang	100	250,071,200	72,092,200	28.83	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					148,405,700	57,443,000	38.71		
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	9 Puskesmas, 22.250 lansia	9 Puskesmas, 22.250 lansia	100	148,405,700	57,443,000	38.71	Dinas Kesehatan	
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan					39,834,000	35,545,000	89.23		
			Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100	39,834,000	35,545,000	89.23	Dinas Kesehatan	
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					2,592,662,600	1,017,933,700	39.26		
			Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	9 Puskesmas	9 Puskesmas	100	146,132,500	91,605,100	62.69	Dinas Kesehatan	
			Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	36 orang	36 orang	100	200,300,000	59,089,300	29.50	Dinas Kesehatan	
			Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	7600 ibu hamil dan pengantar	7600 ibu hamil dan pengantar	100	2,246,230,100	867,239,300	38.61	Dinas Kesehatan	
		Program Keluarga Berencana					50,400,000	23,000,000	45.63		
			Pembinaan Keluarga Berencana	200 keluarga	200 keluarga	100	50,400,000	23,000,000	45.63		
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja					31,950,000	7,100,000	22.22		
			Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	500 Remaja	500 Remaja	100	31,950,000	7,100,000	22.22		
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						21,115,619,416	19,923,574,208	94.35		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,851,234,421	1,750,607,059	94.56		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21 orang, 300 lembar, 1 paket	21 orang, 300 lembar, 1 paket	100	421,568,000	387,221,690	91.85		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8 orang, 2 jenis	8 orang, 2 jenis	100	435,264,000	412,805,008	94.84	Subbagian Umum dan Kepegawaian	

			Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	10 unit	100	6,350,000	3,800,000	59.84	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	3 unit, 4 orang	3 unit, 4 orang	100	63,814,000	46,796,800	73.33	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	10 unit	100	98,572,000	82,524,490	83.72	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 jenis, 29 orang	4 jenis, 29 orang	100	524,699,000	524,699,000	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Sewa Gedung	1 unit	1 unit	100	24,666,621	24,666,621	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	22 jenis	22 jenis	100	22,596,800	22,596,800	100.00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50 lembar, 200 buku	50 lembar, 200 buku	100	19,060,000	19,052,650	99.96	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	23 orang, 8 kegiatan	23 orang, 8 kegiatan	100	234,644,000	226,444,000	96.51	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					397,965,348	377,536,900	94.87		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	3 unit	100	68,297,900	67,400,000	98.69	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	73 unit	73 unit	100	177,597,600	176,075,000	99.14	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit		0	9,355,948	-	0.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 unit	1 unit	100	10,940,000	9,856,500	90.10	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	2 unit	100	36,130,000	34,382,500	95.16	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	45,477,500	39,782,500	87.48	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Jaringan Instalasi	1 unit	1 unit	100	50,166,400	50,040,400	99.75	Subbagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					188,608,700	155,503,422	82.45		
			Pendidikan dan pelatihan formal/teknis	15 orang	15 orang	100	188,608,700	155,503,422	82.45		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					147,970,800	147,684,600	99.81		
			Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	2,957,100	2,957,100	100.00	Sub Bagian Keuangan	
			Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	14,225,700	14,211,500	99.90	Sub Bagian Keuangan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	130,788,000	130,516,000	99.79	Sub Bagian Keuangan	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					11,710,500	10,946,000	93.47		
			Perayaan hari besar nasional dan HUT otonomi daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100	11,710,500	10,946,000	93.47	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Perencanaan Pengembangan Sektoral SKPD					14,775,000	14,775,000	100.00		
			Penyusunan Renstra, Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	14,775,000	14,775,000	100.00	Sub Bagian Perencaaan dan Program	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					5,723,100	5,723,100	100.00		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen	100	3,087,100	3,087,100	100.00	Seksi Pelayanan	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	1,318,000	1,318,000	100.00	Seksi Pelayanan	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen	1 dokumen	100	1,318,000	1,318,000	100.00	Seksi Pelayanan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					54,140,600	53,044,500	97.98		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	54,140,600	53,044,500	97.98	Sub Bagian Perencaan	

		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang/Aset Daerah					2,753,000	2,753,000	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	2,753,000	2,753,000	100.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Obat dan Pembekalan Kesehatan					5,382,704,209	5,325,490,705	98.94		
			Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan	3 paket, 3.470.500 Psi	3 paket, 3.470.500 Psi	100	5,370,800,209	5,316,249,955	98.98	Seksi Penunjang	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	1 paket, 4.000 lembar, 2 kali	1 paket, 4.000 lembar, 2 kali	100	11,904,000	9,240,750	77.63	Seksi Penunjang	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat					6,337,164,640	5,735,939,084	90.51		
			Peningkatan Pelayanan dan Penanggulungan masalah	100 orang	100 orang	100	6,069,984,640	5,540,032,664	91.27	Seksi Pelayanan	
			Fasilitasi/Pendampingan Rujukan Pasien ke Luar Daerah	20 pasien	20 pasien	100	267,180,000	195,906,420	73.32	Seksi Pelayanan	
		Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					6,496,504,798	6,137,814,853	94.48		
			Pembangunan Kamar Jenazah (DAK 2015	1 unit	1 unit	100	43,686,320	43,686,320	100.00	Seksi Penunjang	
			Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	1 unit	1 unit	100	2,022,944,300	1,996,658,000	98.70	Seksi Penunjang	
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	406 unit	406 unit	100	1,444,533,520	1,380,432,270	95.56	Seksi Penunjang	
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain	156 unit	156 unit	100	340,503,658	222,934,791	65.47	Seksi Penunjang	
			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	3 paket	3 paket	100	1,388,606,525	1,386,502,851	99.85	Seksi Penunjang	
			Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	2 paket	2 paket	100	160,015,125	159,885,800	99.92	Seksi Penunjang	
			Pengembangan Tipe Rumah Sakit	2 paket	2 paket	100	307,491,400	189,886,621	61.75	Seksi Penunjang	
			Pembangunan Gedung Pelengkap RSUD (rekam medik, PSRS, pusat sterilisasi dan laundry, selasar	1 paket	1 paket	100	788,723,950	757,828,200	96.08	Seksi Penunjang	
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					224,364,300	205,755,985	91.71		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,495,000	99.80	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Obat/Apotik	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,496,000	99.84	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (WIP, VIP, Kelas I, II dan III)	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,500,000	100.00	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Gawat Darurat	1 unit	1 unit	100	12,500,000	12,495,000	99.96	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,500,000	100.00	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,486,000	99.44	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Bersalin	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,500,000	100.00	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,500,000	100.00	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Laboratorium Rumah Sakit	1 unit	1 unit	100	19,182,500	19,167,500	99.92	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	23 unit	23 unit	100	124,907,000	115,551,185	92.51	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah	1 unit	1 unit	100	45,274,800	36,100,300	79.74	Sub Bagian Perencanaan dan Program	

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit (rekam medik, IPRS	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,465,000	98.60	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gas Medik	1 unit	1 unit	100	2,500,000	2,500,000	100.00	Sub Bagian Perencanaan dan Program	
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2,653,928,180	2,621,949,150	98.80		
		Program Penataan Administrasi Kependudukan					1,575,927,250	1,549,179,850	98.30		
			Pengelolaan dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan	1 paket	1 paket	100	28,885,800	26,551,650	91.92	Seksi Pengelolaan Data dan Penyajian Kependudukan	
			Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	3 orang KSO, pelayanan 30 titik di 9 kecamatan dan Rakor Catatan Sipil 5 kali	3 orang KSO, pelayanan 30 titik di 9 kecamatan dan Rakor Catatan Sipil 5 kali	100	210,008,500	209,463,200	99.74	Seksi Kelahiran dan Kematian dan Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaran	
			Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	6 orang KSO 1 tahun, pelayanan langsung 50 titik di 9 kecamatan, Rakor pendaftaran Penduduk 13 kali	6 orang KSO 1 tahun, pelayanan langsung 50 titik di 9 kecamatan, Rakor pendaftaran Penduduk 13 kali	100	500,646,400	499,329,350	99.74	Seksi Identitas Penduduk dan Seksi Pindah Datang Pendataan Penduduk	
			Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil	151 desa & kelurahan	151 desa & kelurahan	100	468,354,550	450,902,850	96.27	Seksi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	
			Dukungan Teknis Administrasi Lainnya yang berkualitas	20 buah ribbon, 20 film printer, 10 pembersih printer, 25.000 blangko kartu keluarga, 8.000 blangko akte kelahiran, 8.000 akte perkawinan & 461 lbr permohonan pindah keluar	20 buah ribbon, 20 film printer, 10 pembersih printer, 25.000 blangko kartu keluarga, 8.000 blangko akte kelahiran, 8.000 akte perkawinan & 461 lbr permohonan pindah keluar	100	339,396,900	337,713,500	99.50	Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat	
			Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	75 buku profil kependudukan	75 buku profil kependudukan	100	28,635,100	25,219,300	88.07	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					462,697,800	462,377,700	99.93		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 orang KSO, 2 jenis benda pos, 1 paket pengiriman	1 orang KSO, 2 jenis benda pos, 1 paket pengiriman	100	23,708,000	23,708,000	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan (rek. telepon Listrik, air, internet, 4 iklan	12 bulan (rek. telepon Listrik, air, internet, 4 iklan	100	75,200,000	75,200,000	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit pajak kendaraan roda 4 dan 14 unit kendaraan roda 2	1 unit pajak kendaraan roda 4 dan 14 unit kendaraan roda 2	100	7,600,000	7,600,000	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 orang KSO, 17 alat dan bahan pembersih	2 orang KSO, 17 alat dan bahan pembersih	100	43,372,100	43,372,100	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	43 jenis ATK	43 jenis ATK	100	67,113,500	67,113,500	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 cetakan blok, 90.000 lbr penggandaan, 70 jilidan	10 cetakan blok, 90.000 lbr penggandaan, 70 jilidan	100	32,768,000	32,768,000	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket penerangan gedung kantor	1 paket penerangan gedung kantor	100	3,633,800	3,633,800	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis mas media 1 tahun	3 jenis mas media 1 tahun	100	2,340,000	2,340,000	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	

			Penyediaan Makanan dan Minuman	700 dos makanan, 52 dos air, 48 dos snack	700 dos makanan, 52 dos air, 48 dos snack	100	22,892,400	22,892,400	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	54 kali perjalanan DD dan 12 kali perjalanan LD	54 kali perjalanan DD dan 12 kali perjalanan LD	100	184,070,000	183,749,900	99.83	Semua Bidang dan Sekretariat	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					249,460,680	248,012,600	99.42		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket (kipas angin, camera e-ktip, laptop, meja kerja, bangku tunggu, kursi plastik	1 paket (kipas angin, camera e-ktip, laptop, meja kerja, bangku tunggu, kursi plastik	100	72,293,580	71,413,000	98.78	Bagian Umum dan Kepegawian, Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 orang KSO, paket dekorasi, belanja pemeliharaan gedung, pembenahan instalasi listrik	1 orang KSO, paket dekorasi, belanja pemeliharaan gedung, pembenahan instalasi listrik	100	61,694,300	61,694,300	100.00	Bagian Umum dan Kepegawian, Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kemdaraan Dinas/Operasional	2 orang KSO,40 kali jasa service, 62 suku cadang, 3.364 liter BBM & 1 kali perjalanan ke luar daerah	2 orang KSO,40 kali jasa service, 62 suku cadang, 3.364 liter BBM & 1 kali perjalanan ke luar daerah	100	115,472,800	114,905,300	99.51	Bagian Umum dan Kepegawian, Sekretariat	
		Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					120,454,850	116,991,400	97.12		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang bimtek	2 orang bimtek	100	42,862,000	42,580,800	99.34	Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan Program,/Sekretariat	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	6 kali perjalanan dinas, seleksi dan biaya kepesertaan	6 kali perjalanan dinas, seleksi dan biaya kepesertaan	100	77,592,850	74,410,600	95.90	Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan Program,/Sekretariat	
		Pogram Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					169,289,800	169,289,800	100.00		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen LAKIP dan LPPD	2 dokumen LAKIP dan LPPD	100	3,925,900	3,925,900	100.00	Penatausahaan Keuangan (Sekretariat)	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 orang KSO, 2 laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	1 orang KSO, 2 laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	100	32,642,700	32,642,700	100.00	Penatausahaan Keuangan (Sekretariat)	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	1 paket pengelolaan keuangan skpd	1 paket pengelolaan keuangan skpd	100	132,721,200	132,721,200	100.00	Penatausahaan Keuangan (Sekretariat)	
		Pogram Perencanaan Pembangunan Sektoral					31,790,200	31,790,200	100.00		
			Penyusunan Renstras, Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	31,790,200	31,790,200	100.00	Perencanaan Program (Sekretariat)	
		Pogram Penataan Peraturan Perundang-undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					14,040,300	14,040,300	100.00		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen	100	4,646,400	4,646,400	100.00	Perencanaan Program (Sekretariat)	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	4,549,900	4,549,900	100.00	Perencanaan Program (Sekretariat)	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen	1 dokumen	100	4,844,000	4,844,000	100.00	Perencanaan Program (Sekretariat)	
		Pogram Perencanaan Penganggaran SKPD					15,147,100	15,147,100	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	15,147,100	15,147,100	100.00	Penatausahaan Keuangan (Sekretariat)	

		Pogram Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					15,120,200	15,120,200	100.00		
			Penyusunan Laporan Barang/Aset Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	15,120,200	15,120,200	100.00	Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan Program,/Sekretariat	
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						4,420,906,950	3,945,582,116	89.25		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					653,889,526	115,812,000	17.71		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 meterai, 3 orang KSO	150 meterai, 3 orang KSO	100	119,148,000	115,812,000	97.20	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis belanja	4 jenis belanja	100	23,124,000	22,856,785	98.84	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit mobil & 51 unit motor	2 unit mobil & 51 unit motor	100	16,587,676	16,587,620	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 orang KSO, 11 jenis belanja bahan pakai habis	2 orang KSO, 11 jenis belanja bahan pakai habis	100	40,744,000	39,832,000	97.76	Sekretariat	
			Belanja Jasa Sewa Gedung	1 unit gedung	1 unit gedung	100	30,000,000	30,000,000	100.00	Sekretariat	
			Belanja Alat Tulis Kantor	28 jenis belanja ATK	28 jenis belanja ATK	100	41,096,500	41,096,500	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73,205 lembar & 30 buku	73,205 lembar & 30 buku	100	26,577,750	26,577,750	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis surat kabar/majalah	2 jenis surat kabar/majalah	100	1,920,000	1,740,000	90.63	Sekretariat	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	720 orang makan	720 orang makan	100	28,786,200	28,767,000	99.93	Sekretariat	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 paket perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 paket perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	100	308,837,000	308,777,697	99.98	Sekretariat	
			Penetapan angka kredit	2 jenis belanja	2 jenis belanja	100	17,068,400	17,027,400	99.76	Sekretariat	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					188,405,200	186,132,418	98.79		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5,300 liter BBM, transportasi & akomodasi 2 unit kendaraan, jasa non pegawai, cek up kendaraan dan suku cadang	5,300 liter BBM, transportasi & akomodasi 2 unit kendaraan, jasa non pegawai, cek up kendaraan dan suku cadang	100	180,802,900	178,530,118	98.74		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6 unit komputer dan 1 paket sistim instalasi	6 unit komputer dan 1 paket sistim instalasi	100	7,602,300	7,602,300	100.00	Sekretariat	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					94,893,597	207,390,797	218.55		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 orang	6 orang	100	94,893,597	94,893,597	100.00	Sekretariat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja					112,497,200	112,497,200	100.00		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	1,093,600	1,093,600	100.00	Sekretariat	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	3,321,700	3,321,700	100.00	Sekretariat	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	12 orang, 5 jenis ATK & penggandaan 5.016 lembar	12 orang, 5 jenis ATK & penggandaan 5.016 lembar	100	108,081,900	108,081,900	100.00	Sekretariat	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					6,761,700	6,761,700	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	6,761,700	6,761,700	100.00	Sekretariat	

		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					8,379,600	8,379,600	100.00		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen, 1 buku	1 dokumen, 1 buku	100	4,200,000	4,200,000	100.00	Sekretariat	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen, 1 buku	1 dokumen, 1 buku	100	4,179,600	4,179,600	100.00	Sekretariat	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					6,311,600	6,311,600	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	6,311,600	6,311,600	100.00	Sekretariat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					34,638,000	34,638,000	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	34,638,000	34,638,000	100.00	Sekretariat	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					229,098,100	226,303,100	98.78		
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	12 bulan, KSO 12 bulan, 22 jenis ATK, 1.500 lembar cetak dan penggandaan, jilid 12 buku, makan minum 20 orang, perjalanan dinas 9 kecamatan	12 bulan, KSO 12 bulan, 22 jenis ATK, 1.500 lembar cetak dan penggandaan, jilid 12 buku, makan minum 20 orang, perjalanan dinas 9 kecamatan	100	229,098,100	226,303,100	98.78	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					118,098,350	117,759,350	99.71		
			Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	5 orang Honorer, ATK 7 jenis, jasa kantor 4 jenis, cetak dan penggandaan 1.245 lembar, sewa ruang rapat pertemuan 2 ruang, makan minum 110 orang, perjalanan dinas luar daerah 1 kali	5 orang Honorer, ATK 7 jenis, jasa kantor 4 jenis, cetak dan penggandaan 1.245 lembar, sewa ruang rapat pertemuan 2 ruang, makan minum 110 orang, perjalanan dinas luar daerah 1 kali	100	26,743,050	26,521,050	99.17	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Sosialisasi Sistim Pencatatan dan Pelaporan KDRT	7 orang honor,ATK 7 jenis, jasa kantor 4 jenis, cetak dan penggandaan 1.500 lembar, sewa ruang rapat pertemuan 1 ruang, makan minum 120 orang & PD luar daerah 3 kali	7 orang honor,ATK 7 jenis, jasa kantor 4 jenis, cetak dan penggandaan 1.500 lembar, sewa ruang rapat pertemuan 1 ruang, makan minum 120 orang & PD luar daerah 3 kali	100	31,756,300	31,719,300	99.88	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Sosialisasi Undang-undang Perlindungan dan Undang-undang KDRT	5 orang honor, ATK 6 jenis, jasa kantor 3 jenis, makan dan minum 120 orang & PD dalam daerah 9 kali	5 orang honor, ATK 6 jenis, jasa kantor 3 jenis, makan dan minum 120 orang & PD dalam daerah 9 kali	100	36,183,000	36,183,000	100.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

			Penegakan dan Bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	40 OH transportasi dan akomodasi, jasa pendampingan kasus 40 OK, jasa pelayanan kesehatan 40 OK & belanja makan dan minm 500 orang	40 OH transportasi dan akomodasi, jasa pendampingan kasus 40 OK, jasa pelayanan kesehatan 40 OK & belanja makan dan minm 500 orang	100	23,416,000	23,336,000	99.66	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Keluarga Berencana					275,227,177	271,840,616	98.77		
			Pelayanan KIE	12 bulan honor KSO, bahan material 3 jenis, makan minum 50 orang, PD dalam daerah 5 kali	12 bulan honor KSO, bahan material 3 jenis, makan minum 50 orang, PD dalam daerah 5 kali	100	56,407,000	55,951,000	99.19	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Revitalisasi Kelompok UPPKS	6 orang honor, 7 jenis ATK, bahan materian 1 jenis, jasa kantor 3 jenis, sewa gedung 1 ruang, makan minum 75 orang, PD dalam daerah 7 kecamatan	6 orang honor, 7 jenis ATK, bahan materian 1 jenis, jasa kantor 3 jenis, sewa gedung 1 ruang, makan minum 75 orang, PD dalam daerah 7 kecamatan	100	64,772,900	63,715,800	98.37	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pelatihan Pencatatan & Pelaporan Klinik	7 orang honor, 4 jenis ATK, 3 jenis jasa kantor, sewa ruang 1 unit, 70 orang makan, PD dalam daerah 3 kecamatan	7 orang honor, 4 jenis ATK, 3 jenis jasa kantor, sewa ruang 1 unit, 70 orang makan, PD dalam daerah 3 kecamatan	100	29,911,400	29,911,400	100.00	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Update data pendataan keluarga	6 orang honor, 6 jenis ATK, 1 jenis jasa kantor, penggandaan 2.150 lembar, sewa ruang 1 unit, 150 orang makan, PD dalam daerah 9 kecamatan, PD luar daerah 4 orang	6 orang honor, 6 jenis ATK, 1 jenis jasa kantor, penggandaan 2.150 lembar, sewa ruang 1 unit, 150 orang makan, PD dalam daerah 9 kecamatan, PD luar daerah 4 orang	100	85,171,900	85,154,439	99.98	Pengendalian Penduduk dan Sistim Informasi Keluarga	
			Sosialisasi Peran Serta Pria dalam Program KB	5 orang honor, 4 jenis ATK, jasa kantor 2 jenis, sewa ruang 1 unit, 400 orang makan, PD dalam daerah 5 kecamatan	5 orang honor, 4 jenis ATK, jasa kantor 2 jenis, sewa ruang 1 unit, 400 orang makan, PD dalam daerah 5 kecamatan	100	38,963,977	37,107,977	95.24	Bidang KB	
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja					63,771,600	63,476,400	99.54		
			Advoksi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	6 orang KSO, 6 jenis ATK, 2 jenis jasa kantor, penggaandaan 5.000 lembar, 200 orang makan, PD dalam daerah 9 kecamatan, PD luar daerah 2 orang	6 orang KSO, 6 jenis ATK, 2 jenis jasa kantor, penggaandaan 5.000 lembar, 200 orang makan, PD dalam daerah 9 kecamatan, PD luar daerah 2 orang	100	63,771,600	63,476,400	99.54	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

		Program Pelayanan Kontrasepsi					51,156,900	50,580,099	98.87		
			Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB	1 orang KSO, 8 jenis alat kesehatan, PD dalam daerah 9 kecamatan & PD luar daerah 2 orang	1 orang KSO, 8 jenis alat kesehatan, PD dalam daerah 9 kecamatan & PD luar daerah 2 orang	100	51,156,900	50,580,099	98.87	Bidang KB	
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR					38,611,400	38,489,400	99.68		
			Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	6 orang KSO, 6 jenis ATK, jasa kantor 3 jenis, 7.500 lembar cetak dan penggandaan, sewa gedung 1 unit, 45 orang makan PD d PD luar daerah 1 orang	6 orang KSO, 6 jenis ATK, jasa kantor 3 jenis, 7.500 lembar cetak dan penggandaan, sewa gedung 1 unit, 45 orang makan PD d PD luar daerah 1 orang	100	38,611,400	38,489,400	99.68	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PAUD					228,140,000	227,950,000	99.92		
			Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu PAUD	20 kelompok honor BKBHI, 10 kelompok jasa pihak ketiga, PD dalam daerah 9 kecamatan, PD luar daerah 1 orang	20 kelompok honor BKBHI, 10 kelompok jasa pihak ketiga, PD dalam daerah 9 kecamatan, PD luar daerah 1 orang	100	228,140,000	227,950,000	99.92	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Penyuluhan KB					1,812,450,000	1,785,320,836	98.50		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Balai Penyuluhan KB	9 jenis ATK, pembersih 3 jenis, minyak 52 liter, penggaandan 60.000 lembar, jilid 90 buku, makan minum 2 jenis, PD dalam daerah 9 kecamatan, pemeliharaan 4 jenis, belanja modal 6 paket	9 jenis ATK, pembersih 3 jenis, minyak 52 liter, penggaandan 60.000 lembar, jilid 90 buku, makan minum 2 jenis, PD dalam daerah 9 kecamatan, pemeliharaan 4 jenis, belanja modal 6 paket	100	1,812,450,000	1,785,320,836	98.50	Bidang KB	
		Program Pembinaan Kinerja Lini Lapangan					498,577,000	485,939,000	97.47		
			Pembinaan dan Operasional Petugas Lapangan KB	23 orang KSO, 4 jenis ATK & 1.000 lembar penggandaan	23 orang KSO, 4 jenis ATK & 1.000 lembar penggandaan	100	498,577,000	485,939,000	97.47	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						1,545,146,200	1,430,149,990	92.56		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					565,282,500	560,207,504	99.10		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis surat masuk dan keluar 2 orang KSO	2 jenis surat masuk dan keluar 2 orang KSO	100	41,716,000	41,169,320	98.69	Sub Bagian Umum	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan, 3 jenis	12 bulan, 3 jenis	100	12,900,000	12,889,449	99.92	Sekretariat	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit sepeda motor, 1 unit mobil	11 unit sepeda motor, 1 unit mobil	100	6,650,000	4,957,635	74.55	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16 jenis bahan, 3 KSO	16 jenis bahan, 3 KSO	100	59,247,900	58,431,000	98.62	Sekretariat	
			Belanja Alat Tulis Kantor	33 jenis	33 jenis	100	21,719,400	21,719,400	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,894 lembar foto copy, 117 buku	22,894 lembar foto copy, 117 buku	100	19,575,000	19,575,000	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	100	1,435,600	1,435,600	100.00	Sekretariat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis	100	42,050,200	40,500,000	96.31	Sekretariat	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2 jenis	100	5,400,000	5,360,000	99.26	Sekretariat	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10 kali rapat, 10 konsultasi	10 kali rapat, 10 konsultasi	100	354,588,400	354,170,100	99.88	Sekretariat	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					75,696,600	74,024,600	97.79		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	5,386,000	5,386,000	100.00	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit roda 2, 1 unit roda 4 & 1 KSO	11 unit roda 2, 1 unit roda 4 & 1 KSO	100	67,810,600	66,138,600	97.53	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	2,500,000	2,500,000	100.00	Sekretariat	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100,074,000	99,596,500	99.52		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 kali	4 kali	100	100,074,000	99,596,500	99.52	Sekretariat	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					129,747,650	129,224,550	99.60		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	3,285,250	3,285,250	100.00	Sub Bagian Keangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	15,897,700	15,874,600	99.85	Sub Bagian Keuangan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	110,564,700	110,064,700	99.55	Sub Bagian Keuangan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					15,846,700	15,846,600	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	6,059,100	6,059,100	100.00	Sub Bagian Perencanaan Program	
			Penyusunan Profil Pembangunan Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	100	9,787,600	9,787,500	100.00	Sub Bagian Perencanaan Program	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					12,000,000	12,000,000	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	12,000,000	12,000,000	100.00	Subbag Keuangan	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					195,857,500	194,875,680	99.50		
			Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	9 kali, 1 laporan	9 kali, 1 laporan	100	6,000,000	6,000,000	100.00	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	1 kegiatan	1 kegiatan	100	52,894,900	52,866,400	99.95	Subid Bina Idiologi dan Bela Negara	
			Fasilitasi Operasional Kominda	3 kegiatan	3 kegiatan	100	89,846,500	88,893,180	98.94	Subid Kerjasama Intelkam	
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	16,045,600	16,045,600	100.00	Subid Bina Idiologi dan Bela Negara	
			Pemutakhiran Data Base dan LSM se Kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	100	31,070,500	31,070,500	100.00	Subid Kelembagaan Partai Politik	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					188,938,200	179,364,506	94.93		

			Fasilitasi Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat	4 kali rapat, 4 Rekomendasi	4 kali rapat, 4 Rekomendasi	100	28,746,600	28,711,800	99.88	Subid Wasdin dan Kerjasama Intelkam	
			Fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Kebangsaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	54,343,600	45,073,036	82.94	Subid Idiologi dan Bela Negara	
			Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Agraris	1 kegiatan	1 kegiatan	100	67,565,800	67,479,470	99.87	Subid Ketahanan Ekonomi	
			Koordinasi dan Pemetaan Basis Sumber Daya Alam dan Daerah Rawan Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100	38,282,200	38,100,200	99.52	Subid Ketahanan SDA	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					149,262,700	60,406,300	40.47		
			Peniingkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Pengamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	104,079,400	15,480,500	14.87	Subid Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	
			Fasilitasi Penanganan Konflik di Wilayah	7 konflik	7 konflik	100	22,055,100	21,955,100	99.55	Subid Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing	
			Monitoring dan Pengawasan Orang/Lembaga Asing	6 kegiatan	6 kegiatan	100	23,128,200	22,970,700	99.32	Subid Wasdin dan Kerjasama Intelkam	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat					112,440,350	104,603,750	93.03		
			Penyuluhan Kepada Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100	22,427,100	22,427,100	100.00	Subid Partai Politik	
			Verifikasi dan Bantuan Keuangan Partai Politik	1 kegiatan	1 kegiatan	100	19,875,100	19,865,100	99.95	Subid Partai Politik	
			Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Parpol	1 kegiatan	1 kegiatan	100	56,348,700	48,522,100	86.11	Subid Partai Politik	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	13,789,450	13,789,450	100.00	Subid Partai Politik	
26	BAPPELITBANGDA						4,918,315,028	4,601,489,552	93.56		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					525,704,834	475,167,428	90.39		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	42,016,000	42,016,000	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	78,000,000	27,499,694	35.26	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit STNK dan pajak roda empat, 12 unit roda dua	2 unit STNK dan pajak roda empat, 12 unit roda dua	100	7,341,000	7,341,000	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	21,910,600	21,873,500	99.83	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100	73,904,700	73,904,700	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	37,196,150	37,196,150	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	100	2,040,000	2,040,000	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	51 kali dalam daerah, 32 kali luar daerah	51 kali dalam daerah, 32 kali luar daerah	100	263,296,384	263,296,384	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					747,119,344	709,603,545	94.98		
			Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	124,246,011	109,596,512	88.21	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	15 unit AC dan 1 paket horden	15 unit AC dan 1 paket horden	100	258,890,000	236,124,000	91.21	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	100	211,416,300	211,316,000	99.95	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit roda empat, 12 unit roda dua	2 unit roda empat, 12 unit roda dua	100	147,567,033	147,567,033	100.00	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	5,000,000	5,000,000	100.00	Sub Bagian Pengelolaan Barang Pengguna & Perkantoran	

		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					181,354,000	181,349,900	100.00		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen LAKIP dan LPPD	2 dokumen LAKIP dan LPPD	100	5,709,000	5,708,700	99.99	Sub Bagian Keangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 laporan keuangan	1 laporan keuangan	100	24,321,900	24,321,900	100.00	Sub Bagian Keangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	151,323,100	151,319,300	100.00	Sub Bagian Keangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Internal SKPD					45,518,000	45,515,800	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	30,770,400	30,768,800	99.99	Sub Bagian Keangan & Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					7,373,800	7,373,500	100.00		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	7,373,800	7,373,500	100.00	Sub Bagian TU, Organisasi dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					26,237,400	26,236,000	99.99		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 laporan	2 laporan	100	26,237,400	26,236,000	99.99	Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi	
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					70,327,000	70,268,790	99.92		
			Penyusunan dan Pembagunan Data Base Daerah	1 dokumen SIPD	1 dokumen SIPD	100	70,327,000	70,268,790	99.92	Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi	
		Program Kerjasama Pembangunan					94,334,800	93,915,099	99.56		
			Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	4 laporan	4 laporan	100	94,334,800	93,915,099	99.56	Sub Bidang Sosial dan Budaya	
		Program Pengembangan Wilayah Tertinggal, Perbatasan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					124,698,400	123,619,519	99.13		
			Koordinasi Penanganan Wilayah Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 laporan	4 laporan	100	124,698,400	123,619,519	99.13	Sub Bidang Infrastruktur	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota dan Desa Menengah dan Besar					170,972,250	170,604,250	99.78		
			Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan/Pedesaan	4 laporan	4 laporan	100	170,972,250	170,604,250	99.78	Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					2,102,222,050	1,937,182,376	92.15		
			Penyusunan dan Penetapan RPJPD	1 dokumen RPJPD	1 dokumen RPJPD	100	52,227,000	50,819,000	97.30	Sub Bidang Penelitian	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 dokumen RPJMD	1 dokumen RPJMD	100	626,032,800	533,847,967	85.27	Sub Bidang Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Pengawasan	
			Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	100	153,295,850	125,361,250	81.78	Sub Bidang Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Pengawasan	
			Penyusunan dan Penetapan RKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	709,544,300	671,234,400	94.60	Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	301,792,100	301,776,969	99.99	Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	

			Koordinasi Penyusunan Proposal dan Pengurusan Program Kegiatan pada Pemerintah Tingkat Atas	1 paket proposal	1 paket proposal	100	82,318,900	79,859,598	97.01	Sub Bidang Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Pengawasan	
			Penyusunan Rancangan KU APBD dan PPAS APBD	2 dokumen	2 dokumen	100	46,749,700	46,730,892	99.96	Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
			Penyusunan Rancangan Perubahan KU APBD dan PPAS APBD	2 dokumen	2 dokumen	100	46,633,700	46,585,400	99.90	Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan SDM	4 laporan	4 laporan	100	83,627,700	80,966,900	96.82	Sub Bidang Pemerintahan Umum	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					128,099,100	122,481,100	95.61		
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	4 laporan	4 laporan	100	74,872,100	72,197,800	96.43	Sub Bidang Ekonomi	
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	53,227,000	50,283,300	94.47	Sub Bidang Ekonomi	
		Program Perencanaan Sosial Budaya					94,220,000	93,135,800	98.85		
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	4 laporan	4 laporan	100	94,220,000	93,135,800	98.85	Sub Bidang Sosial dan Budaya	
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam					55,025,900	54,922,299	99.81		
			Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	4 laporan	4 laporan	100	55,025,900	54,922,299	99.81	Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					330,867,700	276,092,696	83.45		
			Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	292,482,300	237,937,668	81.35	Sub Bidang Pemerintahan Umum	
			Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	4 laporan	4 laporan	100	38,385,400	38,155,028	99.40	Sub Bidang Pemerintahan Umum	
		Program Penelitian dan Pengembangan					214,240,450	214,021,450	99.90		
			Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	214,240,450	214,021,450	99.90	Sub Bidang Pemerintahan Umum	
27	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3,983,421,688	3,687,586,337	92.57		
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS					203,899,300	151,646,300	74.37		
			Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	5 (KUBE) 50 KK	4 (KUBE) 40 KK	80	203,899,300	151,646,300	74.37	Seksi Pemberdayaan Fakir miskin, keluarga dan KAT	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					587,245,000	414,341,850	70.56		
			Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk Bagi Korban Bencana	50 orang	100 orang	200	67,050,000	66,901,850	99.78	Seksi Diklat Pengembangan Potensi dan masalah serta data base	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	9 unit kursi roda dan 5 buah alat bantu	9 unit kursi roda dan 5 buah alat bantu	100	162,625,700	160,769,700	98.86	Seksi pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Usia Lanjut	
			Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggal Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	9 kecamatan	9 kecamatan	100	186,626,000	176,152,000	94.39	Seksi Penanganan Korban Bencana	
			Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	16 unit rumah	- unit rumah	-	170,943,300	10,518,300	6.15	Seksi Diklat Pengembangan Potensi dan masalah serta data base	
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial					161,648,200	161,055,200	99.63		

			Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	18 orang	18 orang	100	161,648,200	161,055,200	99.63	Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan tuna sosial	
		Program Pelayanan Bantuan Sosial					322,840,950	283,367,850	87.77		
			Pengadaan Pangan Beras	1 unit gudang	1 unit gudang	100	96,264,750	70,170,650	72.89	Seksi Penanganan korban bencana	
			Koodinasi Bantuan Sosial Bagi Keluarga Sangat Miskin	5,682 RTSM	5,682 RTSM	100	196,522,600	196,522,600	100.00	Seksi Jaminan Sosial	
			Sosialisasi Program Keluarga Harapan	5,682 RTSM	5,682 RTSM	100	30,053,600	16,674,600	55.48	Seksi Jaminan Sosial	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					529,975,500	519,515,575	98.03		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 orang	8 orang	100	152,987,000	152,401,000	99.62	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	28,200,000	23,827,534	84.49	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit roda empat, 12 unit roda dua	3 unit roda empat, 12 unit roda dua	100	8,400,000	6,043,915	71.95	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14 jenis	14 jenis	100	3,256,000	3,237,000	99.42	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Sew Gedung	12 bulan	12 bulan	100	20,000,000	20,000,000	100.00	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyedian Alat Tulis Kantor	33 jenis	33 jenis	100	21,155,000	21,153,500	99.99	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50 lembar FC, 32 julidan	50 lembar FC, 32 julidan	100	17,500,000	17,498,400	99.99	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 surat kabar	2 surat kabar	100	2,700,000	2,460,000	91.11	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	2 jenis	2 jenis	100	11,431,500	11,419,900	99.90	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	58 kali dalam daerah, 12 kali luar daerah	58 kali dalam daerah, 12 kali luar daerah	100	264,346,000	261,474,326	98.91	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					157,754,838	157,290,300	99.71		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit roda empat, 12 unit roda dua	3 unit roda empat, 12 unit roda dua	100	134,704,838	134,253,800	99.67	Kasubag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6 jenis	6 jenis	100	23,050,000	23,036,500	99.94	Kasubag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					303,493,000	300,155,400	98.90		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5 orang	5 orang	100	94,100,000	90,762,400	96.45	Kasubag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Pendididikan dan Pelatihan Kepemimpinan	3 orang	3 orang	100	209,393,000	209,393,000	100.00	Kasubag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					132,433,000	132,364,000	99.95		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	1 orang KSO, 4 dokumen (semesteran, tahunan, LAKIP, LPPD)	1 orang KSO, 4 dokumen (semesteran, tahunan, LAKIP, LPPD)	100	32,658,000	32,639,000	99.94	Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	99,775,000	99,725,000	99.95	Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					41,345,100	40,516,100	97.99		

			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	6 dokumen (Renja, Perubahan Renja, Evaluasi Renja 4 triwulan)	6 dokumen (Renja, Perubahan Renja, Evaluasi Renja 4 triwulan)	100	41,345,100	40,516,100	97.99	Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					17,345,800	17,345,000	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	17,345,800	17,345,000	100.00	Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program	

		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					24,783,500	21,966,700	88.63		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	10 buku untuk 2 dokumen	10 buku untuk 2 dokumen	100	24,783,500	21,966,700	88.63	Kasubag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					376,187,000	372,878,599	99.12		
			Pencanangan & Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	1 kegiatan	1 kegiatan	100	57,983,700	57,497,700	99.16	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan SDA dan TTG	
			Pendampingan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Terpadu (P2LDT)	165 rumah	165 rumah	100	74,001,100	72,113,500	97.45	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan SDA dan TTG	
			Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-GSC)	4 kecamatan	4 kecamatan	100	83,320,900	83,246,599	99.91	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan SDA dan TTG	
			Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	73,235,200	72,942,200	99.60	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan SDA dan TTG	
			Pendampingan Kegiatan Pembangunan Desa	1 kali	1 kali	100	87,646,100	87,078,600	99.35	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan SDA dan TTG	
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					121,772,350	120,106,250	98.63		
			Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	144 desa	144 desa	100	121,772,350	120,106,250	98.63	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Pendayagunaan SDA dan TTG	
		Program Pelatihan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					118,953,700	116,490,800	97.93		
			Pelaksanaan Musyawarah Membangun Desa	90 desa	90 desa	100	41,083,000	40,881,200	99.51	Seksi Pembangunan	
			Monitoring dan Evaluasi Program-program Pemberdayaan Masyarakat	151 desa/kelurahan	151 desa/kelurahan	100	77,870,700	75,609,600	97.10	kasubag Keuangan dan Perencanaan Program	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Penataan Administrrsi Desa					286,242,750	284,089,100	99.25		
			Pelatihan Aparatur Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	105 orang	105 orang	100	89,680,500	87,682,300	97.77	Seksi Keuangan dan Aset Desa	
			Penyusunan Profil Desa	9 desa/kelurahan	9 desa/kelurahan	100	59,454,250	59,430,050	99.96	Seksi Pembangunan	
			Penyusunan Juklak,Juknis dan Perda tentang Desa	2 Perda, 2 Perbup, 4 Juklah/Juknis	2 Perda, 2 Perbup, 4 Juklah/Juknis	100	97,358,000	97,353,950	100.00	Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Pembinaan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	144 desa	144 desa	100	39,750,000	39,622,800	99.68	Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					330,582,700	328,838,450	99.47		
			Pendampingan Organisasi Perempuan	9 kecamatan	9 kecamatan	100	269,216,000	268,083,750	99.58	Seksi Pengembangan Sosial	
			Pelatihan Kader PKK	132 orang	132 orang	100	29,879,600	29,567,600	98.96	Seksi Pengembangan Sosial	
			Pelatihan Kader Posyandu	72 orang	72 orang	100	31,487,100	31,187,100	99.05	Seksi Pengembangan Sosial	
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					208,015,900	207,042,963	99.53		
			Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	432 Perdes, 432 Keputusan Desa	432 Perdes, 432 Keputusan Desa	100	19,955,350	19,926,050	99.85	Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	144 Desa	144 Desa	100	188,060,550	187,116,913	99.50	Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Penataan Desa					58,903,100	58,575,900	99.44		
			Evaluasi Perkembangan Desa	151 desa/kelurahan	151 desa/kelurahan	100	58,903,100	58,575,900	99.44	Seksi Kelembagaan Desa	

28	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						7,232,810,664	6,766,703,932	93.56		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					486,955,400	441,997,333	90.77		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	950 lembar meterai	950 lembar meterai	100	4,875,000	4,872,000	99.94	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis jasa	2 jenis jasa	100	62,700,000	30,564,840	48.75	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	24 unit roda dua & 1 unit roda empat	24 unit roda dua & 1 unit roda empat	100	26,100,000	14,441,215	55.33	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18 jenis barang	18 jenis barang	100	3,088,000	3,088,000	100.00	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	53 jenis ATK	53 jenis ATK	100	80,427,600	80,427,500	100.00	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000 lembar FC, 30 buku	100,000 lembar FC, 30 buku	100	48,475,000	48,471,200	99.99	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	744 nasi kotak, snack 650 kotak	744 nasi kotak, snack 650 kotak	100	29,322,800	29,317,600	99.98	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 kali luar daerah	4 kali luar daerah	100	231,967,000	230,814,978	99.50	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					510,894,310	507,274,748	99.29		
			Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	136,396,000	136,352,000	99.97	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	4 jenis	100	254,173,620	253,174,000	99.61	Subbag Pengelolaan Barang dan Pengguna Barang	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit kantor & 2 unit balon	2 unit kantor & 2 unit balon	100	24,513,100	24,513,000	100.00	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	20 unit roda dua & 1 unit roda empat	20 unit roda dua & 1 unit roda empat	100	79,115,965	76,540,123	96.74	Subbag Pengelolaan Barang dan Pengguna Barang	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	100	16,695,625	16,695,625	100.00	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					64,896,000	58,654,600	90.38		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang-Undangan	4 orang	4 orang	100	64,896,000	58,654,600	90.38	Subbag TU, Organisasi, Kepegawaian, PBP dan Perkantoran	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					126,783,400	126,469,499	99.75		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen (20 buku)	2 dokumen (20 buku)	100	4,174,000	4,174,000	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen (20 buku)	3 dokumen (20 buku)	100	4,174,000	4,174,000	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	2 dokumen (20 buku)	2 dokumen (20 buku)	100	118,435,400	118,121,499	99.73	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					18,798,000	18,548,000	98.67		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya	3 perayaan	3 perayaan	100	18,798,000	18,548,000	98.67	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektor					10,888,900	10,879,400	99.91		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra, Renja	40 buku	40 buku	100	10,888,900	10,879,400	99.91	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		Program Perencanaan Keuangan Internal					27,859,800	27,858,900	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPIA SKPD	4 dokumen 60 buku	4 dokumen 60 buku	100	27,859,800	27,858,900	100.00	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD					38,700,000	36,438,150	94.16		

			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	20 buku	20 buku	38700000	38,700,000	36,438,150	94.16	Subbag Pengelolaan Barang dan Pengguna Barang Perkantoran	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini					273,786,700	263,393,800	96.20		
			Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Usia Dini	135 orang	135 orang	100	153,802,300	153,659,800	99.91	Bidang Paud Dikmas	
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	15 Lembaga	15 Lembaga	100	119,984,400	109,734,000	91.46	Bidang Paud Dikmas	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					2,180,941,875	2,167,762,674	99.40		
			Pembangunan Ruang Kelas	15 RKB SD	15 RKB SD	100	30,000,000	30,000,000	100.00	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Pengadaan Alat Praktik & Peraga Siswa	1 Paket	1 Paket	100	717,910,775	717,805,775	99.99	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Pengadaan Meubeler Sekolah	7 Paket	7 Paket	100	717,910,775	717,805,775	99.99	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Asrama Siswa	41 ruang kelas dan 17 paket	41 ruang kelas dan 17 paket	100	6,000,000	6,000,000	100.00	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	30 SD dan 20 SMP	30 SD dan 20 SMP	100	24,575,150	24,012,150	97.71	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Penyediaan Biaya Operasional DAK Bidang Pendidik	1 Paket	1 paket	100	236,552,000	231,517,900	97.87	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	3,456 peserta didik	3,456 peserta didik	100	236,552,000	231,517,900	97.87	Bidang SD	
			Seksi Olympiade MIPA SD/MI	180 peserta didik	180 peserta didik	100	48,625,200	47,414,600	97.51	Bidang SD	
			Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah	40 SD, 20 SMP 232 orang, 3.676 peserta	40 SD, 20 SMP 232 orang, 3.676 peserta	100	72,370,700	71,318,299	98.55	Bidang SD	
			Pendampingan Try Out Mata Pelajaran	3,676 peserta didik	3,676 peserta didik	100	90,445,275	90,370,275	99.92	Bidang SD	
		Program Pendidikan Menengah					1,356,901,879	1,340,344,450	98.78		
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru Penjaga Sekolah Asrama Siswa	1 paket	1 paket	100	476,011,100	466,467,100	98.00	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Pembangunan Ruang Kelas	1 paket	1 paket	100	342,444,600	341,432,100	99.70	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Pembangunan Laboratorium Sekolah	1 paket	1 paket	100	433,409,929	427,409,000	98.62	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 SMK	1 SMK	100	9,986,250	9,986,250	100.00	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Pengadaan Meubeler Sekolah	1 paket	1 paket	100	38,050,000	38,050,000	100.00	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kelapa Sekolah	1 paket	1 paket	100	57,000,000	57,000,000	100.00	Seksi Sarana dan Prasarana SD	
		Program Pendidikan Non Formal					73,493,600	72,113,599	98.12		
			Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal (SKB)	32 orang	32 orang	100	31,330,350	30,524,350	97.43	Bidang SKB	
			Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	1 Dokumen	100	9,743,150	9,469,149	97.19	Bidang SKB	
			Pengembangan Kecakapan Hidup (Life Mode UPTD SKB Kab. Lembata)	9 kelompok	9 kelompok	100	13,220,900	13,045,900	98.68	Bidang SKB	
			pendampingan BOP PAUD	10 orang	10 orang	100	19,199,200	19,074,200	99.35	Bidang SKB	

		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					573,905,150	553,801,977	96.50		
			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	150 guru	150 guru	100	35,118,350	33,506,548	95.41	Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi	142 guru	142 guru	100	291,117,000	283,670,998	97.44	Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pengembangan Sistim Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,646 PTK	3,646 PTK	100	111,388,800	103,876,800	93.26	Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pengembangan Sistim Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	340 pendidik	340 pendidik	100	34,202,000	34,185,132	99.95	Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pengembangan Sistim Perencanaan dan Pengendalian	655 guru	655 guru	100	44,952,600	43,404,300	96.56	Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penetapan Angka Kredit	1 dokumen	1 dokumen	100	57,126,400	55,158,199	96.55	Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidik					480,876,800	458,693,552	95.39		
			Penetapan Sistim dan Informasi Manajemen Pendidikan	264 sekolah	264 sekolah	100	68,122,000	68,117,400	99.99	Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Operasional UPTD PPO	9 kecamatan 33.622 siswa	9 kecamatan 33.622 siswa	100	225,705,000	217,207,152	96.23	Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Supervisi Akademi dan Managerial pada setiap Jenjang Satuan Pendidikan	232 sekolah	232 sekolah	100	187,049,800	173,369,000	92.69	Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					235,178,600	234,272,000	99.61		
			Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	70 orang peserta paskibra	70 orang peserta paskibra	100	235,178,600	234,272,000	99.61	Bagian Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda					354,565,000	32,821,500	9.26		
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100 Peserta	100 Peserta	100	354,565,000	32,821,500	9.26	Bagian Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga					417,385,250	415,379,750	99.52		
			Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	352 orang	352 orang	100	277,608,450	277,602,950	100.00	Bagian Kepemudaan dan Olahraga	
			Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat	1 paket atlit berprestasi	1 paket atlit berprestasi	100	139,776,800	137,776,800	98.57	Bagian Kepemudaan dan Olahraga	
29	KECAMATAN LEBATUKAN						1,388,975,755	981,662,375	70.68		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					227,272,500	226,019,520	99.45		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	77,809,100	77,808,800	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	9,000,000	8,962,000	99.58	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	8 unit	100	4,400,000	3,486,320	79.23	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14 jenis	14 jenis	100	1,309,800	1,309,800	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100	29,335,600	29,335,600	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3000 lembar FC, 10 buku	3000 lembar FC, 10 buku	100	15,460,000	15,460,000	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	517 OM	517 OM	100	23,608,000	23,607,000	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26 orang	26 orang	100	66,350,000	66,050,000	99.55	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					769,715,755	388,355,455	50.45		
			Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	585,725,000	206,840,000	35.31	Kantor Camat Lebatukan	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	26 unit, 1 set, 1 buah	26 unit, 1 set, 1 buah	100	63,915,950	62,681,000	98.07	Kantor Camat Lebatukan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	33,258,455	33,258,455	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	8 unit	100	81,476,850	80,236,500	98.48	Kantor Camat Lebatukan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14 unit	14 unit	100	5,339,500	5,339,500	100.00	Kantor Camat Lebatukan	

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					44,362,000	19,694,999.60	44.40		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	3 orang	100	44,362,000	19,694,999.60	44.40	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					139,751,650	139,720,450	99.98		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 laporan	2 laporan	100	23,909,300	23,909,300	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1 laporan	1 laporan	100	11,006,200	10,980,200	99.76	Kantor Camat Lebatukan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	104,836,150	104,830,950	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					62,427,200	62,425,300	100.00		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	62,427,200	62,425,300	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Perencanaaan Pembangunan Sektoral					20,260,300	20,260,300	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renda SKPD	7 dokumen	7 dokumen	100	20,260,300	20,260,300	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					4,704,350	4,704,350	100.00		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen	100	2,379,650	2,379,650	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	2,324,700	2,324,700	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					7,581,500	7,581,500	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	7,581,500	7,581,500	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					13,577,600	13,577,600	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna OPD	2 dokumen	2 dokumen	100	13,577,600	13,577,600	100.00	Kantor Camat Lebatukan	
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					99,322,900	99,322,900	100.00		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	99,322,900	99,322,900	100.00	Kantor Camat Lebatukan	

30	KECAMATAN NUBATUKAN						3,997,181,894	2,337,625,054	58.48		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					960,301,900	953,675,004	99.31		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis surat, 20 KSO	2 jenis surat, 20 KSO	100	392,995,000	392,982,000	100.00	Seksi Pelayanan Umum, Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 meteran air, 1 meteran listrik	1 meteran air, 1 meteran listrik	100	33,000,000	31,987,614	96.93	Seksi Pelayanan Umum	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit kendaraan	6 unit kendaraan	100	7,200,000	5,885,190	81.74	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15 KSO dan 15 jenis pembersih	15 KSO dan 15 jenis pembersih	100	297,476,600	297,475,200	100.00	Seksi Pelayanan Umum, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	30 Jenis	100	87,978,800	87,978,800	100.00	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000 lembar FC, 600 buku	30,000 lembar FC, 600 buku	100	65,973,500	65,968,100	99.99	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	1,320 OM	1,320 OM	100	35,116,000	35,009,600	99.70	Seksi Pelayanan Umum	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 kali perjalanan	3 kali perjalanan	100	40,562,000	36,388,500	89.71	Seksi Pelayanan Umum, Subbag Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					920,749,294	913,372,750	99.20		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7 unit laptop, 9 unit printer	7 unit laptop, 9 unit printer	100	181,181,900	181,044,000	99.92	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pembangunan Aula	1 unit	1 unit	100	665,497,994	664,948,000	99.92	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8 unit kantor	8 unit kantor	100	11,975,500	10,475,500	87.47	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda empat, 22 unit roda dua	1 unit roda empat, 22 unit roda dua	100	53,429,900	51,473,250	96.34	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	8 unit, 40 jenis	8 unit, 40 jenis	100	8,664,000	5,432,000	62.70	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					199,145,000	199,145,000	100.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 orang	9 orang	100	199,145,000	199,145,000	100.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					152,362,100	150,950,900	99.07		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen (LAKIP, LPPD)	2 dokumen (LAKIP, LPPD)	100	4,345,800	4,345,300	99.99	Sub Bagian Keuangan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen (Semesteran/Prognosis, Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 dokumen (Semesteran/Prognosis, Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	4,209,200	4,039,200	95.96	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan dan Pemerintahan Umum	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	143,807,100	142,566,400	99.14	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					69,501,400	69,249,400	99.64		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan HUT Otonomi Daerah	3 kegiatan (HUT RI, HUT Kecamatan dan HUT OTDA)	3 kegiatan (HUT RI, HUT Kecamatan dan HUT OTDA)	100	69,501,400	69,249,400	99.64	Seksi Pemerintahan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					6,742,600	6,351,800	94.20		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	4 dokumen (evaluasi renja, renja, renja perubahan dan renstra)	4 dokumen (evaluasi renja, renja, renja perubahan dan renstra)	100	6,742,600	6,351,800	94.20	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					11,045,200	10,886,300	98.56		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	11,045,200	10,886,300	98.56	Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	

		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					33,997,500	33,993,900	99.99		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	33,997,500	33,993,900	99.99	Sub Bagian Aset	
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					1,643,336,900	-	0.00		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	7 kegiatan		0	162,470,000		0.00		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan	6 kegiatan		0	1,480,866,900		0.00		
31	KECAMATAN ILE APE TIMUR						899,192,383	890,186,683	99.00		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					311,953,500	303,806,100	97.39		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan/2 jenis	12 bulan/2 jenis	100	83,388,200	83,388,200	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan/12 tangki air	12 bulan/12 tangki air	100	7,380,000	7,380,000	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit mobil & 9 unit motor	1 unit mobil & 9 unit motor	100	5,450,000	5,450,000	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan, 17 jenis	12 bulan, 17 jenis	100	1,885,500	1,885,500	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Penyedian Alat Tulis Kantor	45 Jenis	45 Jenis	100	21,325,900	21,325,900	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	7,925,000	7,925,000	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	100	2,312,100	2,312,100	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	6 jenis	100	31,924,400	26,605,000	83.34	Bagian Tata Usaha	
			penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28 jenis	28 jenis	100	54,210,400	53,945,000	99.51	Bagian Tata Usaha	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	293 OMKN	293 OMKN	100	13,754,000	13,754,000	100.00	Bagian Tata Usaha	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	218 kali	218 kali	100	82,398,000	79,835,400	96.89	Bagian Tata Usaha	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					267,022,233	266,562,133	99.83		
			Pembangunan Rumah Jabatan Camat	1 unit	1 unit	100	205,685,000	205,516,000	99.92	Bagian Tata Usaha	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit mobil & 7 unit motor	1 unit mobil & 7 unit motor	100	61,337,233	61,046,133	99.53	Bagian Tata Usaha	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					11,558,200	11,440,000	98.98		
			Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perlengkapannya	22 zet	22 zet	100	11,558,200	11,440,000	98.98	Bagian Tata Usaha & Keuangan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					19,715,000	19,635,000	99.59		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	1 orang	100	19,715,000	19,635,000	99.59	Bagian Tata Usaha	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					97,698,300	97,498,300	99.80		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	3 dokumen (LAKIP, LPPD, ATA/AMJA)	3 dokumen (LAKIP, LPPD, ATA/AMJA)	100	4,820,000	4,745,000	98.44	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	10,628,300	10,503,300	98.82	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100	82,250,000	82,250,000	100.00	Bagian Tata Usaha & Keuangan	

		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					42,790,700	42,790,700	100.00		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan HUT Otonomi Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100	42,790,700	42,790,700	100.00	Bagian Tata Usaha & Keuangan	
		Program Penataan Lingkungan Kantor					19,645,000	19,645,000	100.00		
			Penataan Areal Perkantoran	1 paket	1 paket	100	19,645,000	19,645,000	100.00	Tata Usaha	
		Program Perencanaan Pembangunan Eksternal					13,315,400	13,315,400	100.00		
			Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	7 dokumen; Renstra, Renja, Renja Perubahan, Evaluasi renja 4 triwulan	7 dokumen; Renstra, Renja, Renja Perubahan, Evaluasi renja 4 triwulan	100	10,073,400	10,073,400	100.00	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Penyusunan Profil Pembangunan Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	100	3,242,000	3,242,000	100.00	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					2,100,000	2,100,000	100.00		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	1,200,000	1,200,000	100.00	Tata Usaha	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen	1 dokumen	100	900,000	900,000	100.00	Tata Usaha	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					15,548,200	15,548,200	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen RKA-RDPPA-DPA SKPD	4 dokumen RKA-RDPPA-DPA SKPD	100	15,548,200	15,548,200	100.00	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pengelolaan Barang/Aset Daerah					3,321,600	3,321,600	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	3,321,600	3,321,600	100.00	Bagian Tata Usaha	
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					94,524,250	94,524,250	100.00		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	12 bulan, 9 desa, 6 kegiatan	12 bulan, 9 desa, 6 kegiatan	100	94,524,250	94,524,250	100.00	Lima Seksi	
32	KECAMATAN ATADEI						824,696,260	729,676,549	88.48		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					147,959,600	135,100,700	91.31		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	59,849,000	59,849,000	100.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	13,441,300	2,040,000	15.18	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1,133,500	1,133,500	100.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Penyedian Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100	15,325,600	15,325,600	100.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	6,246,400	5,382,700	86.17	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100	11,113,800	11,111,900	99.98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	160 kali	160 kali	100	40,850,000	40,257,999.80	98.55	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					263,096,010	216,403,950	82.25		

			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	7 jenis	7 jenis	100	28,740,200	28,723,000	99.94	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	49 jenis	49 jenis	100	102,216,600	102,151,000	99.94	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	6,188,600	3,625,000	58.58	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	1 unit	100	122,450,610	81,904,950	66.89	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 unit	12 unit	100	3,500,000	-	0.00		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					81,642,850	70,222,499	86.01		
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	1 orang	1 orang	100	81,642,850	70,222,499	86.01	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Pelayanan Umum	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					88,954,000	87,612,500	98.49		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	10 buku	10 buku	100	8,116,600	7,875,100	97.02	Administrasi Keuangan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	80,837,400	79,737,400	98.64	Administrasi Keuangan	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					23,512,000	17,948,000	76.34		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan HUT Otonomi Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100	23,512,000	17,948,000	76.34	Seksi Pemerintahan	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					8,901,300	5,683,600	63.85		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	5,683,600	5,683,600	100.00	Sub Bagian Perencanaan Program	
			Penyusunan Profil Pembangunan Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	100	3,217,700	-	0.00		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					22,162,600	19,572,600	88.31		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 laporan	2 laporan	100	22,162,600	19,572,600	88.31	Sub Bagian Administrasi Keuangan	
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					188,467,900	177,132,700	93.99		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	15 desa	15 desa	100	188,467,900	177,132,700	93.99	4 seksi & 3 Sub Bagian	
33	KECAMATAN NAGAWUTUNG						1,123,077,340	1,072,767,660	95.52		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					197,624,800	187,278,698	94.76		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 pegawai honorer, 12 bulan, meterai 70 buah & foto copy 2.800 lmr	2 pegawai honorer, 12 bulan, meterai 70 buah & foto copy 2.800 lmr	100	41,116,000	39,741,000	96.66	Kantor Camat Nagawutung	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening (listrik & air)	2 rekening (listrik & air)	100	13,263,000	6,236,000	47.02	Kantor Camat Nagawutung	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit (5 unit roda 2 dan 1 unit roda 4)	6 unit (5 unit roda 2 dan 1 unit roda 4)	100	3,769,600	2,513,000	66.66	Kantor Camat Nagawutung	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 jenis barang	10 jenis barang	100	3,741,200	3,741,200	100.00	Kantor Camat Nagawutung	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	18 jenis barang	18 jenis barang	100	9,678,500	9,678,500	100.00	Kantor Camat Nagawutung	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,000 lembar, 71 buku	16,000 lembar, 71 buku	100	5,406,500	5,250,000	97.11	Kantor Camat Nagawutung	

			Penyediaan Makanan dan Minuman	270 orang makan	270 orang makan	100	4,214,000	4,214,000	100.00	Kantor Camat Nagawutung	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	95 90 ke kabupaten, 3 kali Jakarta, 2 kali ke Kupang	95 90 ke kabupaten, 3 kali Jakarta, 2 kali ke Kupang	100	116,436,000	115,904,998	99.54	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					533,312,240	506,089,962	94.90		
			Pembangunan Gedung Kantor	1 gedung aula	1 gedung aula	100	344,632,450	328,173,250	95.22	Kantor Camat Nagawutung	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	3 jenis barang	3 jenis barang	100	67,750,000	67,750,000	100.00	Kantor Camat Nagawutung	
			Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis barang	3 jenis barang	100	34,179,200	34,172,000	99.98	Kantor Camat Nagawutung	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit (5 unit roda 2 dan 1 unit roda 4)	6 unit (5 unit roda 2 dan 1 unit roda 4)	100	79,830,900	69,294,712	86.80	Kantor Camat Nagawutung	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	2 paket	2 paket	100	6,919,690	6,700,000	96.83	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					63,922,000	61,716,000	96.55		
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	1 orang eselon III	1 orang eselon III	100	63,922,000	61,716,000	96.55	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					99,287,350	95,355,950	96.04		
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen laporan (laporan keuangan semesteran dan akhir tahun)	2 dokumen laporan (laporan keuangan semesteran dan akhir tahun)	100	10,036,050	8,354,950	83.25	Kantor Camat Nagawutung	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	2 dokumen laporan (laporan keuangan semesteran dan akhir tahun)	2 dokumen laporan (laporan keuangan semesteran dan akhir tahun)	100	89,251,300	87,001,000	97.48	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					38,465,600	36,465,600	94.80		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	2 kegiatan HUT RI & HUT OTDA)	2 kegiatan HUT RI & HUT OTDA)	100	38,465,600	36,465,600	94.80	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					5,742,000	3,536,600	61.59		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	2 dokumen (Renstra dan Renja)	2 dokumen (Renstra dan Renja)	100	5,742,000	3,536,600	61.59	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Perencanaan Penganggaran SKPD					7,874,650	7,621,350	96.78		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	4 dokumen (RAK,DPA, RDPPA & DPPA)	4 dokumen (RAK,DPA, RDPPA & DPPA)	100	7,874,650	7,621,350	96.78	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					24,998,500	24,248,500	97.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	2 dokumen laporan (LBPS & LBPT)	2 dokumen laporan (LBPS & LBPT)	100	24,998,500	24,248,500	97.00	Kantor Camat Nagawutung	
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					151,850,200	150,455,000	99.08		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	18 desa	18 desa	100	151,850,200	150,455,000	99.08	Kantor Camat Nagawutung	
34	KECAMATAN WULANDONI						1,086,657,430	1,063,497,692	97.87		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					250,923,830	249,171,380	99.30		

			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis surat & 3 KSO	2 jenis surat & 3 KSO	100	59,374,000	59,274,000	99.83	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 meteran air dan 1 meteran listrik	1 meteran air dan 1 meteran listrik	100	3,600,000	2,139,000	59.42	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	9 unit (1 unit roda 4 & 8 unit roda 2)	9 unit (1 unit roda 4 & 8 unit roda 2)	100	2,745,180	2,662,030	96.97	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13 jenis, 1 KSO	13 jenis, 1 KSO	100	20,003,200	20,003,200	100.00	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
			Penyedian Alat Tulis Kantor	20 jenis	20 jenis	100	18,782,800	18,782,800	100.00	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	25,000 lembar	25,000 lembar	100	10,373,650	10,373,650	100.00	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	200 OM, 200 OSNK	200 OM, 200 OSNK	100	7,920,000	7,920,000	100.00	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 kali	100 kali	100	128,125,000	128,016,700	99.92	Subag Tatausaha dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					379,217,600	372,329,812	98.18		
			Pembangunan Rumah Dinas	1 unit	1 unit	100	139,965,000	139,965,000	100.00	Seksi Pelayanan Umum	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	3 unit	3 unit	100	90,558,900	89,775,000	99.13	Seksi Pelayanan Umum	
			Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7 unit (3 laptop, 3 printer & 1 generator	7 unit (3 laptop, 3 printer & 1 generator	100	44,935,700	38,842,000	86.44	Seksi Pelayanan Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	24,500,000	24,500,000	100.00	Seksi Pelayanan Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit	8 unit	100	79,258,000	79,247,812	99.99	Seksi Pelayanan Umum	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					57,300,000	51,865,500	90.52		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 orang	4 orang	100	57,300,000	51,865,500	90.52	Subbag TU, Organisasi dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					120,343,500	119,968,500	99.69		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	8,261,000	8,261,000	100.00	Seksi Pemerintahan Umum	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	100,386,700	100,186,700	99.80	Subbag Keuangan dan Perencanaan	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	11,695,800	11,520,800	98.50	Subbag Keuangan dan Perencanaan	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					53,288,900	53,288,900	100.00		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan HUT Otonomi Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100	53,288,900	53,288,900	100.00	Seksi Pemerintahan Umum	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					36,899,500	34,599,500	93.77		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	6 dokumen, 1 KSO	6 dokumen, 1 KSO	100	32,334,600	32,334,600	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan	
			Penyusunan Profil Pembangunan Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	100	4,564,900	2,264,900	49.62	Subbag Keuangan dan Perencanaan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					11,227,700	4,827,700	43.00		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen, 10 buku	1 dokumen, 10 buku	100	3,752,800	1,452,800	38.71	Seksi Pelayanan Umum	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen, 10 buku	1 dokumen, 10 buku	100	3,586,200	1,286,200	35.87	Seksi Pelayanan Umum	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen	1 dokumen	100	3,888,700	2,088,700	53.71	Seksi Pelayanan Umum	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Aplikasi Pengelolaan Barang Pengguna					3,521,000	3,521,000	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	5 buku	5 buku	100	3,521,000	3,521,000	100.00	Seksi Pelayanan Umum	

		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					173,935,400	173,925,400	99.99		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	1 KSO, 5 kegiatan 15 desa	1 KSO, 5 kegiatan 15 desa	100	173,935,400	173,925,400	99.99	Seksi Pemdes & Seksi Pembangunan dan PMD	
35	KECAMATAN OMESURI						1,226,365,040	1,154,563,772	94.15		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					241,835,453	239,488,142	99.03		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	41,090,500	41,086,000	99.99	Kantor Camat Omesuri	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	3,960,000	3,960,000	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit pajak mobil & 5 unit pajak motor	1 unit pajak mobil & 5 unit pajak motor	100	1,973,688	1,960,400	99.33	Kantor Camat Omesuri	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	21,795,500	21,795,100	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyedian Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100	25,237,500	25,237,500	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12,655,000	12,655,000	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100	49,324,200	48,467,278	98.26	Kantor Camat Omesuri	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100	9,133,565	9,133,365	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30 kali perjalanan DD eselon III, 6 kali eselon IV, 8 kali gol II & 3 kali eselon III perjalanan LD	30 kali perjalanan DD eselon III, 6 kali eselon IV, 8 kali gol II & 3 kali eselon III perjalanan LD	100	76,665,500	75,193,499	98.08	Kantor Camat Omesuri	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					478,631,085	475,204,334	99.28		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1 unit	1 unit	100	7,203,400	7,203,400	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Aula/Ruang Pertemuan	1 unit	1 unit	100	12,278,350	12,278,350	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	145,697,390	142,391,000	97.73	Kantor Camat Omesuri	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit roda empat, 5 unit roda dua	1 unit roda empat, 5 unit roda dua	100	97,877,645	97,870,784	99.99	Kantor Camat Omesuri	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	6,024,300	6,020,800	99.94	Kantor Camat Omesuri	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	1 unit	1 unit	100	209,550,000	209,440,000	99.95	Kantor Camat Omesuri	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					23,278,400	23,278,400	100.00		
			Pengadaan Pakian Dinas berserta Kelengkapannya	1 paket	1 paket	100	23,278,400	23,278,400	100.00	Kantor Camat Omesuri	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					127,690,502	127,182,496	99.60		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	3 orang	100	55,968,000	55,459,998	99.09	Kantor Camat Omesuri	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	1 orang	1 orang	100	71,722,502	71,722,498	100.00	Kantor Camat Omesuri	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					82,085,300	16,770,300	20.43		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	3,041,300	3,041,300	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	13,779,000	13,729,000	99.64	Kantor Camat Omesuri	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	65,265,000	65,265,000	100.00	Kantor Camat Omesuri	

		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					57,405,200	57,201,000	99.64		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah	4 kegiatan (Gala Desa, Lomba Pangan Lokal, HUT RI)	4 kegiatan (Gala Desa, Lomba Pangan Lokal, HUT RI)	100	57,405,200	57,201,000	99.64	Kantor Camat Omesuri	
		Program Perencanaan Pembangunan Internal SKPD					14,043,500	14,043,500	100.00		
			Penyusunan, Evaluasi, Pengendalian Renstra dan Renja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	9,566,200	9,566,200	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyusunan Profil Pembangunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	4,477,300	4,477,300	100.00	Kantor Camat Omesuri	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi					7,962,100	7,962,100	100.00		
			Penyusunan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen	100	2,667,900	2,667,900	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	100	2,657,500	2,657,500	100.00	Kantor Camat Omesuri	
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen	1 dokumen	100	2,636,700	2,636,700	100.00	Kantor Camat Omesuri	
		Program Perencanaan Penganggaran Internal SKPD					14,016,700	14,016,700	100.00		
			Penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	14,016,700	14,016,700	100.00	Kantor Camat Omesuri	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pengelolaan Barang /Aset Daerah					24,008,600	24,008,600	100.00		
			Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	24,008,600	24,008,600	100.00	Kantor Camat Omesuri	
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					155,408,200	155,408,200	100.00		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	22 desa	22 desa	100	155,408,200	155,408,200	100.00	Kantor Camat Omesuri	
36	KECAMATAN BUYASURI						553,700,000	551,228,300	99.55		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					160,135,400	157,672,800	98.46		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	44,222,000	43,406,000	98.15	Subbag TUOKPBPP	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	820,000	795,000	96.95	Seksi Pelayanan umum	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit pajak mobil & 5 unit pajak motor	1 unit pajak mobil & 5 unit pajak motor	100	3,114,000	3,113,500	99.98	Seksi Pelayanan umum	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	1,339,000	1,339,000	100.00	Subbag TUOKPBPP	
			Penyedian Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100	42,054,600	42,054,500	100.00	Subbag TUOKPBPP	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	8,369,400	8,369,400	100.00	Subbag TUOKPBPP	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	365 nasi kotak, 150 dos snack, 6 dos aqua gelas, 20 dos aqua botol	365 nasi kotak, 150 dos snack, 6 dos aqua gelas, 20 dos aqua botol	100	14,108,400	14,108,400	100.00	Seksi Pelayanan umum	

			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25 kali perjalanan DD eselon III 2 orang, 15 kali eselon IV 5 orang & 2 kali eselon III Perjalanan Luar Daerah	25 kali perjalanan DD eselon III 2 orang, 15 kali eselon IV 5 orang & 2 kali eselon III Peja==rjalanan Luar Daerah	100	46,108,000	44,487,000	96.48	Seksi Pem. Umum, PPM, Pemdes, Pelayananan Umum, Trantib, Subbag Keuangan dan Perencanaan & TUOKPBPP	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur					76,313,650	76,310,550	100.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100	18,727,850	18,727,850	100.00	Subbag TUOKPBPP	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit kendaraan roda 4, 8 unit kendaraan roda 2	1 unit kendaraan roda 4, 8 unit kendaraan roda 2	100	52,619,900	52,616,800	99.99	Subbag TUOKPBPP	
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit laptop, dinamo air dan jaringan 1 paket & 1 unit printer	1 unit laptop, dinamo air dan jaringan 1 paket & 1 unit printer	100	4,965,900	4,965,900	100.00	Subbag TUOKPBPP	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					116,471,500	116,467,300	100.00		
			Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	7,448,400	7,448,400	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	19,166,300	19,165,000	99.99	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program	
			Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100	89,856,800	89,853,900	100.00	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program	
		Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara					44,500,500	44,500,500	100.00		
			Perayaan Hari Besar Nasional dan HUT Otonomi Daerah	1 kegiatan HUT RI & 1 HUT Kec. Buyasuri & Porajl	1 kegiatan HUT RI & 1 HUT Kec. Buyasuri & Porajl	100	44,500,500	44,500,500	100.00	Subbag Pemerintahan Umum	
		Program Perencanaan Pembangunan Sektoral					8,600,900	8,599,500	99.98		
			Penyusunan Rentra, Renja	5 dokumen	5 dokumen	100	8,600,900	8,599,500	99.98	Subbag Keuangan dan Perencanaan Program	
		Program Pengembangan Sistim Pengelolaan Barang/Aset Daerah					22,894,400	22,894,400	100.00		
			Penyusunan Laporan Barang Tahunan	2 dokumen	2 dokumen	100	22,894,400	22,894,400	100.00	Subbag TUOKPBPP	
		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					124,783,650	124,783,250	100.00		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	20 desa	20 desa	100	124,783,650	124,783,250	100.00	Seksi Pemdes, PPM, Trantib & Pemerintahan Umum	
37	KECAMATAN ILE APE						711,060,846	704,057,555	99.02		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					201,799,750	198,807,775	98.52		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100	29,704,200	29,292,350	98.61	Kantor Camat Ile Ape	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	5,100,000	4,624,000	90.67	Kantor Camat Ile Ape	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit pajak mobil, 10 unit pajak motor	1 unit pajak mobil, 10 unit pajak motor	100	3,250,000	2,623,175	80.71	Kantor Camat Ile Ape	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100	5,780,800	5,780,700	100.00	Kantor Camat Ile Ape	
			Penyedian Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100	28,124,500	28,124,500	100.00	Kantor Camat Ile Ape	

[illegible]

		Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan Wilayah Bawahan					153,286,500	152,585,700	99.54		
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	17 Desa	17 Desa	100	153,286,500	152,585,700	99.54	Kantor Camat Ile Ape	

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR, ST

